

HADIAH

**PEMILIHAN PRESIDEN  
LANGSUNG 2004 DAN  
MASALAH KONSOLIDASI  
DEMOKRASI DI INDONESIA**

Lili Romli  
Edison Muchlis  
Sri Nuryanti  
Syafuan Rozi  
Tri Rainny Syafarani  
Syamsuddin Haris



Pusat Penelitian Politik  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
2005

## KATALOG DALAM TERBITAN

Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di  
Indonesia / Lili Romli (et al). - Jakarta: Pusat Penelitian Politik,  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005.  
iii + 199 hlm.

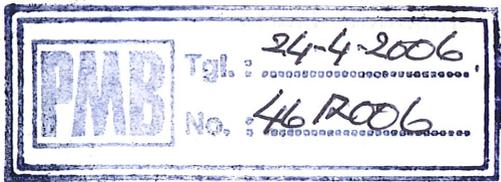
ISBN 979-3673-93-1

1. Electoral Systems

I. Romli, Lili

Klas : 324.63

**Penerbit :** LIPI Press, Anggota IKAPI  
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350  
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591  
e-mail : [bmrlipi@uninet.net.id](mailto:bmrlipi@uninet.net.id)  
[lipipress@uninet.net.id](mailto:lipipress@uninet.net.id)



## Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Copyright© 2005 Pusat Penelitian Politik-LIPI  
Gedung Widya Graha, Lt. XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Fax.: (021) 5207118  
Sumber Gambar Sampul: Foto Koleksi Lili Romli

## KATA PENGANTAR

Penelitian *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia* merupakan salah satu dari sembilan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Kegiatan ini tergabung dalam DIPA Tahun Anggaran 2005.

Penelitian ini dilaksanakan dengan personalia sebagai berikut:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Drs. Lili Romli, M.Si       | (Koordinator) |
| 2. Edison Muchlis M, SH, M. Kn | (Anggota)     |
| 3. Sri Nuryanti, S.IP MA       | (Anggota)     |
| 4. Syafuan Rozi, S.IP, M.Si    | (Anggota)     |
| 5. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si | (Anggota)     |

Sebelum menjadi naskah akhir, laporan penelitian ini telah dibahas dalam Seminar Akhir Hasil Penelitian P2P LIPI di Wisma Jalasena TNI AL Cipayung, Bogor yang mengundang Pembahas dari luar P2P, baik dari LIPI maupun non LIPI.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian ini tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para peneliti dan staf administrasi P2P LIPI, serta para peneliti dari luar P2P LIPI yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini tidak lepas dari berbagai kekurangan atau kekeliruan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai adanya saran maupun kritik demi penyempurnaan laporan-laporan penelitian kami di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2005  
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

**Dr. Ikrar Nusa Bhakti**  
NIP. 320004778

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Bab I</b> Mengapa Pemilihan Presiden Langsung? <i>Catatan Pendahuluan</i> .....	1
<i>Lili Romli</i>	
<b>Bab II</b> Sistem dan Regulasi Pemilihan Presiden 2004 .....	13
<i>Edison Muchlis</i>	
<b>Bab III</b> Partai Politik dalam Proses Pilpres 2004 .....	55
<i>Sri Nuryanti</i>	
<b>Bab IV</b> Pola dan Kecenderungan Perilaku Pemilih .....	97
<i>Syamsuddin Haris dan Tri Rainny Syafarani</i>	
<b>Bab V</b> Faktor Penentu Kemenangan dan Kekalahan Kandidat dalam Pilpres 2004 .....	131
<i>Syafuan Rozi</i>	
<b>Bab VI</b> Pemilihan Presiden Langsung dan Konsolidasi Demokrasi: <i>Catatan Kesimpulan</i> .....	179
<i>Lili Romli</i>	
<b>Daftar Pustaka</b> .....	199



# **Bab I**

## **MENGAPA PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG?**

### **Catatan Pendahuluan**

*Lili Romli*

#### **Latar Belakang**

Tahun 2004 merupakan momentum penting dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini karena pada tahun tersebut bangsa Indonesia berhasil melaksanakan “pesta demokrasi” dalam dua rangkaian pemilu sekaligus, yaitu pemilu legislatif 5 April 2004 dan pemilihan presiden secara langsung, yang dilaksanakan dalam dua putaran, yaitu 5 Juli 2004 (putaran pertama) dan 20 September 2004 (putaran kedua). Kedua pesta demokrasi itu relatif berjalan aman, damai, dan demokratis.

Dalam Pemilu Legislatif, terdapat tujuh partai politik yang memperoleh suara signifikan di DPR, yaitu Golkar (21,58%), PDIP (18,53%), PKB (10,57%), PPP (8,15%), PD (7,45%), PKS (7,34%), dan PAN (6,44%). Dari perolehan suara itu tampak, meski Golkar meraih suara terbanyak, tidak ada kekuatan politik yang dominan di DPR. Dengan demikian mengharuskan di antara mereka adanya koalisi. Sedangkan berkaitan dengan Pilpres, pada putaran pertama diikuti oleh lima pasangan kandidat, yaitu Wiranto-Wahid, Megawati-Hasyim, Amien-Siswono, Yudhoyono-Kalla, dan Hamzah-Agum Gumelar. Hasil putaran pertama ini yang keluar sebagai pemenang dan masuk dalam putaran kedua adalah pasangan Yudhoyono-Kalla (33,57%) dan pasangan Mega-Hasyim (26,61%). Pada pilpres putaran kedua pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan memperoleh 60,62% suara.

Pemilihan presiden langsung merupakan peristiwa pertama dalam sejarah suksesi kepemimpinan di Indonesia. Sebelumnya, suksesi kepemimpinan selalu melalui sebuah lembaga yang bernama MPR. Atas nama pemegang kedaulatan rakyat, MPR memilih, mengangkat, dan memberhentikan seorang presiden. Namun dalam pelaksanaannya, MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat ini ternyata mengalami distorsi. Ia, atas nama pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, misalnya pada masa Orde Baru, selalu memilih Soeharto sebagai presiden sampai enam kali. Padahal pilihan MPR tersebut tidak sejalan dengan aspirasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya.

Selain itu, ternyata presiden yang dipilih oleh MPR tersebut keberlangsungan pemerintahannya sangat tergantung pada MPR. MPR, atas permintaan DPR, dapat mengadakan Sidang Istimewa, untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan haluan negara. Apabila pertanggungjawaban presiden ditolak oleh MPR maka presiden dapat diberhentikan. Mandat yang diberikan kepada presiden dapat dicabut kembali oleh MPR. Dengan demikian MPR suatu waktu dapat memberhentikan presiden di tengah jalan manakala presiden dianggap telah melanggar haluan negara atau konstitusi.

Karena sistem pemerintahan yang sangat tergantung pada MPR tersebut, muncul desakan agar presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini karena dengan pemilihan presiden secara langsung, bukan hanya akan mengakhiri kekuasaan MPR dalam memilih presiden tetapi juga memberikan legitimasi yang kuat bagi presiden serta memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk memilih dan menilai sendiri calon-calon pemimpinnya. Sehubungan dengan itu pemilihan presiden secara langsung merupakan suatu yang niscaya. Atas dasar desakan itu UUD 1945 lalu mengalami perubahan, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan presiden secara langsung sebagaimana tercantum dalam pasal 6A UUD 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dalam amandemen UUD 1945 tersebut bukan hanya masalah pemilihan presiden secara langsung tetapi juga berkaitan dengan masalah-

Sebagai penjabaran terhadap pasal 6A UUD 1945 tersebut disusun UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung. Adanya amandemen UUD 1945 dan keluarnya UU No. 23 Tahun 2003 tersebut, dengan demikian kekuasaan MPR yang memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden berakhir. Kini kekuasaan untuk memilih presiden dan wakil presiden berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang akan menentukan siapa yang berhak untuk memimpin Indonesia.

Meski kekuasaan memilih presiden ada ditangan rakyat, bukan berarti lalu persoalannya sudah selesai. Baik dalam penyusunan regulasi maupun dalam pelaksanaan pilpres, ternyata masih muncul persoalan-persoalan. Dalam hal penyusunan regulasi misalnya, terjadi tarik-menarik kepentingan partai politik. Sedangkan dalam pelaksanaan pilpres, partai politik atau elit, misalnya, cenderung masih ingin mempertahankan peran oligarkisnya. Sehubungan dengan itu suatu evaluasi terhadap regulasi, sistem dan pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung yang dilaksanakan tahun 2004 yang lalu menjadi penting untuk dilakukan.

### **Permasalahan dan Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dikatakan di atas, penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden 2004 yang dilaksanakan secara langsung. Dalam hal ini evaluasi difokuskan pada: (1) Bagaimana regulasi dan sistem pemilihan presiden langsung 2004? (2) Bagaimana pola koalisi dan strategi partai-partai politik dalam upaya memenangkan calon presidennya? (3) Bagaimana preferensi politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2004 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?

Berdasarkan pada pertanyaan seperti itu, maka tujuan penelitian ini terdiri atas : (1) untuk menjelaskan problematik sistem dan regulasi, peran partai politik, pola koalisi dan pola perilaku pemilih dalam pemilihan presiden langsung 2004; dan (2) untuk

---

masalah lain, misalnya, tentang pembatasan jabatan presiden yang hanya dua kali.

melihat konstribusi pemilihan presiden langsung 2004 bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

### **Pilpres dan Konsolidasi Demokrasi**

Pemilihan presiden langsung merupakan wujud dari demokrasi partisipatoris di mana rakyat secara langsung ikut menentukan pemimpin pilihannya. Munculnya demokrasi partisipatoris ini sebagai kritik terhadap demokrasi perwakilan, yang menjadi ciri dari negara modern. Ternyata dalam pelaksanaannya demokrasi perwakilan melahirkan sistem oligarki yang merampas hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya. Oleh karena itu model pemilihan langsung oleh rakyat dalam menentukan pemimpinnya dalam upaya untuk memotong sistem oligarki tersebut.

Ada beberapa kelebihan dari pemilihan presiden secara langsung.<sup>2</sup> Pertama, presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat. Sementara legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, krisis legitimasi telah menggerogoti negara kita dan telah mengakibatkan ketidakstabilan politik serta ekonomi yang berkepanjangan.

Kedua, presiden terpilih tidak terikat pada konsesi pada partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya. Artinya, presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila presiden terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan parpol, maka kabinet yang dibentuk cenderung merupakan kabinet koalisi parpol dan bukan kabinet kerja. Padahal, pada masa krisis ekonomi yang diperlukan adalah kabinet kerja.

Ketiga, sistem ini menjadi lebih *accountable* dibandingkan sistem MPR di mana rakyat harus menitipkan suaranya melalui MPR, yang tidak seluruhnya merupakan anggota terpilih hasil

---

<sup>2</sup>Satya Arinanto, "Pemilihan Presiden secara Langsung: Beberapa Catatan", <http://www.cetro.or.id>.

pemilu. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Apabila presiden yang terpilih ternyata kemudian tidak memenuhi harapan rakyat, maka pada pemilihan berikutnya kandidat yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi. Keempat, ada mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dapat lebih seimbang. Kriteria calon presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang memberikan suaranya.

Dengan sistem pemilihan langsung maka kandidat presiden secara aktif dapat mengkampanyekan agenda-agenda politiknya jika ia terpilih menjadi presiden kelak. Ini sekaligus akan membawa rakyat pada proses pencerahan politik dalam rangka untuk memperbesar penggunaan penentuan pilihannya berdasarkan pilihan yang rasional, kendati pilihan atas dasar emosional maupun primordialisme sempit juga tidak serta-merta dapat dihilangkan. Di samping itu, rakyat dapat pula secara langsung menggunakan tolok ukur keberhasilan sang presiden dari seberapa mampu presiden terpilih mengimplementasikan janji-janji kampanye dalam tindakan nyata.<sup>3</sup>

Dalam upaya mengkaji tentang pemilihan presiden langsung di Indonesia, perlu meninjau berbagai jenis pemilihan presiden yang selama ini pernah diterapkan di beberapa negara. Pertama, *first-past-the post*; Kandidat yang memperoleh suara terbanyak langsung memenangkan pemilihan presiden. Dalam sistem ini, seorang kandidat presiden dapat memenangkan pemilihan meskipun hanya meraih kurang dari separo suara pemilih. Sistem ini tergolong sederhana, mudah, dan murah. Namun kelemahannya, mempersulit upaya ke arah persatuan nasional dan justru melemahkan legitimasi presiden terpilih. Sistem ini juga mendorong timbulnya banyak kandidat presiden.

---

<sup>3</sup>Mulyana W. Kusumah, dkk, *Menata Politik Paska Reformasi*, (Jakarta: KIPP, 2000), hal.142-149.

Kedua, *preferential voting*; Pada saat pemilihan, pemilih memberikan peringkat (pertama, kedua, dan seterusnya) terhadap kandidat-kandidat presiden yang ada. Kandidat dengan perolehan peringkat pertama terbesar akan otomatis memenangkan pemilihan. Metode ini lebih akurat karena mencerminkan preferensi pemilih, dan memaksa kandidat untuk berkoalisi sehingga mengurangi jumlah kandidat. Namun, kelemahannya, terlalu rumit untuk dilaksanakan, dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap TPS, memerlukan persiapan logistik yang efektif, dan memakan biaya besar.

Ketiga, *two round system atau sistem run-off*; Bila tak seorangpun dari kandidat memperoleh mayoritas absolut (50%+1) dari keseluruhan suara, maka dua kandidat dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan tahap kedua. Jumlah suara minimum yang harus diperoleh para kandidat tahap pertama agar dapat ikut dalam pemilihan tahap kedua bervariasi di beberapa negara. Sistem ini paling populer dilaksanakan di negara-negara dengan sistem presidensiil. Kandidat yang terpilih dari sistem ini memiliki legitimasi yang cukup besar, dan memungkinkan terjadinya koalisi untuk pemilu tahap kedua. Kelemahannya ialah biayanya sangat besar karena pemilu dilaksanakan dua kali.

Keempat, *sistem electoral college*; Setiap unit pemilihan (provinsi atau negara bagian) diberi alokasi atau bobot suara Dewan Pemilihan (*Electoral College*) sesuai dengan jumlah penduduknya. Setelah pemilihan presiden, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap kandidat di setiap unit pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap negara bagian berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di negara bagian yang bersangkutan. Kekuatan sistem ini ialah, apabila jumlah pemilih kurang dari mayoritas maka bobot dewan pemilih akan dapat mengoreksi kurangnya legitimasi. Sedangkan kelemahannya, memungkinkan seorang kandidat untuk menang meskipun hanya memenangkan suara di beberapa negara bagian yang padat penduduknya. Akibatnya, legitimasi presiden lemah..

Kelima, *sistem Nigeria*. Seorang kandidat presiden dinyatakan sebagai pemenang apabila kandidat tersebut dapat meraih suara mayoritas sederhana (50%+1) dan minimum 25 % dari sedikitnya 2/3 dari 36 negara bagian di Nigeria. Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa presiden terpilih memperoleh dukungan mayoritas penduduk yang tersebar di 36 negara bagian. Kekuatan sistem ini ialah, presiden terpilih mendapat dukungan luas, mengurangi jumlah kandidat, dan tidak mendiskriminasi provinsi/negara bagian dengan jumlah penduduk sedikit. Namun kelemahannya, sulit bagi kandidat memenuhi kriteria untuk menjadi pemenang, sehingga perlu dilaksanakan pemilu ronde kedua.<sup>4</sup>

Apabila kita melihat dari kelima sistem pemilihan tersebut di atas dan memperhatikan UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) dan (4), maka sistem yang digunakan adalah *two round system* atau *sistem run-off*. Pasal 6A ayat (3) mengatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden”. Kemudian Pasal 6A ayat (4) menyebutkan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden”.

Pemilu, termasuk di dalamnya pemilu presiden, merupakan tahap awal bagi konsolidasi demokrasi. Namun demikian, untuk mengukur konsolidasi demokrasi bukan hanya pemilu saja. Hal ini karena “demokrasi yang terkonsolidasi adalah di mana demokrasi berlaku sebagai aturan main, baik dalam segi perilaku, sikap,

---

<sup>4</sup>Smita Notosusanto, *Usulan Pemilihan Presiden Langsung*. Pustaka Cetro, 2003. [www.cetro.or.id](http://www.cetro.or.id).

maupun dalam segi peraturan (konstitusi).”<sup>5</sup> Sehubungan dengan itu Linz dan Stepan memberikan kriteria, yaitu,

“Dari segi perilaku, rezim demokratis dalam sebuah negara terkonsolidasi jika tidak ada tokoh-tokoh nasional, sosial, ekonomi, politik utama yang menggunakan sumber-sumber penting dalam upaya mencapai tujuan mereka dengan menciptakan rezim nondemokratis atau dengan memisahkan diri dari negara.

Dari segi sikap, rezim demokratis dapat dikatakan terkonsolidasi jika mayoritas opini publik, bahkan di tengah permasalahan ekonomi yang berat dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pihak yang berwenang, tetap berpegang pada keyakinan bahwa prosedur-prosedur dan institusi-institusi demokrasi merupakan cara paling tepat untuk mengatur kehidupan kolektif.

Dari segi konstitusi, rezim demokratis dapat dikatakan terkonsolidasi jika kekuatan-kekuatan pemerintah dan non pemerintah sama-sama tunduk pada – dan terbiasa dengan – upaya pemecahan konflik di dalam batas-batas undang-undang, prosedur, dan institusi tertentu yang ditetapkan melalui proses yang demokratis.<sup>6</sup>

Selanjutnya Linz dan Stepan mengajukan 5 (lima) syarat lain yang saling berkaitan bagi konsolidasi demokrasi, yaitu (1) masyarakat sipil yang bebas dan aktif; (2) masyarakat politik yang bebas dan otonom; (3) tokoh politik utama tunduk dan patuh pada aturan hukum; (4) birokrasi yang mendukung pemerintahan demokratis baru; dan (5) masyarakat ekonomi yang dilembagakan.<sup>7</sup>

Larry Diamond juga mengatakan bahwa esensi konsolidasi demokrasi adalah terbentuknya suatu perilaku dan sikap, baik di tingkat elit maupun massa, yang mencakup dan bertolak dari metode dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan mengutip pendapat Linz,

---

<sup>5</sup>Juan Linz dan Alfred Stepan, “Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi”, dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (ed.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, Yogyakarta: Mizan, 2001, hal 41.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 40-41. Lihat juga J Linz dan Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1996, hal. 6.

<sup>7</sup>*Ibid*.

Diamond mengatakan bahwa, “Para pemain politik harus menghormati demokrasi (hukum-hukum, prosedur, dan institusi yang ditetapkannya) sebagai *the only game in town*, satu-satunya kerangka kerja yang layak untuk mengatur masyarakat dan memajukan kepentingan mereka sendiri. Dan pada tingkat massa, harus ada konsensus normatif dan perilaku yang luas – secara lintas kelas, etnis, kebangsaan, dan pemisah-pemisah lainnya – tentang legitimasi sistem konstitusional, betapa pun pada suatu waktu barangkali kinerjanya buruk atau tidak memuaskan”.<sup>8</sup> Hal senada juga dikemukakan Dankwart Rustow, bahwa konsolidasi mencakup “pembiasaan di mana norma-norma, prosedur-prosedur, dan harapan-harapan tentang demokrasi menjadi sedemikian terinternalisasi sehingga para aktor secara rutin, secara mekanis, mencocokkan diri dengan aturan permainannya yang tertulis (dan tidak tertulis), bahkan ketika mereka berkonflik dan bersaing”.<sup>9</sup>

Oleh karena itu agar demokrasi terkonsolidasi, Diamond mengatakan di mana para elit, organisasi dan massa, semuanya harus percaya bahwa sistem politik (demokrasi) yang mereka miliki layak dipatuhi dan dipertahankan, baik dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku. Dalam konteks itu, lalu ia mengemukakan indikator-indikator konsolidasi pada tiga level di atas (elit, organisasi, dan massa), seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel: Indikator-Indikator Konsolidasi Demokrasi

Level	Norma dan Kepercayaan	Perilaku
Elit	Kebanyakan pemimpin yang signifikan dari organisasi-organisasi opini, kultur, bisnis, dan sosial percaya pada legitimasi demokrasi. Semua pemimpin yang utama pemerintahan dan partai-partai yang signifikan secara politik percaya bahwa demokrasi adalah bentuk	Para pemimpin pemerintahan, lembaga-lembaga negara, partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang signifikan saling menghargai hak satu sama lain untuk bersaing memperebutkan kekuasaan secara damai, menjauhkan diri dari

<sup>8</sup>Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta, IRE Press, 2003, hal. 84.

<sup>9</sup>Dikutip dalam Larry Diamond, *Ibid*, hal. 84.

	<p>pemerintahan terbaik dan bahwa aturan-aturan dan lembaga-lembaga dari sistem konstitusional tersebut layak mendapat dukungan. Keyakinan-keyakinan ini terwujudkan dalam retorika publik, ideologi, tulisan-tulisan dan gerak-gerak simbolis mereka.</p>	<p>kekerasan dan mematuhi hukum, konstitusi dan norma-norma perilaku yang diterima secara bersama. Para elit menghindari retorika yang dapat menghasut mereka pada kekerasan, intoleransi atau metode-metode ilegal. Para pemimpin politik tidak berusaha menggunakan militer demi keuntungan politik.</p>
Organisasi	<p>Semua partai, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial yang signifikan secara politik mendukung (atau minimal tidak menolak) legitimasi demokrasi, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga konstitusional spesifik negara tsb dalam anggaran dasar, tulisan-tulisan dan deklarasi-deklarasi mereka.</p>	<p>Tidak ada partai, kelompok kepentingan, gerakan atau lembaga yang signifikan secara politik yang berusaha menggulingkan demokrasi atau menggunakan kekerasan, kecurangan atau metode-metode inskonstitusional atau anti demokrasi lainnya sebagai taktik yang disengaja dalam mengejar kekuasaan atau sasaran-sasaran politik lain.</p>
Massa	<p>Lebih dari 70% publik secara konsisten percaya bahwa demokrasi lebih baik daripada segala bentuk pemerintahan lainnya dan bahwa demokrasi yang ada di negeri tsb adalah bentuk pemerintahan yang paling cocok bagi negara tsb.</p>	<p>Tidak ada gerakan, partai atau organisasi anti demokrasi yang mendapat pengikut massa signifikan, dan warga negara biasa tidak secara rutin menggunakan kekerasan, kecurangan atau metode-metode ilegal dan inskonstitusional lainnya untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politik mereka atau memburu kepentingan politik mereka.</p>

Sumber: Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta, IRE Press, 2003, hal, 87.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian studi pustaka dan lapangan. Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen tertulis, buku, jurnal, dan majalah, koran dan internet yang dianggap memiliki signifikansi yang kuat dengan obyek penelitian. Penelitian lapangan dilaksanakan

dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dipandu oleh sebuah pedoman wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, termasuk di dalamnya beberapa narasumber dari kalangan elite partai, anggota DPRD, KPUD, Panwas pemilu, pemantau pemilu, organisasi massa, tokoh masyarakat, LSM, dan akademisi. Penentuan nara sumber dilakukan secara *purposive*, yakni dengan sengaja menentukan narasumber yang akan diwawancarai berdasarkan kriteria kemampuan dan pengetahuan narasumber tentang masalah yang dikaji. Daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan wilayah Jawa dan luar Jawa serta perkiraan basis massa masing-masing kandidat, meski tidak mewakili secara keseluruhan. Pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam di empat daerah tersebut diharapkan dapat menunjang data-data yang diperoleh melalui studi pustaka.

### **Sistematika Tulisan**

Penulisan laporan penelitian akan disusun berdasarkan tematik, bukan kasus laporan per daerah. Ada pun sistematika laporan terdiri atas enam bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan penelitian, kerangka teoritik, serta permasalahan yang diteliti berikut metodologi penelitian yang digunakan.

Bab II : Sistem dan Regulasi Pemilihan Presiden 2004. Pada bab ini membahas secara kritis tentang sistem dan regulasi yang digunakan dalam pemilihan presiden 2004, serta implementasi dan distorsi yang terjadi di dalam pelaksanaannya.

Bab III: Partai Politik dan Proses Pemilihan Presiden 2004. Bab ini membahas peran partai politik dalam proses pemilihan presiden 2004, manajemen yang diterapkan masing-masing partai dalam

melakukan mobilisasi massa dan mempengaruhi preferensi pilihan politik massa pemilih maupun pola koalisi yang dibangun di antara partai politik.

**Bab IV: Pola dan Kecenderungan Perilaku Pemilih.** Bab ini akan mendiskripsikan dan menganalisa pola pergeseran perilaku pemilih pada pemilihan presiden putaran pertama dan kedua. Selain itu juga akan diulas faktor-faktor apa saja yang mendasari munculnya perbedaan preferensi pilihan tersebut.

**Bab V: Faktor Kemenangan dan Kekalahan Kandidat dalam Pemilihan Presiden.** Pada bab ini membahas faktor-faktor determinan yang menentukan hasil akhir kandidat terpilih dalam pemilihan presiden 2004. Selain peran media massa, analisis faktor figur sebagai penentu kemenangan dan atau kekalahan seorang kandidat akan dikaji.

**Bab VI: Pemilihan Presiden 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia.** Bab ini mengulas tentang peluang proses dan hasil pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

## **Bab II**

# **SISTEM DAN REGULASI PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG 2004**

*Edison Muchlis*

### **Pendahuluan**

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Karena itu, pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.<sup>1</sup>

Belum adanya pengalaman dalam pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung sejak republik ini berdiri enam dekade lalu, melahirkan banyak pertanyaan dan sekaligus harapan baru bagi bangsa ini: apakah presiden dan wakil presiden terpilih yang merupakan produk UU No. 23 Tahun 2003 ini betul-betul menjadi presiden/wakil presiden yang berkualitas, memiliki legitimasi yang kuat, dipilih melalui pemilu yang jujur, adil dan demokratis sesuai harapan rakyat dan tuntutan reformasi? Pada saat yang sama juga dipertanyakan, apakah sistem dan aturan hukum yang mengatur pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini telah cukup baik dan memenuhi standar internasional yang demokratis, sehingga melahirkan pula pemilu yang *fair* dan demokratis? Munculnya dua pertanyaan di atas tidak terlepas dari

---

<sup>1</sup>Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

adanya klausul yang diatur di dalam undang-undang pemilu yang baru.

Produk perundang-undangan mengenai pilpres ini tidak terlepas dari kepentingan elit politik yang berkuasa dan ikut serta dalam perumusan undang-undang ini. Kepentingan politik itu dapat dilihat, misalnya, dari hal-hal mengenai: dipertahankannya kedaulatan elit partai dalam dominasi calon, tidak adanya calon presiden/wakil presiden yang independen, ketentuan waktu kampanye pemilu yang sangat singkat, persyaratan bagi capres dan cawapres (pendidikan, mantan terpidana di bawah lima tahun), serta kurangnya kewenangan Panwaslu dalam pelaksanaan tugasnya baik di pusat maupun di daerah serta ketentuan lain yang banyak menimbulkan multi tafsir antara KPUD dan Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tulisan ini hendak melihat sistem pemilihan presiden dan wakil presiden langsung secara teoritis-normatif, yaitu bagaimana regulasi pemilihan presiden dan wakil presiden menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan pelaksanaannya dalam pemilu 2004, dan evaluasi atas sistem dan regulasi mengenai Pilpres itu sendiri.

### **Perspektif Historis Pemilihan Presiden di Indonesia**

Sampai dengan Pilpres 2004, sejarah pemilihan presiden RI tidak banyak mengalami perubahan. Sebab, sistem pemilihan presiden dilaksanakan oleh MPR, kecuali pada pemilihan presiden dan wakil presiden RI pertama di awal kemerdekaan, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh PPKI. Perubahan sistem pemilu presiden yang signifikan terjadi pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, sesudah amandemen konstitusi ketiga dan keempat diselesaikan. Penetapan presiden dan wakil presiden pertama RI dilaksanakan dengan “penunjukan” [sebagai ganti penyebutan pemilihan yang sangat sederhana oleh PPKI] dwi tunggal Sukarno-Hatta, masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden RI pertama, sesudah proklamasi kemerdekaan RI. Pemilihan itu kemudian dilegitimasi oleh “Konstitusi I” negara unitaris Republik

Indonesia berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.”<sup>2</sup> Kenyataan ini terjadi karena proklamasi kemerdekaan RI dilakukan secara mendadak dan dalam keadaan darurat, sehingga wajar kalau “penunjukan” presiden dan wakil presiden dilakukan mendahului disahkannya Konstitusi I (UUD 1945).

Sistem yang digunakan dalam pemilihan presiden ini dapat dikatakan “sistem pemilihan darurat”. Artinya, presiden dan wakil presiden dipilih (langsung) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) dalam sidangnya yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945. Landasan hukumnya adalah ketentuan hukum konstitusi: Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Mekanisme pemilihannya pun berlangsung sangat sederhana, yakni dipilih dan disetujui oleh anggota PPKI. Maka secara yuridis dalam keadaan darurat, pemilihan presiden dan wakil presiden pertama ini dianggap memiliki validitas hukum yang sah.

Bagaimana mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden pertama itu, dapat dilihat dari hasil Sidang Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Bung Karno selaku Ketua Sidang ketika itu membuka sidang dan mengajukan agenda sidang untuk pemilihan presiden. Dalam proses pengesahan Rancangan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, sesaat sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung, Bung Karno sebagai Ketua Sidang PPKI menyatakan:

“Sekarang untuk memenuhi permintaan pers, lebih dahulu saya hendak masuk ke dalam acara pemilihan Kepala Negara dan Wakilnya, tetapi lebih dahulu saya minta disahkan Pasal III dalam Aturan Peralihan, yang tuan-tuan sekalian memegangnya: ‘untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu kita ini.’ Bagaimana tuan-tuan setuju? Kalau setuju, maka sekarang saya masuk acara

---

<sup>2</sup>Syafuruddin Bahar et. all., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PBUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 ), hal. 445.

pemilihan Presiden. Saya minta *Zomikyoku* membagikan *sembiljet*.”<sup>3</sup>

Akhirnya dalam sidang PPKI pertama ini, dwi tunggal Sukarno-Hatta terpilih masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama, berdasarkan usulan Oto Iskandardinata, salah seorang anggota sidang PPKI. Ada empat hal yang menarik dari sidang pertama PPKI untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ini. *Pertama*, Bung Karno dan Bung Hatta diusulkan hanya oleh seorang anggota sidang, yakni Oto Iskandardinata. *Kedua*, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang diusulkan Oto adalah bahwa “pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi.”<sup>4</sup> Karenanya, proses pemilihan ini berlangsung sangat singkat, karena usul Oto untuk pemilihan aklamasi disetujui secara aklamasi pula oleh para anggota sidang lainnya yang berjumlah 66 orang. *Ketiga*, Bung Karno selaku Ketua sidang hanya mengesahkan sidang dengan mengetuk palu dan diiringi dengan kor setuju serta tepuk tangan oleh para anggota sidang seraya diikuti oleh lagu Indonesia Raya. *Keempat*, tidak terjadi adu argumentasi oleh masing-masing anggota sidang PPKI dalam persidangan ini. Inilah yang menyebabkan sidang pemilihan presiden dan wakil presiden

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Usulan Oto Iskandardinata itu berbunyi sebagai berikut: “Berhubung dengan keadaan waktu, saya harap pemilihan presiden ini diselenggarakan secara aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri (*tepek tangan hadirin*).” Sehubungan dengan usulan Oto tersebut, maka Bung Karno selaku pemimpin sidang menyatakan: “Tuan-tuan, banyak terimakasih atas kepercayaan tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia (*tepek tangan hadirin*).” Setelah peristiwa pemilihan presiden ini disahkan Bung Karno selaku Ketua sidang, maka Oto Iskandardinata kembali mengusulkan pendapatnya tentang calon wakil presiden kepada sidang dengan kalimat sebagai berikut: “Pun untuk pemilihan Wakil Kepala Negara Indonesia saya usulkan cara yang baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala Negara Indonesia (*tepek tangan*).” Lihat *Ibid.*, hal. 445-46.

berlangsung secara amat singkat, mungkin hanya dalam hitungan "sepuluh menit."

Cara pemilihan presiden dan wakil presiden pertama yang dilakukan dalam sidang PPKI ini terlihat sangat sederhana. Tidak ada perdebatan yang sengit, usulan dari seorang anggota yang mengusulkan Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta selaku wakil presiden tidak mendapat sanggahan satupun dari para anggota sidang lainnya. Lebih dari itu, tidak ada juga calon lain yang diusulkan selain kedua calon tersebut di atas.<sup>5</sup> Sebaliknya, kejatuhan Bung Karno dan pemberhentiannya sebagai presiden tidak dilaksanakan dengan cara yang rasional dan benar menurut konstitusi. Bung Karno dilengserkan ("diberhentikan") oleh Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 12 Maret 1967, karena perbedaan pandangan antara MPRS dengan Presiden Sukarno. Presiden Sukarno dianggap telah melakukan kesalahan besar dalam tiga hal: (1) presiden sebagai pemegang mandat dari MPRS harus bertanggung jawab secara pribadi atas kehancuran ekonomi nasional; (2) bertanggung jawab atas krisis moral bangsa; (3) keterlibatannya dalam Gestapu. Konsekuensi politiknya, berdasarkan Tap MPRS ini, titel yang diberikan kepada Bung Karno sebagai presiden seumur hidup (*president for life*) dan Pemimpin Besar Revolusi dicabut dan diberhentikan sebagai

---

<sup>5</sup>Yang menjadi pertanyaan kita, apakah dalam pemilihan itu memang hal demikian terjadi apa adanya, atau mungkin telah didesain secara rapi oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebelum sidang berlangsung?

Presiden RI.<sup>6</sup> Maka berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1968, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan negara sebagai Pejabat Presiden (*Acting President*).

Pada era Orde Baru, pemilihan dan pemberhentian Soeharto sebagai Presiden RI dilakukan melalui sistem pemilihan perwakilan oleh MPR, kecuali untuk pertama kalinya dilakukan oleh MPRS. Untuk melaksanakan agenda pemilihan presiden selama masa rezim Orde Baru, MPR melakukan Sidang Umum. MPR merupakan wujud dari perwakilan rakyat yang memegang kedaulatan rakyat dan berwenang memilih dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, di samping kewenangan lainnya. Dasar hukum persyaratan pemilihan presiden ini ditentukan: pemilihan dengan jumlah mayoritas mutlak, yaitu separoh tambah satu suara (50% + 1 suara)

---

<sup>6</sup>Lebih lanjut lihat bagian Pengantar, TK. Tan (ed.), *Sukarno's Guided Indonesia*, [cet. 1] (Brisbane, NSW, Melbourne: Jacaranda Press, PTY. LTD., 1967). Bandingkan dengan tulisan Abdul Hakim G. Nusantara dalam *Kompas*, 17 April 2002 (yang kemudian dibukukan), yang mengemukakan alasan pemecatan Presiden Sukarno sebagai Presiden RI. Presiden Sukarno dipecat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1967 karena pidato pelengkap pertanggungjawabannya yang disebut Nawaksara ditolak Majelis. MPRS bahkan menilai Presiden Soekarno tidak dapat mempertanggungjawabkan merosotnya moral dan akhlak bangsa. Luasnya wilayah pertanggungjawaban presiden yang dituntut MPRS dapat dipandang sebagai kesewenangan MPRS sebagai akibat logis dari tidak adanya norma hukum dan kriteria yang jelas untuk memecat seorang presiden. Lihat lebih lanjut, Abdul Hakim G. Nusantara, "Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Amandemen III UUD 1945," dalam Bambang Widjayanto et. all., (ed.), *Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 130.

dari seluruh anggota MPR yang bersidang.<sup>7</sup> Dasar legalitas pemilihan presiden Suharto sebagai Presiden RI ditetapkan dalam Tap MPRS No. XXXIII Th 1967 tertanggal 22 Februari 1967. Selanjutnya, setiap pemilihan presiden selama Orde Baru, yang selalu dimenangkan oleh Soeharto ditetapkan berdasarkan Tap MPR.

Sementara itu, pemilihan wakil presiden dalam sistem perwakilan MPR dilakukan dalam satu paket pemilihan yang "tidak utuh". Artinya, calon wakil presiden sebelum dipilih MPR, harus memenuhi syarat subjektif dari Soeharto, yaitu: harus sanggup bekerjasama dengan presiden terpilih. Syarat inilah yang menghambat Naro untuk dapat bersaing dalam pemilihan wakil presiden pada awal dekade 90-an, karena Naro "tidak direstui" Soeharto. Dengan demikian, posisi wakil presiden secara politik, benar-benar "*subordinated*" dan sebagai "simbol" di bawah otoritas presiden.

Dari uraian di atas, dapat dipahami beberapa perbedaan mendasar sistem pemilihan presiden oleh lembaga perwakilan MPR dengan sistem pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat. *Pertama*, mengingat pemilihan presiden dilakukan oleh sejumlah orang anggota MPR yang mencapai 700 orang, maka kehendak rakyat untuk memilih presiden/wakil presiden yang diinginkan mereka belum tentu sama dengan keinginan anggota MPR tersebut. Sementara itu, tidak semua anggota MPR berasal dari anggota DPR - yang merupakan wakil-wakil murni yang dipilih oleh rakyat, karena sebagian dari mereka diangkat baik dari TNI/Polri maupun dari kalangan sipil yang mewakili daerah dan golongan. *Kedua*, kekuasaan/kewenangan anggota MPR dalam memilih presiden dan

---

<sup>7</sup>Dasar hukum penetapan Suharto sebagai Pejabat Presiden RI pertama kali diatur dalam Tap MPRS No. XXXIII/1967 tertanggal 22 Februari 1967, dan setahun kemudian ia dipilih dan dilantik menjadi Presiden RI dalam Sidang Umum MPRS tanggal 27 Maret 1968, selanjutnya ditetapkan sebagai presiden berdasarkan Tap. MPR No. IX Th 1968. Selanjutnya dalam jabatan presiden berikutnya, yang dipilih dalam enam kali pemilu, dari pemilu 1971 sampai pemilu 1997 diatur dalam Tap MPR.

wakil presiden hampir sepenuhnya dapat dikooptasi oleh kekuasaan (Suharto selama Orde Baru). Jadi hasil pemilihan oleh MPR sudah dapat diketahui sebelum pemilihan dilaksanakan. Akibatnya, pemilihan presiden yang dilakukan di Senayan tidak lebih dari sekedar memenuhi formalitas instrumen demokrasi, bukan untuk melakukan pergantian kepemimpinan dan pemerintahan. *Ketiga*, hubungan mutual simbiosis dari kedua poin di atas tidak memberikan legitimasi yang kuat terhadap presiden terpilih.

Sebaliknya, pada sistem pemilihan presiden dan wakil presiden langsung, keadaan di atas menjadi terbalik. *Pertama*, pemilihan langsung oleh rakyat memberikan legitimasi yang kuat berdasarkan kedaulatan rakyat yang dimandatkan kepada presiden terpilih. Karena pilihan rakyat didasarkan atas banyak faktor: baik kapasitas intelektual, kemampuan kepemimpinan dan kepribadian kandidat, keinginan dan keyakinan rakyat atas hal tersebut. *Kedua*, suara rakyat secara langsung mempunyai arti sangat signifikan dan menentukan terpilihnya seorang kandidat presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, suara rakyat tidak bisa dikooptasi oleh kekuasaan otoriter yang memengaruhi pemilihan seperti dalam sistem perwakilan MPR. *Ketiga*, secara konstitusional, presiden/wakil presiden terpilih bertanggung jawab kepada rakyat melalui UUD. Ini berarti kontrak politik antara presiden dengan rakyat yang disampaikan melalui janji-janji di dalam visi, misi dan program capres/cawapres semasa kampanye akan dituntut oleh rakyat bila penyelenggaraan negara oleh presiden beserta kabinetnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan tersebut. *Keempat*, dalam sistem ketatanegaraan, konsekuensi pemilihan presiden secara langsung akan menentukan penyelenggaraan negara pada sistem pemerintahan presidensial.

### **Beberapa Model Sistem Pilpres**

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan, terdapat berbagai model dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di berbagai negara. Secara umum ada dua model besar dengan berbagai variannya, pertama model pemilihan langsung oleh

rakyat dan kedua pemilihan tidak langsung. Di dalam model sistem pemilihan langsung, terdapat model-model berikut. *Pertama*, apa yang disebut dengan model *first past the post*. Dalam sistem ini, yang memenangkan pemilu menduduki jabatan sebagai presiden, kendati kemenangannya tidak mutlak, atau kurang dari separoh suara pemilih. *Kedua*, sistem *preferential*, yaitu suatu sistem yang memungkinkan pemilih untuk melakukan dan memberikan pembobotan atau perengkingan kepada para calon (apakah calon parlemen, kepala daerah, ataupun calon presiden dan wakil presiden). Calon-calon yang secara kumulatif memperoleh suara mayoritas mutlak, ditetapkan menjadi pemenangnya. Dengan kata lain, kandidat yang memperoleh suara pertama terbesar otomatis memenangkan pemilihan.<sup>8</sup> *Ketiga*, *two round system* atau disebut juga *run-off system*. Dalam sistem ini, bila tidak ada kandidat yang memiliki suara mayoritas mutlak, maka dua kandidat dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua harus maju dalam pemilihan tahap kedua. Pelaksanaan pemilihan presiden tahap kedua ini biasanya ditentukan dalam dua sampai tiga minggu setelah pemilihan tahap pertama dilakukan.

Selanjutnya, dalam sistem pemilihan tidak langsung terdapat model-model pemilihan presiden berikut. *Pertama*, sistem *electoral collage*, yaitu sistem pemilihan melalui *electoral collage* yang bobotnya ditentukan berdasarkan besarnya wilayah/penduduk negara bagian/provinsi. Dalam sistem pemilihan ini, presiden dipilih oleh para pemilih yang disebut *electoral collage* (badan pemilih) yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat di setiap negara bagian dengan jumlah yang sama dengan jumlah utusan dari negara bagian yang bersangkutan dalam keanggotaan Senat dan perwakilan

---

<sup>8</sup>Lihat Kacung Marijan, "Sistem Pemilihan Presiden Secara Preferensial: Upaya Mengatasi Krisis Kepemimpinan Nasional" dalam Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim (ed.), *Amandemen Konstitusi & Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: AIPI bekerjasama dengan Partnership for Government in Indonesia, 2002), hal. 264; juga Smita Notosusanto, *Usul Pemilihan Presiden Langsung*, Pustaka Cetro, 2003: [www.cetro.or.id](http://www.cetro.or.id).

Kongres pada setiap kali pemilihan presiden.<sup>9</sup> Dengan demikian, sebenarnya jelas bahwa sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat itu bukan merupakan pemilihan yang bersifat langsung. *Kedua*, sistem pemilihan tidak langsung yang dilakukan melalui lembaga perwakilan, seperti yang terjadi dalam sejarah RI sejak kemerdekaan sampai selama masa Orde Baru dan dua tahun kemudian. Dalam sistem ini, presiden hanya dipilih oleh MPR yang berjumlah 700 orang (pilpres terakhir Orde Baru), sebagai representasi dari lebih 100 juta rakyat pemilih di Indonesia.

Sistem pemilihan tidak langsung ini juga pernah terjadi di Prancis sebelum perubahan Konstitusi Republik Keempat tahun 1962, di Filipina sampai tumbanganya rezim Ferdinand Marcos, dan sampai saat ini masih berlaku di Amerika Serikat, tetapi dengan pola yang berbeda dengan Indonesia. Dalam sistem pemilu tidak langsung di Prancis, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh lembaga *electoral collage* yang berjumlah 80.000 orang wakil rakyat dari pusat dan daerah. Namun dalam perkembangannya, setelah perubahan Konstitusi Republik Keempat yang diprakarsai oleh Presiden Charles de Gaulle tahun 1962, model pemilihan tidak langsung ini dianggap kurang demokratis. Karena itu, atas inisiatif Presiden de Gaulle pada era Republik Kelima, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Prancis diubah menjadi sistem pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Konstitusi Prancis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie (b), "Demokratisasi Pemilihan Presiden dan Peran MPR di Masa Depan" dalam *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol. 1 No. 1 Mei-Agustus 2000, hal. 93. Namun dalam praktek, para wakil rakyat yang dipilih untuk duduk menjadi anggota *electoral collage* itu secara langsung menjadi instrumen kampanye untuk memilih calon presiden yang sejak awal dipromosikan oleh partai politiknya bersama-sama calon wakil presiden dalam satu paket. Sehingga yang terlihat seolah-olah presiden dan wakil presiden Amerika Serikat itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Lihat *ibid.* hal. 94.

<sup>10</sup>Pasal 6 Konstitusi Prancis (hasil amandemen tahun 1962) yang digunakan sekarang mengatur pemilihan presiden secara langsung untuk masa jabatan 7 tahun. Secara implisit, pasal 6 itu menyatakan: "The

Di kawasan Amerika Latin, Argentina dan Brazil juga menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung melalui dua tahap sebagaimana halnya dengan model Prancis. Berdasarkan perubahan terakhir Konstitusinya tahun 1994, Argentina juga menerapkan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam dua tahap, namun menggunakan sistem perhitungan distrik. Sementara itu, Brazil pun menerapkan cara yang sama, yaitu sistem pemilihan dua tahap berdasarkan sistem distrik. Kedua negara ini juga menganut sistem pemerintahan presidensial.

Selanjutnya, yang lebih mirip dengan sistem pilpres di Indonesia adalah Finlandia. Berdasarkan konstitusinya tahun 1988, Finlandia menerapkan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam dua tahap, dengan menggunakan sistem proporsional yang dilengkapi stelsel daftar. Begitu juga Austria, menerapkan sistem pemilihan langsung dalam dua tahap, kendati negara ini menganut sistem pemerintahan parlementer.<sup>11</sup>

#### **Sistem Pemilu Presiden Langsung 2004**

Dari dua model sistem pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana disinggung di atas, muncul pertanyaan, model sistem pilpres manakah yang cocok untuk kondisi Indonesia dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi? Dalam proses amandemen ketiga dan keempat konstitusi kita, ternyata pengaruh para elit yang reformis cukup besar untuk menentukan sistem pemilihan umum

---

president of the Republic is for seven years by direct universal suffrage. The method of implementing this articles is laid down by an organic enactment.” Selanjutnya dalam pasal 7 dinyatakan: “The President of the Republic is elected by an absolute majority of the votes cast. If this is not obtained on the first ballot, there shall be a second ballot on the second Sunday following. The only candidates at ballot are the two who received the highest number of votes at the firs ballot, having, where necessary, taken account of the withdrawal of candidates who received more votes... dst”. Bunyi kedua pasal ini adalah sebagaimana dikutip oleh Asshiddiqie (b), *ibid.*, hal. 95.

<sup>11</sup>Lebih lanjut lihat *ibid* terutama hal. 97-98.

presiden/wakil presiden secara langsung, dengan memilih model Prancis dan Finlandia.

Dalam sistem pemilu presiden dan wakil presiden langsung yang disepakati, mekanismenya telah dirumuskan dalam UUD 1945 [*perubahan ketiga dan keempat*]. Pasal 6A ayat (1 dan 2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, dan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”<sup>12</sup> Dengan ketentuan ini, berarti secara tegas gagasan pemilihan presiden (*presidential election*) langsung telah diadopsi ke dalam rumusan UUD 1945. Sesuai prinsip sistem pemerintahan presidensial, calon presiden dan calon wakil presiden dipilih dalam satu paket, karena kedua jabatan ini dipandang sebagai satu kesatuan institusi kepresidenan.<sup>13</sup>

Selanjutnya, mekanisme pilpres tahap pertama ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3) yang memberikan dasar yuridis, bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dapat dilakukan dalam satu tahap, jika salah satu pasangan kandidat melampaui jumlah 50% suara, dan dengan distribusi suara yang menyebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Untuk itu perhatikan bunyi Pasal 6A ayat (3) ini sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Rumusan aturan pasal ini mengandung nilai-nilai yang *ambivalen*. Di satu pihak ia memberikan ketegasan tentang pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Namun di pihak lain tidak dijelaskan makna kata “sebelum pemilihan umum.” Apakah yang dimaksud di sini sebelum pemilu legislatif atau sebelum pemilu presiden? Aturan seperti ini telah melahirkan multi tafsir terhadap jangka waktu pengumuman calon presiden dan wakil presiden, yang pada Pilpres 2004 dan mungkin di masa yang akan datang tentu akan menimbulkan masalah yang tidak dapat diremehkan.

<sup>13</sup>Lihat Jimly Asshiddiqie (a), *Konsolidasi Nasakah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 8.

”Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.”

Menurut ketentuan ayat (3) ini, jika pada pemilu tahap pertama tidak dicapai ketentuan lebih dari 50% suara (mayoritas mutlak) maka akan dilaksanakan pemilu tahap kedua (*second round*).<sup>14</sup> Mekanisme Pilpres tahap kedua ini ditentukan dalam ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

”Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.”

Pemilu tahap kedua dimaksudkan untuk menyempurnakan dukungan rakyat kepada calon presiden/wakil presiden pilihan mereka. Dengan demikian, basis legitimasi dan dukungan rakyat terhadap presiden dan wakil presiden terpilih menjadi kuat. Namun tentu saja, sistem ini melahirkan konsekuensi biaya yang sangat mahal.

Ada tiga hal yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal 6 A di atas. *Pertama*, calon presiden dan wakil presiden harus diajukan secara resmi oleh partai politik. Artinya, untuk diajukan sebagai calon presiden dan/atau calon wakil presiden, diperlukan dukungan dari

---

<sup>14</sup>Sebelum perubahan UUD 45 tahap keempat berlangsung, muncul wacana dari berbagai kalangan mengenai sistem pemilihan presiden untuk kondisi Indonesia. Jimly Asshiddiqie misalnya mengusulkan sebagai berikut: “..... mekanisme yang saya usulkan di sini adalah pada tahap pertama presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi pada tahap kedua dipilih melalui atau dalam sidang Umum MPR.” Lihat Jimly Asshiddiqie (b), *op. cit.*, hal. 106. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat biaya, dan pemilihan langsung pada tahap pertama sudah cukup memberikan legitimasi yang kuat dari rakyat kepada presiden dan wakil presiden terpilih.

partai politik peserta pemilu. *Kedua*, partai politik yang mencalonkan paket calon presiden dan wakil presiden itu dapat bekerjasama satu sama lain. Misalnya, partai A mengajukan calon presiden dan partai B mengajukan calon wakil presiden. Bahkan aliansi kerjasama itu dapat pula dilakukan oleh lebih dari dua partai politik. *Ketiga*, pelaksanaan pemilihan presiden itu terkait langsung dengan pemilihan umum legislatif. Pengikatan kerjasama antara partai politik harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga hasil pemilu tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih mitra kerjasama yang memungkinkan terjadi politik dagang sapi di tingkat elit politik. Karena itu, paket calon presiden dan calon wakil presiden harus didaftarkan sebelum pemilu. Dengan adanya ketentuan demikian, diharapkan pula bahwa dalam jangka panjang akan timbul kecenderungan penciutan jumlah partai politik secara alamiah, karena adanya kebutuhan alamiah di antara partai-partai politik itu untuk saling bekerjasama.<sup>15</sup>

Dalam sistem pilpres ini, siapakah yang dapat dilantik menjadi presiden? Pasal 6A UUD 1945 menentukan dua sistem. *Pertama*, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.<sup>16</sup> *Kedua*, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh

---

<sup>15</sup>Lihat *ibid.* Dalam pemilu presiden 2004 yang lalu, sistem pemilu presiden seperti yang ditentukan dalam ayat (3) ini tidak dapat terlaksana. Sebab, tidak satupun pasangan calon yang mencapai jumlah suara 50% lebih. Oleh karena itu, sistem pemilihan tahap kedua menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan. Sementara itu, Aturan Peralihan UU No. 23 Th 2003 tentang Pilpres memberikan kesempatan kepada calon presiden dan wakil presiden khusus untuk Pilpres 2004 dengan hanya menguasai 3% suara di seluruh Indonesia dan didukung oleh 15% kursi DPR di tingkat nasional.

<sup>16</sup>Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 (hasil perubahan ketiga).

rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.<sup>17</sup>

Apa yang dimaksud oleh ayat (3) Pasal 6 ini adalah bahwa presiden dan wakil presiden terpilih harus mendapat dukungan mayoritas mutlak di lebih dari separoh jumlah propinsi di seluruh Indonesia (*distribution requirement*). Dengan demikian, presiden memang benar-benar memiliki legitimasi yang kuat bukan saja secara kuantitatif melalui *popular vote*, tetapi juga mendapat dukungan yang meluas secara geografis di wilayah RI.<sup>18</sup> Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga distribusi dukungan suara yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan suara pemilih di suatu wilayah seperti di Jawa saja, sedangkan di luar Jawa tidak mendapat dukungan masyarakat.

Selanjutnya, jika ketentuan pada ayat (3) tidak tercapai (dalam pemilu tahap pertama), maka diperlukan tahap kedua sebagaimana dinyatakan dalam ayat (4) di atas. Kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang dapat berkompetisi pada tahap kedua ini adalah dua pasangan calon yang lolos dan mendapat suara terbanyak pada pemilihan tahap pertama. Penyelenggaraan pemilihannya juga dilakukan secara langsung sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 6 ini.

Jika ditinjau dari awal, proses pemilihan presiden ini sebenarnya dilakukan melalui "tiga tahap". Tahap pertama dilaksanakan sebelumnya di tingkat partai politik, baik secara mandiri maupun melalui koalisi (gabungan partai). Kandidat capres/cawapres yang diajukan parpol ke KPU harus telah lolos dalam pemilihan tahap pertama di tingkat internal partai. Dalam Pilpres 2004, satu-satunya contoh terbaik dari partai politik yang membuka diri dalam seleksi bakal capres adalah Partai Golkar, yaitu dilakukannya Konvensi Partai Golkar untuk mendapatkan calon terbaik partai, kendati akhirnya dimenangkan oleh Wiranto. Pasal 6A ayat (2) merupakan dasar hukum bagi pemilihan tahap pertama di tingkat internal partai, sebagaimana terlihat dalam kalimat

---

<sup>17</sup>Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 (hasil perubahan keempat).

<sup>18</sup>Lihat Asshiddiqie (a), *op.cit.*, hal. 9.

”Pasangan capres/cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ....” Realitas politik pelaksanaan pilpres dilakukan tiga tahap seperti dijelaskan di atas, namun konstitusi hanya menyebutnya dua tahap.

Sistem pemilihan presiden langsung melalui dua tahap ini persis sama dengan sistem pemilihan presiden di Finlandia (1994) dan dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Prancis sampai saat ini. Finlandia untuk pertama kalinya melakukan pemilu presiden langsung pada tahun 1994, yaitu Pilpres putaran pertama pada 16 Januari 1994 dan Pilpres putaran kedua pada 6 Februari 1994.<sup>19</sup> Namun, calon presiden di Finlandia ini juga mengikutsertakan calon independen (*non-party list*).

Dalam konteks perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia, rasionalitas pemilihan presiden secara langsung adalah untuk memperkuat pelebagaan sistem pemerintahan presidensial, dan melembagakan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>20</sup> Dengan demikian diharapkan pemilihan presiden secara langsung dapat melahirkan angin segar bagi perubahan perilaku dan budaya politik di tingkat elit dan tingkat

---

<sup>19</sup>Dalam pemilu presiden putaran pertama, terdapat 11 kandidat presiden, empat di antaranya berasal dari kandidat *non-party list* (calon independen). Martti Ahtisaari yang diusulkan oleh Partai Sosial Demokrat (*Social Democratic Party*) memenangkan 828.038 suara atau 25,9% dari jumlah suara nasional, kurang dari separuh jumlah suara pada pilpres putaran pertama tanggal 16 Januari 1994. Dan dalam pilpres putaran kedua, tiga minggu setelah pilpres putaran pertama, Ahtisaari memenangkan pemilu presiden dengan meraih sebanyak 1.723.485 suara atau 53,9%. Sedangkan lawannya Elisabeth Rehn dari *Swedish People's Party* hanya mampu meraih 1.476.294 atau 46,1%. Dengan demikian, kemenangan tipis Ahtisaari telah mengantarkan dia ke kursi kepresidenan di Finlandia. Lebih Lanjut lihat, Jan Sundberg, “Finland: Presidential Elections” dalam *European Journal of Political Research*, vol 28, nos. 3/4 December 1995, hal. 323-324.

<sup>20</sup>Lihat TA Legowo (ed), *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis dan Kritik*, (Jakarta: Kedeputian Bidang Dinamika Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi, 2004), hal. 31.

*grass roots*, serta memberikan fondasi bagi penguatan legitimasi rakyat terhadap presiden pilihan mereka. Selanjutnya, diharapkan sistem presidensial ini dapat melahirkan pemerintahan yang kuat, yang lahir dari hasil pemilu demokratis dan mendapat dukungan mayoritas rakyat pemilih.

Sistem pemilihan secara langsung didasarkan atas azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>21</sup> Pertanyaannya, bagaimana tata cara pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung itu dilaksanakan? Menurut Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, rakyat memilih secara langsung calon pilihan mereka melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam satu paket. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih figur yang diinginkan mereka. Ditentukannya calon presiden dan wakil dalam satu paket mendorong hubungan yang paralel dan saling melengkapi di antara keduanya. Jadi kedudukan wakil presiden tidak lagi sebagai “ban serep” dan “simbol” pelengkap lembaga kepresidenan sebagaimana terjadi pada pemerintahan rezim Orde Baru, tetapi memiliki kedudukan yang riil sebagai wakil presiden, tidak lagi sebagai simbol.

Namun dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan presiden dan wakil presiden, konstitusi negara hasil amandemen ini masih memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden melalui sidang MPR, tanpa mempersoalkan apakah kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden itu disebabkan karena presiden atau wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>22</sup>Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 [hasil perubahan keempat].

Perubahan regulasi yang dilakukan atas sistem pemilu presiden yang dasar-dasarnya digariskan dalam perubahan UUD 1945 --terutama yang menyangkut kekuasaan pemerintahan negara (pasal 6 s/d pasal 8) dan kemudian dijabarkan oleh UU Pilpres No 23 Tahun 2003, telah membawa perubahan positif yang dapat dilihat dalam lima aspek berikut. *Pertama*, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memberikan basis legitimasi yang kuat bagi presiden. *Kedua*, didukung oleh legitimasi yang kuat dari rakyat, presiden tak perlu terikat oleh fraksi-fraksi politik di lembaga legislatif. Sistem pemilihan presiden yang baru memberikan konsekuensi bahwa presiden tidak mudah dijatuhkan oleh lembaga legislatif hanya karena alasan politik sebagaimana pernah terjadi pada presiden Abdurrahman Wahid tahun 2002. *Ketiga*, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memberikan kesempatan kepada setiap warga negara (pemilih) untuk memberikan penilaian tentang calon-calon presiden, dan karenanya mendorong dan sekaligus menuntut kematangan politik rakyat dalam berpartisipasi menentukan pergantian pemerintahan. *Keempat*, sistem baru pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat akan mengurangi distorsi suara rakyat sehingga terhindar dari praktek “membeli kucing dalam karung”. Kegagalan Megawati dalam pemilihan presiden tahun 1999 mencerminkan kentalnya nuansa distorsi suara rakyat. *Kelima*, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat relatif melemahkan insentif praktek-praktek penggunaan kekuatan *money politic* dibanding dengan sistem pemilihan presiden diserahkan kepada MPR dalam jumlah terbatas.<sup>23</sup>

### ***Proses dan Tahap Penyelenggaraan Pilpres***

Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU (Pasal 9) sebagaimana halnya dengan pemilu legislatif. Dalam sistem Pilres 2004, proses pilpres dilaksanakan dalam enam tahap kegiatan. *Pertama*, dimulai dari pendaftaran pemilih (Pasal 20 s/d 24), yang merupakan kelanjutan dari pemilu legislatif. *Kedua*, tahap

---

<sup>23</sup>TA Legowo, *op. cit.*, hal. 32-33.

pencalonan pasangan kandidat presiden dan wakil presiden, diajukan baik oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu (Pasal 25 s/d 34). *Ketiga*, tahap pelaksanaan kampanye (Pasal 35 s/d 42) dan sekaligus pengaturan tentang dana kampanye (Pasal 43 s/d 45). *Keempat*, tahap pemungutan suara (Pasal 46 s/d 57). *Kelima*, tahap penghitungan suara (Pasal 58 s/d 65), dan *terakhir*, tahap penetapan calon terpilih dan pelantikannya (Pasal 66 s/d 69).

Keenam tahap tersebut hanya dapat berjalan kalau penyelenggaraan pemilu berlangsung secara baik. Artinya, penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dapat diselesaikan di semua tahapan tersebut. Namun apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proses sebagaimana disebut di atas, maka harus dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang di TPS (Pasal 70 s/d 72). Di samping itu, jika terjadi hal-hal yang menyebabkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana disebut di atas tidak dapat dilaksanakan, maka harus dilakukan pemilu presiden dan wakil presiden lanjutan (Pasal 73). Dan bilamana terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan pilpres tidak dapat dilaksanakan, maka harus dilakukan pemilu lanjutan (Pasal 74).

Hal lain yang terkait erat dengan proses pelaksanaan dalam tahapan demi tahapan sebagaimana diuraikan di atas adalah masalah pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Ketentuan mengenai ini diatur dalam Bab XI Pasal 76 s/d 82 UU No. 23 Tahun 2003. Dalam pelaksanaan Pilpres 2004, aturan hukum yang termuat dalam Pasal-Pasal 70 s/d 74 tidak pernah diterapkan. Sebab, pemilu dinilai berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi pemungutan suara ulang dan pemilu lanjutan.

Dilihat dari tingkat kesulitan, resiko dan kecurangan dalam pelaksanaannya, tahap keempat (pemungutan suara) dan tahap kelima (penghitungan suara) merupakan tahap-tahap yang paling krusial dalam pemilu. Kerawanan pada kedua tahap ini memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan pemilu. Namun demikian, bukan berarti tahap ketiga (kampanye) tidak bermasalah, semuanya melahirkan persoalan yang saling berkait dan pada akhirnya menurunkan kualitas pemilu itu sendiri. Berbagai permasalahan yang timbul dalam tahapan pelaksanaannya akan dijelaskan pada sub-bagian selanjutnya mengenai regulasi pemilihan presiden dan pelaksanaannya.

### **Upaya Memperkuat Kelembagaan Sistem Presidensial?**

Sistem pemerintah pada dasarnya dibangun dari dua pilar kekuasaan eksekutif dan legislatif. Relasi keduanya akan melahirkan sebuah sistem pemerintahan apakah bersifat parlementer ataupun presidensial. Dalam sistem parlementer, posisi kekuasaan terletak pada lembaga legislatif (parlemen). Sementara dalam sistem presidensial, posisi dan pengendali kekuasaan lebih terfokus pada presiden. Di negara demokrasi yang menganut ajaran *trias politica* (kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif) kekuasaan eksekutif sama sekali terpisah dari dua kekuasaan tersebut, tanpa memandang apakah sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial atau sistem parlementer. Artinya, baik legislatif apalagi yudikatif tidak dapat melakukan intervensi atas kekuasaan pemerintah yang berjalan. Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan serta karakteristik masing-masing yang berbeda pula. Begitu pula penerapannya, berpengaruh pada sistem pemilihan presiden yang dianut di suatu negara.

Secara teoritis, sistem presidensial melibatkan pemilihan langsung baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Kabinet secara efektif ditunjuk oleh presiden dan presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif, presiden hanya bisa dikeluarkan dari jabatannya bilamana ia melakukan apa yang disebut kejahatan negara tingkat tinggi (*high crimes and misdemeanors*). Sementara legislatif memiliki masa jabatannya yang tetap (*fix term*) sehingga tidak bisa dibubarkan (*dissolved*) oleh presiden. Selanjutnya, sistem presidensial membutuhkan sistem pengadilan yang otonom dan non-

partisan dalam penyelesaian sengketa hukum antara kedua cabang pemerintahan ini.<sup>24</sup>

Dalam paradigma ini, Prof. Juan J. Linz berpendapat bahwa sistem presidensial pada dasarnya cenderung melahirkan polarisasi dan instabilitas politik. Karena itu, sistem ini tidak cocok dengan negara demokrasi baru. Sebagaimana dikutip Gunther, Linz mengatakan:

“Presidential systems (in which there is a formal separation of power between the executive and legislative branches of government) are prone to political polarization and instability, and are particularly poorly suited for new democracies.”<sup>25</sup>

Sebaliknya, sistem parlementer menurut Linz lebih bersifat fleksibel dan dapat diterima dalam jangka pendek, dan lebih menyediakan manajemen konflik dalam politik yang mengandung potensi konflik, tidak stabil dan terpecah. Namun teori Linz ini, nampaknya belum cocok dengan pengalaman sejarah sistem pemerintahan di Indonesia sejak negara ini merdeka hingga saat ini.

Kelemahan lain dalam sistem presidensial menurut Linz adalah bahwa adanya: (1) perasaan memiliki kekuasaan yang independen; (2) mandat dari rakyat yang seolah-olah memberikan seorang presiden kekuasaan dan misi yang dapat melebihi proporsi pluralitas terbatas yang memilihnya sebagai presiden; (3) masa jabatan yang permanen (*fix term in office*) baik pada legislatif maupun pejabat pemerintahan membuat sistem menjadi tidak fleksibel.

Kondisi yang ada pada sistem presidensial di atas berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, eksekutif (yang dipimpin oleh perdana menteri, kanselor, atau presiden)

---

<sup>24</sup>Richard Gunther, “Opening a Dialogue on Institutional Choice in Indonesia: Presidential, Parliamentary and Semipresidential Systems,” dalam R. William Liddle (ed.), *Crafting Indonesian Democracy* (Bandung: Mizan, Bekerjasama dengan PPW-LIPI dan The Ford Foundation, 2001), hal. 172-173.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 152.

menerima legitimasi demokrasi (*democratic legitimacy*) secara tidak langsung. Ia tidak dipilih langsung oleh rakyat, dan demokrasi parlementer ini hanya diklaim untuk memerintah berdasarkan pelantikan jabatan (*investiture*) dan melanjutkan pertanggungjawabannya di parlemen. Karena itu pula perdana menteri dan pemerintah dapat diberhentikan (*remove*) dari jabatannya dengan pemungutan suara di parlemen, atau berdasarkan penetapan/keputusan (*determination*) oleh kepala negara. Termasuk dalam hal ini sebuah kepala negara monarki atau presiden yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, karena pemerintah tidak lagi didukung oleh mayoritas anggota parlemen.<sup>26</sup>

Ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai ciri dari sistem parlementer: (1) hubungan antara lembaga legislatif (parlemen) dan eksekutif (pemerintah) pada umumnya erat, karena dewan menteri (kabinet) dibentuk berdasarkan suara mayoritas dalam parlemen; (2) kedudukan para menteri kabinet tergantung pada parlemen dan bertanggung jawab pada parlemen; (3) kepala negara (presiden atau raja) tidak bertanggung jawab, karena yang sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan adalah perdana menteri.<sup>27</sup>

Dalam pengalaman dan sejarah ketatanegaraan Indonesia, ternyata sistem parlementer tidak dapat berjalan dengan baik, sebagaimana terbukti bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun saja (1950 s/d 1959) tidak kurang dari tujuh kali kabinet berganti. Umur rata-rata kabinet pada masa itu kurang dari 1,5 tahun. Kabinet Hatta misalnya berumur kurang dari satu tahun (Desember 1949-Agustus

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 173.

<sup>27</sup>H. Azhary, "Teori Bernegara Bangsa Indonesia (Suatu Pemahaman tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas dalam Hukum Tata Negara)", pidato pengukuhan guru besar disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1995, dalam Hendra Nurtjahjo (ed.), *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 1, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004), hal. 207.

1950).<sup>28</sup> Pada umumnya kerapuhan kabinet ini disebabkan oleh konflik di antara elit politik. Itu pula sebabnya Bung Karno pernah menyarankan untuk menguburkan partai politik dalam pidatonya yang berjudul “Indonesia, Pilihlah Demokrasi yang Sejati,” ia menyerukan ajakan untuk menguburkan partai-partai. Sebab, pada waktu itu, partai politik dianggap menjadi biang ketidakstabilan pemerintahan parlementer dan macetnya persidangan Konstituante.<sup>29</sup>

Pandangan Linz mengenai penerapan sistem parlementer di negara-negara demokrasi baru --yang dinilai lebih fleksibel-- ternyata tidak cocok untuk Indonesia. Sebab pengalaman kita dalam berdemokrasi parlementer justru melahirkan situasi politik yang berlawanan dengan teori Linz tersebut. Mungkin berdasarkan pengalaman buruk ini pula, termasuk pada masa awal reformasi, para elit politik di negeri ini justru ingin memantapkan penerapan sistem presidensial dalam pengelolaan negara.

Menurut Satori, ada tiga ciri yang melekat pada sistem presidensial: (a) kepala pemerintahan (presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu; (b) dalam masa jabatannya presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan; (c) presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya. Verney menambahkan sejumlah ciri lain dari sistem pemerintahan presidensial ini, yaitu: (a) kekuasaan eksekutif bersifat tidak terbagi (*sole executive*) dimana jabatan kepala negara (*head of the state*) sekaligus juga kepala pemerintahan (*head of the government*); (b) tidak ada peleburan antara eksekutif dan legislatif,

---

<sup>28</sup>Dari 15 anggota Kabinet Hatta (termasuk Moh Hatta sebagai Perdana Menteri), delapan di antaranya berasal dari *non party* (kelompok independen), selebihnya dari partai Masyumi empat orang, PNI tiga orang, dan Parkindo satu orang. Untuk semua kabinet masa demokrasi parlementer, lihat lebih lanjut, Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, first published, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962), terutama hal. 46-47 dan bab-bab lainnya.

<sup>29</sup>Priyatno dan Anton Muljono (ed.), *Pemilu 2004: Kesaksian Politik Rakyat atas Jalannya Reformasi*, Cet. 1, (Surabaya: Forum Rektor Indonesia, 2004), 25.

majelis tidak berubah menjadi parlemen dan presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis dan; (c) eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi dan secara langsung kepada para pemilih (rakyat).<sup>30</sup>

Perubahan regulasi sistem pemilihan presiden menjadi sistem pemilihan langsung (*direct vote*) di dalam konstitusi 1945, pada dasarnya ditujukan untuk menjamin pemerintahan yang kuat. Sebab, belajar dari pengalaman tiga pemerintahan terdahulu pasca Soeharto, tidak satupun dari ketiga pemerintahan yang ada itu cukup kuat, karena mereka dinilai tidak memiliki legitimasi yang kuat. Presiden Habibie, misalnya, ia dijatuhkan dalam Sidang Umum MPR karena laporan pertanggungjawaban pemerintahannya ditolak oleh MPR, di samping penunjukannya sebagai presiden bukan atas dasar pemilihan umum langsung oleh rakyat. Presiden Abdurrahman Wahid juga dijatuhkan dalam Sidang Istimewa MPR, karena kesalahannya membuat Dekrit Presiden untuk membubarkan parlemen. Megawati turun dari kursi kepresidenan sesudah habis masa jabatannya dengan segala kelemahan pemerintahannya: selain pemilihannya sebagai presiden tidak memiliki legitimasi politik yang kuat melalui pemilihan langsung dari rakyat, juga karena sistem pemerintahan yang berlaku ketika itu tidak mendukung kekokohan lembaga kepresidenan, karena sistem yang berlaku justru mengarah kepada sistem pemerintahan semi parlementer (*semu*).

Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang kuat, untuk dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan mengantarkan bangsa ini menuju negara maju yang demokratis, maka perubahan sistem kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi negara harus menjamin sebuah pemerintahan yang kuat, yang kepala negaranya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang demokratis pula. Dalam kaitan ini, hasil perubahan pertama (Pasal 7) dan perubahan ketiga (Pasal 7C) UUD 1945 memberikan dukungan kuat terhadap

---

<sup>30</sup>Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), "Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan" sebagaimana dikutip Legowo dalam *op. cit.*, hal. 32.

pelembagaan sistem presidensial. Hal ini misalnya, dapat dilihat dari bunyi Pasal 7C yang menyatakan: “presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Jimly Asshiddiqie dalam konteks ini, memberikan tafsirannya terhadap Pasal 7C ini, dengan menyatakan bahwa:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas dianutnya sistem presidensial dalam Undang-Undang Dasar ini, sekaligus untuk memastikan bahwa pengalaman seperti yang pernah dialami ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencoba mempertahankan kedudukannya dengan mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen oleh presiden.”<sup>31</sup> Sebab dalam sistem presidensial, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pula sebaliknya parlemen tidak dapat memberhentikan presiden/wakil presiden sebelum masa pemerintahannya berakhir, hanya karena alasan politis.<sup>32</sup>

Namun jika dilihat dari aturan pasal demi pasal yang dimuat dalam UUD 1945 sampai dengan perubahan keempat, kita melihat tidak satupun pasal yang secara tegas menyatakan sistem pemerintahan yang dianut dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi,

---

<sup>31</sup>Lihat Jimly Asshiddiqie (a), *Op. cit.*, hal. 14.

<sup>32</sup>Dalam ketentuan UUD 1945, presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden (hasil perubahan ketiga, Pasal 7A). Jika sebelum amandemen konstitusi pemberhentian presiden dapat dilakukan karena alasan pelanggaran haluan negara yang bersifat politik dan memberikan efek multi tafsir, maka dalam perubahan Pasal 7A, ditegaskan pemberhentian presiden itu atas dasar pelanggaran hukum saja. Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah: (i) pelanggaran hukum berat; (ii) melakukan perbuatan tercela dan; (iii) mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Yang dapat menimbulkan persoalan nantinya adalah soal perbuatan tercela, yang tidak begitu jelas ukurannya seperti ketentuan mengenai “misdemeanors” dalam konstitusi Amerika Serikat. Untuk ini lebih lanjut lihat, *ibid.*

tidak berbeda halnya dengan aturan hukum dan sistem yang dimuat dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang sama sekali tidak menyatakan sistem pemerintahan yang berlaku. Maka karena ketidakjelasan yang disebabkan karena ketiadaan pengaturan itu pulalah banyak pakar hukum ketatanegaraan dan ilmu politik kita sejak dua dekade terakhir ini memberikan penafsiran yang berbeda mengenai sistem pemerintahan yang dianut dalam konstitusi kita.

Dalam hubungan ini, Prof. H. Azhary memberikan penafsirannya bahwa pembentuk UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak menganut teori Trias Politika, tetapi menentukan teorinya sendiri berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945. Karena sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan negara tertinggi ada pada MPR, maka tepatlah dikatakan sebagai sistem pemerintahan MPR.<sup>33</sup> Atas pertimbangan ini pula Prof. Azhary mendukung pandangan Prof. Padmo Wahyono yang sebelumnya telah memberikan pandangan serupa mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 sebelum amandemen.

### **Regulasi Pemilihan Presiden dan Implementasinya pada Pilpers 2004**

Sebagaimana disampaikan pada bagian terdahulu, pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU (Pasal 9) seperti halnya dengan pemilu legislatif. Proses pelaksanaan Pilres 2004 diselenggarakan dalam enam tahap kegiatan. Dimulai dari tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan pasangan kandidat presiden dan wakil presiden, tahap pelaksanaan kampanye, tahap pemungutan suara, tahap penghitungan suara, dan *terakhir*, tahap penetapan calon terpilih dan pelantikannya.

Sehubungan dengan proses dan tahapan pemilu di atas, sub bagian ini hanya menguraikan beberapa hal yang dianggap sangat penting saja, yaitu mengenai pencalonan dan mekanismenya, masalah-masalah dalam penyelenggaraan pemilu, pemungutan dan

---

<sup>33</sup>Lihat H. Azhary, *Op. cit.*, hal. 209-210.

penghitungan suara serta pengawasan dan penegakan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu.

### ***Pencalonan dan Mekanismenya***

Ada dua hal penting yang ingin dilihat dalam uraian ini, yaitu mengenai persyaratan presiden dan wakil presiden serta mekanisme pencalonannya dan bagaimana peran parpol dalam pencalonan kandidat. Sebagai implementasi dari Pasal 6 UUD 45, Pasal 5 UU Pilpres mengatur tentang peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Ayat (1) menyatakan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ayat (2) dan (3) masing-masing mengatur pengumuman dan pendaftaran capres/cawapres. Regulasi Pasal 5 ini tidak memberikan rentang waktu (*time frame*) yang jelas mengenai pengumuman dan pendaftaran kandidat presiden dan wapres. Paling tidak terdapat tiga hal *ambiguity* dan bahkan kontradiktif dalam pengaturan kedua ayat tersebut.

*Pertama*, mengenai pengumuman pasangan capres/cawapres, ketentuan ayat (2) ini menyatakan bahwa pengumuman pasangan capres/cawapres dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR ke KPU [Pasal 5 ayat (2)]. Hal ini berarti bahwa pengumuman pasangan capres/cawapres oleh KPU dilaksanakan sebelum diselenggarakannya pemilu legislatif. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah adanya aturan dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa “pendaftaran pasangan calon oleh parpol dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU.” Ketentuan ini terkait erat dengan ayat (4), yang menyatakan bahwa pasangan calon hanya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR, atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

*Kedua*, regulasi ini menyisakan beberapa pertanyaan: bukankah ketentuan ayat (3) dan (4) pasal ini bertentangan satu sama lain? Bagaimana jika perolehan suara dari partai atau gabungan

partai yang mengajukan calon memperoleh suara tidak mencukupi jumlah yang ditentukan dalam ayat (4) tersebut padahal kandidat pasangan calon sudah diumumkan sesuai dengan ayat (2) undang-undang ini?<sup>34</sup> Mestinya dijelaskan dalam UU ini bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden ke KPU dapat dilakukan apabila partai politik yang mengusung kandidat tersebut sudah ditetapkan memenuhi kriteria *electoral threshold* yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) UU Pilpres.<sup>35</sup>

*Ketiga*, dilihat dari aturan konstitusi yang menjadi acuan bagi UU Pilpres ini, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Lalu kapan pendaftaran kandidat ke KPU dilakukan? Masa pendaftaran capres dan cawapres menurut UU Pilpres adalah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

---

<sup>34</sup>Kasus Dr. Syahrir calon presiden dari PIB, yang terhalang untuk maju berkompetisi dalam pilpres karena partainya tidak melewati batas *electoral threshold* (3% suara –khusus pada pilpres 2004) tentu menyakitkan pihak PIB karena aturan hukum yang tidak rasional ini. Dengan demikian, Syahrir merupakan korban pertama dari kontradiksi ayat (2) dan (3) Pasal 5 UU Pilpres ini.

<sup>35</sup>Kritik dan saran semacam ini juga disampaikan oleh beberapa nara sumber di Makassar. Seperti disampaikan Dr. Aswanto dan HL Arumahi, mantan Ketua dan Anggota Panwaslu Prov. Sulawesi Selatan, dalam wawancara dengan penulis di Makassar masing-masing pada 5 dan 6 Agustus 2005. Aswanto dalam hal ini memberikan kritiknya bahwa: “Mestinya dijelaskan saja bahwa calon-calon presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh partai politik yang sudah ditetapkan memenuhi persyaratan. Jadi tidak menciderai orang. Kalau dari awal dia tahu bahwa (minimal perolehan suara partainya tidak mencukupi 20% dan/atau kursi 15% di DPR), dia bisa berkoalisi dengan partai lain. Ini juga menutup kandidat untuk berkoalisi karena sudah terlanjut masuk nama. Mustinya, sebelum memasukan nama, dia diberi informasi untuk berkoalisi. Ini bisa mengurangi hak politik orang lain.”

penetapan hasil perolehan suara pemilu anggota DPR oleh KPU.<sup>36</sup> Pengertian tentang pemilihan umum ini juga tidak dijelaskan dalam UUD 1945. Jika pemilu ini ditafsirkan sebagai pemilu legislatif, maka kandidat presiden dan wakil presiden harus diusulkan sebelum pemilu legislatif, jadi bukan sebelum pemilu presiden dan wakil presiden.

Mengenai pencalonan oleh partai politik (dan/atau gabungan partai politik), dan tidak adanya calon independen dalam aturan pilpres ini, telah menjadi wacana dan perdebatan nasional, begitupun di daerah-daerah penelitian ini. Kondisi ini oleh sebagian besar nara sumber dinilai sebagai masih sangat dominannya peran partai dalam pengajuan capres/cawapres. Dominasi partai ini terlihat dari tiadanya keinginan partai-partai politik untuk memberikan peluang bagi calon independen (*non-party candidate*) untuk ikut bersaing dalam kompetisi bebas pemilu presiden di negeri ini. Akibatnya, filosofis sesungguhnya yang diharapkan dari pemilu langsung ini masih belum bisa diharapkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Pasal 28 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>37</sup>Seperti dikatakan oleh salah seorang nara sumber: “Filosofis sebenarnya yang ingin dicapai dari dengan sistem pemilihan langsung itu tidak bisa terlaksana secara maksimal, karena menggunakan partai sebagai kendaraan di situ lahir deal-deal tertentu. Jadi kita lihat yang masih lebih dominan adalah peranan partai politik. Saya kira orang tahu bagaimana kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem itu.” Wawancara dengan Aswanto, mantan Ketua Panwaslu Sulsel di Makassar, tanggal 5 Agustus 2005.

Ketentuan tentang persyaratan peserta pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 UU Pilpres.<sup>38</sup> Aturan mengenai persyaratan ini sekilas terlihat cukup komprehensif jika dibandingkan dengan persyaratan presiden pada UUD 45 sebelum amandemen, begitu pula dengan persyaratan presiden dan wakil presiden pada UUDS 1950. Namun beberapa di antaranya dipertanyakan dan menjadi perdebatan. Misalnya, persyaratan pendidikan, kesehatan dan tidak pernah dipidana dengan hukuman lima tahun atau lebih. Dengan syarat yang terakhir ini, jika seorang capres/cawapres yang pernah dipidana empat tahun (atau kurang dari

---

<sup>38</sup>Di antara syarat yang dinilai kontroversial dari Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden (pasal 6 huruf d). Persyaratan ini pada dasarnya cukup baik dalam menjamin kualitas kesehatan dan kapabilitas intelektual seorang calon presiden, mengingat tugas seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat berat. Namun banyak kalangan yang menghadapkan persyaratan kesehatan (jasmani dan rohani) ini sebagai ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia, karena adanya kepentingan politik salah satu partai yang terganggu. Namun demikian, pada umumnya nara sumber setuju dengan persyaratan kesehatan capres/cawapres ini.

Namun demikian, banyak sekali persyaratan yang sangat baik dalam menjaga kredibilitas dan integritas moral pribadi calon yang bersangkutan. Persyaratan integritas seperti itu dapat dilihat misalnya dari sisi pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata, etika politik dan keberadaannya sebagai warganegara Indonesia. Hal-hal yang menyangkut perbuatan pidana, misalnya seperti yang diatur dalam huruf i, p dan t. Hal-hal yang menyangkut pelanggaran perdata misalnya diatur dalam huruf g dan h. Mengenai aturan persyaratan yang menyangkut kewajiban sebagai warganegara, dapat dilihat seperti yang tercantum dalam huruf c, e, f, l, m dan o. Demikian juga persyaratan formalitas pribadi (pendidikan dan moralitas) yang cukup baik sebagaimana diatur dalam huruf a dan q. Namun persyaratan tingkat pendidikan terlihat sangat rendah karena persyaratannya cukup pada pendidikan tingkat SLTA. Persyaratan yang terakhir ini sangat vulgar terlihat penuh kepentingan politik dari penguasa pada saat Undang-Undang ini dalam pembahasan di DPR.

lima tahun), maka ia dibolehkan untuk ikut berkompetisi dalam pilpres, sebuah fenomena kerusakan moral bangsa yang luar biasa. Hal ini tidak begitu menjadi persoalan jika hukuman pidananya merupakan pidana politik. Tiga poin ini merupakan bagian yang “diperdagangkan” dalam politik dagang sapi partai-partai besar yang ikut berperan dalam perumusan UU Pilpres.

Kenyataan seperti ini dipandang oleh Paul A. Sebastian dan Hank Jenkins-Smith, dalam konsep *advocay coalition framework* (ACF), menekankan bahwa perubahan kebijakan atau perundang-undangan dalam subsistem tertentu merupakan akibat dari dua proses penting. *Pertama*, persaingan antara sejumlah koalisi dukungan, yang masing-masing terdiri dari para aktor yang berasal dari berbagai lembaga swasta dan pemerintah yang sama-sama mendukung suatu sistem kepercayaan tertentu dan berusaha menguasai lembaga pemerintah demi mewujudkan tujuan-tujuan mereka. *Kedua*, adanya guncangan kuat dari luar subsistem, seperti perubahan radikal atas kondisi ekonomi-politik domestik maupun pergeseran sistem nilai secara tajam dari masyarakat.<sup>39</sup> Dua ukuran yang dikemukakan Sebastian dan Smith tersebut dapat menggambarkan bagaimana proses yang terjadi dalam perumusan UU Pilpres yang melahirkan apa yang penulis sebut sebagai demokrasi “*exchange*” model Indonesia. Fenomena ini, dalam berbagai pandangan lain disebut sebagai proses “demokrasi kaum penjahat”.

### ***Masalah Penyelenggaraan Pemilu***

Sesuai dengan Pasal 9 UU Pilpres, penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh KPU yang dibantu oleh KPUD Propinsi dan Kabupaten/Kota di daerah-daerah pemilihan. Dari wilayah penelitian ini, KPUD Sulawesi Selatan (Sulsel), misalnya, mengakui bahwa pemilu presiden berlangsung di

---

<sup>39</sup>Lihat Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Masa Depan Demokrasi Pasca Pilpres 2004*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 29.

daerah ini dengan cukup baik, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Salah satu fenomena yang menonjol dalam proses pelaksanaan pilpres di daerah penelitian ini adalah adanya kenyataan bahwa rakyat di Sulsel sangat kokoh dalam pandangan dan pendirian primordialisme mereka.

Faktor primordial itu berwujud “pengagungan” terhadap tokoh daerah, Jusuf Kalla. Figur Jusuf Kalla terkesan sangat kuat bukan hanya di Sulsel tetapi juga di kawasan Indonesia bagian timur lainnya. Sehingga tidak heran jika rakyat di kawasan ini meletakkan figur Jusuf Kalla sebagai simbol wakil wilayah Indonesia Timur dalam perebutan kursi kepemimpinan nasional ini. Karena itu, tidak heran jika mayoritas mutlak sebanyak 4.027.059 suara (87,23%) rakyat di Sulsel memilih pasangan Yudhoyono-Kalla dalam pilpres tahap kedua, dengan menyisakan 565.953 suara (12,76%) bagi pasangan Megawati-Hasyim. Hasil putaran kedua ini jauh melampaui hasil perolehan suara yang diraihinya pada putaran pertama, yaitu sebanyak 2.854.774 suara (64,16%) dari jumlah total suara sah di provinsi Sulsel. Perolehan pasangan Yudhoyono-Kalla sangat jauh meninggalkan pasangan Megawati-Hasyim yang hanya menduduki peringkat keempat sesudah pasangan Wiranto-Wahid dan Amien-Siswono, yakni sebanyak 381,385 suara (8,57%).

Di sisi lain, kemenangan partai Golkar di Sulsel yang mencapai lebih dari 80% suara dalam pemilu legislatif praktis berjalan tidak paralel dengan hasil pilpres. Suara yang diperoleh partai Golkar itu bukan bertahan untuk mendukung pasangan Wiranto-Wahid, tetapi justru meninggalkan pasangan itu dan berpindah mendukung pasangan Yudhoyono-Kalla yang diusung oleh partai Demokrat, dan dalam pilpres putaran kedua didukung pula oleh PKS yang bergabung dalam koalisi Kebangsaan. Paling tidak ada lima faktor yang dapat menjelaskan mengapa fenomena antagonisme seperti itu dapat terjadi dalam kasus Sulsel. *Pertama*, mesin partai Golkar lumpuh dalam upaya memenangkan kandidatnya di Sulsel: seperti dalam masa kampanye, maupun pada saat perhitungan suara dan pengawasan rekapitulasi suara di TPS-TPS. *Kedua*, hampir sebagian besar suara pendukung partai Golkar

berpindah ke pasangan Yudhoyono-Kalla [Kalla sebagai faktor utama], dengan alasan, mendukung Kalla juga mendukung partai Golkar, karena Kalla adalah juga tokoh dari partai Golkar. *Ketiga*, masyarakat Sulsel justru memiliki semangat primordialisme dan fanatisme yang kuat untuk mendukung tokoh daerah. *Keempat*, faktor figur dan kepribadian Yudhoyono yang dinilai cerdas, santun dan tidak memiliki dosa nasional *vis-à-vis* Wiranto dan berbagai kelemahan para kompetitor lainnya. *Kelima*, lembaga yang paling berperan penting dalam kemenangan capres/cawapres justru Tim Sukses.<sup>40</sup> Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa pemaparan program, visi dan misi kandidat hampir sama sekali tidak menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan mereka dalam Pilpres ini.

Penyelenggaraan pemilu pilres di daerah ini dinilai hampir semua nara sumber cukup berhasil. KPUD Sulsel dalam hal ini tidak banyak memiliki kendala yang signifikan sampai pada saat pengesahan hasil rekapitulasi perhitungan suara. Keberhasilan pilpres di wilayah ini disampaikan KPUD Sulsel kepada masyarakat melalui surat terbuka di harian Fajar dengan judul “Terima Kasih Masyarakat Sulawesi Selatan.”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Kesemua faktor ini merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara penulis dengan 15 orang nara sumber di Makassar pada minggu pertama dan kedua Agustus 2005. Di antara mereka yang paling kritis memberikan masukan ini adalah Nurdin Makana (DPRD Sulsel-Golkar), Dr. Kosim Matar (tokoh masyarakat), Dr. Armin Arsyad (akademisi), Dr. Aswanto dan HL. Arumahi (Panwaslu), Aidir Amin Daud (KPUD), Jufri dan Yudha Yusuf (Pemantau pemilu dari JPPR Sulsel), Patawari (Badko HMI) dan Zaenal Abidin (DPRD Sulsel- PKS ).

<sup>41</sup>Ucapan terimakasih KPUD Sulsel itu diungkapkan dalam kalimat berikut: “Sebuah perjalanan panjang menuju demokrasi telah kita lalui dalam suasana yang aman dan damai. Kita sebagai bangsa patut bangga telah mampu melaksanakan 3 kali pemilu yang amat bersejarah, yaitu pemilu untuk anggota DPR, PPD, dan DPRD pada 5 April 2004, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden putaran pertama pada 5 Juli, dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden putaran kedua pada 20 September 2004.

Berdasarkan hasil evaluasinya, secara keseluruhan, KPU/KPUD telah melaksanakan tugasnya secara independen baik terhadap pemerintah maupun parpol dan calon peserta pemilu. Namun demikian, persyaratan, mekanisme rekrutmen, jumlah anggota, masa jabatan, keanggotaan, hak administratif, dan akuntabilitas anggota KPUD belum menghasilkan KPUD yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Transparansi dan akuntabilitas KPUD baik secara politik maupun secara administrasi/keuangan kepada pemerintah dan secara hukum dinilai masih belum optimal. Hal ini misalnya, dapat dilihat dari penyampaian laporan kegiatan dan laporan keuangan oleh KPUD yang masih sering terlambat.<sup>42</sup>

### ***Pemungutan dan Penghitungan Suara***

Pemungutan suara yang adil, jujur dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Hal ini mengharuskan penghitungan suara, pentabulasian dan pengkonsolidasiannya dihadiri oleh perwakilan partai dan kandidat serta pemantau pemilu. Diharapkan juga seluruh proses dalam penentuan pemenang betul-betul terbuka bagi publik.<sup>43</sup>

Dalam pelaksanaannya, pemungutan dan penghitungan suara adalah momen kegiatan yang sangat krusial bagi terjadinya

---

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat se-Sulawesi Selatan, Anggota KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu se Sulse dan Daerah, Pemantau daerah, dalam dan luar negeri yang berada di Sulawesi Selatan, partai politik peserta pemilu 2004, media cetak dan elektronik, segenap jajaran pemerintah daerah, aparat kepolisian maupun militer, serta pimpinan dan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota. Tanpa dukungan anda semua, perhelatan itu tak akan terlaksana dengan baik. ....dst.” *Harian Fajar*, 9 Oktober 2004.

<sup>42</sup>Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, *Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan Umum 2004*, Makassar, Juli 2005, hal. 23.

<sup>43</sup>International Institute for Democracy and Electoral Assistance/IDEA, *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu* (Swedia: Publication Office, International IDEA, 2002), hal. 85.

pelanggaran. Di wilayah penelitian ini, banyak perbedaan hasil perhitungan suara terjadi antara tingkat PPS dengan KPPS.<sup>44</sup> Dalam proses pemungutan dan perhitungan suara pada Pilpres tahap pertama, terjadi pelanggaran administrasi dalam bentuk: banyaknya kertas suara yang tercoblos lebih dari satu kali. Hal ini serentak terjadi hampir di seluruh provinsi Indonesia yang menjadi masalah di TPS-TPS. Terjadinya kasus seperti ini disebabkan antara lain karena model lipatan surat suara yang tidak tepat. Terhadap kasus coblos ganda ini, KPU mengeluarkan Surat Edaran KPU No. 1151 yang menyatakan bahwa pencoblosan langsung lebih dari satu tersebut dianggap sah.<sup>45</sup> Dalam penghitungan suara, dari 8.233.375 jiwa penduduk di Sulawesi Selatan yang berasal dari 28 Kabupaten/Kota dan 291 Kecamatan, terdapat sebanyak 4.448.815 penduduk yang menggunakan hak pilih, dengan suara tidak sah sebanyak 67.198 dan terdapat sebanyak 1.077.396 (19,43%) penduduk yang tidak menggunakan hak pilih,<sup>46</sup> suatu angka yang cukup besar, yaitu hampir seperlima dari jumlah pemilih terdaftar. Hal ini memberikan indikasi bahwa partisipasi politik rakyat dalam Pilpres 2004 tidak

---

<sup>44</sup>Rawannya proses penghitungan suara ini terjadi di tingkat paling bawah digambarkan oleh salah seorang nara sumber dalam kalimat berikut: "... menurut kami, ini yang rawan, karena masih lemahnya aparat di tingkat bawah, kemudian masih dominannya beberapa unsur yang bermain mulai dari hari H sampai perhitungan suara. Ini memang perlu mendapat porsi yang lebih tegas dan jelas dalam aturan pemilu. Pelaksanaan teknis di tingkat bawah ini lemah, sehingga masih bisa dilakukan permainan-permainan oleh pelaksana di tingkat bawah dengan pelaksana di tingkat menengah. Banyak contoh kasus yang dilaporkan oleh Panwaslu terjadi perbedaan antara perhitungan di tingkat PPS dengan tingkat KPPS." Wawancara dengan Hamzah Hapati Hasan, Sekretaris Komisi A – DPRD Sulsei di Makassar, 8 Agustus 2005.

<sup>45</sup>Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, *Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama dan Kedua*, Buku 4, (Makassar: 2004) hal.17.

<sup>46</sup>Lihat tabel 1; juga Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama dan Kedua, Buku 5, yang dikeluarkan Panitia Panwaslu Sulsei, 2005; lihat juga harian Fajar, 20 September 2004.

cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia; dan kemungkinan jumlah pemilih yang kritis juga cukup banyak di samping faktor kesulitan dalam pelaksanaan pemberian suara oleh para pemilih golput ini.

Meskipun terlihat sejumlah angka yang cukup besar dari kalangan golput, namun secara umum, para nara sumber menilai bahwa pelaksanaan pilpres cukup berhasil di wilayah ini, tanpa rintangan dan problematik yang berarti. Sehingga pelaksanaan persetujuan pengesahan hasil rekapitulasi perhitungan suara berjalan dengan lancar, sangat cepat dan tenang tanpa gangguan. Akan tetapi sukses ini pada dasarnya terkait dengan figur Jusuf Kalla sebagai putra daerah. Itu pula yang memudahkan KPUD Sulsel dalam penyelesaian akhir pengesahan suara. Seperti dikatakan Aidir Amin Daud:

“Orang juga tidak mau terlalu berlawanan dengan Jusuf Kalla. Karena itu, kita KPUD di sini tidak susah untuk mendapatkan tanda tangan untuk persetujuan, hanya lima menit untuk meminta tanda tangan untuk mengesahkan hasil pilpres. Ketika rekapitulasi tingkat nasional, kita membacakan satu kali dan langsung Tim Sukses Mega itu menerima. Dari enam propinsi di Sulawesi ini, tiga ditunda: Manado, Kendari, dan Sulteng itu ditunda.”<sup>47</sup>

### ***Pengawasan dan Penegakan Hukum***

Pasal 77 UU Pilpres mengatur empat tugas dari Panwas,<sup>48</sup> yaitu: (1) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pilpres; (2) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pilpres; (3) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu dan; (4) meneruskan temuan dan laporan yang tidak diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka pelaksanaan tugas

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Aidir Amin Daud, SH. MH, Ketua KPUD Sulsel di Makassar, pada 4 Agustus 2005.

<sup>48</sup>“Panwas” atau “Panwaslu” adalah istilah yang digunakan dalam tulisan ini untuk merujuk pengertian pengawasan dalam penyelenggaraan pilpres baik untuk tingkat pusat maupun daerah.

ini, Panwas berhak mendapat informasi dan kemudahan mendapatkan informasi dari penyelenggara pemilu (KPU) dan instansi terkait lainnya.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Panwas daerah seringkali terbentur dalam implementasi pasal 79 ayat (4) UU Pilpres. Menurut ketentuan pasal ini, setiap laporan (lisan/tulisan) harus disampaikan kepada Panwas sesuai wilayah kerjanya, paling lambat tujuh hari sejak terjadinya pelanggaran dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Panwas Sulsel kesulitan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran ini, sebab sering kali kasus-kasus pelanggaran itu dilaporkan kepada Panwas setelah lewat tujuh hari kerja sejak terjadinya pelanggaran. Di sisi lain, jaksa menafsirkan bahwa setelah lewat dari 7 hari berarti kasusnya telah “kadaluarsa”. Ada dua hal yang perlu dibedakan menurut aturan hukum pilpres. Pertama, kasus berdasarkan laporan dari masyarakat, dan kedua, kasus temuan Panwas sendiri. Yang pertama memang diatur batas kadaluarsanya sesudah lewat 7 hari, tetapi yang kedua, temuan Panwas, tidak memiliki batas waktu kadaluarsa. Persoalannya adalah kedua hal ini disamaratakan saja dalam penyelesaian kasusnya oleh penyidik dari Kejaksaan di Sulsel.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Mengenai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran pemilu ini, mantan Ketua Panwas Pilpres Sulsel, Aswanto mengatakan: “Kemaren yang menjadi persoalan itu adalah ada aturan pengawasan bahwa kasus itu paling lambat tujuh hari sesudah kejadian sudah harus dilapor. Kemudian ini ditafsirkan oleh banyak orang: kalau kasus itu baru dilapor lewat dari tujuh hari, maka pihak jaksa penyidik menyatakan itu kadaluarsa.” Selanjutnya dalam kasus temuan Panwas, Aswanto mengatakan: “Nah kalau kasus temuan Panwas itu sebenarnya tidak ada batas kadaluarsa. Artinya, jarak antara kejadian dengan ditemukannya kasus oleh Panwas itu tidak menjadi problem, karena tidak ada batas kadaluarsa. Tetapi kemaren, itu kemudian disamaratakan, pokoknya semua kasus itu apakah berdasarkan laporan dari masyarakat ataukah temuan Panwas, jika telah lewat tujuh hari, dianggap kadaluarsa, pokoknya dilihat tanggalnya. Sehingga pengawasan dalam pilres itu tidak maksimal.” Wawancara dengan Dr. Aswanto di Makassar tanggal 5 Agustus 2005.

Selanjutnya, banyak hal dalam tahapan-tahapan pilpres tidak mampu dikawal dengan baik oleh Panwas di daerah ini. Termasuk juga dalam tahapan kampanye dan pelaksanaan penghitungan suara. Yang terakhir ini muncul, lantaran kurangnya tenaga pengawas termasuk sukarelawan dan saksi-saksi dari partai politik yang mengawasi jalannya proses penhitungan suara di TPS-TPS.

Dalam hal penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran pemilu ini, terdapat beberapa kendala penting, antara lain: (1) kurangnya kemampuan SDM penegak hukum dalam memahami aturan hukum mengenai Pilpres; (2) kurangnya sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan pemilu termasuk pilpres dan pemilu legislatif; (3) kurangnya jumlah SDM dalam pengawasan pada tingkat kabupaten/kota sampai ke desa-desa. Di sisi lain, kurangnya penanganan yang serius bagi para pelanggar pemilu oleh para penegak hukum; dari sisi sifatnya, banyak pelanggaran itu terjadi pada tingkat hukuman administratif<sup>50</sup> atau hukuman yang tidak berat seperti yang mengarah ke hukuman pidana. Di sinilah perlunya lembaga pengawas yang benar-benar independen yang diperkuat oleh koordinasi dengan penegak hukum yang profesional pula.

Dari kenyataan yang terjadi di lapangan, dapatlah disimpulkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pilpres di wilayah penelitian ini masih sangat lemah. Oleh karena itu harus ada usaha untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada Panwas agar pelaksanaan tugasnya bisa lebih efektif, sebagaimana disarankan oleh salah seorang nara sumber berikut:

“Panwaslu harus diberi kewenangan yang lebih luas lagi, karena selama ini, kewenangannya hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya insidental kalau kita lihat di lapangan. Karena sesudah itu muaranya ke pengadilan. Dan keberadaan Panwaslu itu tidak lagi di bawah KPU. Di sini KPUD membawahi Panwaslu. Mestinya Panwaslu diberikan peran yang sama sesuai tugas masing-masing, sehingga terlihat lebih fair dalam

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Dr. Armin Arsyad di Makassar pada 4 Agustus 2005.

menangani masalah. Jadi peran Panwaslu lebih ditingkatkan, dia harus independen dan sejajar dengan KPUD.”<sup>51</sup>

Lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan pilpres ini pada akhirnya dapat melahirkan sengketa hasil pemilu, karena hasil perhitungan suara yang merugikan salah satu pasangan capres/cawapres. Gugatan pasangan Wiranto-Wahid terhadap Mahkamah Konstitusi yang harus disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu dinilai terlalu cepat. Sebab adalah tidak mungkin mengumpulkan bukti yang sempurna dalam tempo sedemikian sempit. Ini pulalah antara lain, yang menyebabkan gugatan pasangan Wiranto-Wahid ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>52</sup> Dengan demikian, sudah dapat dibayangkan bahwa regulasi Pilpres baik di tingkat konstitusi maupun dalam UU Pilpres No. 23 Th 2003 memberi peluang akan munculnya sengketa pilpres di kemudian hari.

## Penutup

Proses kelahiran UU No 23 Tahun 2003 tentang Pilpres ini sejak awal telah dapat dipahami sebagai sebuah proses “politik dagang sapi.” Kelahirannya merupakan hasil kompromi politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh partai-partai besar melalui para anggotanya di DPR. Calon presiden dari partai besar yang akan bertarung merupakan *variable independen* dalam penentuan syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu. Secara prosedural, proses pembuatan UU ini selayang terlihat demokratis, tetapi jika ditinjau lebih jauh lagi dalam proses itu terdapat cacat substansial atas nilai-nilai demokrasi yang terkandung di dalamnya. Hal ini terlihat jelas dari pendirian politik

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Hamzah Hapati Hasan, Sekretaris Komisi A-DPRD Sulsel, 13 Agustus 2005.

<sup>52</sup>Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan atas perkara sengketa hasil pilpres ini didasarkan atas Pasal 68 jo Pasal 85 UU Pilpres, dan Pasal 1 ayat (3) huruf d UU No. 24 Th 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

masing-masing partai besar yang bertarung di DPR mewakili kepentingan politik partai masing-masing, bukan kepentingan rakyat dan kepentingan demokrasi untuk jangka panjang.

Mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden di masa mendatang sebaiknya diperluas dengan memperhatikan tuntutan demokrasi dari rakyat yang berkembang di berbagai daerah. Dengan menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat Indonesia, maka harus dibuka peluang bagi calon independen (misalnya untuk 2-3 pasangan kandidat) untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan presiden/wakil presiden yang demokratis. Para calon presiden dari *non-party list* ini tentu tidak banyak dibebani oleh *deal-deal* politik yang pada akhirnya merugikan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sehingga dengan demikian, diharapkan dapat tampil tokoh nasional yang berbobot yang disukai rakyat kendati mereka tidak memiliki basis partai politik tertentu.

Mengingat konstitusi kita tidak menyebut baik sistem pemerintahan maupun sistem pemilu presiden dan wakil presiden, maka sebaiknya dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang mengatur secara jelas baik sistem pemerintahan (presidensial) maupun sistem pemilu presiden langsung (bertahap). Hal ini perlu ditegaskan, karena dalam seluruh pasal-pasal UUD 1945, tidak satupun yang menyatakan secara jelas bahwa sistem pemerintahan kita menganut sistem presidensial. Karena itu, perubahan terhadap konstitusi mengenai dua hal ini menjadi semakin penting, agar kelak di kemudian hari tidak lagi terdapat multi tafsir terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia dalam era menuju konsolidasi demokrasi ini.

Jarak waktu pelaksanaan pilpres putaran pertama dan kedua seharusnya tidak terlalu lama seperti yang terjadi pada pilpres 2004 yang lalu. Mestinya cukup berjarak antara 2-3 minggu sesudah dilaksanakannya pilpres putaran pertama, jika memang harus dilaksanakan putaran kedua. Justru waktu yang cukup lama diperlukan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan begitu, partai politik yang memenangkan pemilu legislatif dan calon independen (jika mungkin ada) memiliki cukup waktu untuk

mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan pilpres, baik persiapan tentang calon, masalah dana, kampanye, visi-misi dan program dalam kampanye, maupun soal-soal teknis lainnya.

Regulasi mengenai biaya pemilu harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemilu yang efektif, efisien dan demokratis. Efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan kertas suara yang sederhana (tanpa kertas berwarna), sedang percetakan surat suara tersebut dapat dicetak di daerah-daerah provinsi dengan menunjuk KPUD Provinsi sebagai penanggungjawab penyediaan logistik pemilu di daerah masing-masing. Yang terpenting adalah seluruh petunjuk pelaksana (juklak) yang ada mengenai teknis pelaksanaan di daerah harus berdasarkan standarisasi yang dibuat oleh KPU pusat. Sehingga diharapkan distribusi kertas, tinta, kotak suara dan bilik suara tidak terkonsentrasi di KPU pusat, yang menyulitkan distribusi dan pengirimannya ke daerah-daerah seperti yang terjadi selama ini. Dengan demikian, penghematan waktu dan keuangan negara dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden ini dapat diwujudkan semaksimal mungkin.

Kurangnya peran pengawasan disebabkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai peran Panwas pemilu dalam melakukan pengawasan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, terutama yang menyangkut pelanggaran administratif yang diteruskan ke KPU. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pelanggaran administrasi yang dilaporkan Panwas kepada KPU kurang ditanggapi secara serius.



### Bab III

## PARTAI POLITIK DALAM PROSES PEMILIHAN PRESIDEN 2004

*Sri Nuryanti*

*"Democracy does not mean and cannot mean that the people actually rule in any obvious sense of the terms 'people' and 'rule'. Democracy means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them....Now one aspect of this may be expressed by saying that democracy is the rule of politician."* (Schumpeter)<sup>1</sup>

### **Pendahuluan**

Pada tahun 2004, politik Indonesia diwarnai oleh pelaksanaan prosesi demokrasi yang berupa pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden. Pemilu legislatif 2004, sebagaimana Pemilu legislatif tahun 1999, diwarnai dengan munculnya banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Meskipun pada Pemilu legislatif 2004, jumlah partai politik yang menjadi kontestan Pemilu hanya 24 parpol (sedangkan Pemilu 1999 diikuti oleh 48 parpol), Pemilu 2004 sarat makna politik. Dari 24 parpol yang mengikuti Pemilu 2004, sebagian adalah parpol yang mencapai *electoral threshold* pada Pemilu 1999. Sementara, sebagian lagi adalah parpol baru yang berkompetisi meraih suara bersaing dengan parpol lama. Baik parpol baru maupun parpol lama, pada Pemilu legislatif 2004 dianggap masih belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Apalagi pada kenyataannya, parpol pasca Pemilu legislatif seperti

---

<sup>1</sup>Schumpeter.J, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London: Allen and Unwin, pp 284-5 pada David Held, *Models of Democracy*, California: Stanford University Press, 1987,p.166

‘hilang’ dari percaturan politik. Kondisi ini menarik mengingat bahwa parpol masih harus menjalankan perannya pada Pemilu presiden secara langsung yang pertama kalinya diadakan di Indonesia. Hal inilah yang menarik untuk diamati karena berhubungan dengan dinamika demokrasi di Indonesia.

Dinamika demokrasi di Indonesia mungkin dapat secara sederhana dielaborasi dari penjelasan Schumpeter pada awal tulisan ini bahwa demokrasi pada dasarnya adalah kepemimpinan oleh politisi. Berpijak dari hal ini, dapat dikatakan bahwa eksistensi politisi menjadi penting dan sangat berhubungan dengan keberadaan partai politik. Partai politik sebagai wahana yang memunculkan politisi. Oleh sebab itu, partai politik mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan warna politik di Indonesia. Bagian ini akan menganalisis mengenai peran partai politik dalam Pilpres secara langsung 2004.

Perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dalam kaitan demokrasi ini misalnya ditunjukkan dengan periode perubahan dari pemerintahan *authoritarian* ke sistem pemerintahan yang lebih demokratik. Pola perubahan itu telah membawa kepada suatu euforia politik tersendiri dan sekaligus memunculkan banyak ketidak pastian atas arah perkembangan politik Indonesia itu sendiri. Pada satu sisi, ketika reformasi dibuka lebar-lebar, telah memunculkan euforia politik dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk melakukan dan terlibat dalam proses demokrasi, bahkan untuk memilih presidennya sendiri secara langsung.

Namun demikian, proses yang dibawa oleh reformasi juga tidak mudah. Dengan bergulirnya reformasi, bergulir juga banyak ketidak pastian perkembangan politik karena perbedaan pemaknaan reformasi itu sendiri yang berujung pada konflik kepentingan. Munculnya penghargaan yang berlebihan terhadap kelompok etnis maupun kelompok sosial kemasyarakatan lain juga telah menyebabkan munculnya konflik bahkan menginspirasi munculnya gerakan separatis. Dari pemaknaan reformasi seperti ini, masyarakat sepertinya dihadapkan pada suatu konsekuensi reformasi politik yang besar-besaran. Gelombang reformasi ini berusaha

meniadakan keterbatasan politik sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Reformasi politik ini pada dasarnya telah menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam mesin politik yaitu memilih pemimpin negara secara langsung. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya oleh sebagian besar masyarakat. Perubahan pranata politik ini, belum mampu memunculkan 'kedewasaan politik' yang sesungguhnya, sehingga keterlibatan masyarakat pada Pilpres masih sangat artifisial dan sekedar memenuhi formalitas. Masyarakat masih belum seluruhnya mampu memahami bahwa preferensi pilihan mereka pada Pemilu presiden 2004 mengandung konsekuensi politik untuk maksimal lima tahun mendatang.

Dalam kaitannya dengan pencalonan presiden-wakil presiden, hak masyarakat untuk mempunyai calon sendiri sebenarnya tereduksi dengan mekanisme yang harus melalui partai politik. Partai politik ditempatkan sebagai mesin politik yang utama, sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

Lewat UU partai politik menjadi sangat berkuasa. Setiap calon pasangan yang maju harus lewat pintu partai. Padahal sistem rekrutmen politik melalui partai, sangat ditentukan oleh pimpinan partai. Sehingga orang-orang yang di luar partai, yang berkualitas, punya integritas bagus, kemampuan berfikir bagus, sangat susah untuk masuk melalui pintu partai. UU menetapkan satu-satunya cara, harus masuk melalui partai terlebih dahulu. Padahal habitat mereka berbeda. Belum lagi biaya yang mesti disetor untuk bisa diusung. Partai di sini menjadi tempat orang untuk 'mencari makan'. Sehingga ada resitensi juga dari calon yang berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai capres melalui pintu parpol. Kalangan intelektual yang kritis dan berkualitas bagus menjadi tidak begitu suka masuk ke partai. Masuk ke partai bagi mereka prosesnya tampak tidak lebih seperti orang mencari atau melamar pekerjaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan wartawan Harian Kupang Pos, 23 Juli 2005 di Kupang.

Dari pemaparan di atas sepertinya menegaskan pendapat bahwa partai masih bersifat elitis sebagaimana yang digaris bawah oleh pendapat salah satu narasumber dalam wawancara berikut:

Sampai sekarang sebetulnya ... bahwa oligarki partai itu tinggi sekali. Jadi yang berkuasa kan partai politik. Kalau dulu partai politik tidak punya kekuasaan, sekarang mereka pegang kekuasaan. Meskipun kekuatan yang lain masih ya, seperti... birokrasi...jadi dominasi partai itu relatif... Nah, oleh karena itu di DPR itu mereka tidak mau menerima calon perorangan. ---orang-orang partai di DPR itu bersikukuh seperti Undang-undang kepresidenan...pemilihan presiden...undang-undang presiden ya...calon itu hanya dari partai. Nah, sebetulnya kalau kita merunut pada UU tahun 55, dalam pemilu 55 itu ada calon individu dan calon institusional. Calon institusional itu dari partai politik, individu dari individu.<sup>3</sup>

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa partai memegang peran penting dalam salah satu proses pilpres. Peran sebagai 'pintu utama' pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden ini telah membuat partai politik sebagai ajang pertarungan politik yang menentukan.

### **Peran Partai Politik Dalam Pembuatan Regulasi**

Reformasi telah membawa Indonesia kearah perubahan politik yang drastis, yang pada kerangka ini berpengaruh pada peran dan fungsi partai politik dalam kehidupan demokrasi. Dalam kaitannya dengan Pilpres, perubahan drastis ini menyangkut hak masyarakat untuk secara langsung memilih pasangan presiden dan wakil presidennya. Bukan itu saja yang digulirkan oleh reformasi. Reformasi juga menguatkan munculnya praktika politik yang dianggap sebagai bagian dari perubahan yang harus ditempuh Indonesia menuju negara

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan wakil ketua KPU Jatim, 21 Juli 2005 di Surabaya

demokrasi yang mensyaratkan terpenuhinya 4 indeks dasar demokrasi (*core index*) yaitu:<sup>4</sup>

1. Adanya sistem pemilihan yang jujur (*Free and Fair Elections*)
2. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsive (*open, accountable and responsive government*)<sup>5</sup>
3. Adanya promosi dan perlindungan HAM yang berkelanjutan, terutama hak-hal sipil dan politik
4. Adanya masyarakat demokratis dalam bentuk civil society maupun lembaga-lembaga politik yang merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri (*a society of self confident citizens*)

Dalam upaya pemenuhan 4 *core index* demokrasi tersebut di atas, reformasi politik Indonesia --termasuk reformasi dalam Pilpres-wakil presiden-- diupayakan mengarah kepada kehidupan demokratis yang melibatkan parpol. Pola ini semakin menegaskan bahwa parpol seharusnya dapat menjalankan fungsinya.

Tahapan selanjutnya setelah 4 *core index* itu terpenuhi adalah terwujudnya agenda besar demokrasi yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Terciptanya kinerja pemerintahan yang demokratis
- 2) Institusionalisasi politik dan penegakan hukum
- 3) Restrukturisasi hubungan sipil militer

---

<sup>4</sup>Lihat Kata Pengantar Muladi, dalam Makmur Makka (ed) , *Demokratisasi Tak Boleh Henti*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal.ix

<sup>5</sup>Dalam buku lain juga sering disebut sebagai “upaya untuk mewujudkan Good governance”, seperti dalam buku Tataq Chidmad, SH, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Widyatama, hal.3

<sup>6</sup>Pemikiran Larry Diamond dalam *Developing Democracy*, yang dikutip oleh Syamsuddin Haris, dalam makalah Seminar Refleksi Akhir Tahun 2004, *Presiden Pilihan Rakyat, So What?*, Kedepuitan Bidang IPSK LIPI, 2005, hal.33

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan suatu sinergi dari berbagai macam komponen, termasuk didalamnya adalah partai politik.

Pada awalnya, dasar pemikiran pemberian hak kepada rakyat untuk memilih presidennya secara langsung adalah dengan mempertimbangkan kegagalan masa lalu dimana masyarakat tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Presiden Indonesia terdahulu yang dipilih oleh DPR-MPR dianggap sebagai salah satu bagian dari kegagalan demokrasi. Dalam semangat reformasi ini, masyarakat diberikan kewenangan yang lebih besar untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden meskipun harus melalui partai politik.

Kalimat Marc Plattner menggambarkan logika berpikir ini:<sup>7</sup>

... the overall trend, nonetheless, is for more and more countries to become and remain democratic. Moreover, the historical record shows that countries that have had an earlier experience with democracy that failed are more likely to succeed in a subsequent attempt than countries with no previous democratic experience. So even if democracy breaks down, it can leave a legacy of hope for the future.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa negara yang sudah mempunyai pengalaman dalam mewujudkan demokrasi meskipun awalnya gagal, cenderung sukses mewujudkan demokrasi pada upaya selanjutnya.

Meskipun pemerintah melakukan perubahan sistem Pilpres, banyak yang menganggap bahwa agenda reformasi menuju demokrasi tidak jelas arahnya. Banyak yang bersembunyi di balik argumen bahwa pemerintah mempunyai 'pekerjaan rumah' terlalu banyak dalam membenahan struktur maupun praktik ekonomi dan politik yang diarahkan untuk tidak lagi mengalami kebocoran implementasi. Kutipan dibawah ini menunjukkan dinamika di atas: *"At the present time, the causes of these uncertainties are not perceived to be the absence of a 'strong man' but of the prevalence of*

---

<sup>7</sup>Lihat <http://www.policyreview.org>

*culture of self-enrichment, and of rivalry power and resources, among the old parties*”<sup>8</sup>

Dalam kutipan di atas, partai politik dianggap menentukan warna politik di Indonesia khususnya ketika dihubungkan dengan Pilpres langsung. Hal itu diawali dari perdebatan yang memunculkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan Undang-Undang Politik baru yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pada itu, posisi partai politik menjadi krusial mengingat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden harus melalui mekanisme partai politik. Hal ini yang dianggap mereduksi hak masyarakat karena masyarakat tidak begitu saja bebas menentukan siapa yang bakal dicalonkan sebagai pasangan presiden dan wakil presidennya tanpa harus melalui mekanisme pencalonan oleh partai politik. Masyarakat tentunya dapat menduga bahwa pola ini akan sarat dengan permainan politik internal partai sebelum pasangan calon secara resmi diumumkan sebagai calon oleh partai politik itu.

UU Pilpres tersebut memang tidak memberi ruang terhadap adanya calon-calon independen. Sebagian rakyat ada yang menilai, calon-calon yang diusung partai itu, tidak diminati oleh mereka. Peluang untuk munculnya calon lain, tidak ada oleh undang-undang. Saya berkesimpulan bahwa UU Pilpres itu sangat politis dan sangat melindungi kepentingan partai mayoritas.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, berkembang dua kategori partai politik dalam percaturan amandemen undang-undang politik yaitu partai politik yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dan partai politik yang tidak berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk partai-partai yang mencapai *electoral threshold*, dari segi konstitusi dimungkinkan untuk mengusung nama calon dari partainya.

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Wawancara dengan anggota DPRD Provinsi NTT, Anggota Komisi A Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan Keamanan dan Tata Pemerintahan, 21 Juli 2005 di Kupang.

Sementara itu, partai politik yang tidak memenuhi syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden dapat melakukan:

- a. Bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat 1 pasal 9 Undang-Undang Politik
- b. Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ayat 1 tersebut dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai yang bergabung.
- c. Bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ayat 1 tersebut dengan menggunakan nama dan tanda gambar yang baru

Dari hal di atas, jelas terlihat bahwa partai politik mempunyai peran yang penting dalam memuluskan jalannya pasangan presiden dan wakil presiden ke istana. Pola sebagaimana yang diatur dalam undang-undang politik di atas, menunjukkan pola penggabungan sebagai pola alternatif khususnya bagi partai-partai kecil yang tidak dapat memenuhi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dalam kaitannya dengan penataan partai politik seperti diatas, Brockington mengemukakan bahwa ada paradoks atas sistem pemilu proporsional. Dalam penjelasannya sistem perwakilan proporsional akan memperbesar derajat partisipasi, namun sistem kepartaian yang besar justru akan mengurangi derajat partisipasi politik. Dalam pandangan selanjutnya, Brockington mengutip teori yang dikemukakan oleh Blais & Dobrzynska (1998) yang mengatakan bahwa: "*Large party systems under proportional representative virtually guarantee that some form of coalition government will result. Large party system may confuse voters with a myriad of choices resulting in costlier information and alternation in the heuristic value of the partisan cue*"<sup>10</sup>

Sementara itu, sistem Pilpres langsung yang dibangun adalah melalui mekanisme dua putaran. Pemenang akan ditentukan oleh perolehan prosentase suara yaitu minimal 50% plus. Bila dalam

---

<sup>10</sup>Lihat David Brockington, "The Paradox of Proportional Representation", dalam *Political Studies* 2004, vol 52, page 470

putaran pertama diperoleh secara langsung prosentase itu, maka hanya memerlukan satu putaran. Putaran kedua hanya dilakukan bila tidak ada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mencapai perolehan suaranya melebihi 50%. Mengingat kompleksnya struktur konstituen di Indonesia, maka untuk mencapai prosentase mutlak itu tidak mudah. Oleh karena itu, bagi partai yang cerdas, partai-partai politik itu akan menggalang kekuatan massa pendukung dari partai-partai lain yang pendukungnya solid dan banyak. Pola kerja keras yang harus dilakukan partai untuk mengusung calonnya itu tidak lepas dari skeptisisme masyarakat mengenai imej buruk 'orang partai' sebagaimana yang tergambarkan oleh kutipan wawancara berikut:

Orang-orang partai saat ini bisa dinilai bukan dari kebanyakan orang yang sungguh-sungguh berniat, bekerja, menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat melalui lembaga dewan. Dalam pencalonan Pilpres, partai sangat berkuasa dan menentukan siapa yang akan dimajukan. Orang yang terdekat dan bernuansa KKN-lah yang akan dimajukan. Ada partai yang menetapkan paket calon untuk bisa diusung dengan nilai berjutaan.<sup>11</sup>

Peran parpol dalam pilpres sebenarnya muncul dari perdebatan awal bahkan ketika masih merumuskan konsep Pilpres yang paling tepat. Dalam perdebatan mengenai persyaratan sebagai presiden dan wakil presiden misalnya, banyak manuver politik yang ditempuh oleh partai politik. Hal pertama yang menghangat dalam diskusi-diskusi adalah mengenai *electoral threshold* yang hendak diterapkan dalam pemilihan langsung presiden ini.

Partai Golkar yang sangat optimis menang dalam Pemilu presiden ini mengusulkan 35%. Sementara itu pemerintah melalui Depdagri mengusulkan 20% dan yang lainnya mengusulkan 3%, yaitu berpedoman pada *electoral threshold* Pemilu. Perdebatan mengenai *electoral threshold* ini merupakan suatu hal yang melelahkan. Sebelum diakomodir melalui sistem dua putaran, konsep

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan wartawan Kupang Pos, 23 Juli 2005 di Kupang.

*electoral threshold* ini mendominasi percaturan. Dalam salah satu pertemuan, Prof. Dr. Riswandha Imawan mengomentari bahwa usulan partai Golkar dengan 35% *electoral threshold* sangat tidak mempertimbangkan fragmentasi politik di masyarakat. 35% sebagai *electoral threshold* juga dianggap tidak mempertimbangkan unsur *deadlock* yang bisa saja terjadi bila hasil penghitungan suara nantinya tidak mencapai 35%. Sementara itu, 3% juga terlalu minim, sehingga perhelatan Pilpres akan menyita waktu sangat lama. Maka itu, pemerintah melalui Depdagri memutuskan untuk mengambil angka 20% sebagai langkah aman dalam menentukan *electoral threshold*.<sup>12</sup>

Sedangkan, hal lain yang turut menyita perhatian adalah perdebatan soal syarat-syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. Yang berkembang adalah adanya syarat-syarat pendidikan minimal S1, larangan bagi terdakwa dan kesehatan jasmani rohani. Syarat di atas menyita perdebatan seperti misalnya apakah perlu menerapkan syarat bahwa calon presiden Indonesia mempunyai pendidikan minimal sarjana lengkap (S1). Dalam hal pendidikan ini, seorang narasumber mengatakan bahwa:

Kalau dilihat persyaratan antara menjadi presiden dan menjadi dewan, sebenarnya lebih berat menjadi dewan. Setidaknya minimal menjadi anggota dewan harus mempunyai pendidikan minimal SMA. Nah, kalau untuk menjadi presiden tidak dicantumkan syarat pendidikan terendah, itu menjadi pertanyaan masyarakat. Kalau menjadi dewan minimal sekolah menengah, ya sebaiknya untuk menjadi presiden mempunyai pendidikan lebih tinggi. Ini bukan apa-apa. Kita harus melihat bahwa pekerjaan seorang presiden itu sangat berat. Kalau hanya dengan pendidikan sekolah menengah, apakah sanggup menghadapi tantangan? Kalau cerita Nagabonar memang pintar berstrategi, tetapi apakah lembaga kepresidenan akan dilihat

---

<sup>12</sup>Dalam suatu perbincangan informal, Riswandha Imawan mengemukakan perdebatan mengenai *electoral threshold* ini sebagai upaya untuk menghalangi naiknya partai-partai kecil memenangkan Pilpres. Wawancara di Yogyakarta, 2005

dengan sederhana seperti ini? Jadi, menurut saya, soal tingkat pendidikan itu perlu.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebenarnya Partai Golkar lah yang mengajukan persyaratan mengenai pendidikan ini. Usulan ini mendapat dukungan dari fraksi Reformasi dan fraksi Bulan Bintang. Namun demikian, fraksi PDI Perjuangan menentang keras usulan ini. Menurut PDI Perjuangan, ukuran kemampuan seseorang bukan terletak pada tingkat pendidikan seseorang, tapi kemampuan individu untuk sukses.

Persyaratan lain yang diajukan dalam persyaratan calon adalah berhubungan dengan status hukum seorang calon presiden. Rata-rata fraksi menyetujui usulan itu. Hanya Partai Golkar yang menentang usulan persyaratan ini, dengan alasan bahwa sebaiknya sebagai negara hukum, kita menjunjung penerapan asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu, sebelum status seseorang diketahui mempunyai status terdakwa yang keputusannya berlaku mengikat, maka orang tersebut masih berhak mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Mengenai persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, persyaratan itu didukung semua fraksi kecuali dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Dalam pandangan mereka, persyaratan mengenai kesehatan jasmani dan rohani berarti diskriminatif, dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia secara sama.

Melihat gelagat perdebatan mengenai persyaratan menjadi calon presiden ini, dapat diterka bahwa munculnya persyaratan itu tidak lebih sebagai upaya administratif untuk saling menjegal antara calon dari partai satu oleh partai lainnya. Yang mengerucut pada masa awal penentuan persyaratan calon presiden ini adalah rumor bakal dicalonkannya Megawati, Akbar Tandjung dan Gus Dur. Megawati akan dihadang persyaratan menyangkut klausul "minimal berpendidikan S1" sebab meskipun Megawati pernah menjadi mahasiswa tetapi Megawati tidak menamatkan pendidikannya sehingga Megawati tidak mendapat gelar sarjana penuh.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan pejabat di DPRD Sumut, 2005

Sedangkan klausul persyaratan “tidak dalam status tersangka” adalah untuk menjegal majunya Akbar Tandjung yang pada saat itu status hukumnya masih belum jelas dalam kasus dana non budgeter. Pada awalnya, memang yang dielus sebagai bakal calon dari partai Golkar adalah Akbar Tandjung, yang juga sebagai ketua DPP Partai Golkar. Selain dengan pertimbangan bahwa Akbar Tandjung adalah ‘pemain lama’ dalam politik, Akbar Tandjung juga dianggap mampu membawa Partai Golkar kepada kemajuan.

Sementara persyaratan “kesehatan jasmani dan rohani” adalah untuk menahan langkah naiknya Gus Dur ke bursa pencalonan. Dalam hal ini Gus Dur dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan. Jadi, persyaratan ini alih-alih untuk menjaring presiden yang mempunyai kualitas bagus untuk kepentingan demokrasi Indonesia, ternyata penuh intrik politik untuk kepentingan menjegal lawan politiknya.

Dalam perdebatan di Dewan, peran yang dijalankan partai politik dalam memobilisasi kepentingan dan mobilisasi massa selama Pilpres dianggap akan memunculkan friksi yang kuat di masyarakat. Koalisi antara partai politik dengan massa pemilih tidak akan membahayakan demokrasi. Namun apabila partai politik sebagai kekuatan politik menggandeng tentara sebagai *partnernya*, maka pola demokratisasi akan menuai kritik. Oleh sebab itu, partai politik seharusnya belajar mengatur partainya.

Dalam perkembangan berikutnya, partai politik memang harus dapat menggalang dukungan massa melalui mesu dan artikulasi kepentingan masyarakat. Hal ini untuk memunculkan basis dukungan yang mengakar kepada masyarakat. Sebaliknya, jika partai politik dikucilkan oleh masyarakat, maka partai politik tidak dapat menggunakan pengaruhnya untuk dapat melaksanakan fungsi *checks and balances* bagi pelaksanaan kepastian hukum dan konstitusi. Dengan demikian, merupakan suatu tugas dari partai politik untuk turut menggalang dukungan masyarakat kepadanya sehingga institusionalisasi demokrasi dapat tercapai.

Melihat kondisi majemuk Indonesia, maka perlu dicari suatu sistem yang dapat mengakomodasikan kepentingan yang muncul di

masyarakat. Banyak hal yang menjadikan kondisi kepartaian di Indonesia mengalami dinamika yang sarat dengan kronika. Polarisasi ideologi di awal terbentuknya partai politik sampai munculnya politik aliran di dalam partai politik di Indonesia, telah membuat warna tersendiri bagi perkembangan sistem kepartaian di Indonesia. Perdebatan yang mengerucut di dewan banyak yang mengatakan sebagai perdebatan 'dagang sapi', karena esensi perdebatannya bukan mempersoalkan konsekuensi atas kebijakan tetapi lebih kepada pola tawar menawar 'harga politik' yang harus dibayar sebagaimana dalam perdagangan pada umumnya.

### **Proses Pencalonan dan Pola Koalisi**

Dalam proses pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, tampaknya menjadi hal yang rumit. Banyak hitungan-hitungan politik yang harus dicermati sebelum memutuskan melangkah. Oleh karena itu, dalam proses pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden ini akan memunculkan banyak sekali nama. Dari calon yang berlatar belakang pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai tokoh yang mengklaim 'berdarah biru' kepresidenan. Banyak tokoh dielus dengan promosi sebagai tokoh yang mampu mengentaskan Indonesia dari keterpurukan krisis. Banyak tokoh yang bermunculan yang mewarnai bursa calon presiden. Dari yang mengaku mempunyai harta karun yang sanggup mengentaskan Indonesia dari krisis sampai tokoh yang secara supra natural dianggap sebagai 'satrio piningit'/putra mahkota yang akan muncul menjadi penguasa. Identifikasi atas kepantasan sebagai calon presiden menjadi sumir dengan banyaknya ukuran yang sifatnya fisik. Sebagian masyarakat memang mulai menyinggung persoalan yang dirasa urgen dalam pandangan mereka, seperti penegakan hukum, tidak korupsi, dan mampu memulihkan Indonesia dari krisis. Gambaran-gambaran itu yang akhirnya ditangkap oleh partai politik yang dipakai untuk menyeleksi secara internal atas calon yang akan di dukung oleh partainya.

Salah satu cara yang dipakai untuk menyeleksi kandidat presiden ini dilakukan dengan konvensi. Partai Golkar misalnya,

menggunakan cara konvensi untuk menjaring calon yang secara resmi akan didukung oleh partainya. DPP Partai Golkar melempar ide konvensi untuk menjaring secara terbuka nama yang bakal diunggulkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Konvensi yang digelar Partai Golkar bukan pekerjaan mudah karena Partai Golkar masih dalam proses berjuang memulihkan citranya sebagai partainya penguasa (*'the ruller's party'*) menuju ke arah partai yang berkuasa (*'the rulling party'*). Sementara itu, kasus yang melibatkan Akbar Tandjung yang pada saat itu ketua DPP Partai Golkar menambah sulit upaya untuk merubah Partai Golkar ke paradigma baru yang berbeda dari Golkar semasa Orde Baru.

Dalam kondisi seperti ini, Partai Golkar mengadakan konvensi, yang pada dasarnya merupakan seleksi internal partai yang dilakukan secara terbuka, dengan puncak acara konvensinya adalah pada tanggal 5 Februari 2004. Dalam pengaturan konvensi, ditetapkan bahwa yang berhasil merebut setengah suara plus satu dari sejumlah 534 suara dari DPP, DPD I, DPD II, ormas-ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar. Pola ini merupakan pola penjaringan baru yang dianggap lebih fair dan terbuka.

Menurut Hajriyanto Y.Thohari, konvensi seperti yang dilakukan partai Golkar ini disebut sebagai pola tidak biasa (inkonvensional). Dengan model konvensi ini, partai Golkar telah merubah pola lama dengan model 'kebulatan tekad' ke pola baru yang dianggap jauh lebih demokratis.<sup>14</sup>

Bursa konvensi yang dilakukan oleh Partai Golkar diwarnai dengan munculnya banyak nama termasuk Akbar Tandjung. Kepesertaan Akbar Tandjung dalam konvensi ini mengandung dilema. Selain karena posisi Akbar Tandjung secara hukum yang berkaitan dengan kasus Bulog-gate masih jelas di satu sisi, disisi lain Akbar Tandjung dianggap berjasa mampu membesarkan Partai Golkar dan bangkit dari keterpurukannya. Sebagai politisi handal, Akbar Tandjung 'bermain cantik'. Banyak yang mengatakan bahwa

---

<sup>14</sup>Lihat Hariyanto Y.Thohari, *Pasca Konversi kini Konvensi: Esei-esei Politik tentang Golkar*, Karanganyar: The Hajriyanto Center, 2004, hal. 12

Partai Golkar mengambil langkah yang berani dengan melakukan seleksi secara terbuka melalui sistem konvensi ini. Prediksi awal, banyak yang memperkirakan bahwa posisi Akbar Tandjung yang ketua DPP Golkar akan dengan mudah mendapatkan suara dukungan dan memenangkan konvensi. Nama yang muncul sebagai kandidat dalam bursa konvensi Partai Golkar ada beberapa nama yang diusulkan sebagai calon presiden dari partai Golkar yaitu Akbar Tandjung, Wiranto, Prabowo Subiyanto, Surya Paloh, Aburizal Bakri dan Jusuf Kalla (meskipun pada akhirnya Jusuf Kalla mundur dari konvensi Partai Golkar). Pada prosesnya, Wiranto unggul dengan memenangkan suara 315 suara sementara Akbar Tandjung yang diprediksikan akan memenangkan konvensi hanya berhasil mengumpulkan 227 suara. Sebagai hasilnya, konvensi ini telah memunculkan Wiranto sebagai nama yang memenangkan konvensi. Dengan demikian Wiranto secara resmi di calonkan oleh Partai Golkar.

Secara internal, partai politik dapat menerapkan pola penyeleksian internal seperti yang dilakukan oleh Partai Golkar ini. Beberapa partai mengambil keputusan mengenai nama yang akan diusulkan menjadi presiden dengan melalui berbagai cara: musyawarah nasional atau pencalonan secara tertutup. Untuk partai-partai yang mencapai *electoral threshold*, yang secara konstitusi diperbolehkan mengajukan nama calon presiden, pola konvensi seperti ini dapat dilakukan sehingga langsung didapat nama calon.

Namun demikian, untuk partai kecil yang secara undang-undang tidak diperbolehkan mengajukan nama calon presiden, mereka harus menempuh jalan alternatif yaitu dengan menggabungkan diri dengan partai lain. Dari hal ini, tentunya calon yang akan diusulkan oleh anggota partai yang bergabung adalah murni dari keputusan partai gabungan itu. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah esensi menggabungkan diri dengan partai lain ini sama esensinya dengan melakukan koalisi?

Dari logika sederhana, koalisi hanya akan dimungkinkan apabila ada persamaan-persamaan yang mungkin bila digabungkan saling mendukung antara partai satu dengan yang lain, seperti

misalnya kesamaan ideologi partai, kesamaan cita-cita dan kesamaan platform. Koalisi model ini akan menghasilkan koalisi tetap yang dimungkinkan mengarah kepada pembentukan partai baru hasil fusi antara beberapa partai lama yang berkoalisi. Namun bila antara partai satu dengan partai lainnya tidak ditemui unsur persamaan, maka penggabungan partai hanya bersifat sementara dan sangat pragmatis untuk kepentingan sesaat. Koalisi model ini rentan konflik kepentingan (*vested interest*) sehingga bila kepentingan dasarnya sudah tercapai, partai yang berkoalisi ini tidak mengarah kepada pembentukan partai baru, tetapi kembali ke bentuk semula.

Dari teori koalisi oleh Fabrizio Cargmignani, koalisi terjadi karena kesamaan platform, kesamaan keinginan maupun karena kesamaan ideologi. Karena itu, kesepakatan yang dibuat oleh partai-partai yang berkoalisi biasanya menghasilkan *coalition contract* (kesepakatan tertulis mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh masing-masing partai yang berkoalisi).<sup>15</sup>

Mengingat bahwa untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan presiden tidak mudah, maka yang ditempuh bahkan dalam pencalonan oleh partai politik adalah mencari koalisi dengan partai-partai yang dianggap mempunyai ide yang sama ataupun dengan partai yang mempunyai pertimbangan tertentu seperti misalnya persamaan ideologi. Namun demikian, dalam sistem suatu negara pembentukan koalisi kadang tidak semudah itu, artinya pembentukan koalisi bisa jadi bukan karena persamaan ideologi atau persamaan platform. Pemilihan untuk berkoalisi bisa jadi didorong oleh keinginan pragmatis yang hanya efektif sampai tujuan koalisi tercapai. Karena pertimbangan pragmatis itulah menurut Seidmann dan Winter, pemilihan berkoalisi bisa bersifat gradual atau bertahap termasuk diantaranya adalah mengenai preferensi mengapa seorang calon X memilih berpasangan dengan calon Y. Oleh karena itulah

---

<sup>15</sup>Lihat penjelasan Fabrizio Cargmignani, "Cabinet Formation in Coalition System", dalam *Scottish Journal of Political Economy*, Vol.48 No.3 Agustus 2001, page.318

barangkali proses berkoalisi antar pasangan capres dan cawapres terjadi.<sup>16</sup>

Karena model pemilihan presiden yang dilaksanakan dengan melalui sistem dua putaran, maka sejak awal partai-partai yang cerdas segera mengelompokkan diri dan menyusun barisan agar bisa menghimpun lebih dari separuh kekuatan bangsa sehingga pada putaran pertama dapat meloloskan kandidatnya dan mengantarkannya memasuki putaran ke dua. Diharapkan pada proses itu, kandidatnya memenangkan suara terbanyak pada putaran ke dua. Pada sistem dua putaran ini, secara otomatis pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berada pada urutan lebih dari dua hanya akan menjadi 'pelengkap penderita' saja.<sup>17</sup>

Persaingan yang harus ditempuh oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk sampai lolos putaran pertama sangat berat, khususnya untuk membangun imej di masyarakat bahwa mereka lah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang paling tepat untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Perjuangan memunculkan imej ini lah yang mendorong masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden mempromosikan 'kelebihan-kelebihan' yang mereka punyai. Kelebihan-kelebihan mereka ini dipakai sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat yang diharapkan pada waktu pelaksanaan pemilihan, masyarakat ini memilih mereka. Dalam upaya ini, tak pelak lagi melibatkan berbagai macam strategi dan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Meskipun demikian, pada dasarnya strategi dan jumlah uang yang banyak itu, tidak menjadi jaminan bagi mereka untuk lolos pada putaran pertama.

Dari sisi pencalonan, pada pemilihan presiden 2004 ini telah memunculkan lima pasangan calon yang berlaga pada putaran pertama yaitu:

---

<sup>16</sup>Lihat penjelasan Daniel J. Seidmann dan Eyal Winter, "A theory of Gradual Coalition Formation", dalam *Review of Economic Studies* 1998, 68.793815

<sup>17</sup>Lihat . H. Suroto dan Doddy Rudianto, *Partai-Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Mandala Pratama, 2003, hal.187

- 1) Wiranto dan Salahuddin Wahid
- 2) Megawati Sukarno Putri dan Hasyim Muzadi
- 3) Amien Rais dan Siswono Yudohusodo
- 4) Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla
- 5) Hamzah Haz dan Agum Gumelar

Menjelang pencalonan resmi, masing-masing pasangan ternyata diterpa isu yang tidak enak yaitu antara lain sehubungan dengan isu penolakan presiden perempuan, isu penolakan presiden dari militer, pemboikotan 'golput/golongan putih' dan masih banyak lagi. Untuk mengantisipasi isu-isu tidak sedap dan 'merapatkan barisan' untuk memenangkan 'hati rakyat' menjelang pencalonan itulah, maka pola koalisi dijalankan dengan ketat dan dengan pertimbangan matang.

Bila koalisi secara sederhana dimengerti sebagai penggabungan antara dua atau lebih unsur yang berbeda, maka pencalonan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama dapat dikategorikan pada pola ini, meskipun hanya sekedar untuk mengatakan bahwa masing-masing calon mempunyai pertimbangan tertentu yang membuat mereka memutuskan untuk saling menjadi partner yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, pemaparan berikut ini adalah untuk menggambarkan alasan dibalik tindakan bahwa "calon dari partai x" menggandeng "calon dari partai y". Dalam kerangka itu, maka konstelasi politik pencalonan presiden yang muncul pada putaran pertama dapat dengan sederhana dibaca sebagai berikut:

#### 1) Wiranto-Salahuddin Wahid

Pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid membentuk pola koalisi dengan pertimbangan bahwa sosok Wiranto dianggap mampu memenuhi harapan para pendamba terjaminnya keamanan. Sedangkan sosok Salahuddin Wahid (Gus Sholah) adalah tokoh PKB yang juga adik mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Restu Gus Dur kepada Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sering dianggap kontroversial oleh PKB karena PKB menjalin kedekatan

dengan Partai Golkar. Namun demikian, restu Gus Dur kepada Salahuddin Wahid (Gus Sholah) telah membuat pencalonan Salahuddin Wahid ke RI 2 (wakil Presiden) lancar-lancar saja.

Pertimbangan lain yang membuat pasangan ini optimis menang adalah adanya keyakinan bahwa keduanya didukung oleh organisasi besar, Wiranto didukung Partai Golkar sementara Salahuddin Wahid didukung PKB. Salahuddin Wahid juga mendapatkan legitimasi dukungan dari NU secara kultural karena posisi Gus Dur di NU. Dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, dukungan yang banyak dari anggota partai besar itu dianggap sangat signifikan untuk mengantarkan ke kursi kepresidenan.

Pertimbangan Wiranto memilih Solahuddin Wahid. Dia berpikir hanya 40 juta itu orang NU, dan Hasyim Muzadi sudah mengambil NU juga. Jadi tidak terpikirkan faktor Jawa-luar Jawa ini kecuali SBY-YK.<sup>18</sup>

Ada yang mengatakan bahwa lolosnya Wiranto dalam konvensi Partai Golkar yang akhirnya memunculkan namanya sebagai kandidat dari Partai Golkar hasil konvensi adalah suatu 'blunder'/halangan untuk Partai Golkar memenangkan pemilu presiden. Hal ini dikaitkan dengan citra Wiranto yang tidak sama sekali 'bersih' dari peristiwa di Timor Timur.

Bagaimana pun juga wajah Wiranto itu masih terlalu erat dengan peristiwa 1998 di Jakarta. Peristiwa 1999 di Dili. Kasus-kasus HAM. Wiranto mungkin naik pada saat yang barangkali tidak pas. Menurut saya, secara pribadi Wiranto mungkin baik. Visi dia waktu itu, hanya menjabat satu periode saja. Wiranto cukup satu periode. Bagaimana pun juga, orang masih terlalu ingat dan belum lupa soal Tim-tim terkait dengan Wiranto. Peristiwa 1998, saat Wiranto masih sangat berkuasa. Sehingga boleh dibilang, ada yang berpandangan, dia tentara yang belum bersih dari lumuran darah korban-korban pelanggaran HAM. Itu yang juga disuarakan saat pilpres di NTT. Semua orang tahu dan kita di NTT sangat dekat dengan Timor-timur. Masyarakat memperoleh informasi juga seperti itu. Wiranto

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Pengajar Fisip Unhas di Makassar, 4 Agustus 2005

memperoleh panen *black-campaign* dan harus bekerja keras. Orang juga ribut soal latar belakang militernya. Militer kembali ingin berkuasa. Mau dibawa kemana kita. Ironi seperti jaman Soeharto lagi.<sup>19</sup>

Menyadari hal itu, Akbar Tandjung selaku ketua umum Partai Golkar menghimbau agar seluruh anggota dan simpatisan Partai Golkar tetap mendukung Wiranto, sebagai calon presiden yang resmi dicalonkan oleh Partai Golkar. Akbar Tandjung juga mengatakan bahwa kemenangan Wiranto dalam konvensi sekaligus menunjukkan bahwa konvensi bukan hal yang akal-akalan saja.<sup>20</sup>

## 2) Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi

Megawati dan Hasyim Muzadi mempunyai alasan kuat untuk berkoalisi. Megawati merasa bahwa dukungan dari PDI Perjuangan dan bahkan seluruh rakyat Indonesia akan jatuh ke tangannya. Megawati percaya bahwa masyarakat akan menghargai prestasi selama Megawati menjadi presiden RI menggantikan Gus Dur. Sementara itu, Hasyim Muzadi secara struktural adalah ketua PBNU yang dianggap mampu membawa kaum Nahdliyin mengarahkan pilihannya ke pasangan ini.

Alasan-alasan yang membangun koalisi itu, misalnya Megawati memilih Hasim Muzadi, karena Megawati merasa mendapat dukungan Jawa-luara Jawa yang signifikan. Hasim Muzadi itu memiliki anggota 40 juta (NU dan Jawa). Megawati lupa, bahwa NU itu mayoritas di Jawa dan Mega juga hanya didukung mayoritas di Jawa. Di situ luputnya Megawati.<sup>21</sup>

Dalam menyokong keputusannya untuk berpartner dengan tokoh NU ini, Mega membentuk Mega center yang diharapkan akan mendongkrak suara kepadanya. Pasangan ini sebenarnya mempunyai

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Wartawan Kupang Pos di Kupang, 23 Juli 2005

<sup>20</sup>Tempo Interaktif, 20 April 2004

<sup>21</sup>Wawancara dengan Pengajar Fisip Unhas di Makassar, 4 Agustus 2005

kelebihan yaitu pada posisi Mega yang menjabat sebagai presiden sehingga seolah-olah masyarakat mempunyai 'cermin' atas apa yang hendak dilakukan oleh pasangan calon presiden-wakil presiden ini bilamana mereka terpilih.

Sayangnya, tidak mampu mengemas posisi menguntungkan itu sebagai suatu potensi kekuatan. Mungkin ya boleh dibilang *over confident* juga ya untuk masa itu, karena istilahnya biasanya *incumbent* itu sangat diuntungkan tanpa melihat lawannya ya, apalagi kalau lawannya tidak seimbang. Seperti di Surabaya ini kan *incumbent* diuntungkan dan menang karena lawannya memang tidak seimbang. Bukan tidak seimbang pendidikannya dengan gelar doktor segala, tapi artinya di mata masyarakat, popularitas, dan sebagainya. Nah pada waktu bu Mega itu seolah-olah sebagai *incumbent* itu sangat *confident*, kemudian juga tidak memperhitungkan bahwa lawan-lawannya ini mempunyai pesona yang lebih besar.<sup>22</sup>

### 3) Amien Rais-Siswono Yudohusodo

Pilihan Amien Rais-Siswono Yudohusodo berkoalisi mungkin dengan pertimbangan bahwa Amien Rais adalah tokoh reformasi yang handal, yang dianggap akan mampu mendulang suara banyak pada waktu Pilpres. Sementara itu, Siswono Yudohusodo adalah tokoh HKTI yang dikenal 'bersih' dan intelek. Suara yang beredar waktu itu seolah membuai Amien-Siswono sebagai tokoh idaman, yang bakal memimpin Indonesia dengan semangat reformasi.

Kalau pasangan Amin dengan Siswono, saya lihat pertimbangan koalisinya dengan Siswono kurang kuat. Memang Amin Rais membutuhkan seorang konglomerat yang cukup kuat. Tetapi basis politiknya Siswono tidak kuat, dia hanya Ketua tani (HKTI) yang ada di Indonesia dan dia tidak berakar dari keluarga tani. Kita tahu bahwa Siswono itu adalah pengusaha, mantan menteri yang kaya yang pernah menggeluti dunia pertanian, tiba-tiba menjadi ketua

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Aktifis LSM di Surabaya, 25 Juli 2005

tani. Jadi antara infrastruktur di bawah tidak tercermin dengan supra struktur di atas.<sup>23</sup>

#### 4) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla

Yudhoyono-Kalla berkoalisi dengan mengusung isu perwakilan Jawa dan luar Jawa. Selama ini dikotomi Jawa dan luar Jawa masih relevan untuk menjelaskan soal representasi. Yudhoyono yang mewakili Jawa merasa perlu menggandeng Kalla yang berasal dari Makassar untuk representasi luar Jawa. Penampilan Yudhoyono yang sangat hati-hati dan meskipun tidak begitu kuat, Yudhoyono terkesan sebagai 'tokoh yang menjadi korban kekuasaan'. Yudhoyono juga berhasil mengemas 'jualannya' dengan sangat baik. Representasi Kalla yang 'luar Jawa' membuat pasangan Yudhoyono-Kalla banyak dilirik sebagai pasangan yang ideal. Apalagi isu pemulihan krisis konon katanya Indonesia akan sanggup dipulihkan dari krisis dengan kekayaan yang *nota bene* dimiliki oleh Kalla.

Selain itu, Yudhoyono-Kalla mempunyai faktor unggulan yaitu yang melekat lebih pada diri Yudhoyono.

SBY itu ada faktor teraniaya, faktor charming, santun banyak faktor yang seperti itu. Di tengah-tengah orang menggunakan bahasa-bahasa yang mengerikan, dia (SBY -red.) muncul sebagai figur yang santun, yang orang melihat. "lha ini yang kita cari!" gitu ya. Imej ya, citra pemimpin yang diidamkan itu kan muncul dalam personifikasi SBY.<sup>24</sup>

Dalam menggaris bawahi analisis ini, wawancara dengan narasumber berikut ini menjadi justifikasi atas analisis tersebut di atas.

Pola koalisi yang dilakukan oleh SBY dan Yusuf Kalla adalah pola koalisi yang sangat tepat, karena SBY dan YK adalah perpaduan Jawa-luar Jawa. Perlu diketahui bahwa bagaimanapun juga dikotomi Jawa-luar Jawa hingga saat ini masih ada, meskipun dalam pidato

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Pengajar Fisip Unhas di Makassar, 4 Agustus 2005

<sup>24</sup>Wawancara dengan aktifis LSM di Surabaya, 25 Juli 2005

pejabat dikhotomi itu tidak ada lagi. Itu merupakan sebuah konflik yang laten di dasar hati masyarakat. Oleh karena itu, salah satu kegagalan Megawati, menurut saya adlah dia memilih pasangan wapresnya dari Jawa. Jadi Jawa semua. Dan pasangan lainnya, yang luar Jawa semua, itu lebih parah lagi. Sebab mengapa, secara jumlah orang Jawa itu tetap dominan di Indonesia. Karena itu, konsep primordial dan etnis masih berlaku, masih kuat tentu Jawa tak mau dipimpin oleh luar Jawa. Jadi yang cocok itu adalah presidennya Jawa dan wakil presidennya luar Jawa. Dan satu-satunya pasangan calon presiden/wapres itu hanya SBY-Yusuf Kalla yang memilih pola itu. Yang lainnya itu kan tidak ada. Seandainya Wiranto memilih Akbar Tandjung, bisa pertarungannya seru. Mengapa karena Golkar memiliki mesin politik yang tangguh, akarnya ke daerah sudah mantap. Bahkan nota benanya, Yusuf Kalla juga didukung oleh orang-orang Golkar itu, seperti orang-orang Golkar di Sulawesi Selatan.<sup>25</sup>

##### 5) Hamzah Haz –Agum Gumelar

Pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar mempunyai pertimbangan koalisi yang ‘paling rapuh’ sebab nampaknya hanya mengandalkan dukungan dari PPP. Hamzah Haz yang mantan wakil presiden tetap optimis bahwa masyarakat khususnya dari kalangan Islam akan memilih dirinya. Dalam beberapa pemberitaan di surat kabar, sindiran bahwa pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar dianggap sebagai ‘*underdog*’ justru membuat pasangan ini ‘*nothing to lose*’.

Hamzah dengan Agum Gumelar ini hanya pelengkap penderita saja. Hamzah hanya takut kehilangan muka saja, sehingga dia tetap maju. Sebenarnya di hati kecilnya Hamzah itu masih ingin berpartner dengan Mega, dan Mega juga masih ingin berpartner dengan Hamzah. Hanya persoalannya adalah ketika PPP melakukan persyaratan yang berat dipenuhi oleh PPP, maka ini dirasa berat oleh PDI-P. Dalam hal ini PDI-P mengatakan inikan masih banyak koalisi lain, anda kan telah dikasih Wakil Presiden. Jadi karena PPP terlalu

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Pengajar pada Fisip Unhas di Makassar, 4 Agustus 2005

ketat, akhirnya bercerailah dan perceraian itu lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Akhirnya dua-duanya hancur.<sup>26</sup>

Sebagaimana sudah disinggung di depan bahwa proses dan kompetisi pencalonan presiden pada putaran pertama sangat berat. Hal ini ditandai dengan perebutan massa atau basis pendukung dari kalangan-kalangan yang mempunyai basis massa yang signifikan dapat mendongkrak perolehan suara. Berbagai macam strategi dijalankan oleh tim sukses masing-masing calon. Dengan mempertimbangkan bahwa proses pencalonan presiden-wapres yang demikian ketat sehingga kemungkinan gagal pada putaran pertama, telah membuat sejumlah partai politik melakukan hitung-hitungan politik yang berujung seperti dagang sapi.

Selain itu, persaingan pada Pilpres putaran pertama begitu berat dengan mendasarkan analisis pada kenyataan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden tidak didukung oleh suara mayoritas hasil Pemilu legislatif 2004. Meskipun beberapa kandidat didukung oleh partai besar, namun kenyataannya tidak satupun partai besar yang kemenangannya sangat mencolok dibandingkan dengan partai lain. Sebagai akibatnya, tujuh partai yang berhasil mencapai *electoral threshold* yang sebenarnya mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak juga mengajukan pasangan calon dari partai sendiri untuk menjadi presiden. Pencalonan Wiranto (Golkar), Megawati (PDI-P), Amien Rais (PAN), Susilo Bambang Yudhoyono (PD) dan Hamzah Haz (PPP) mengikuti pola sama, pola "calon wapres dari luar partai sendiri".

Dari hal di atas, sebenarnya dapat diduga bahwa banyak sekali pertimbangan kepentingan politik ekonomi yang turut bermain. Ketika masing-masing kandidat berusaha mendekati partai lain yang potensial untuk memperoleh dukungan, masing-masing harus sabar menunggu kata sepakat dari pimpinan partai. Sikap politik dan dukungan PKB terhadap salah satu kandidat misalnya, baru akan disampaikan sesuai hasil Musyawarah Kerja Nasional PKB.

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Pengajar di Unhas, 4 Agustus 2005

Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru akan memutuskan untuk memberikan dukungan setelah diadakan rapat Pengurus Harian Pusat (PHP) DPP PPP. Soal kepentingan yang turut bermain dalam pola dukung mendukung ini, wawancara dengan narasumber berikut menegaskan hal itu.

Proses pemilu itu lebih pada bentuk nuansa kepentingan, koalisi kepentingannya daripada program, karena program bisa beda pada awal pilpres pertama karena masing-masing punya konsep yang berbeda-beda dalam program politiknya. Tapi nyatanya bisa bersatu, paling tidak itu ke arah yang lebih mendekati pada figur-figur tertentu. Dan memang ini kenyataan bahwa saya kira konsep koalisi politik di Indonesia itu kan tidak dalam konteks koalisi yang bersifat ideologis, tapi lebih pada tataran koalisi kepentingan yang pragmatis. Ya memang ujung-ujungnya pada akhirnya toh pada bagi-bagi posisi kekuasaan di kabinet nanti.<sup>27</sup>

Menjelang Pilpres putaran ke dua, muncul pola koalisi yang resmi di deklarasikan oleh para ketua dari beberapa partai, yaitu koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan.

Koalisi kebangsaan di deklarasikan pada hari Kamis, 19 Agustus 2004 oleh ketua partai Golkar, PDI-P, PPP dan PDS. Koalisi Kebangsaan ini ditujukan untuk memenangkan pasangan Calon Presiden Megawati Soekarnoputri dan Calon Wakil Presiden KH Hasyim Muzadi pada pemilihan umum presiden putaran kedua yang akan dilangsungkan pada 20 September 2004. Deklarasi yang memuat lima butir perjuangan bersama, serta lima butir bentuk kerjasama, dibacakan oleh Sekjen Partai Golkar Budi Harsono dan ditandatangani ketua umum dari keempat partai yaitu: Akbar Tandjung dari Partai Golkar, Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan, Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Ruyandi Mustika Hutasoit dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Dalam kesepakatan mereka, Akbar Tandjung ditetapkan sebagai Pemimpin Koalisi Kebangsaan. Acara deklarasi itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Bintang Reformasi KH Zainuddin MZ, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri dan Ketua

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Pengajar Fisip Unair, di Surabaya, 20 Juli 2005

Umum Partai Karya Peduli Bangsa Hartono, yang menyatakan bergabung dalam Koalisi kebangsaan tersebut.

Menurut berbagai sumber, deklarasi itu didasari oleh keinginan luhur untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan semangat Proklamasi Kemerdekaan serta untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Akbar Tandjung dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa Koalisi Kebangsaan bertekad menjalankan misinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Koalisi kebangsaan juga bertekad melaksanakan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dengan menjadikan koalisi kebangsaan sebagai kekuatan penyeimbang yang akan melaksanakan fungsi mekanisme *check and balances*. Fungsi ini akan dilakukan melalui kekuatan lima Fraksinya yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDI P, Fraksi PPP, Fraksi Bintang Reformasi, dan Fraksi Damai Sejahtera.

Dari sisi pembentukan koalisi kebangsaan ini, ada yang mengkritik bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kebangsaan semata-mata hanya mempertimbangkan kepentingan politik praktis. Kalau dicermati, partai-partai yang tergabung dalam koalisi kebangsaan adalah partai-partai yang sudah ada sejak orde baru, hanya dengan penambahan satu partai yaitu PDS. Orientasi yang hendak dibangun oleh koalisi kebangsaan yang dapat ditangkap adalah untuk menegakkan politik yang cenderung membela kepentingan elit masa lalu. Koalisi kebangsaan ini sangat yakin bahwa perjuangan mereka untuk memenangkan pasangan Mega-Hasyim akan sukses karena koalisi kebangsaan yang terdiri atas PDIP, Partai Golkar, PPP, dan PDS telah menguasai lebih dari 300 kursi dari jumlah 550 kursi DPR-RI, ditambah PBR, PKPB, dan Partai Massa Marhaenisme yang juga diyakini mendukung Mega.

Berdasarkan hitung-hitungan basis massa seperti itu, kubu koalisi kebangsaan mantap melangkah bahkan cenderung mengklaim bahwa hanya koalisi kebangsaan lah yang akan dapat melakukan perubahan. Koalisi kebangsaan ini mengklaim dirinya sebagai koalisi yang membela kepentingan rakyat, meskipun namanya

menggunakan kata kebangsaan dan anggotanya terdiri dari partai yang pernah ada pada masa orde baru.

Koalisi Kebangsaan juga sepakat merenda koalisi yang bersifat permanen. Andaikata Megawati-Hasyim Muzadi gagal merebut kursi presiden-wakil presiden 2004-2009, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPIP), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) akan meneruskan kerja sama di parlemen tingkat pusat sampai daerah. Hal itulah yang dijanjikan oleh para deklarator dan dituangkan secara tertulis dalam butir-butir deklarasi yang berlangsung di Hotel Grand Melia, Jakarta. Dalam hal ini koalisi kebangsaan intinya bertekad melakukan kerjasama secara longitudinal, meskipun Pemilu telah usai.

Lima bentuk kerjasama yang akan dipertahankan oleh koalisi kebangsaan adalah: Pertama, memenangkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dalam Pemilu Presiden 2004. Kedua, membentuk pemerintah pusat dan daerah yang kuat, bersih, dan efektif atas dasar profesionalisme dan kebersamaan.

Koalisi kebangsaan juga akan meningkatkan efektivitas peran dan fungsi lembaga legislatif di pusat dan daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Selanjutnya, mereka bertekad meningkatkan kerja sama sinergis antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di pusat dan daerah. Hal terakhir yang menjadi sasaran adalah meningkatkan peran dan fungsi partai sebagai wadah perjuangan politik rakyat dalam mengembangkan demokrasi.<sup>28</sup>

Sementara itu, koalisi kerakyatan adalah koalisi yang dibentuk oleh F-PPP, F-PKS, F-PAN, F-Partai Demokrat dan F-Bintang Pelopor Demokrasi. Koalisi ini konon malah justru disebut koalisi yang pro pemerintah meskipun anggotanya terdiri dari partai-partai baru dan bukan partai besar.

Koalisi kerakyatan menjelang Pemilu presiden putaran ke dua memang tidak seoptimis koalisi kebangsaan. Hal ini di dasarkan pada

---

<sup>28</sup>Lihat <http://www.tokohindonesia.com/majalah/15/berita.shtml>

dukungan koalisi kerakyatan yang berasal dari partai-partai kecil. Namun demikian, dari awal pembentukannya, anggota koalisi kerakyatan ini akan sekuat tenaga mendukung pasangan Yudhoyono-Kalla, sebagai pasangan presiden dan wakil presiden yang lolos pada putaran ke dua. Keyakinan akan kemengan koalisi kerakyatan ini adalah pada dukungan dari partai-partai kecil namun solid, dan permainan yang diperankan oleh Yudhoyono-Kalla sendiri yang 'cantik' sehingga terkesan 'elegance'. Dalam hal ini, profil Yudhoyono dan Kalla sebagai calon unggulan koalisi kerakyatan dianggap pas dan mampu memenuhi keinginan konstituen. Profil yang meyakinkan itu, telah membuat keyakinan koalisi kebangsaan semakin besar. Apalagi didukung dari hasil-hasil polling yang dilakukan oleh beberapa instansi yang menyebutkan hasilnya dimana popularitas Yudhoyono-Kalla selalu mengungguli rating pasangan Mega-Hasyim.

Dalam pekerjaan selanjutnya, koalisi kerakyatan menunjukkan gebrakan yang berarti, seperti misalnya setelah sukses mengantar Hidayat Nurwahid ke tampuk Ketua MPR RI, koalisi yang terdiri atas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) itu memboikot seluruh Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung antara 26-29 Oktober 2004. Rapat Paripurna itu mengagendakan pemilihan pimpinan komisi DPR, sebuah momen penting yang dipertaruhkan segenap fraksi di parlemen.<sup>29</sup>

Perebutan pimpinan komisi terkait dengan eksistensi dan gengsi (citra), juga menjadi media untuk memperjuangkan kepentingan partai. Secara normatif pemilihan pimpinan komisi mendasarkan pada kapabilitas, kapasitas dan pengalaman anggota DPR atas bidang-bidang tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya pimpinan komisi, termasuk anggotanya, ditentukan berdasarkan jumlah kursi fraksi-fraksi di parlemen. Kian banyak jumlah kursi sebuah fraksi, maka makin besar peluang merengkuh jabatan (ketua dan wakil ketua komisi).

---

<sup>29</sup>Lihat pemberitaan *Tempo Interaktif*, 28 Oktober 2004

Konflik di dewan begitu kentara oleh dua kubu yang berseberangan ini, meskipun akhirnya dapat dikatakan bahwa konfliknya semata-mata adalah berkaitan dengan jatah kursi atau kekuasaan. Seperti yang ditunjukkan oleh koalisi kerakyatan, dimana Koalisi Kerakyatan tetap memboikot Sidang Paripurna. Merujuk pada Pasal 203 ayat 1 Tata Tertib DPR Koalisi Kerakyatan menyatakan Rapat Paripurna batal demi hukum. Sebab yang hadir kurang dari setengah jumlah fraksi DPR. Itu berarti Rapat Paripurna tidak dapat mengeluarkan keputusan sebab syarat kuorum dari sisi jumlah fraksi tidak terpenuhi.

### **Strategi Pemenangan Kandidat**

Pengalaman pada waktu pemilihan umum legislatif pada 5 April 2004 banyak mengecewakan partai politik besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Banyak suara yang semula diprediksikan akan diberikan untuk kedua partai tersebut ternyata meleset. Mempertahankan suara yang pernah diperoleh pada Pemilu 1999 ternyata tidaklah mudah. Munculnya parpol baru yang relatif belum mempunyai nilai negatif di mata masyarakat berhasil menawarkan pilihan baru bagi masyarakat.

Berdasarkan pengalaman pemilihan umum (Pemilu) legislatif tersebut, partai politik (parpol) mulai berancang-ancang agar jangan sampai kecolongan lagi, terutama parpol besar. Salah satunya adalah dengan membentuk tim sukses Pilpres yang dirancang secara hati-hati untuk menarik para konstituen untuk memilih pasangan yang dicalonkan oleh koalisi mereka.

Pengalaman menunjukkan bahwa suara hasil Pemilu legislatif tersebut menghadapi masalah besar pada pilpres mendatang karena masih adanya konflik internal parpol dan masuknya "nilai-nilai gizi pilpres" seperti ketokohan calon presiden dan praktik politik uang dalam berbagai bentuk.

Strategi Yudhoyono adalah dengan melakukan kampanye terbuka, penggalangan dan pembinaan, serta mobilisasi dukungan, opini dan kontra opini. Selain itu, pihak Yudhoyono akan melaksanakan politik yang bersih, cerdas, dan damai. Hal tersebut

akan diwujudkan dengan memenuhi segala aturan hukum yang telah ditetapkan. Langkah ketiga, mengembangkan cara-cara kampanye dan semua upaya pemenangan Pilpres dan wakil presiden secara baik dan efektif.

Pasangan Yudhoyono-Kalla akan melakukan langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan semua pihak yang turut berjuang dalam memenangkan Pilpres. Langkah ini konon harus diambil dalam rangka menyikapi tumbuhnya gerakan-gerakan di masyarakat yang mendukung pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla secara spontan di berbagai daerah. Pembentukan Blora Center misalnya adalah untuk mensosialisasikan mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh pasangan Yudhoyono-Kalla bila terpilih.

Pasangan lain seperti Mega-Hasyim pun melakukan hal-hal yang dianggap akan mendongkrak kemenangan pasangan Mega Hasyim seperti misalnya dengan mendirikan Mega Center yang menggodok strategi pemenangan pasangan Mega-Hasyim. Meskipun pada dasarnya yang dilakukan oleh center-center ini adalah mensosialisasikan misi-visi sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka juga mencari terobosan baru untuk 'menjual' pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya dengan berbagai kegiatan seperti Dompot Peduli, Posko-posko, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Makna pemilihan secara langsung oleh rakyat juga berkurang maknanya pada sistem pilpres karena hanya partai atau koalisi partai yang dapat mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden (wapres). Pilpres lebih menjadi agenda elit partai. Penentuan kandidat bukan didasarkan pada dukungan rakyat langsung (bandingkan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah), tetapi oleh partai yang melampaui ambang batas perolehan suara (*electoral threshold*) sebanyak 5 % dari total suara sah dalam Pemilu parlemen. Sebenarnya amandemen konstitusi dapat mencantumkan syarat bahwa pasangan calon presiden-wapres harus didukung 5% suara

---

<sup>30</sup>Lihat penjelasan <http://www.sumpahpalapa.com>, diakses pada 21 Desember 2005

pemilih (atau syarat dukungan untuk pencalonan anggota DPD), yang tersebar di separuh jumlah provinsi.

Pada intinya, pencalonan presiden-wapres hanya dapat dilakukan oleh partai politik. Oleh karena itu, partai politik memegang peranan penting sebagai 'kendaraan politik' bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik yang berhasil mendudukkan calonnya dan memperoleh kemenangan pada putaran pertama maka secara otomatis harus lebih mengetatkan perjuangan untuk menuju putaran kedua. Partai politik sebenarnya harus mewaspadaai terjadinya dukungan dan koalisi semu, karena dukungan semu bisa menjebak dan menyebabkan kekalahan pada putaran ke dua. Bila koalisi semu tak terjadi, dukungan mayoritas sederhana sudah cukup untuk meraih jabatan presiden melalui putaran kedua pilpres 2004

Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut di atas, partai politik perlu menyadari bahwa partai politik adalah kendaraan politik bagi elit dan masyarakat sekaligus. Bagi elit, partai politik menjadi kendaraan yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan sementara itu bagi masyarakat, partai politik menjadi sarana untuk menyampaikan keinginannya ke pemerintah. Partai politik secara ideal adalah suatu institusi politik dimana seharusnya partai politik ini secara internal mampu menjembatani perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik pada tataran horizontal seperti persoalan yang berkaitan dengan etnis, budaya dan kewilayahan dan dalam tataran vertikal yang menghubungkan antara elit-massa, perbedaan kaya - miskin melalui mesin akomodasi kepentingan. Namun demikian, formasi kepartaian yang di bangun di Indonesia tidak mengarah pada penopangan fungsi partai politik seperti tersebut di atas. Formasi kepartaian Indonesia menjadi sangat elitis dan hanya dikuasai oleh beberapa orang tertentu. Oleh karena itu, dukungan dan koalisi semu yang seolah-olah ditujukan oleh suatu partai politik, tetap harus disikapi secara hati-hati. Bisa jadi, yang berkoalisi atau yang memberikan dukungan hanyalah kalangan elit partai saja, sementara kader dan simpatisan partai politik itu sebenarnya tidak memberi dukungan sama sekali.

Oleh sebab itu, elit politik perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menjebak seperti ini.

Elit politik di partai itu terlambat memahami fenomena voting behavior. Mereka masih bias hegemonik elit, seperti zaman orde baru. Jadi kalau partai itu berkoalisi, maka dianggapnya masyarakat akan mengikuti koalisi partai. Padahal tidak.<sup>31</sup>

Dalam Pilpres, akhirnya kandidat presiden dan wakil presiden menyadari bahwa mesin partai tidak berfungsi. Partai politik hanya kendaraan untuk pencalonan semata. Namun demikian, rata-rata kandidat menyadari bahwa pada tingkat *grass root* keinginan konstituen belum tentu sejalan dengan keinginan elit partai politik. Dengan demikian, hal itu telah memunculkan ide untuk mencari alternatif pemecahan untuk menjalankan mesin kemenangan pilpres yaitu dengan membentuk tim sukses-tim sukses. Tim sukses ini yang akhirnya berfungsi menggodog formula kemenangan kandidat dengan berbagai cara. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pada tingkat lokal dibuat semacam kesepakatan untuk melakukan pilpres damai.

KPUD juga membuat kesepakatan kepada tim sukses agar siap menang dan siap kalah, antar tim sukses tidak saling memfitnah dan sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pilpres adalah proses politik yang harus demokratis. Untuk Pilpres mendatang perlu diberi ruang kepada setiap warga negara untuk maju menjadi pasangan presiden tanpa harus mengikat harapan lewat partai politik saja.<sup>32</sup>

Lebih jauh, penggunaan tim sukses ini sebenarnya bisa dianggap sebagai respon atas kenyataan bahwa sistem pilpres di Indonesia memerlukan sistem pilpres yang mengatasi kemajemukan dan ketersebaran penduduk agar pilpres menghasilkan dukungan integratif kepada presiden. Terlebih lagi, pola koalisi disadari bukan jaminan atas kemenangan partai. Maka itu diperlukan mesin politik

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan wakil ketua KPU Propinsi Jawa Timur di Surabaya, 21 Juli 2005

<sup>32</sup>Wawancara dengan anggota KPU Propinsi NTT, 21 Juli 2005

lain yang dapat bekerja sampai ke ‘bawah’ yaitu dengan pembentukan tim sukses, apalagi bila sudah mulai muncul kesadaran bahwa *pattern of voting behavior* berbeda.

Kecenderungan voting behavior itulah yang nggak pernah dihitung secara kuantitatif oleh partai nah, karena itu tim suksesnya biasanya – tim-timnya partai itu – gagal semua memahami itu. Tim-tim partai yang paham terhadap itu, baru dia ngerti bahwa di tiap kabupaten, di tiap kecamatan itu aspirasi masyarakat berkembang ke mana... lalu dia harus membuat itu seperti apa, lalu dia harus bikin kampanye seperti apa, lalu dia harus mendekati masyarakat itu seperti apa, lalu dia harus menjual programnya terhadap masyarakat itu seperti apa. Nah, tim sukses – dalam hal ini mestinya manajer kampanye itu – adalah orang-orang yang harus profesional.<sup>33</sup>

Tugas tim sukses sangat berat karena tim sukses harus mampu men’jual’ profil calon presiden. Calon presiden sendiri dipilih dengan syarat berat untuk menjadi presiden, yang dituangkan dalam Amandemen UUD 1945 yaitu didukung oleh lebih dari 50 persen suara pemilih yang tersebar di separuh jumlah provinsi dan paling sedikit memperoleh dukungan 20 persen di tiap provinsi itu. Calon presiden tidak bisa bila hanya mengandalkan partai saja.

Jadi ukurannya kalau apa yang dicalonkan partai itu sudah diikuti konstituen berarti partai sudah mampu membangun konstituen. Sehingga bisa dijamin kalau koalisi antar partai besar katakan, ketika legislatif dapat sekian itung di atas kertas, dia banyak menangnya. Tapi kemarin kan *ndak* ada jaminan. Karena apa? Karena itu menggambarkan bahwa hubungan konstituen dengan partai rendah, menurut saya. Itu bagian daripada apa yang saya katakan tadi bahwa, mengapa pemilihan Presiden tidak harus dibatasi lewat partai karena partai sendiri belum mampu membangun konstituen. Peta riilnya yaitu ketika apa yang dikatakan partai A, anggotanya belum tentu A. Itu menggambarkan partai sekarang, fungsi-fungsi kepartaian hanya satu aja, cari kekuasaan itu, *power building* aja. Fungsi membangun,

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Wakil Ketua KPU Propinsi Jawa Timur di Surabaya, 21 Juli 2005

fungsi agregasi, fungsi menyalurkan aspirasi tu semua *ndak* ada---- sekarang ada kecenderungan partai tu hanya 'jual tiket' lho.<sup>34</sup>

Untuk mewujudkan harapan kemenangan seperti yang dicita-citakan bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, pembentukan tim sukses bagi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi andalan untuk menuju kemenangan pasangan tersebut.

Dengan perilaku pemilih yang terbuka seperti sekarang, demokratis...sekarang itu masyarakat punya kecenderungan sendiri yang berbeda dengan kecenderungan partai. Kalau dulu partai itu korelasi kuat dengan dominasi di perlemen karena pemilihan tertutup, karena orang-orang parlemen adalah orang-orang partai yang bisa dikontrol. Tapi sekarang kan masyarakat tidak bisa dikontrol oleh partai. Karena itu partai harus mengikuti kecenderungan perilaku memilih masyarakat.<sup>35</sup>

Masing-masing tim sukses berusaha 'menjual kelebihan'/ marketing kandidat dengan cara mengelaborasi program kerja para pasangan capres/cawapres yang didukungnya. Tim sukses Wiranto-Wahid yang diperkuat oleh Suaidi Marasabessy dan Bomer Pasaribu misalnya, men'jual' pencalonan Wiranto dengan mengatakan bahwa sehubungan dengan tuntutan *big bang* reformasi, maka pasangan Wiranto-Wahid akan menekankan pada lima hal yang digarap oleh tim 5 yaitu adanya Supremasi hukum, persoalan yang berkaitan dengan *civil society*, *economic society*, *political society* dan *bureaucratic reform*. Dalam hal ekonomi, Wiranto-Wahid akan menerapkan model *pro employment economy* yaitu yang mengutamakan *employment* tetapi tidak anti pasar (*market friendly*). Untuk itu akan dilakukan beberapa level kebijakan yaitu yang mengutamakan *grass root level economy* baru mengarah ke *competitive economy*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Ketua PWNU di Surabaya, 27 Juli 2005

<sup>35</sup>Wawancara dengan Wakil Ketua KPU Propinsi Jawa Timur di Surabaya, 21 Juli 2005

<sup>36</sup>Lihat penjelasan tim Wiranto-Wahid yang diwakili oleh Suaidi Marasabessy dan Bomer Pasaribu pada Makmur Keliat dan S. Yunanto

Sementara itu, tim sukses pasangan Mega-Hasyim men'jual' program kerja pasangan Mega-Hasyim dengan cara mengelaborasi program kerja yang sudah dilakukan oleh Mega. Dalam hal ini, pasangan Mega-Hasyim diuntungkan dengan menjatuhnya Mega sebagai presiden RI sebelum pilpres 2004 sehingga apa-apa yang sudah dilakukan oleh Mega ketika menjadi presiden dianggap sebagai bukti atas kinerja Mega, dan dipertahankan akan dilaksanakan jika Mega terpilih lagi sebagai presiden hasil pilpres 2004. Sayangnya, program kerja Mega-Hasyim tidak cukup menjelaskan apa-apa yang hendak dilakukan sebagai prioritas kerja jika terpilih.<sup>37</sup>

Hal senada diungkapkan oleh narasumber berikut:

Tema tim kampanye Mega, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Kita dulu dibagi-bagikan brosur berisi capaian-capaian dan prestasi Mega selama menjadi presiden. Keberhasilan dia yang dia coba tonjolkan, rencana ke depan tidak terlalu diungkap. SBY sebaliknya, dia mengusung perubahan. Temanya, "Bersama kita bisa!". Perubahan dalam segala bidang, baik ekonomi, pemerintahan, pendidikan. Pokoknya akan ada perubahan.<sup>38</sup>

Tim sukses Hamzah-Agum men'jual' program kerja pasangan ini dengan mengemukakan kelebihan Hamzah Haz sebagai *pioneer* seperti misalnya dikatakan bahwa Hamzah Haz lah orang yang pertama kali tidur di Aceh dalam kondisi Aceh genting, atau Hamzah Haz yang mendeklarasikan bahwa negara Republik Indonesia ini Cuma ada satu bendera, ketika Hamzah Haz diatas gereja Soya. Dari situ, tim sukses Hamzah-Agum ingin agar masyarakat melihat

---

(Editor), *Menatap Masa Depan Indonesia, Analisis Platform Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2004*, The Ridep Institute, Jakarta, 2004 hal.12-13

<sup>37</sup>Tim Sukses Mega-Hasyim diwakili oleh Syarif Bastaman. Lihat dalam Makmur Keliat dan S. Yunanto, *ibid*, hal.35

<sup>38</sup>Wawancara dengan wartawan *Kupang Pos* di Kupang, 23 Juli 2005

kelebihan atas apa yang sudah dilakukan oleh Hamzah Haz sebagai daya tarik atas pasangan ini.<sup>39</sup>

Pasangan Amien-Siswono lebih menggaris bawahi bahwa upaya reformasi masih belum selesai sehingga visi utamanya adalah untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Untuk itu diperlukan “percepatan kemajuan bangsa” yang dirumuskan melalui (1) pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara, (2) pengembangan sistem hukum yang adil dan benar, (3) pengembangan sistem politik yang demokratis, (4) pengembangan sistem ekonomi yang adil dan produktif, (5) kehidupan sosial budaya yang beradab, (6) sumber daya manusia yang bermutu dan (7) penyikapan yang tepat terhadap globalisasi. Tim sukses Amien-Siswono berharap bahwa kemenangan akan ada di tangan pasangan ini dengan mengandalkan pada figur Amien yang lekat dengan upaya-upaya reformasi.<sup>40</sup>

Pasangan Yudhoyono-Kalla lebih menggaris bawahi soal tidak adanya dikotomi sipil militer sebagai bahan ‘jualan’ tim suksesnya. Soal *human rights* juga menjadi hal utama yang dijual oleh tim sukses ini sebagai hal yang akan diperjuangkan kalau pasangan Yudhoyono-Kalla terpilih. Dalam kaitan dengan itu, tim sukses Yudhoyono-Kalla selalu berusaha mengemukakan komitmen untuk bekerja maksimal sehingga program kerja 100 hari menjadi salah satu isu menarik. Dalam masa 100 hari, pemerintahan Yudhoyono-Kalla bila terpilih akan melakukan evaluasi atas kinerja 100 hari nya. Dilihat dari program yang ditawarkan pasangan Yudhoyono-Kalla banyak sekali program kerja yang menyangkut pada bidang politik, pertahanan dan keamanan; keadilan, hukum dan demokrasi; ekonomi dan kesejahteraan dengan melandaskan diri pada misi untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera. Dengan semboyan “Bersama Kita Bisa” tim sukses

---

<sup>39</sup>Tim sukses Hamzah-Agum diwakili oleh Laode Kamaludin. Lihat dalam Makmur Keliat dan S. Yunanto (Editor), *ibid*, hal.72

<sup>40</sup>Lihat *Misi- Visi Pasangan Amien-Siswono* pada Makmur Keliat dan S. Yunanto, *ibid*, hal. 138-139

Yudhoyono-Kalla berharap banyak atas kemenangannya pada pilpres putaran pertama dan ke dua.<sup>41</sup>

Sekarangnya ada dua kemungkinan untuk memenuhi tuntutan terpilihnya presiden yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat, yaitu mengharap kemunculan seorang pemimpin besar bangsa atau memilih presiden melalui koalisi besar-besaran. Kemungkinan pertama sulit terwujud dan tak dapat direkayasa tanpa mesin kekuasaan yang rapi, seperti birokrasi dan terutama militer, maupun cara-cara otoriter. Kemungkinan kedua gagal mewujudkan diri. Perolehan suara tertinggi Pemilu 1999 hanya 33 persen (diperoleh oleh PDI-P), sedangkan konfigurasi politik yang dihasilkan bersifat fragmentaris dan tidak memunculkan konsensus politik sejati. Artinya, tidak ada satu partai atau kandidat presiden pun dapat memenangi pilpres putaran pertama secara mutlak.

Syarat konstitusional dan ideologis untuk babak pertama itu lantas dinihalkan oleh proyeksi pertarungan kekuasaan antarpolisi. Dipilihlah syarat yang lebih ringan untuk pilpres putaran ke dua, yaitu hanya diikuti pasangan calon presiden-wapres yang menduduki peringkat pertama dan kedua pada putaran pertama. Dampaknya, seberapa besar jumlah suara tidak sah dan golput, pasangan dengan suara terbanyak sederhana dapat didudukkan sebagai presiden melalui putaran kedua.

Meskipun dari persoalan persyaratan tampak lebih ringan, dalam kenyataannya persaingan justru makin ketat. Tim sukses harus kerja keras untuk meminimalisir munculnya koalisi semua atau dukungan semu dalam pilpres putaran ke dua. Jebakan-jebakan yang ditebarkan pihak lawan harus diantisipasi. Konsolidasi internal tim sukses harus benar-benar serius untuk menarik lebih banyak massa dari pendukung yang kalah pada putaran pertama dan untuk mencegah jangan sampai pendukung yang sudah solid, lari ke kubu lawan.

Oleh karena itu, tim sukses benar-benar harus mengerahkan segala upaya untuk menjaga agar kalkulasi suara yang bakal

---

<sup>41</sup>Lihat Misi-Visi pasangan Yudhoyono-Kalla pada Makmur Keliat dan S. Yunanto, *ibid.*, hal.151-155

diperoleh tidak meleset dari perkiraan. Formula untuk menebar pesona, menarik pemilih dilakukan misalnya dengan sistem 'jaring laba-laba' atau sistem *multi level marketing*. Jadi, ada beberapa orang yang dipilih sebagai koordinator, dan koordinator ini berfungsi sebagai 'vote getter', berusaha mempengaruhi pilihan konstituen sebanyak-banyaknya. Pola ini dirasa efektif tetapi memerlukan dana yang tidak sedikit karena kecenderungan praktik politik ini bukan hal yang suka rela.

Dalam Pilpres ini, baik putaran pertama maupun kedua, banyak diliput oleh media massa. Iklan-iklan yang menyajikan profil pasangan presiden dan wapres banyak bermunculan di media massa sesuai dengan gayanya masing-masing. Pola-pola debat terbuka yang diprakarsai oleh beberapa stasiun televisi misalnya, telah menghadirkan calon-calon itu untuk memaparkan keinginannya dalam Pemilu presiden 2004 sekaligus untuk memenangkan hati masyarakat.. Dengan gayanya masing-masing, para kandidat presiden sering muncul di media massa. Slogan-slogan bermunculan. Dari yang berslogan "Bersama kita bisa" sampai slogan lain yang intinya berusaha 'memenangkan hati' masyarakat.

Pemberitaan media massa juga marak dengan pemberitaan mengenai kiprah kerja tim sukses dan peristiwa dukung mendukung yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kasus dukung mendukung yang dilakukan oleh satu Kepolisian Resort (Polres) di Jawa Tengah, sempat menghebohkan karena telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah, pemerintah dengan tegas melarang keterlibatan PNS, TNI dan POLRI untuk terlibat dalam tim sukses atau upaya-upaya dukung mendukung salah satu kandidat. Dalam kategori ini, PNS, TNI dan POLRI harus bersikap netral dalam pilpres. Dalam hal ini, Polres di Jawa Tengah itu dianggap telah menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya untuk mendukung salah satu kandidat presiden dengan mengadakan pertemuan di kantor Polres setempat yang dihadiri oleh masyarakat. Tujuan pertemuan tanggal 29 Mei 2004 itu konon tidak untuk mendukung salah satu calon presiden. Tetapi, dari

VCD yang beredar terlihat bahwa pertemuan itu mengarah pada dukungan terhadap salah satu kandidat.<sup>42</sup>

Media massa dalam hal ini memang memegang peranan penting, khususnya dalam hal *mengekspose* misi, visi kandidat presiden. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa kampanye pilpres khususnya pada putaran ke dua sangat terbatas harinya, yaitu hanya 3 hari, sehingga kampanye dengan menggunakan media massa dirasa paling efektif.

Di lihat dari Pasal: 35 Ayat (9) Undang-undang Nomor 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres menyebutkan, dalam hal tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dapat melaksanakan penajaman visi, misi, dan program yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2004 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wapres, KPU akan mengumumkan daftar peserta pilpres putaran kedua dan penetapan nomor urutnya antara 29 Juli hingga 5 Agustus 2004. Lalu, kampanye pilpres akan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2004. Dengan demikian, jelas sekali bahwa para calon presiden yang lolos pada putaran ke dua harus jeli memanfaatkan kekuatan media massa agar program, misi, dan visi mereka dapat lebih dipahami oleh rakyat. Pada gilirannya, bila rakyat memahami visi, misi dan program mereka apabila mereka terpilih menjadi presiden, diharapkan hal itu akan menggerakkan hati rakyat untuk memilih kandidat tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Lihat *Tempo*, 11 Agustus 2004

<sup>43</sup>Lihat pemberitaan *Suara Merdeka*, 19 Juli 2004 atau lihat juga ulasan *Indonesia Media Online*, September 2004

## Penutup

Hasil Pemilu legislatif 2004 dengan model Pilpres baru ini tidak menghasilkan partai mayoritas menjadi pemegang kekuasaan untuk mendudukkan calonnya menjadi presiden. Dalam Pemilu 2004 ini, Partai Golkar mampu menunjukkan kekuatannya sebagai partai pemenang, meskipun derajat kemenangannya relatif menurun dibandingkan dengan perolehan suara pada masa Orde Baru. Dalam parlemen sendiri tercipta fragmentasi yang tinggi mengingat banyaknya partai politik yang berhasil memperoleh kursi. Dalam kondisi itulah, Pilpres secara langsung dakan. Pada awalnya banyak yang memprediksikan bahwa calon dari partai yang kuat lah yang akan dapat memenangkan Pilpres ini. Hal itu berdasarkan hitungan-hitungan yang berkisar pada kuantitas dukungan pada partai besar yang diperkirakan tidak berbeda secara signifikan dari dukungan yang diberikan pada waktu Pemilu legislatif.

Dalam pada itu, partai-partai besar (Partai Golkar dan PDI-P) meyakini bahwa calonnya lah yang akan menang. Wiranto sebagai calon yang diusung partai Golkar melalui mekanisme konvensi sangat percaya diri dirinya bakal menjadi presiden mengingat dukungan kepada partai Golkar waktu Pemilu legislatif yang tinggi. Keyakinan yang sama dimiliki oleh Megawati bahwa Megawati mendapat dukungan total dari PDI Perjuangan sebagaimana yang didapat pada waktu Pemilu legislatif. Dengan keyakinan ini, para calon presiden menganggap bahwa partai yang mencalonkan mereka akan signifikan memberikan dukungan.

Sayangnya, logika kepartaian ini tidak diikuti oleh logika masyarakat yang menuntun mereka memilih calon presidennya. Itu artinya bahwa masyarakat tidak mempertimbangkan kapabilitas kandidat. Ketika Pemilu legislatif masyarakat memberikan suara pada kandidat dari suatu partai, maka pada Pilpres secara langsung ini, pertimbangan partai bukan menjadi hal yang utama. Masyarakat masih melihat *performance* fisik dan berdasarkan janji-janji yang disampaikan pada waktu kampanye. Beberapa pemilih Megawati pada Pilpres putaran ke dua mengatakan bahwa mereka tergiur untuk memperoleh pekerjaan gratis yang dijanjikan Megawati waktu

kampanye. Sebagian lagi, mendukung Yudhoyono-Kalla dengan pertimbangan: untuk melihat 'orang baru' dalam kursi kepresidenan, sebagian juga terpesona oleh penampilan Yudhoyono-Kalla pada waktu kampanye.

Menjelang dilaksanakannya pilihan presiden putaran ke dua, 20 September 2004, banyak yang berspekulasi mengenai siapa yang bakal keluar sebagai pemenang dan menjadi presiden RI periode 2004-2009. Beberapa lembaga survey mengadakan polling pendapat yang rata-rata intinya mengatakan bahwa pasangan Yudhoyono-Kalla mempunyai popularitas yang melampaui kandidat lain. Meski metode hitung cepat (*quick count*) LP3ES-NDI menunjukkan keunggulan pasangan Yudhoyono-Kalla dibandingkan yang lainnya (nyaris mencapai 34 persen), capaian itu tak melampaui 50 persen sehingga pilpres putaran pertama hanya mengantarkan pasangan dengan peringkat kesatu dan kedua ke putaran ke dua.

Sebagai catatan penutup dapat dikatakan bahwa partai politik dalam pilpres ini cenderung difungsikan sebagai 'kendaraan' politik yang memerankan diri sebagai pedagang. Hal ini ditunjukkan dari peran partai yang kasak-kusuk sana sini untuk memperoleh celah menuju kekuasaan. Dasar perhitungannya adalah politis matematis sehingga konsesi-konsesi politik dan ekonomi mewarnai bursa Pilpres sistem dua putaran ini. Meskipun partai politik pada waktu Pemilu legislatif dapat memperoleh dukungan yang signifikan untuk wakil-wakilnya, pada Pilpres ternyata masyarakat mempunyai preferensi yang belum tentu sama. Partai politik besar tidak lagi dapat memobilisir massa untuk mendukung calonnya sehingga yang menjadi pemenang adalah dari partai kecil. Karena kepresidenan dimenangkan oleh partai kecil, kepresidenan minoritas ini mengandung sejumlah kerawanan politik yang bila tidak diwaspadai hanya akan mengembalikan pola kepemimpinan lama yang otoriter atau pilihan satunya adalah membentuk pemerintahan 'wayang', bias dimainkan kesana kemari. Bila hal ini terjadi, tujuan awal membangun kehidupan politik yang menuju demokrasi hanya akan menjadi angan-angan. Partai politik dalam hal ini menjadi mandul karena cenderung difungsikan hanya sebagai kendaraan politik sesaat

yang dilakukan dengan pembentukan koalisi-koalisi antar partai untuk mengusung pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Setelah itu, partai politik hanya tinggal menjadi cerita.



## **Bab IV**

# **POLA DAN KECENDERUNGAN PERILAKU PEMILIH**

*Syamsuddin Haris dan Tri Rainny Syafarani*

### **Pendahuluan**

Keberhasilan menyelenggarakan tiga rangkaian pemilihan umum (pemilu) demokratis secara nasional sepanjang 2004, yakni pemilu legislatif (5 April), pemilu presiden putaran pertama (5 Juli), dan pemilu presiden putaran kedua (20 September), konon menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan Amerika Serikat. Momentum pemilu yang diperkirakan bergejolak, ternyata berlangsung cukup kondusif, dan bahkan hampir tidak ada konflik ataupun tindak kekerasan massa yang berarti. Meskipun diwarnai letupan fanatisme massa pendukung, di luar dugaan, mayoritas masyarakat dapat menerima kekalahan partai dan atau para kandidat mereka yang bersaing dalam pemilu.

Pemilu legislatif menghasilkan peta kekuatan baru di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibandingkan hasil Pemilu 1999. Pemilu Legislatif 2004 bahkan menjadi momentum kembalinya Partai Golkar sebagai partai terbesar dalam perolehan kursi (128 dari 550 kursi) DPR. Menyusul kemudian PDI-P (109), PPP (58), PD (55), PAN (53), PKB (52), dan PKS (45). Sembilan partai memperoleh satu hingga 14 kursi, sedangkan delapan partai lainnya gagal merebut satu pun kursi DPR. Seperti diketahui, pada Pemilu 1999 Golkar berada di urutan kedua perolehan kursi (120 kursi) dikalahkan oleh PDI-P yang meraih kursi terbanyak (153 dari 500 kursi DPR). Selain itu, Pemilu legislatif 2004 diwarnai oleh tampilnya “bintang baru” dalam peta politik nasional, yakni PD sebagai partai baru yang langsung merebut 55 kursi dan PKS –modifikasi Partai Keadilan

yang memperoleh tujuh kursi pada Pemilu 1999—yang meraih 45 kursi di parlemen nasional.

Meskipun Pemilu Legislatif 2004, seperti juga Pemilu 1999, masih memperlihatkan pertarungan relatif ketat antara Golkar dan PDI-P, namun ternyata pemilu presiden justru dimenangkan oleh kandidat dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pada pemilu presiden putaran kedua pasangan Yudhoyono-Kalla memperoleh 62% suara, sedangkan paket Megawati Sukarnoputeri-Hasyim Muzadi yang dicalonkan oleh PDI-P dan didukung oleh Golkar hanya meraih sekitar 38% suara pemilih. Keunggulan pasangan Yudhoyono-Kalla bahkan sudah tampak pada pemilu presiden putaran pertama dengan meraih 33,57% suara, disusul kemudian oleh Megawati-Hasyim Muzadi (26,61%), Wiranto-Solahudin Wahid (22,15%), Amien Rais-Siswono Yudhohusodo (14,66%), dan Hamzah Haz-Agum Gumelar (3,01%).

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan, apakah makna perubahan peta pilihan dari pemilu legislatif ke pemilu presiden tersebut? Berubahkah preferensi pemilih? Apa yang menyebabkan pergeseran pilihan ini? Bagaimanakah tipologi pemilih di Indonesia ini? Salah satu cara untuk menganalisis pola pergeseran pemilih adalah dengan menggunakan pendekatan *voting behavior*. Secara garis besar, *voting behavior* pada umumnya dapat diketahui melalui dua sudut pandang, yakni sudut pandang sosiologis dan sudut pandang psikologis. Secara sosiologis, perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakteristik dan pengelompokan-pengelompokan sosial, baik secara formal (organisasi, kelompok okupasi, lembaga), maupun informal (keluarga, pertemanan, kelompok kecil). Ikatan-ikatan sosiologis semacam agama, kelas sosial, karakteristik demografis dan geografis, umur serta jenis kelamin, secara teoretis dapat digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan pilihan politik seseorang.

Dalam sudut pandang psikologis, perilaku pemilih lebih dititikberatkan pada konsep sosialisasi dan sikap ketimbang pengelompokan sosial. Sosialisasi politik yang diterima (baik dari

institusi formal maupun informal) sangat mempengaruhi pilihan politik mereka. Selain itu, sudut pandang ini juga menganggap sikap seseorang dalam memilih adalah refleksi kepribadiannya. Sikap memilih tersebut dapat dilihat berdasarkan tiga aspek, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat.<sup>1</sup>

Dalam kaitan tersebut, tulisan ini mencoba melihat kecenderungan perubahan dan pergeseran pilihan konstituen dari pemilu legislatif ke pemilu presiden putaran pertama, dan dari putaran pertama ke putaran kedua. Melalui tinjauan ini diharapkan dapat diketahui pola dan kecenderungan perilaku pemilih dalam Pemilu Presiden 2004 yang lalu.

### **Kecenderungan Peta Pemilu Legislatif**

Seperti dikemukakan sebelumnya, pemilu legislatif 2004 ditandai perubahan peta politik di tingkat nasional. Meskipun demikian, kecenderungan peta pemilu legislatif 2004 masih didominasi lima partai “pemain lama”. Golkar masih menancapkan kukunya di sebagian besar wilayah pemilihan di Indonesia, terutama Sulawesi Selatan dan Gorontalo. PDI-P masih berkuasa di Bali. Kaum *Nahdliyin* di Jawa Timur mengikuti kyainya cenderung memilih PKB. Warga Muhammadiyah di Yogyakarta, setia kepada PAN, sedangkan PPP masih didukung sebagian besar massanya di Kalimantan Selatan.

Selain itu, pemilu legislatif juga diwarnai munculnya Partai Demokrat (PD) dan PKS sebagai partai junior yang secara mengejutkan mampu merebut hati masyarakat, sehingga meraih suara secara signifikan serta merebut masing-masing 55 dan 45 kursi parlemen nasional. Keberhasilan serupa diperlihatkan oleh dua partai baru, Partai Bintang Reformasi (PBR) —partai yang merupakan produk konflik internal PPP—dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang memperoleh masing-masing 14 dan 13 kursi DPR.

---

<sup>1</sup>Richard Rose dan Ian Mc. Alliser, *The Loyalties of Voters: Lifetime Learning Model*, London, Newbury Park, CA: Sage, 1990.

Tabel 1 Partai Sepuluh Besar di DPR Pemilu 2004

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	
		Pemilu 1999	Pemilu 2004
01	Partai Golongan Karya (Golkar)	120	128
02	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	153	109
03	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	58	58
04	Partai Demokrat (PD)	-	55
05	Partai Amanat Nasional (PAN)	34	53
06	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	51	52
07	Partai Keadilan Sejahtera (PKS, 1999: PK)	7	45
08	Partai Bintang Reformasi (PBR)	-	14
09	Partai Damai Sejahtera (PDS)	-	13
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	13	11

Sumber: KPU diolah.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa meskipun di satu pihak pemilu legislatif diwarnai perubahan peta politik dibandingkan Pemilu 1999, namun di pihak lain ditandai pula dengan hadirnya empat partai, yakni PD, PKS, PBR, dan PDS, sebagai kekuatan politik baru di DPR. Data hasil pemilu ini menggambarkan dinamika pergeseran pilihan masyarakat yang menunjukkan bahwa sebagian pemilih masih mempertahankan dukungan mereka pada partai-partai lama, dan sebagian lainnya meninggalkan partai lama untuk kemudian memilih partai-partai baru yang dianggap lebih menjanjikan.

Sementara itu ditinjau dari peta dukungan pemilih terhadap partai-partai dalam pemilu legislatif 2004 tampak bahwa partai-partai lama (Golkar, PDIP, PPP, PKB dan PAN) terutama mengandalkan sumber dukungan para pemilih tradisional, yakni para pemilih yang memilih partai yang sama dalam Pemilu 1999. Partai Golkar misalnya, meskipun sempat terpuruk pada Pemilu 1999, namun berhasil merebut kembali sebagian dukungan dari para pemilih tradisional partai ini di luar Jawa pada umumnya dan Indonesia bagian timur pada khususnya, kecuali Bali dan NTT yang didominasi

partai banteng. PDI-P terutama mengandalkan dukungan para pemilih tradisionalnya di Jawa, terutama Jawa Tengah, Bali dan NTT serta sebagian sebaran dukungan di luar Jawa. Sedangkan partai-partai baru merebut kesempatan dari kegagalan partai-partai lama mempertahankan dukungan di sejumlah daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Partai-partai seperti PD, PKS, PBR, dan PDS tampaknya menikmati limpahan suara dari para pemilih yang kecewa terhadap partai-partai lama sebagai akibat citra buruk mereka di badan-badan legislatif produk Pemilu 1999<sup>2</sup>.

Di samping kecenderungan di atas, analisis terhadap perilaku pemilih di Indonesia juga seringkali dibangun berdasarkan perspektif Clifford Geertz tentang “aliran”, di mana setiap partai pada hakikatnya telah mempunyai jaringan pendukungnya sendiri sesuai dengan aliran politik dan ideologis yang dianut oleh partai yang bersangkutan. Dengan menggunakan perspektif aliran —yakni pengelompokan masyarakat secara sosial-keagamaan—maka pada umumnya pemilih partai NU pada Pemilu 1955 adalah kalangan “santri”, terutama di Jawa Timur. Melalui perspektif yang sama, maka sebagian besar pemilih PNI di Jawa diidentifikasi sebagai kaum “priyayi”, sedangkan pemilih PKI pada Pemilu 1955 adalah kalangan “abangan”. Jadi setiap partai mencoba mempertahankan basis dukungan berdasarkan jaringan sosial, kultural, dan agama di tingkat masyarakat melalui organisasi-organisasi *onderbouw*<sup>3</sup>.

Meski acapkali diperdebatkan, dalam pemilu legislatif dengan sistem multipartai pada 1999 dan 2004, sebagian basis dukungan partai-partai tampaknya masih bersifat aliran, kendati mungkin sudah

---

<sup>2</sup>Lihat misalnya, Moh Nurhasim, ed., *Kualitas Keterwakilan Legislatif: Kasus Sumbar, Jateng, Jatim dan Sulsel*, Jakarta: P2P LIPI, 2001; Lili Romli, ed., *Dinamika Lembaga Perwakilan Lokal: Studi tentang Peranan DPRD dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik*, Jakarta: P2P LIPI, 2002; dan juga Lili Romli, ed., *Potret Partai Politik Pasca-Orde Baru*, Jakarta: P2P LIPI, 2003.

<sup>3</sup>Untuk konteks pola dukungan yang bersifat aliran dalam Pemilu 1955, lihat Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

sangat “cair” dibandingkan pola politik aliran pada Pemilu 1955. Hal ini misalnya tampak pada keunggulan PKB, sebagai partai yang dibentuk NU, di daerah-daerah yang berbasis kaum *Nahdliyin*, begitu pula yang terlihat dari keunggulan PDI-P – pewaris ideologis dari PNI – di wilayah-wilayah basis PNI pada Pemilu 1955. Pada Pemilu 2004 kecenderungan pola dukungan yang bersifat aliran itu masih tampak muncul meskipun tidak sekuat pada Pemilu 1955.

Dalam konteks penyebaran dukungan, pada Pemilu 2004 perolehan suara PDI-P menurun cukup drastis di semua propinsi termasuk basis utamanya di Bali, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Tidak mengherankan jika secara nasional PDI-P kehilangan 44 kursinya di DPR dibandingkan hasil Pemilu 1999. Di sisi lain, meskipun perolehan suara Golkar juga menurun dibandingkan Pemilu 1999, namun perolehan kursinya meningkat dari 120 menjadi 128 kursi pada Pemilu 2004. Kecenderungan yang sama dialami oleh PKB (51 menjadi 52 kursi) dan PAN (34 menjadi 53 kursi) yang mengalami penurunan perolehan suara secara nasional tetapi dari segi jumlah perolehan kursi bertambah dibandingkan pemilu sebelumnya. Sementara itu PPP yang juga mengalami penurunan perolehan suara namun jumlah kursinya (58) di DPR tidak berubah.

Selain itu, yang juga menarik dalam peta pemilu legislatif 2004 ini adalah tetap menurunnya minat masyarakat terhadap partai-partai Islam. Meskipun secara sosiologis umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, namun ternyata hanya sebagian kecil saja yang mendukung partai Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosiologis dan realitas politik.<sup>4</sup> Pada Pemilu legislatif 2004, total perolehan suara partai Islam (PPP, PBB,

---

<sup>4</sup>Lebih jauh analisis tentang hal ini dapat dilihat dalam Lili Romli, “Partai Islam dan Memilih Islam di Indonesia” dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 1 No. 1, Jakarta: LIPI Press, 2004, hal. 29-48. Tentang kegagalan partai-partai Islam dalam Pemilu 1999, lihat Syamsuddin Haris, “Politicization of Religion and the Failure of Islamic Parties in the 1999 General Election”, dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth, ed., *Election in Indonesia: The New Order and Beyond*, London and New York: RoutledgeCurzon, 2004, hal. 61-76.

PBR, PKS, dan PPNUI) hanya 21,17% saja. Realitas ini sekali lagi membuktikan runtuhnya mitos “politik kuantitas”, yang menganggap mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam akan berbanding lurus dengan sikap pilihannya sehingga otomatis mereka akan memilih partai Islam.<sup>5</sup> Dengan demikian umat Islam tidak terikat dengan simbol-simbol keislaman dan juga tidak lagi melihat partai Islam sebagai suatu representasi keislaman. Jadi yang lebih dilihat umat Islam adalah substansi, sejauh mana suatu partai menerapkan nilai-nilai keislaman, bukan formalisme dan labelnya.<sup>6</sup>

Dalam kaitan ini, Arumahi, seorang narasumber yang menjabat Sekretaris PWI sekaligus Pemimpin Redaksi Harian “Pedoman Rakyat” dan anggota Panwaslu Sulawesi Selatan, mengemukakan,

Semua ini masih dalam masa transisi. Dulu yang namanya PPP sangat diidentikan dengan Islam, apalagi dengan lambang ka’bah, pemilih tradisionalnya masih ke situ. Tapi ketika ternyata lambang ka’bah itu tidak mencerminkan perilaku elit partainya, mulai terjadi pergeseran. Jadi yang namanya tradisional mengalami perubahan. Pengalaman pemilu kemarin itu sampai ke tingkat bawah telah terjadi rasionalisasi pemilih. Saya kira ke depan orang tidak akan tertarik lagi kepada simbol-simbol ka’bah, simbol bulan bintang, tetapi orang akan tertarik kepada figur yang dapat dipercaya.<sup>7</sup>

### **Pergeseran Pilihan: Pemilu Legislatif ke Pemilu Presiden**

Pemilihan umum 2004 untuk anggota-anggota badan perwakilan di bawah sistem multipartai merupakan pengalaman ketiga bangsa Indonesia sejak yang pertama pada 1955 dan yang kedua pada 1999. Di luar tiga kali pemilu yang relatif bebas dan demokratis dengan sistem multipartai, selama pemerintahan Orde Baru rakyat sebenarnya sudah terbiasa dengan pemilu – bahkan sejak 1971

---

<sup>5</sup>Lili Romli, *ibid*, hal. 45.

<sup>6</sup>*Ibid*.

<sup>7</sup>Wawancara Tim dengan H.L. Arumahi, Sekretaris PWI Sulsel, Pemred HU. “Pedoman Rakyat” dan anggota Panwaslu, di Makassar, Agustus 2005.

hingga 1997 – meskipun dalam praktiknya tak lebih dari prosesi untuk melestarikan kekuasaan otoriter Soeharto.

Namun demikian pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan pengalaman pertama bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya. Sebagai pengalaman pertama, banyak pihak meragukan kemampuan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara damai dan demokratis. Kekhawatiran akan munculnya konflik dan gejolak melatarbelakangi keraguan tersebut meskipun pemilu legislatif yang mendahuluinya pada 5 April 2004 terselenggara dalam suasana kondusif serta berlangsung aman, damai, dan hampir tanpa gejolak. Keraguan dan kekhawatiran akhirnya memang tidak terbukti, dua putaran pemilu presiden berlangsung aman dan damai seperti juga pemilu legislatif.

Pada mulanya persiapan penyelenggaraan pemilu presiden diwarnai oleh politisasi dan *politicking* elit partai di DPR terhadap materi UU sebagai aturan main pemilu presiden, namun pada akhirnya rakyat di dalam bilik suaralah yang menentukan. Seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, para politisi partai besar seperti Golkar, PDI-P, dan PKB di DPR berusaha menggoalkan suatu UU yang menguntungkan kelompok mereka sendiri dan sebaliknya merugikan kelompok atau partai lain. Golkar berusaha agar UU Pemilu Presiden tidak menghambat ketua umumnya Akbar Tandjung yang tengah dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi; PDI-P berjuang agar persyaratan pendidikan kandidat presiden tidak harus sarjana karena akan menghambat peluang ketua umumnya Megawati Soekarnoputeri; begitu pula PKB berjuang agar persyaratan “sehat jasmani dan rohani” tidak menghambat keinginan Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid untuk maju kembali sebagai kandidat presiden. Pilihan kompromi akhirnya diambil oleh para politisi DPR, sehingga kepentingan partai-partai terakomodasi kendati hal itu belum tentu mencerminkan kehendak rakyat.

Kecenderungan *politicking* yang sama tampak dalam pembahasan tentang persyaratan bagi partai-partai yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Partai-partai besar

berusaha agar persyaratan perolehan suara minimal bagi partai di DPR yang berhak mengajukan kandidat presiden dipatok cukup besar, dan sebaliknya partai-partai kecil berjuang agar persyaratan yang sama ditetapkan sekecil mungkin sehingga elit partai kecil berpeluang pula mengajukan calon pasangan presiden dan wapres seperti halnya partai-partai besar. Seperti halnya soal persyaratan kandidat, dalam masalah prasyarat bagi partai-partai pun dicapai kesepakatan yang sifatnya kompromi politik antara partai-partai besar dan partai-partai kecil. Jadi, meskipun disepakati bahwa hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh minimal 15 persen kursi DPR, atau minimal perolehan suara sah secara nasional, yang dapat mengajukan calon dalam pemilu presiden, namun ketentuan itu belum berlaku pada Pemilu Presiden 2004. Untuk Pemilu 2004, disepakati bahwa partai-partai atau gabungan partai yang memperoleh minimal 3 persen kursi DPR atau minimal 5 persen suara sah secara nasional dapat mengajukan pasangan calon untuk pemilu presiden<sup>8</sup>. Dengan kompromi tersebut maka tujuh partai besar, Golkar, PDI-P, PPP, PKB, PAN, PKS, dan PD, berhak mengajukan pasangan calon presiden tanpa harus bergabung atau berkoalisi dengan partai lain.

### **Pergeseran Pilihan Putaran Pertama**

Kelima pasangan atau paket calon presiden dan wakil presiden – Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto/Solahudin Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono/Jusuf Kalla, Amien Rais/Siswono Yudhohusodo, dan Hamzah Haz/Agum Gumelar – pada dasarnya muncul dari keyakinan para elit politik bahwa pola memilih masyarakat Indonesia belum berubah, yakni dominannya preferensi pilihan atas dasar identifikasi kultural. Pasangan Megawati-Hasyim dan para pendukungnya yakin bahwa gabungan PDI-P sebagai salah satu partai besar dan dukungan kaum *Nahdliyin*, terutama di Jawa, merupakan modal besar yang dapat mengantarkan paket calon yang

---

<sup>8</sup>Lihat “Ketentuan Peralihan”, Pasal 101, UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres.

diusulkan partai banteng ini terpilih dalam pemilu presiden. Keyakinan yang sama jelas dimiliki oleh pasangan calon lain, Wiranto-Wahid. Bagi tim sukses pasangan terakhir, dukungan tak langsung Abdurrahman Wahid sebagai kakak kandung Solahudin tentu diharapkan akan lebih menggiring suara kaum “sarungan” ke paket yang diajukan oleh Partai Golkar ini. Sementara itu paket Amien-Siswono tentu tidak hanya berharap dukungan dari kalangan Muhammadiyah dan kaum nasionalis, melainkan juga bisa lebih luas. Di sisi lain, pasangan Hamzah-Agum menunggu limpahan suara pemilih Islam tradisional –meskipun hasil pemilu legislatif tidak cukup menjanjikan, sedangkan Yudhoyono-Kalla mengandalkan popularitas dan ketokohan mantan Menko Polkam Yudhoyono yang tengah menjadi “bintang” media massa di Tanah Air lantaran pengunduran dirinya dari Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati.

Akan tetapi, seperti telah diketahui, optimisme para kandidat presiden serta para anggota tim suksesnya tersebut ternyata tidak terbukti. Sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini, pola dan kecenderungan perilaku memilih masyarakat dalam pemilu presiden ternyata cenderung berbeda dan bahkan berubah drastis dibandingkan pemilu legislatif. Dalam pemilu legislatif, preferensi pemilih masih mudah dikenali berdasarkan patron lama. Namun ketika pemilu presiden, pemilih kembali menjadi *floating mass* (massa mengambang).<sup>9</sup> Ketika masa kampanye, massa dengan mudah berganti-ganti baju kaos, jumlah jari yang diangkat dan identitas. Mereka bisa setiap hari menjadi simpatisan setiap kontestan. Mereka melakukannya dengan sadar, memanfaatkan secara maksimal kemajemukan identitas mereka sebagai subyek politik yang dianggap mengambang, bukan menetap.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Lihat, “Gugurnya Teori Perilaku Pemilih dan Peran Kaum Migran”, dalam *Republika*, 7 Juli 2004.

<sup>10</sup>Lihat Ariel Heryanto, “Seakan-akan Pemilu” dalam Ifdhal Kasim, ed. *Mendemokratisasikan Pemilu*. Jakarta: ELSAM, 1996, hal. 97. Lebih jauh, Heryanto menyatakan bahwa sesungguhnya massa tidak pernah apolitis apalagi mengambang secara pasif dan jinak. Massa mengambang

Tabel 2 Hasil Perolehan Suara Sah Nasional  
Pemilu Presiden Putaran I dibandingkan Pemilu Legislatif

Pasangan calon	Persentase Pilpres Putaran I	Partai Pendukung Pasangan Calon	Persentase Pemilu Legislatif
Wiranto – Wahid	22,15	Golkar	21,58
Megawati – Hasyim	26,61	PDI-P	18,53
Amien – Siswono	14,66	PAN	6,44
Yudhoyono – Kalla	33,57	PD	7,45
Hamzah – Agum	3,01	PPP	8,15

Sumber: Disarikan dari <http://www.kpu.go.id/>

Selain itu, pada pemilu legislatif, masih tampak loyalitas pemilih terhadap partai-partai besar seperti Golkar, PDI-P, PKB, PPP, PAN dan PBB. Keadaan berubah ketika pada pemilu presiden yang ditawarkan adalah paket pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan konvensi, kesepakatan, dan koalisi elit antarpartai politik. Karena itu tatkala pemilu presiden, preferensi masyarakat dalam memilih partai pada pemilu legislatif tidak berlaku dan bahkan menjadi tidak relevan dalam menjelaskan pola dan peta sumber dukungan dalam pemilu presiden.

Sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini, pada pemilu presiden putaran pertama, optimisme para elit partai besar bahwa preferensi pemilih dalam pemilu presiden seolah-olah sama dengan pemilu legislatif ternyata tidak terbukti. Dari data hasil survei IFES

---

bukanlah kaum bodoh yang mudah ditipu dan tak berdaya digiring ke sana ke mari oleh para kontestan pemilu. Atau sebaliknya, massa diromantisir sebagai oposisi yang terus-menerus mengadakan perlawanan sehari-hari. Massa mengambang justru bisa menggeliat dan menabrak dengan jurus-jurus yang tidak terduga dengan memanfaatkan secara ekstrim tenaga apapun dari lawan yang mencoba mengendalikannya. Menurut Heryanto, massa mengambang adalah massa yang bersenang-senang, sekadar iseng dan asyik menikmati “pesta rakyat” dalam pemilu itu.

tersebut terlihat bahwa pada putaran pertama, hanya para pemilih Partai Demokrat (89,5 persen), PAN (81,5 persen), dan pemilih PDI-P (71,1 persen) yang masih cukup solid dan loyal terhadap kandidat presiden yang diajukan oleh partainya masing-masing. Sedangkan para pemilih Partai Golkar terpecah untuk mendukung Megawati-Hasyim dan Wiranto-Wahid, para pemilih PKB terpecah suaranya ke Yudhoyono-Kalla, Wiranto-Wahid, dan Megawati-Hasyim, suara pemilih PPP menyebar ke semua pasangan calon, sementara dukungan pemilih PKS cenderung diberikan kepada Amien-Siswono, Wiranto-Wahid, dan Yudhoyono-Kalla secara hampir berimbang.

Tabel 3 Sumber Dukungan Kandidat Presiden Putaran I  
(Survei IFES pasca-Putaran I)<sup>11</sup>

Partai Pilihan (Legislatif)	Persentase Dukungan terhadap Para Kandidat Presiden Putaran I				
	SBY/JK	MS/HM	W/SW	AR/SY	HH/AG
Golkar	40,2	3,0	48,4	4,2	-
PDI-P	23,7	71,1	0,8	0,8	-
PPP	22,7	11,4	11,4	22,7	29,5
PKB	37,5	19,2	30,8	3,8	-
PD	89,5	0,7	0,7	0,7	-
PKS	29,0	9,7	21,0	35,5	-
PAN	9,8	1,1	4,3	81,5	1,1
PBB	40,0	6,7	6,7	33,3	-
PBR	54,5	-	36,4	-	-
PDS	41,7	58,3	-	-	-
Partai lainnya	51,1	21,3	4,2	12,8	2,1

Sumber: IFES, *Tracking Survey Gelombang XV*, 4 Agustus 2004 (diolah).

Catatan: Data mereka yang mengaku tidak memilih untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden, serta merahasiakan pilihannya tidak disertakan di dalam tabel.

<sup>11</sup>Survei IFES Gelombang XV dilakukan terhadap 1.250 orang responden yang tersebar di 32 propinsi di Indonesia.

Tidak jauh berbeda dengan hasil survei IFES, survei serupa yang dilakukan oleh lembaga penelitian lainnya seperti LSI dan LP3ES menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Hasil survei yang dilakukan oleh LP3ES terhadap 2.525 orang responden – beberapa waktu menjelang pemilu presiden putaran pertama— misalnya memperlihatkan bahwa para pemilih partai-partai dalam pemilu legislatif ternyata tidak ingin ikut memilih kandidat presiden yang diajukan oleh partai yang sama. Seperti ditunjukkan dalam tabel 4 di bawah ini, ternyata hanya 43,5 persen pemilih partai Golkar yang memilih pasangan Wiranto-Wahid yang diajukan Partai Golkar dalam pemilu presiden putaran pertama, sedangkan 34,3 persen lainnya justru memilih Yudhoyono-Kalla yang dicalonkan oleh Partai Demokrat. Kecenderungan serupa tampak dalam perilaku memilih massa pendukung PKB. Meskipun Wiranto menggaet Solahudin Wahid adik kandung Abdurrahman Wahid sebagai pasangannya dalam pemilu presiden, ternyata hanya sekitar 24,9 persen pemilih PKB yang memberikan dukungan terhadap kandidat dari Golkar tersebut. Lebih parah lagi dialami kandidat presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Dalam rangka meraup dukungan kaum *Nahdliyin*, Megawati menggandeng Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, namun ternyata Megawati-Hasyim hanya dipilih oleh 9,7 persen pemilih PKB dalam pemilu legislatif beberapa waktu sebelumnya. Sebanyak 37,1 persen pemilih PKB justru memberikan dukungan mereka kepada pasangan Yudhoyono-Kalla, kandidat dari Partai Demokrat.

Tabel 4 Sumber Dukungan Kandidat Presiden Putaran I  
(Survei LP3ES menjelang Putaran I)<sup>12</sup>

Partai Pilihan (Legislatif)	Persentase Dukungan terhadap Para Kandidat Presiden putaran I				
	SBY/JK	MS/HM	W/SW	AR/SY	HH/AG
Golkar	34,3	5,3	43,5	6,8	1,0
PDIP	16,1	70,3	4,1	0,9	0,5
PAN	20,0	1,7	1,7	68,6	-
PD	84,2	3,9	3,0	1,5	1,0
PPP	36,8	6,4	11,2	12,0	24,0
PKB	37,1	9,7	24,9	5,9	1,7
PKS	34,9	2,4	7,9	40,5	4,0
PBB	48,6	8,1	16,2	21,6	-
PBR	34,3	2,9	22,9	28,6	2,9
PKPB	40,9	-	45,5	9,1	-
Partai lainnya	43,1	18,5	8,5	11,5	2,3

Sumber: Survei LP3ES, "Rakyat dan Pemilu Presiden 2004", tanggal 30 Juni 2004.

Berpalingnya dukungan massa pendukung partai-partai dari pasangan kandidat yang diajukan oleh partai masing-masing juga tampak dalam hasil survei yang dilakukan oleh LSI terhadap 2.760 orang responden di 32 propinsi di Indonesia pada 20-24 Juni 2004. Seperti juga hasil survei IFES dan LP3ES, hasil survei LSI juga memperlihatkan tingginya kecenderungan para pemilih partai-partai, terutama di luar massa pendukung PDI-P, PD, dan PAN yang cukup loyal terhadap kandidat yang diajukan partainya, untuk memilih kandidat yang bukan pilihan partainya. Para pemilih partai-partai Golkar, PKB, dan PPP misalnya, lebih memilih Yudhoyono-Kalla ketimbang kandidat yang diajukan oleh partai pilihan mereka dalam pemilu legislatif sebelumnya.

<sup>12</sup>Survei LP3ES dilakukan terhadap 2.525 orang responden yang tersebar di 31 propinsi di Indonesia, kecuali Maluku.

Tabel 5 Sumber Dukungan Kandidat Putaran I  
(Survei LSI menjelang Putaran I)

Partai Pilihan (Legislatif)	Wiranto-Salahudin	Megawati-Hasyim	Amien-Siswono	SBY-JK	Hamzah Agum	Tidak tahu
Golkar	40,7	6,2	3,5	44,1	1,8	3,7
PDIP	2,1	71,9	3,7	19,1	0,8	2,3
PKB	23,1	12,2	4,8	56,8	1,3	1,7
PPP	9,6	6,4	13,5	44,9	18,6	7,1
PD	2,6	2,6	3,5	90,0	0,3	1,0
PKS	6,1	2,4	43,3	43,3	2,4	2,4
PAN	4	6	73,4	12,6	1,0	3,0
PDS	9,1	48,5	3,0	39,4	-	-
PBR	3,8	3,8	34,6	53,8	-	3,8
PKPB	29,7	10,8	5,4	54,1	-	-
PBB	16,1	7,1	19,6	53,6	1,8	1,8

Sumber: Survei LSI, "Pemenang Pemilu Presiden Putaran Pertama 5 Juli 2004", tanggal 2 Juli 2004.

Dalam hubungan ini, Daniel T. Sparingga, mengatakan teori perilaku pemilih (*voting behavior theory*) tidak berlaku untuk menjelaskan fenomena kemenangan Yudhoyono-Kalla di dua putaran pemilihan presiden 2004. Tesis yang dapat menjelaskan adalah bahwa di kalangan pemilih sejak awal memang ada ambivalensi afiliasi mereka terhadap partai politik. Menurut Sparingga, hal tersebut merupakan hasil depolitisasi politik massa selama 30 tahun lebih atau selama Orde Baru, sehingga dengan adanya sistem pemilihan langsung maka massa seolah-olah dipaksa untuk kembali ke kandang ideologis dalam pemilu legislatif, namun setelah pemilu legislatif selesai maka loyalitas mereka terhadap partai politik selesai. Sparingga menyatakan, paksaan ideologis tidak

berlaku ketika pemilu presiden, karena massa justru kembali menjadi *floating mass* seperti di era Orde Baru.<sup>13</sup>

### **Pergeseran Pilihan Putaran Kedua**

Barangkali belajar dari pengalaman dalam pemilu presiden putaran pertama, maka para elit partai lebih giat bekerjasama dan merapatkan barisan dalam menyongsong pemilu presiden putaran kedua. Partai-partai politik yang menggumpal di sekitar paket Yudhoyono-Kalla dan Megawati-Hasyim sebagai dua pasangan kandidat yang lolos ke putaran kedua, segera membentuk koalisi-koalisi pendukung masing-masing. Pasangan Yudhoyono-Kalla akhirnya didukung Koalisi Kerakyatan yang terdiri atas PD, PKS, PBB, PKPI, PPD, PP dan PPDI, sedangkan paket Megawati-Hasyim disponsori oleh Koalisi Kebangsaan yang merupakan gabungan Golkar, PDI-P, PPP, PBR, PDS, PKPB, dan PNI-M.

Apabila dihitung dari angka perolehan suara partai-partai pada pemilu legislatif, secara matematis setiap koalisi sangat yakin dapat menjaring sebanyak mungkin dukungan massa.<sup>14</sup> Dengan bertolak pada perolehan suara pemilu legislatif, Koalisi Kebangsaan diprediksi mencapai target 55,75% perolehan suara secara nasional, sedangkan Koalisi Kerakyatan diperkirakan memperoleh 21,35% suara. Selain itu, Yudhoyono-Kalla diperkirakan juga memperoleh dukungan “tidak resmi” dari PKB dan PKS, sehingga kemungkinan dapat memperoleh sekitar 38,36% suara.<sup>15</sup> Secara teoritis-matematis, peluang pasangan Megawati-Hasyim yang didukung Koalisi Kebangsaan jauh lebih besar dibandingkan paket Yudhoyono-Kalla yang didukung Koalisi Kerakyatan. Akan tetapi seperti diketahui, rakyat ternyata menentukan lain. Hasil pemilu presiden putaran

---

<sup>13</sup>Lihat “Gugurnya Teori Perilaku Pemilih dan Peran Kaum Migran”. HU. *Republika*, 7 Juli 2004.

<sup>14</sup>Lebih jauh tentang koalisi partai pada pemilu presiden 2004 putaran kedua ini dapat dilihat di Aris Ananta, dkk., *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2005, hal. 106-110.

<sup>15</sup>*Ibid.*

kedua dimenangkan pasangan Yudhoyono-Kalla dengan memperoleh 69.266.350 suara (60,62%), sedangkan pasangan Megawati-Hasyim hanya mendapatkan 44.990.704 suara (38,39%).<sup>16</sup>

Seperti ditunjukkan tabel hasil survei IFES di bawah ini, koalisi antarelit partai dalam pemilu presiden putaran kedua jelas-jelas tidak efektif dan gagal total karena ternyata rakyat menentukan pilihannya sendiri secara otonom dan independen. Meskipun kandidat dari PDI-P didukung penuh oleh Golkar, PPP, dan PBR melalui Koalisi Kebangsaan, namun ternyata lebih dari 80 persen pemilih partai-partai tersebut menolak untuk memilih Megawati-Hasyim, dan sebaliknya lebih memberikan dukungan kepada paket Yudhoyono-Kalla. Hal yang sama dilakukan oleh sekitar 65 persen pemilih PDS yang lebih memilih Yudhoyono-Kalla ketimbang Megawati-Hasyim.

Tabel 6  
Sumber Dukungan Kandidat Presiden Putaran II

Partai Pilihan (Pemilu Legislatif)	Persentase Dukungan terhadap Kandidat Presiden (Putaran II)		
	Yudhoyono-Kalla	Megawati-Hasyim	Rahasia
Golkar	82	16	2
PDI-P	20	78	2
PPP	84	13	3
PKB	84	16	0
PD	99	1	0
PKS	86	11	3
PAN	87	10	3
PBB	89	8	3
PBR	84	11	5
PDS	65	30	5

Sumber: IFES, *Tracking Survey Gelombang XVIII*, 15 Oktober 2004 (diolah).

Catatan: Data mereka yang merahasiakan pilihan partai dan tidak menjawab tidak disertakan di dalam tabel.

<sup>16</sup>Sumber data dari KPU, <http://www.kpu.go.id/>

Sementara itu jika dilihat dari pergeseran pilihan konstituen dari pemilu presiden putaran pertama ke putaran kedua tampak bahwa kecuali pemilih paket Hamzah-Agum –di mana 55,6 persen memilih Megawati-Hasyim, sebagian besar pemilih paket Wiranto-Wahid dan Amien-Siswono ternyata memberikan suaranya kepada Yudhoyono-Kalla. Sekitar 84,1 persen pemilih Wiranto-Wahid menyumbang suaranya bagi Yudhoyono-Kalla, begitu pula yang dilakukan 83,2 persen pemilih Amien-Siswono. Sedangkan para pemilih pasangan Megawati-Hasyim dan Yudhoyono-Kalla sendiri cukup konsisten mempertahankan pilihan mereka dari putaran pertama ke putaran kedua. Yang menarik, sebagian besar dari mereka yang tidak memilih (golput) pada pemilu presiden putaran pertama ternyata juga memberikan suara bagi pasangan kandidat yang mantan menkopolkam pada Kabinet Megawati tersebut (lihat Tabel 7).

Tabel 7  
Pergeseran Pilihan Konstituen  
Dari Pemilu Presiden Putaran Pertama ke Putaran Kedua

Pilihan pada Putaran Pertama	Pilihan Putaran Kedua (%)		Total (%)
	Yudhoyono-Kalla	Megawati-Hasyim	
Wiranto-Wahid	15,9	84,1	100,0
Megawati-Hasyim	91,9	8,1	100,0
Amien-Siswono	16,8	83,2	100,0
Yudhoyono-Kalla	1,2	98,8	100,0
Hamzah-Agum	55,6	44,4	100,0
Golput	31,6	68,4	100,0
Rahasia	14,0	86,0	100,0

Sumber: Aris Ananta, et.al. (2005), hal. 99.

Dalam kaitan ini, ada semacam pra-anggapan umum bahwa secara historis politik masyarakat Indonesia dibagi secara kasar ke dalam dua blok besar, yakni antara golongan Islam dan golongan Nasionalis. Pra-anggapan ini secara sewenang-wenang telah menyederhanakan pluralitas masyarakat menjadi “dualitas”, yang

akhirnya malah membelah politik Indonesia menjadi dikotomis antara Islam-Nasionalis.<sup>17</sup> Pasangan-pasangan calon presiden dan wakil presiden yang pada akhirnya maju dalam persaingan jelas “memaksakan” penggabungan dari representasi dua golongan yang didasarkan pada pra-anggapan historis-politis tersebut. Alih-alih memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman politik secara moderen, pra-anggapan seperti ini tampaknya malah menggiring dan menjebak masyarakat Indonesia ke dalam suatu kondisi yang justru mengarahkan kepada pemahaman politik yang primordialistik.<sup>18</sup>

Lihatlah paket kelima pasangan kontestan. Golkar bersanding dengan tokoh PKB dan juga NU (Wiranto-Wahid), PDI-P bergandengan dengan Ketua Tanfidziah PBNU (Mega-Hasyim), PAN bergabung dengan tokoh nasionalis (Amien-Siswono), Partai Demokrat melangkah bersama Jusuf Kalla yang ternyata juga mengaku “NU” (SBY-JK) dan PPP berpasangan dengan nasionalis-militer (Hamzah-Agum). Semua pasangan mencoba menjadi yang paling ideal berdasarkan pra-anggapan tersebut, padahal bila partai politik yang mengusung para kandidatnya itu lebih berorientasi ke masa depan, tentulah tidak akan memaksakan “bersatunya” dua prinsip yang saling bertolak belakang.

Massa pendukung dan simpatisan partai bisa menjadi apatis karena masalah ideologi ini, jika ternyata elit partai tidak konsisten dengan prinsipnya dan mau dimingi-imingi jabatan dengan dalih demi kepentingan umat dan atau agama. Misalnya PKS yang pada pemilu legislatif lebih mengedepankan program, visi dan misi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat, pada akhirnya terseret juga pada pragmatisme politik dengan mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres. Bahkan suara internal elit PKS sendiri sempat terpecah menjadi dua kubu, yaitu yang mendukung Amien-Siswono dan yang menginginkan Wiranto-Wahid dengan alasan yang berbeda-beda pula.

---

<sup>17</sup>TA. Legowo, ed., *Pemilihan Presiden secara Langsung: Dokumentasi, Analisis dan Kritik*. Jakarta: Kedeputan Dinamika Masyarakat Menristek RI, 2004, hal. 113.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 113-114.

Jadi, asumsi bahwa melalui koalisi antarpolisi dapat dijangkau massa pemilih sebanyak mungkin lewat perhitungan angka besarnya pemilih partai dalam pemilu legislatif, ternyata keliru. Elit partai sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan perubahan perilaku pemilih meskipun sudah ditunjukkan oleh hasil survei sejumlah lembaga survei, baik sebelum pemilu presiden putaran pertama maupun survei sebelum pemilu presiden putaran kedua. Hasil survei LSI dan IFES bahkan menunjukkan bahwa bahwa para pemilih tidak begitu terpengaruh oleh koalisi antarelit partai karena mereka telah menentukan pilihan jauh-jauh hari sebelum momentum pemberian suara dilakukan.<sup>19</sup>

Mengenai kecenderungan perubahan perilaku pemilih, salah seorang narasumber mengemukakan:

Di dalam pemilihan 2004 kemarin, baik [pemilu] legislatif maupun [pemilu] presiden [putaran] pertama dan kedua, itu menunjukkan bahwa elit politik di partai itu terlambat memahami fenomena *voting behavior*. Mereka masih bias hegemonik elit, seperti zaman Orde Baru. Jadi kalau partai itu berkoalisi, maka dianggapnya masyarakat akan mengikuti koalisi partai. padahal *ndak*. Orang-orang Jakarta ‘kan ngomong “emangnye gue pikirin”, kan gitu. ... Karena masyarakat punya kecenderungan lain yang berbeda dengan kepentingan partai. dulu partai itu menentukan sewenang-wenang. Dalam pemilihan langsung, partai harus tunduk terhadap aspirasi masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sekitar 69,4 persen responden survei LSI menyatakan telah menentukan pilihan sebelum masa kampanye berlangsung, edangkan survei IFES melaporkan bahwa 56 persen responden telah memutuskan pilihannya paling tidak satu bulan sebelumnya.

<sup>20</sup>Wawancara Tim dengan Aribowo, Ketua KPU Jawa Timur, di Surabaya, Juli 2005.

## **Kecenderungan Perilaku Pemilih**

Perubahan perilaku pemilih yang ditandai dengan pergeseran kecenderungan pilihan konstituen dari pemilu legislatif ke pemilu presiden merupakan gambaran empiris paling jelas bahwa tengah terjadi perubahan pola perilaku pemilih di Indonesia. Uraian sebelumnya memperlihatkan bahwa partai sebagai mesin politik untuk mendulang dukungan dalam pemilu ternyata tidak lagi efektif dalam konteks pemilu presiden. Para elit politik dan pemimpin partai di tingkat nasional boleh saling berkoalisi dan membangun optimisme, tetapi pada akhirnya rakyatlah yang berdaulat dan menentukan siapa yang dianggap pantas dan layak memimpin negerinya. Pemilu presiden yang dimenangkan oleh Yudhoyono-Kalla menunjukkan bahwa faktor ketokohan dan atau figur ternyata lebih menentukan ketimbang faktor partai sebagai mesin politik.

## **Pemilih Tradisional**

Gambaran tentang pergeseran dan kecenderungan perilaku pemilih seperti dikemukakan di atas sekaligus merupakan indikasi paling penting bahwa dalam konteks pemilu presiden identifikasi pemilih tradisional, yakni konstituen yang memilih berdasarkan preferensi kultural-primordial, tidak lagi relevan. Para pemilih dari kaum *Nahdliyin* tidak otomatis memilih kandidat yang berasal dari tokoh NU atau partai yang didirikan oleh NU (yakni PKB), begitu pula para pemilih dari kalangan Muhammadiyah ternyata tidak semua memberikan suaranya bagi Amien Rais. Data hasil survei LSI menunjukkan bahwa ternyata hanya 55 persen responden yang mengaku “Muhammadiyah” memberikan dukungannya terhadap pasangan Amien-Siswono pada pemilu presiden putaran pertama. Sedangkan warga NU yang memberikan dukungan kepada Megawati-Hasyim jauh lebih rendah lagi, yakni hanya 19 persen, sama dengan dukungan kepada pasangan Wiranto-Wahid, sementara sebagian besar (50 persen) lebih mendukung pasangan Yudhoyono-

Kalla<sup>21</sup>. Sementara itu pada putaran kedua, hanya sekitar 28 persen responden NU yang tetap memberikan dukungan kepada Megawati-Hasyim karena 58,3 persen lebih memilih Yudhoyono-Kalla<sup>22</sup>. Sebagaimana tampak pada data hasil survei terhadap para responden seperti diuraikan di atas, kegagalan para kandidat dari partai besar antara lain bersumber pada keyakinan bahwa para pemilih tradisional merupakan sumber dukungan utama mereka di luar para pemilih yang bisa dibujuk melalui berbagai bentuk kegiatan kampanye, baik kampanye langsung secara tatap muka maupun tak langsung melalui media massa.

Meskipun demikian, yang menarik, dalam batas-batas tertentu preferensi primordial tersebut masih muncul pada beberapa daerah tertentu. Di Sulawesi Selatan pada umumnya, keunggulan Yudhoyono-Kalla, antara lain karena preferensi konstituen di daerah tersebut yang lebih didasarkan pada ikatan kedaerahan dengan Jusuf Kalla. Mereka memilih kandidat dari putera daerah sebagai solidaritas emosional. Seperti pengalaman yang terjadi di Makassar, SBY menang di Propinsi Sulawesi Selatan karena pasangannya, Jusuf Kalla, adalah orang Bone. Seperti yang dituturkan Armin Arsyad, Dosen FISIP UNHAS:

Saya kira figur Yusuf Kalla, bukan SBY. Yang menarik figur Jusuf Kalla khusus di Sulawesi Selatan. Yusuf Kalla kan orang Bone. Kemenangan Yusuf 99% di Bone, kapan lagi orang Bone jadi wakil presiden?<sup>23</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari preferensi yang bersifat kultural-primordial, para pemilih tradisional juga cenderung mengabaikan visi dan misi pasangan kandidat presiden dan wapres. Di NTT sebagai kantong tradisional PDI-P misalnya, pilihan tetap

---

<sup>21</sup>Lihat, "Pemenang Pemilu Presiden Putaran Pertama 5 Juli 2004", analisis temuan LSI tanggal 2 Juni 2004, hal. 14.

<sup>22</sup>Lihat, "Rakyat dan Pemilu Presiden 2004", Laporan Survei LP3ES, tanggal 9 September 2004, hal. 9.

<sup>23</sup>Wawancara Tim dengan Armin Arsyad, Dosen FISIP UNHAS, di Makassar, Agustus 2005.

diberikan kepada Megawati karena kuatnya ikatan emosional masyarakat setempat terhadap Soekarno yang pernah dibuang oleh kolonial Belanda ke Ende, NTT. Yosep Hardi, anggota KPUD NTT menjelaskan:

Pada Pilpres putaran II secara keseluruhan di NTT, perolehan suara Mega masih sangat mendominasi. NTT ini adalah kantong tradisional PDIP. Mereka tidak mau tahu bagaimana visi calon presiden yang lain, tapi mereka melihat tokoh yang punya ikatan emosional dengan beberapa generasi di atas mereka. Siapa orangnya sangat menentukan. Jadi masuk akal, Mega menang telak di NTT. Dalam kemiskinan orang NTT, dengan kesederhanaan mereka menjadi mudah dipengaruhi oleh kharisma keturunan Soekarno. Mega, memang sangat kuat disini. Dia sering ke sini. Ada sejarahnya kan. Bapaknya Mega dibuang Belanda ke Flores (Ende). Dia juga boleh dibilang, 'dekat dengan kalangan gereja'. Itulah barangkali pendekatan yang Mega dan Timnya pakai untuk meraih suara di NTT. Dia figur yang sudah lebih dikenal di NTT, dibandingkan dengan SBY.<sup>24</sup>

Namun agak berbeda dengan kecenderungan di Sulsel dan NTT, di Jawa Timur sebagai kantong suara terbesar harapan serupa tidak terjadi. Para pemilih tradisional dalam pemilu legislatif mengubah perilaku mereka ketika pemilu presiden lantaran begitu banyaknya kandidat yang mengklaim sebagai warga *Nahdliyin*. Akibatnya, kebingungan melanda warga NU, sehingga mereka akhirnya memutuskan mengubah perilaku tradisionalnya. Seorang narasumber mengemukakan:

Saya melihat bahwa PKB dan juga NU bahkan di sini juga Hamzah Haz dipromosikan sebagai kader NU juga. Sehingga dengan munculnya Sholahudin Wahid dan Hasyim Muzadi yang notabene sama-sama orang Jawa Timur, artinya Hasyim sebagai orang asli Jawa Timur sementara Sholahudin juga akarnya dari Jombang, justru menurut saya semakin membuat ada kebingungan di kalangan akar rumput. Dan juga di elit-elit PKB sendiri secara terang-terangan

---

<sup>24</sup>Wawancara Tim dengan Yosep Hardi H, anggota KPUD NTT, di Kupang, Juli 2005.

mereka kan ke SBY. Sehingga saya kira PKB Jatim meskipun kyai-kyainya kemudian ada yang tidak setuju ke SBY, tapi sebenarnya kyai-kyai yang pengaruhnya besar-yang punya *popular mass* itu sudah terlebih dulu ke SBY.<sup>25</sup>

Sementara itu pimpinan KPUD Jatim, Aribowo, mengungkapkan bahwa karakter pemilih di Indonesia itu cenderung agraris tradisional, yakni lebih melihat figur dan sangat emosional. Gambaran sosok figur yang mereka terima dari media massa lebih dijadikan acuan dibandingkan dengan opini tokoh masyarakat tentang kandidat yang sama. Berikut penuturannya:

Opini seseorang tokoh itu untuk mempengaruhi masyarakat itu relatif terbatas. Itu pertama. Nah, hasil riset itu masyarakat itu terpengaruh pikirannya, perilakunya untuk memilih itu dari media massa. Bukan dari pendapat orang terhadap kandidat, tetapi dari media massa. Termasuk misalnya bagaimana masyarakat itu mengenal Yudhoyono, itu dari media massa. Dari media massa televisi, media massa radio, media massa koran, dan sebagainya. Nah, mereka melihat hasil-hasil riset itu, mereka melihat Yudhoyono itu hampir dengan dengan –secara kultural– dengan masyarakat agraris tradisional.<sup>26</sup>

## **Pemilih Pemula**

Pemilih pemula menduduki posisi penting dalam Pemilihan Umum 2004. Pasalnya, ditilik dari jumlahnya, pemilih pemula mencapai sekitar 34 persen dari keseluruhan pemilih di Indonesia yang mencapai 147.219 juta jiwa.<sup>27</sup> Suara pemilih pemula menjadi sasaran para kandidat sebagai sumber dukungan yang potensial. Bahkan tak tanggung-tanggung, para kontestan presiden pun menghadiri ajang AFI yang saat itu sedang *booming* di kalangan anak muda dan

---

<sup>25</sup>Wawancara Tim dengan Dhimam Abror Djuraid, PU. Harian “Suara Indonesia” dan Ketua PWI Jatim, di Surabaya, Juli 2005.

<sup>26</sup>Wawancara Tim dengan Aribowo, Ketua KPU Jawa Timur, di Surabaya, Juli 2005.

<sup>27</sup>*Kompas*, Kamis, 24 Februari 2004.

disiarkan secara langsung di salah satu televisi swasta. Mereka rela meluangkan waktu untuk hadir, bahkan ikut tampil menyanyi di acara itu, demi menunjukkan kepedulian mereka terhadap aktivitas kaum muda. Mereka seolah-olah ingin membuktikan bahwa aspirasi anak muda pun akan selalu menjadi perhatian mereka.

Anak-anak ABG – yang juga pemilih pemula – akhirnya memiliki kecenderungan untuk memilih kandidat yang wajahnya disorot kamera televisi saat menonton acara AFI itu. Anak-anak remaja yang masih kuat ikatan *peer group*-nya, saling mempengaruhi satu sama lain sehingga preferensi mereka dalam pemilu presiden pun karena ikut-ikutan teman.

Media massa juga berperan penting dalam upaya mensosialisasikan pemilu di kalangan remaja. Stasiun televisi MTV Indonesia, menayangkan klip iklan layanan masyarakat dengan ajakan dalam bahasa *gaul* para remaja pemirsa TV tersebut seperti, “karena suara *elo ngaruh banget!*”. Pun dalam iklan kampanye kandidat presiden, figur Yudhoyono digambarkan dekat dengan anak muda. Dalam iklannya, Yudhoyono tampil bersama ABG – sebagai simbol kekinian dan kedekatannya dengan kaum muda. Selain karena ikut-ikutan teman dan paparan informasi lewat media massa, preferensi pemilih pemula juga dipengaruhi oleh sosialisasi politik di dalam keluarga dan lingkungannya. Seperti diungkapkan Lery Mboeik, aktivis LSM di Kupang:

Ketika ayah, paman, kakak bersimpati kepada Mega maka ibu, adik akan terpengaruh untuk memilih calon yang sama. Pendidikan dan informasi yang kurang berimbang, mendorong pilihan seseorang akan cukup dipengaruhi oleh pilihan politik di dalam keluarganya. Lingkungan tempat tinggal, teman bermain dan pekerjaan juga ikut mempengaruhi pilihan mereka.<sup>28</sup>

Hasil survei lembaga-lembaga yang dikutip sebelumnya mengkonfirmasi bahwa sebagian besar pemilih pemula tampaknya memberikan dukungan mereka kepada paket kandidat

---

<sup>28</sup>Wawancara Tim dengan Lery Mboeik, Aktivis LSM PIAR Kupang, di Kupang, Juli 2005.

Yudhoyono-Kalla. Survei LSI memperlihatkan bahwa 67,5 persen pemilih yang berusia 19 tahun ke bawah (17-19 tahun) lebih memberikan suara mereka kepada pasangan kandidat dari Partai Demokrat tersebut ketimbang pasangan Megawati-Hasyim (28,9 persen) yang diajukan oleh PDI-P.<sup>29</sup> Bagi para pemilih pemula di perkotaan, penampilan publik pasangan kandidat Yudhoyono-Kalla yang lebih “keren” dibandingkan Megawati-Hasyim, tampaknya menjadi faktor daya tarik tersendiri yang mempengaruhi preferensi mereka.

### **Pemilih Rasional dan Rasionalitas Pemilih**

Selain kecenderungan-kecenderungan yang dikemukakan sebelumnya, fenomena pemilu presiden 2004 juga ditandai dengan pergeseran persepsi tentang rasionalitas pemilih. Ada anggapan umum bahwa demokrasi semakin maju dan berkembang apabila masyarakatnya semakin rasional, yang dicerminkan antara lain dari perilaku memilih yang tidak semata-mata berdasarkan preferensi kultural-primordial, melainkan lebih didasarkan pada preferensi program dan visi partai-partai atau para kandidat yang bertarung dalam pemilu. Akibatnya, muncul anggapan bahwa seolah-olah hanya pemilih yang menentukan pilihannya atas dasar preferensi program dan visi saja yang bisa dikategorikan sebagai rasional, dan sebaliknya mereka yang memilih berdasarkan preferensi lain, termasuk figur atau ketokohan, cenderung dikatakan sebagai tidak rasional.

Konsep rasionalitas seperti dikemukakan di atas jelas cenderung “bias” karena (1) lahir dari persepsi dan idealisasi komunitas intelektual tentang preferensi pemilih dalam pemilu yang dibayangkan sama atau seragam pada setiap warga negara; dan (2) seolah-olah rasionalitas selalu berbanding lurus dengan intelektualitas. Padahal, kalau bertolak dari asumsi bahwa apa pun pilihan tindakan bisa dianggap rasional apabila pilihan itu

---

<sup>29</sup>Lihat, “Final LSI National Survey Predicts: Victory for SBY in the Presidential Election”, analisis temuan LSI yang diluncurkan pada 16 September 2004.

berdasarkan tujuan pemilih<sup>30</sup>, maka setiap pilihan rakyat dalam pemilu pada hakikatnya rasional, sekurang-kurangnya dari sudut pandang dan persepsi yang bersangkutan. Jadi, sebenarnya tidak ada rasionalitas yang dibayangkan dapat berlaku sama pada setiap pemilih, karena setiap orang memiliki tujuan dan persepsi tentang tujuan yang berbeda dan tidak sama pula. Mengenai hal ini seorang narasumber mengatakan:

Perilaku pemilih itu bisa irasional dan rasional. Tapi kalau kita lihat dari perbincangan-perbincangan dengan masyarakat, apa yang dikatakan para pengamat sebagai pemilih irasional itu sebetulnya mereka [mem]punya[i] rasionalitas di dalam pengambilan keputusan. Jadi orang yang memilih figur itu dikatakan atau dikategorikan tidak rasional, tapi ketidakrasionalan yang dikatakan oleh pengamat itu justru ada unsur-unsur kerasionalannya. Karena apa? Karena mereka menganggap figur itu bagaimanapun juga itu masih kuat ya mempengaruhi sikap pemilih. Sehingga karena itu para santri atau juga komunitas pesantren di Jawa Timur itu sangat loyal untuk memilih figur atau partai itu berdasarkan fatwa dari kyainya. Ini bukan irasional, tapi rasional sebatas pada batas-batas legitimasi yang bisa diterjemahkan sebagai suatu bentuk perilaku pemilih. Jadi saya kira sikap para pemilih kita itu bagi saya itu tidak ada yang rasional atau irasional. Justru di balik sikap pemilih itu ada semacam pembenaran-pembenaran yang unik yang ini harus dijelaskan oleh para ilmuwan karena kan nggak mungkin kita meramalkan perilaku pemilih itu hanya dengan analisis ilmiah yang rasional gitu. Tapi, juga ada pemilih-pemilih yang dianalisa tidak rasional tapi justru mereka mengatakan ini rasional. Seperti misalnya di Madura, ada bantuan untuk pesanteren-pesantren ya diterima saja gitu. Soal bahwa mereka tidak memilih partai itu nggak urusannya. Pokoknya

---

<sup>30</sup>Konsep “rasionalitas berdasarkan tujuan” dikembangkan oleh Max Weber dalam mencari penjelasan tentang perkembangan pesat kapitalisme di dunia Barat. Tentang rasionalitas Weber, lihat H.H.Gerth dan C.Wright Mills, *From Max Weber: Essays in Sociology*, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.Ltd, 1947.

yang penting duitnya masuk, pilihannya bisa beda gitu. Jadi, bagi masyarakat ini rasional. jadi ada *wise*-nya ya, kebijakannya sendiri.<sup>31</sup>

Senada dengan hal tersebut, Effendi Gazali mengingatkan, “Jangan mengatakan massa di bawah tidak rasional... mereka memilih rasionalitas versi mereka sendiri. Inilah yang harus didiskusikan dengan melihat pengalaman kolektif dan unsur-unsur budaya mereka”.<sup>32</sup> Bahwa rakyat pada dasarnya memiliki kecerdasan dan akal budi sendiri sebelum menentukan pilihan, juga dikemukakan seorang aktivis LSM,

Itu waktu Bu Mega Presiden, kan zamannya Gus Dur itu kan haram, kemudian halal. Kemarin, pemilihan yang kemarin itu kan haram lagi kan gitu. Lho kok bisa, perempuan itu diharamkan dan dihalalkan jadi pemimpin. Kok bisa diplintir-plintir. Lepas saya bukan pendukungnya Mega lagi, tapi cara-cara kotor seperti itu tidak bagus untuk pendidikan politik. Itu jahat itu. Mempermainkan agama, itu agama kok dipermainkan untuk mendukung dan tidak mendukung kepentingan [politik]. Jangan *dong* dicampur-campur seperti itu. Kalau seperti itu kalau dianalogikan, oh babi itu bisa halal bisa haram tergantung tempatnya di mana, *gitu kan nggak* benar juga. Hal-hal seperti itu yang saya maksudkan sebagai pertunjukan politik yang tidak baik dan itu kemudian yang jadi bahan pelajaran masyarakat. Nah, keburukan-keburukan itu, pertunjukan-pertunjukan itu, ternyata membuat masyarakat kita jadi lebih arif, jadi lebih cerdas mencerna, “oh itu cuma akal-akalan”... begitulah.<sup>33</sup>

Pemilu presiden putaran pertama dan kedua memperlihatkan bahwa keputusan rakyat untuk menetapkan pilihannya tidak dilakukan semata-mata atas dasar program rasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang bersaing. Selain itu, pilihan rakyat tampaknya tidak semata-mata ditentukan oleh faktor politik uang

---

<sup>31</sup>Wawancara Tim dengan Kris Nugroho, Dosen FISIP UNAIR dan mantan Panwaslu, di Surabaya, Juli 2005.

<sup>32</sup>Lihat “Effendi Gazali: Komunikasi Politik Bagian dari Rekonstruksi Budaya”. Harian *Kompas*, 20 September 2004.

<sup>33</sup>Wawancara Tim dengan Pinky Saptandari, Aktivis LSM dan Akademisi, di Surabaya, Juli 2005.

seperti disinyalir oleh sebagian kalangan. Seperti diuraikan sebelumnya, sebagian besar rakyat yang dicerminkan oleh suara para responden survei-survei, bahkan telah memutuskan pilihannya jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya kampanye para kandidat. Hasil survei IFES dan LSI memperlihatkan bahwa alasan utama para responden memutuskan pilihannya adalah faktor kepribadian para kandidat<sup>34</sup>, meskipun tidak ada penjelasan lebih jauh, apakah benar para konstituen mengenal pribadi para kandidat secara dekat, benar dan obyektif. Seorang narasumber mengungkapkannya dengan tepat,

Program itu kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang diperdebatkan, sesuatu yang dipersoalkan, sesuatu yang menjadi aspirasi banyak masyarakat. Itu tidak semua orang bisa menangkap itu. Tapi kalau seseorang melihat figur, wajah, sosok, itu lebih konkrit. Orang ini bisa dipercaya atau tidak, itu lebih konkrit daripada program.<sup>35</sup>

Barangkali, itulah fakta tentang suara rakyat yang makin independen dari pengaruh para patron dan lingkungan sosial-kulturalnya, sehingga terbentuk suatu rasionalitas pemilih yang relatif bebas dari kotak-kotak kultural dan ideologis tertentu pula. Bahwa rasionalitas pemilih itu dibentuk secara langsung ataupun tidak langsung oleh media massa, adalah suatu konsekuensi logis dari kompetisi perebutan suara dalam kehidupan demokrasi.

### **Fenomena Golput**

Keberadaan apa yang disebut sebagai “golongan putih” (Golput) adalah fenomena menarik yang terjadi dalam politik Indonesia. Kehadiran Golput yang dijamin legalitasnya dalam UU Pemilu, termasuk pemilu presiden, menunjukkan adanya perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengakuan tersebut mencerminkan bahwa memilih adalah hak politik atas dasar kesukarelaan, bukan karena

---

<sup>34</sup>Lihat hasil survei IFES tanggal 15 Oktober 2004 dan hasil survei LSI tanggal 2 Juni 2004, di mana faktor kepribadian mengalahkan faktor program/kebijakan sebagai alasan utama responden menentukan pilihan.

<sup>35</sup>Wawancara Tim dengan Aribowo, Ketua KPU Jawa Timur, di Surabaya, Juli 2005.

kewajiban atau unsur keterpaksaan. Namun pengertian Golput dalam pemilu kali ini berbeda dengan Golput pada masa Orde Baru. Pada Era Soeharto, Golput lebih merupakan oposisi terhadap pemerintahan, sehingga menjadi ancaman bagi penguasa Orde Baru karena menolak keabsahan pemilu itu sendiri. Yang menarik, semakin serius pemerintah mengancam Golput, semakin tinggi radikalisme golput. Sebaliknya, semakin serius Golput menggugat pemilu, semakin ia malah membantu pemerintah yang berusaha menampilkan pemilu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh serius. Kedua pihak justru saling menguatkan posisi yang lain dengan cara saling mencela.<sup>36</sup>

Sedangkan Golput dalam konteks pemilu presiden – sekurang-kurangnya menurut seorang narasumber – secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap pemilih yang menganggap tidak ada pasangan yang dianggap “klop” dan mampu mewakili aspirasi mereka.<sup>37</sup> Perubahan fenomena Golput ini diperkirakan akan mewarnai kualitas partisipasi politik pemilih di Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang.<sup>38</sup>

Apabila data KPU tentang mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya digeneralisasikan sebagai “Golput”, maka pada pemilu presiden – dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 155 juta orang – tampak adanya kenaikan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dari sekitar 31 juta<sup>39</sup> (20 persen) pada putaran pertama menjadi sekitar 38,3 juta<sup>40</sup> (24 persen) pada putaran kedua.

---

<sup>36</sup>Lebih lengkap lihat dalam tulisan Ariel Heryanto, “Seakan-akan Pemilu”, dalam Ihdhal Kasim, ed. *Mendemokratisasikan Pemilu*, Jakarta: ELSAM, 1996, hal. 91-95.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>38</sup>Indra J. Piliang, “Golput dan Masyarakat Baru Indonesia” dalam *Kompas*, 28 Juli 2004, dikutip dalam TA Legowo, ed., *Pemilihan Presiden secara Langsung: Dokumentasi, Analisis dan Kritik*. Jakarta: Kedepuitan Dinamika Masyarakat Menristek RI, 2004, hal. 124.

<sup>39</sup>Lihat, *Pemilu Presiden 2004*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, hal 107.

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 159.

Mengapa jumlah Golput pada pemilu presiden menjadi lebih besar dibandingkan pemilu legislatif?<sup>41</sup> Pemilih yang memilih menjadi Golput bisa disebabkan karena berbagai kemungkinan, di antaranya <sup>42</sup> : *Pertama*, sikap apatis pemilih yang beranggapan memilih atau tidak memilih, nasibnya dalam hidup ini akan sama saja. Mereka pasrah sebagai obyek politik yang tidak berdaya. *Kedua*, mereka tidak peduli pemilu presiden karena kesibukan pekerjaan dan sebagainya. Banyak pemilih lupa hari pencoblosan sehingga tidak datang ke TPS.

*Ketiga*, simpatisan yang kecewa pada elit partai politik yang tidak mampu menyuarakan aspirasi mereka. Bahkan simpatisan ini berubah menjadi apatis ketika partainya tidak konsisten dalam mempertahankan ideologinya. *Keempat*, paket kandidat presiden dan wakil presiden yang kurang “klop”, membuat pemilih khawatir terhadap pilihannya kelak. *Kelima*, konflik internal partai, misalnya perpecahan antara NU dan PKB rupanya telah berakibat tidak solidnya suara di kalangan umat. Mereka kebingungan, di antaranya justru menghindari hari pemungutan suara, tidak menghadiri tempat pemungutan suara, atau bahkan meninggalkan kampung tempat tinggalnya untuk bepergian wisata, ziarah, dan sebagainya. *Keenam*, karena “jagoannya” sudah kalah pada pemilu presiden putaran pertama, maka pemilih yang “tidak bisa pindah ke lain hati” memilih untuk tetap setia dengan tidak memilih calon yang lain.

## Penutup

Secara umum pergeseran pilihan konstituen menunjukkan adanya perubahan preferensi pemilih dari pemilu legislatif ke pemilu presiden. Pergeseran pola dan kecenderungan perilaku memilih ini tampak jelas dari kekalahan para kandidat yang dicalonkan oleh

---

<sup>41</sup>Pada pemilu legislatif, jumlah Golput diperkirakan sekitar 25,5 juta (17 persen) dari 147,1 juta pemilih terdaftar. Lihat, Aris Ananta, et al., *Emerging Democracy in Indonesia*, hal. 19.

<sup>42</sup>Disarikan dari beberapa wawancara Tim dengan narasumber dari berbagai kalangan di daerah, Juli – Agustus 2005

partai-partai besar, khususnya Golkar dan PDI Perjuangan. Sebagai partai-partai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu legislatif, paket calon Golkar Wiranto-Wahid dan pasangan kandidat dari PDI-P Megawati-Hasyim mestinya unggul pada pemilu presiden, tetapi ternyata tidak karena dikalahkan oleh paket kandidat presiden Yudhoyon-Kalla dari Partai Demokrat yang relatif lebih kecil. Upaya para elit partai besar untuk memobilisasi dukungan melalui pembentukan Koalisi Kebangsaan pun gagal mengimbangi dukungan rakyat terhadap kandidat yang diajukan koalisi partai yang relatif lebih kecil. Para pemilih partai-partai pada pemilu legislatif ternyata tidak merasa terikat untuk memilih kandidat presiden yang diajukan oleh partai yang sama dalam pemilu presiden.

Faktor yang menyebabkan pergeseran pilihan ini – dilihat dari sudut pandang sosiologis dan psikologis – bervariasi dan saling tumpang tindih satu sama lain. Di antara variabel-variabel itu di antaranya adalah faktor popularitas figur dan ketokohan, pencitraan dan pembentukan opini oleh media massa, kinerja partai, dan tentu saja peningkatan kecerdasan politik dan kearifan masyarakat akibat “pendidikan politik” yang telah mereka alami selama ini. Kinerja dan popularitas elit partai-partai besar yang dianggap buruk oleh publik, dan sebaliknya popularitas figur kandidat Partai Demokrat yang dicitrakan positif oleh media massa, tampaknya menjadi salah satu faktor penting di balik pergeseran pola perilaku pemilih dari pemilu legislatif ke pemilu presiden. Tidak mengherankan jika pasangan Yudhoyono-Kalla telah unggul sejak pemilu presiden putaran pertama.

Berbeda dengan pola perilaku pemilih dalam pemilu legislatif yang cenderung masih bersifat “aliran”, maka perilaku pemilih dalam pemilu presiden sangat cair, sehingga preferensi konstituen lebih didasarkan pada *performance* pribadi, ketokohan, dan citra publik para kandidat ketimbang latar belakang kultural-ideologisnya. Perubahan pola perilaku pemilih tersebut telah tampak pada pemilu presiden putaran pertama ketika ternyata warga NU tidak sepenuhnya mendukung para kandidat yang berlatar belakang *Nahdliyin* seperti ditawarkan oleh Golkar melalui Wiranto-Wahid

dan oleh PDI-P dengan paket Megawati-Hasyim. Hal yang sama terjadi pada kandidat PAN Amien Rais yang gagal meraih dukungan penuh warga Muhammadiyah kendati dia merupakan mantan pimpinan ormas Islam modernis tersebut yang paling populer.

Hasil pemilu presiden putaran kedua yang dimenangkan secara mutlak oleh Yudhoyono-Kalla merupakan bukti empiris bahwa partai-partai politik sebenarnya belum memiliki basis massa yang jelas. Popularitas figur yang dicitrakan positif oleh media, ternyata jauh lebih menentukan ketimbang mesin politik partai ataupun program politik para kandidat presiden. Selain itu, kemenangan Yudhoyono-Kalla memperlihatkan bahwa sebenarnya rakyat memiliki rasionalitas politik sendiri yang berbeda dan belum tentu sama dengan rasionalitas politik para elit partai-partai.

Di luar berbagai faktor yang dikemukakan di atas, fenomena pemilu presiden 2004 memperlihatkan apa yang disebut Edward Aspinall sebagai “*a significant modernisation and professionalisation of politics*” di Indonesia. Modernisasi dan profesionalisasi politik itu ditandai dengan fenomena di mana para kandidat presiden didukung oleh para ahli pemilu, konsultan pencitraan, ahli dan lembaga survei yang melakukan *polling* secara periodik serta manajemen *public relation* yang canggih<sup>43</sup>. Namun demikian, apakah semua itu kemudian bisa mendorong dan memberikan kontribusi bagi suatu praktik demokrasi yang substansial, dalam pengertian lebih produktif serta berpihak kepada kepentingan rakyat, mungkin sejarah bangsa ini yang kelak menjadi saksinya.

---

<sup>43</sup>Edward Aspinall, “Politics: Indonesia’s Year of Elections and the End of the Political Transition”, dalam Budy P. Resosudarmo, ed., *The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Resources*, Singapore: ISEAS, 2005, hal. 13-30.



## Bab V

# FAKTOR PENENTU KEMENANGAN DAN KEKALAHAN KANDIDAT PILPRES 2004

*Syafuan Rozi*

### **Pendahuluan**

Bab ini akan menjelaskan faktor penentu kemenangan dan kekalahan calon presiden pada pilpres putaran pertama dan kedua. Faktor yang menjadi tema penentu kemenangan-kekalahan itu antara lain: ketokohan atau figur, mesin partai, strategi memilih pasangan, basis ideologi, ingatan kolektif pemilih, momen atau peristiwa khusus, peran media massa dan opini publik, serta pengaruh kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*), yang terkait dengan kemenangan dan kekalahan salah satu pasangan calon presiden.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kampanye negatif (*negative campaign*) adalah bentuk kampanye seorang kandidat yang membeberkan kekurangan dan kelemahan kandidat lain secara terbuka untuk dinilai oleh para pemilih. Contohnya: orasi atau dokumen kegagalan atau jejak karir kandidat lain yang dianggap bermasalah, namun mengandung fakta. Sedangkan kampanye hitam (*black campaign*) adalah kampanye berisi pembunuhan karakter kandidat lain lewat berita fitnah dan hasutan. Praktek memobilisasi dukungan dengan pembelian suara, suap atau ancaman intimidasi. Contohnya: fitnah bahwa seorang kandidat telah melakukan kejahatan asusila, berpindah-pindah agama, punya misi penyebaran agama atau akan bertindak diskriminatif terhadap agama tertentu. Putaran I Pilpres di NTT, khususnya di kota Kupang diwarnai oleh *negative-campaign* lewat SMS terhadap suatu calon jika calon itu terpilih Indonesia akan seperti apa, calon yang suka poligami, calon yang tidak konsisten identitas agamanya, bahaya Islamisasi dan Kristenisasi, ancaman otoriterisme bila militer kembali berkuasa. Sumber:

Basis ideologi berkaitan dengan dasar aliran atau afiliasi politik yang dianut oleh suatu komunitas atau individu yang dimiliki kandidat, bersifat meluas atau sempit. Kemampuan kandidat untuk memiliki *cross cutting issues* seperti sinergi nilai-nilai liberal kapitalis, demokrat-libertarian, nasionalis, sekuler, religius, sosialis atau tradisional, dianggap mampu menarik banyak dukungan. Ingatan kolektif pemilih berkaitan dengan riwayat tokoh pada masa lalu yang dikenang positif atau negatif oleh pemilih, untuk dijadikan alasan memilih atau tidak memilih pasangan kandidat tersebut. Momen atau peristiwa khusus berkaitan dengan peristiwa tertentu yang bisa menjadikan seorang tokoh mendapat banyak simpati massa atau sebaliknya tidak populer. Media massa, jajak pendapat dan opini publik diproyeksikan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas substansi komunikasi politik yang dilakukan kandidat dan tim suksesnya untuk meraih dukungan yang meluas.

Selain itu ada persoalan dilema konsolidasi demokrasi berupa kelemahan sistem. Sistem atau aturan main pencalonan yang ada, cenderung belum memungkinkan calon non partai unggulan untuk bisa berkompetisi dalam pemilihan. UU tidak memungkinkan masuknya "tokoh alternatif" yang punya kapasitas *excellent* untuk dicalonkan lewat pintu independen. Sehingga lawananding dalam kompetisi pemilihan cenderung belum berkompetisi maksimal. Hasilnya, rekrutmen kandidat Pilpres Langsung 2004 cenderung belum berpeluang menghasilkan "darah segar" (*new blood*), guna memperkuat masyarakat madani (*civil society*), penanggulangan krisis ekonomi dan kemakmuran yang optimal di Indonesia.<sup>2</sup>

---

Lambe Kanisius, Aktifis LSM Jaringan Rakyat Pemantau Pemilu-Lapesdam NU, Kupang, Sabtu, 23 Juli 2005

<sup>2</sup>Dalam pengertian ini UU Pilpres RI 2004 cenderung belum mampu menghasilkan proses sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan antar rezim, yang lebih berpihak kepada pemilih dari pada kepentingan 'hukum besi' oligarkhi partai. Praktik Pilpres 2004 baru menghasilkan demokrasi prosedural, belum mencapai tahapan demokrasi substansial.

## **Analisis Faktor Kemenangan Pilpres Putaran I**

### *Kemenangan pasangan Yudhoyono-Kalla dan Mega-Hasyim.*

Ada debat apakah faktor ketokohan/figur atau mesin partai yang menjadi faktor penting yang menyebabkan kemenangan kandidat pada putaran pertama? Banyak yang meragukan kemampuan mesin politik mempengaruhi para pemilih. Pemilih cenderung punya alasan tersendiri dalam memberikan dukungan dan belum tentu sama atau ikut dengan pilihan partai yang ia pilih dalam Pemilu Legislatif sebelumnya. Faktor utama kemenangan menurut hasil survey beberapa lembaga jajak pendapat seperti LP3ES, IFES, LSI menunjukkan kemenangan paket calon presidem 2004 lebih karena ketokohan/figur calon tersebut dan bukan karena kerja keras partai yang mengusungnya dalam mempengaruhi pilihan pemilih.

Menangnya pasangan Yudhoyono-Kalla (33,57% atau 39.838.184) dan Mega-Hasyim (26,61% atau 31.569.104) pada putaran pertama, ada yang berpendapat disebabkan oleh ketokohan mereka cenderung lebih kuat. Hal ini menandakan bahwa sejak awal sudah ada pergeseran dukungan pemilih. Pada pemilu legislatif 1999 massa yang banyak berafiliasi ke PDIP-Mega, mulai menaruh harapan ke partai baru atau tokoh harapan baru yang lain yaitu Yudhoyono. Selain itu kemenangan Yudhoyono-Kalla dan Mega-Hasyim disebabkan oleh faktor regulasi atau aturan main yang telah menguntungkan mereka, sehingga mereka bisa menang dengan mudah bersaing dengan calon yang kalah mutu untuk dinilai pemilih. Calon-calon alternatif seperti misalnya Nurcholis Madjid, Faisal Basri, Abdulah Gymnastiar, Romo Mudji, H.S. Dillon, Syahrir, Buyung Nasution, Mulya Lubis, Meutia Hatta, atau yang lainnya. Dengan regulasi UU Pilpres yang ada menjadi tidak bisa ikut berkompetisi. Padahal seleksi kader dan pencalonan oleh partai saja, bukan satu-satunya yang terbaik dan bebas praktik pembusukan politik. Prinsip hanya boleh lewat satu pintu yaitu partai untuk bisa masuk ke dalam bursa Pilpres, bisa berakibat biaya 'sewa perahu' pihak non-partai bisa sangat mahal dan oligarkhis. Hal ini tidak adil.

Menangnya pasangan Yudhoyono-Kalla seolah kasat mata karena mendapat dukungan penuh hampir dari 90 % dari pemilih dan simpatisan Partai Demokrat (PD) yang sedang 'naik daun' waktu itu. Analisis ini setuju bahwa mesin partai bekerja menarik dukungan pemilih. Partai ini antara lain digerakan oleh akademisi seperti guru besar/antropolog UI dan kampus lain, keluarga besar TNI, beberapa mantan gubernur di daerah, artis, pengusaha, rohaniawan dan para pendukung JK dan kader Golkar dari Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Peluncuran buku SBY Sang Demokrat, relatif berhasil mengubah kesan buruk orang terhadap tentara saat itu. Begitu pula sisi humanis Yudhoyono yang bisa menyanyikan beberapa lagu di depan publik, berhasil meredam kesan bahwa tentara itu kaku dan kurang bersahabat. Figur Yudhoyono yang bisa ber-transformasi di seorang jendral TNI ke sosok humanis dan demokrat, cenderung tampak berhasil menarik banyak kalangan pemilih presiden langsung 2004.

Ada pandangan bahwa menangnya Mega-Hasyim pada putaran pertama, diperoleh dari dukungan masa PDIP sendiri (sebanyak 70%) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak (60%). Dengan alasan, dua partai partai tersebut secara resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan ini, dan kemudian diikuti kader dan simpatisannya. Sebelum pemilihan Juni 2005 pendukung PDS tadinya suaranya cenderung terbagi ke tiga kandidat: Yudhoyono-Kalla, Mega-Hasyim dan Amien Siswono.

Anggota tim sukses Mega-Hasyim, Heri Ahmadi menyatakan keyakinannya lolos ke putaran kedua dengan menggandeng kekuatan politik yang ada. Menurut Heri Ahmadi, Megawati-Hasyim akan mengincar pula suara dari warga NU. Perselisihan masalah gender yang sempat muncul pada masa kampanye pemilu presiden, salah satu pendekatan yang tengah diatasi. PDIP sudah melakukan pendekatan masalah itu. Mereka katakan soal gender dan kepemimpinan sudah diselesaikan pada Munas NU di NTB pada 1997.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lihat *Pikiran Rakyat*, Kamis, 8 Juli 2004.

Hasyim ketika menyetujui menjadi pasangan Mega menyatakan kiranya ia bisa berperan demi kesejahteraan bangsa, antara lain dalam rangka pemberantasan korupsi. Menurut Hasyim, duetnya dengan Megawati merupakan awal dari dikikisnya dikotomi Islam abangan dan Islam santri. Mulai hari itu, kata Hasyim, istilah santri abangan di desa perlu ditinggalkan. Alasannya, bahwa sebagian besar warga PDI-P adalah orang Islam di desa-desa. Begitu pula orang-orang NU berada di desa-desa. Duet Megawati-Hasyim diharapkan tidak hanya dalam membentuk pemimpin di skala pemerintahan, tetapi juga membangun dimensi kultural untuk menjamin kekokohan persatuan rakyat.<sup>4</sup>

Hasyim Muzadi memiliki pandangan atau platform kerja sama internasional, dunia internasional perlu mengetahui kondisi Islam di Indonesia dan perilaku mereka yang tidak menyetujui tindak kekerasan. Untuk itu, menurutnya perlu upaya komunikasi dengan dunia luar secara intensif. Tak terkecuali dengan AS. Makin banyak dan intens komunikasi maupun kontak ormas-ormas moderat Indonesia dengan internasional dan AS, itu makin positif. Apalagi, di tengah keterpurukan ekonomi, sosial, dan keamanan di Indonesia saat ini, kerja sama internasional jauh lebih berfaedah daripada keterasingan internasional.<sup>5</sup> Faktor ini sedikit banyak diduga bisa mengangkat popularitas Hasyim di mata pemilih urban dan modernis yang menginginkan calon pemimpin yang pluralis dan berpandangan keluar (*outward looking*) pada Pilpres putaran pertama.

Sementara itu fakta dukungan dari masa PKB dengan hadirnya Hasyim yang diperkirakan ada sebanyak 1/5 perolehan cenderung bergeser, karena sebagian mengalir ke Wiranto-Solahudin yang mendapat restu kakaknya, Gus Dur. Kekalahan peroleha suara Mega-Hasyim dibanding perolehan suara Yudhoyono-Kalla pada putaran

---

<sup>4</sup>Lihat artikel Forum Megawati-Hasyim Muzadi, [www.megacenter.com](http://www.megacenter.com).

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hasyim Muzadi adalah salah seorang tokoh, selain Syafi'I Maarif dari Muhammadiyah yang mendapat tempat diundang pemerintah AS untuk memberi penjelasan tentang pemahaman masyarakat Islam dan terorisme di Indonesia

pertama tampaknya disebabkan terpecahnya massa PKB dan NU, yang mestinya mengalir ke Mega-Hasyim, mengalir juga ke pasangan Wiranto-Solahudin.<sup>6</sup>

### **Faktor Kegagalan Kandidat Presiden lain**

*Pasangan Amien-Siswono.* Salah satu faktor penyebab kegagalan pasangan Amien-Siswono bisa dikarenakan tidak solidnya koalisi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam membangun dukungan. Koalisi antarpantai dan organisasi massa cenderung tidak berjalan efektif dalam mendongkrak perolehan suara. Meski di tingkat elite, partai-partai sepakat mendukung capres-cawapres tertentu, hal itu belum atau tidak sampai ke pemilih di tingkat akar rumput. Sebagai contoh aktual, dukungan PKS terhadap Amien Rais. Elite partai itu mengaku hanya bisa mengerahkan 500.000 suara untuk mendukung capres dari PAN tersebut. Faktanya, suara pemilih PKS cenderung terpecah-pecah untuk kandidat lain.

Selain kegagalan koalisi, kekalahan Amien cenderung disebabkan karena sempitnya basis ideologi Islam modernis-nya, yang tidak mampu menembus keluar batas sekat ideologis pemilih mengambang. Ada juga analisa lain yang menyebutkan faktor trauma ingatan kolektif sebagian pemilih terhadap sosok Amien Rais ketika menjadi bagian dari 'poros tengah' naik jatuhnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Ada yang optimis Amin bisa masuk ke putaran kedua mengingat jejak karir atau *track-record* Amien Rais yang 'berani' sebagai tokoh reformis menjelang turunnya Presiden Soeharto. Hal itu harusnya menyebabkan dia memperoleh nilai plus dan punya dukungan yang luas dari gerakan reformasi yang berhadapan dengan gerakan kelompok 'Syndrom Rindu Soeharto' (SARS) yang dikhawatirkan akan mengembalikan Indonesia ke dalam siklus rekonsolidasi otoritarian.

---

<sup>6</sup>Lihat Ananta Aris, Evi Nurvidya dan Leo Suryadinata, *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapura: ISEAS, 2005 hlm. 85

Faktanya pasangan Amien-Siswono ini belum mampu menuai dukungan luas dari para pemilih di tingkat nasional. Pasangan ini hanya menang di 2 provinsi dari 32 provinsi yang ada. Kabar gembiranya, mereka ada di urutan perolehan suara kedua terbanyak di ibukota negara, mengalahkan Mega-Hasyim. Basis ideologi Amien-Siswono, cenderung sempit atau spesifik. Mereka identik dengan modernisme Islam (Muhammadiyah) dan Nasionalis. Muhammadiyah cenderung kurang solid dan PKS yang sempat melakukan kontrak politik dengan Amien, tampak lamban melakukan *political marketing*. Hal ini dampaknya belum bisa menembus simpati dukungan dari pemilih PKS dan keluarga besar Muhammadiyah di perkotaan Jawa dan luar-Jawa. Masa mengambang dan pemilih berbasis ideologi lainnya kurang tersentuh lewat *cross cutting issue* yang coba dilontarkan, seperti kontrak politik dengan kalangan mahasiswa, karena *political marketing* yang cenderung hanya dilakukan dalam kurun waktu yang sempit. Selain itu ada ingatan kolektif pemilih terhadap sosok calon presiden, momen khusus tertentu dan opini publik yang dibangun oleh kandidat lain, menyebabkan Amien-Siswono 'kalah angin' atau daya tariknya menjadi tenggelam. Walau ia sudah berupaya keras tampil optimal di depan publik.

Basis ideologi Amien-Siswono bisa dinilai ada dalam posisi terlalu relatif sempit, yaitu hanya mampu menarik kalangan modernis Islam berbasis PAN dan keluarga besar Muhammadiyah. Memang ada dorongan dari pendukung Siswono, Mantan Menpertrans dan Aktifis HKTl yang didukung sebagian tokoh nasionalis yang mendambakan "jalan lurus". Suatu pemerintahan yang bersih bebas KKN, yang melekat pada pengalaman kedua tokoh tersebut sewaktu menjadi dosen HI/pengamat politik UGM dan Menteri Perumahan dan Transmigrasi atau aktifis mahasiswa di jamannya. Sosok Amien Rais cenderung tampak hanya mendapat simpati dari sebagian kalangan menengah atas perkotaan modernis yang melihat Amien Rais sebagai sosok yang berani melakukan kontrak politik dengan mahasiswa di Balairung UI Depok. Ia juga berani mempersoalkan kontrak karya pertambangan dan gagasan

federalisme-nya diwaktu lalu. Amien-Siswono mendapat dukungan tertinggi di Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Barat. Selain itu, sekali lagi terbukti, pada putaran pertama pasangan ini memang mendapat tempat kedua terbanyak setelah pasangan Yudhoyono-Kalla di Jakarta. Mega-Hasyim di Jakarta hanya menempati posisi ketiga.

Ada hal lain yang penting menyangkut trauma ingatan kolektif, yang berkaitan dengan memori jangka menengah dan panjang yang ada dalam benak para pemilih terhadap Amien Rais. Sosiolog Andreas Bintoro berpendapat, bahwa seandainya ada rasa lapang dada melihat orang lain menjadi presiden, ada kesetiaan antara para pemimpin sipil (tidak menohok kawan seiring dan menggantung dalam lipatan), tidak ada Poros Tengah yang mengantarkan K.H. Abdurrahman Wahid menjadi presiden dan kemudian menjatuhkannya, maka pastilah sipil tetap berkuasa dan bahkan mungkin Amien Rais dapat menjadi presiden berikutnya tahun 2005. Akan tetapi itu hanya pengandaian, nasi sudah menjadi bubur. Itulah harga perpecahan para reformis.<sup>7</sup>

Kekalahan Amien Rais, dalam perspektif ini disebabkan oleh tidak populernya *track-record* Amien Rais yang cenderung *plin-plan* mendukung dan memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden, di mata bagi sebagian besar massa "tradisional" semacam Nahdiyin/NU, yang jumlahnya cukup besar di Pulau Jawa dan Sumatera yang berpenduduk padat. Sosok Amien cenderung diingat oleh sebagian pemilih menurut narasumber sebagai orang yang tidak konsisten dan terlalu banyak bicara. Amien-Siswono baru bisa menang dukungan di Sumater Barat (Sumbar) dan Nangro Aceh Darussalam (NAD). Profinsi Sumbar dan NAD dikenal sebagai basis Muhammadiyah setelah D.I. Yogyakarta. Dukungan pemilih terhadap pasangan Amien di Yogyakarta sebanyak 27,18 %, pun hampir sama dengan perolehan pasangan Mega 27,13%. Dikandangnya sendiripun Amien belum terpercaya. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kontestasi yang berimbang antara basis ideologi Modernisme-Islam

---

<sup>7</sup>Andreas Bintoro, *Pikiran Rakyat*, 27 September 2004, "Bias Gender Penyebab Kekalahan Mega".

bersaing dengan Nasionalis-Sukarnoisme, pemilih dalam menetapkan calon presidennya di kota tempat Amien Rais dibesarkan.

Ada pula penjelasan Saiful Mujani soal faktor psikologis dan kalkulasi rasional pemilih atas partai dan calon presiden, yang menyumbang menjadi penyebab kekalahan pasangan Amien Rais dan termasuk Hamzah Haz.<sup>8</sup> Penjelasan purba perilaku politik pemilih melihat pentingnya soal aliran, dalam hal ini soal paham keagamaan dan kelas sosial-dalam menjelaskan perilaku pemilih, seperti teori politik aliran dan kelas sosial yang pernah diusung Clifford Geertz. Pertama, dalam penjelasan politik aliran ini, santri yang taat agama akan cenderung memilih partai Islam semacam itu, sementara yang tidak atau kurang taat, akan cenderung memilih partai-partai sekular. Pola hubungan antara paham keagamaan dan pilihan terhadap partai politik semacam itu sangat kuat bercokol dalam masyarakat kita.

Kedua, kalau hubungannya dengan pilihan atas calon presiden, mereka yang santri diharapkan-menurut penjelasan aliran-akan memilih Hamzah Haz, Amien Rais, atau Gus Dur (kalau kemarin lolos seleksi KPU); mereka yang berlatarbelakang tradisi Islam yang cukup kuat. Tapi nyatanya, kita tidak melihat pola semacam itu, dalam memilih partai politik ataupun presiden. Dalam penjelasan psikologis, pertama-tama-dalam soal memilih partai politik- lebih pada sejauh mana seorang pemilih itu tersosialisasi dalam sebuah komunitas politik tertentu. Penjelasannya bukan pada ketaatan agama, bukan pula karena latar belakang kelas sosial tertentu. Hal yang lebih tepat, sejauh mana seorang pemilih itu hidup dan cukup dekat dengan lingkungan sebuah partai tertentu, misalnya dalam keluarga. Sebab, proses sosialisasi politik itu biasanya dimulai dari keluarga. Itu yang paling mendasar. Dalam penjelasan kalkulasi rasional, pilihan terhadap partai atau calon presiden sangat

---

<sup>8</sup> Lihat Saiful Mujani, *JIL Newsletter*, 12 September 2005, "Penjelasan Aliran dan Kelas Sosial Sudah tidak Memadai"..

ditentukan oleh bagaimana masyarakat mengevaluasi kinerja partai yang didukungnya atau calon yang sedang berkuasa.<sup>9</sup>

Ada gejala kesulitan Amien memilih koalisi & pasangan. Amien Rais, yang selama lima tahun terakhir bekerja keras untuk menggalang dukungan, tampak cenderung agak sedikit mendapat kesulitan dalam mendapat pasangan wakilnya. Amien bertekad ia harus menjadi kandidat pertama (Capres) dan Cawapres yang dilirik dari kalangan mantan jenderal yang bisa cocok berpasangan dengannya sudah menyatakan menjadi kompetitor. Posisi Yudhoyono, Wiranto, Prabowo dan Agung Gumelar sudah ada di "kandang" politik masing-masing. Pilihan untuk Amien Rais akhirnya tinggal tokoh-tokoh nasionalis seperti Siswono Yudo Husodo dan Marwah Daud Ibrahim. Dengan komposisi pasangan seperti itu, cenderung seperti yang diduga Moeslim Abdurahman, yaitu bahwa posisi Partai Kebangkitan Bangsa menjadi amat penting dengan Gus Dur sebagai *the king maker*.<sup>10</sup> Amien Rais tidak terpikir untuk merekrut kalangan independen non partai yang juga memiliki pendukung di tingkat akar rumput, LSM, Pers, akademi kampus, pegiat oposisi loyal/demonstran, seperti H.S. Dillon (ahli ekonomi pertanian), Parni Hadi (Republika), Emmy Hafiz (YLKI), Rama Pratama (BEM), dst. Seolah-olah pasangannya haruslah tokoh lama yang sudah mapan.

Terpuruknya perolehan suara untuk Amien-Siswono, hal ini diduga karena mesin politik PKS, PAN dan Muhammadiyah yang berbasis Islam modernis di perkotaan (urban) ditambah HKTI (konon berbasis tradisional- rural/pedesaan) dari Siswono ternyata masih kurang bekerja. Hal itu terjadi mengingat ikatan dengan Siswono ternyata kurang kuat dan ada di atas kertas. Siswono cenderung baru didukung oleh Parpol nasionalis yang baru memiliki suara nol koma di Pemilu legislatif. Pijakan ideologis Siswono cenderung masih kurang ditopang oleh massa loyal yang solid. Akan beda halnya jika Siswono memiliki kendaraan politik yang bisa dikendarainya sendiri. HKTI belum seperti itu. Konsolidasi ke bawah ke kalangan petani

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup>Lihat *Kompas*, 18 April 2004.

dan nelayan tentu harusnya jauh lebih mudah. Faktor potensi Siswono kurang menyumbang peran terhadap suara pasangan Amien dalam putaran pertama.

Amien Rais sendiri cenderung belum sanggup seratus persen menarik massa PAN dan Muhammadiyah seperti yang diperkirakan. PAN dan Muhammadiyah tampaknya masih belum solid. PAN diperhitungkan oleh peneliti LP3ES baru menyumbang sekitar 79 persen suara milik Amien-Siswono, Muhammadiyah (54 persen), NU (11 persen) dan ormas lain (26 persen). PKS yang diharapkan total di belakang Amien, ternyata hanya memberikan 57 persen suara. Selebihnya 24 persen suara 'partai dakwah' ini diberikan pendukungnya untuk pasangan Yudhoyono-Kalla.<sup>11</sup> Kurang efektifnya mesin politik PKS dalam mendukung Amien itu terkait erat dengan terlalu dekatnya pengumuman dukungan partai ini dengan hari pencoblosan. Pemasaran politiknya dengan sendirinya kekurangan waktu untuk mengena. Akan sangat berbeda hasilnya, kalau PKS mendukung Amien jauh-jauh hari. Ada data menarik di lapangan, misalnya soal beredarnya SMS agitatif yang sempat masuk ke massa PKS. "Waspadai Gerakan Amien harus Tidak Menang. Petugas Pembaca Suara di TPS akan merusak surat suara dengan kuku. Target 3-6 juta suara Amien batal = 5-10 suara per TPS x 600 ribu TPS".<sup>12</sup> Upaya yang ada belum merupakan *marketing politic* yang brilian untuk menjaring simpati pemilih mengambang.

Untuk Pemilih Indonesia Bagian Timur, dalam kasus pemilih NTT, ada pendapat nara sumber yang mengatakan Amien Rais kurang didukung karena sebagai orang kampus yang sulit mereka pahami. Ketika masuk menjadi politisi dan menjadi ketua MPR, masyarakat melihat tidak ada sesuatu yang dia buat terhadap NTT. Amien Rais justru lebih bagus ketika ia berada di luar jalur politik.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Lihat hasil *Exit Polling LP3ES*, 2004.

<sup>12</sup>Lihat ulasan Moh. Samsul Arifin *aktivis Center for Bureaucracy Studies (CBS) Jakarta*. "Buruk Suara, KPU Dicela", dalam rubrik *Teropong, Pikiran Rakyat*, 12 Juli 2004.

<sup>13</sup>Wawancara tim dengan Wartawan Senior/Redaktur Pelaksana *Harian Kupang Pos*, Sabtu, 23 Juli 2005.

Armin, dosen FISIP Universitas Hasanudin memperhitungkan kekalahan Amien Rais karena pertimbangan koalisinya dengan Siswono masih kurang kuat. Memang Amien Rais membutuhkan seorang konglomerat yang kuat. Tetapi basis politik Capresnya Siswono masih belum kuat seperti yang dibayangkan. Siswono bisa jadi mengklaim potensinya sebagai Ketua tani (Himpunan Karya Tani Indonesia) yang ada di Indonesia. Faktanya petani yang jumlahnya jutaan di Indonesia belum mau memilihnya. Sosok Siswono adalah pengusaha *real-estate/property*, mantan menteri perumahan yang kaya. Ada catatan bahwa sebagai ketua HKTI, Siswono belum pernah berkarir di bidang dunia pertanian seperti halnya H.S. Dillon. Ia seolah tiba-tiba saja menjadi ketua tani (HKTI). Tidak ada petani mendukung ketua HKTI yang belum mengakar.<sup>14</sup>

Chris Nugroho, dosen FISIP Universitas Airlangga, memberikan analisisnya tentang kekalahan Amien Rais di Jawa Timur karena faktor figur kontroversial. Sementara itu ada kecenderungan sebagian pemilih Jawa Timur adalah masa tradisional yang pro harmoni atau keseimbangan yang tidak mengguncangkan, sebagai berikut:

“..Tidak banyaknya dukungan masyarakat terhadap figur Amien Rais, karena dalam beberapa hal ada pernyataannya yang mengundang kontroversi-kontroversi. Semakin banyak ia bicara, semakin banyak hal-hal yang menyangkut sisi-sisi yang tidak disukai terhadap dirinya tampil ... jadi figur yang kontroversi itu tidak terlalu disukai dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya Jatim yang kenyataannya masih membutuhkan harmoni, mengakomodasi keseimbangan-keseimbangan baru. Di balik itu ada juga pengharapan di dalam figur SBY, ada harapan Indonesia menjadi lebih baik...”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara tim dengan Dr. Armin, MSi, Dosen FISIP – Universitas Hasanudin, 4 Agustus 2004.

<sup>15</sup>Wawancara Tim dengan Chris Nugroho, dosen FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu, 20 Juli 2005.

Ariwibowo, dosen FISIP UNAIR memberikan analisa tentang mengapa Amien Rais menjadi kurang didukung. Persepsi yang berkembang antara lain ada sisi *Americancentris* pada dirinya. Amien terlalu tegas menyatakan soal hitam-putihnya suatu perkara. Masyarakat sebagian belum bisa menerima hal tersebut. Apalagi kalangan bawah yang terbiasa dididik dalam keadaan harmoni, akan tidak bersimpati dengan sikap *ofensif* seorang tokoh walaupun nasibnya sedang dibela oleh Amien. Pilihan kata Amien dalam beberapa pertemuan publik banyak yang menggunakan kata-kata berbahasa Inggris yang tidak dimengerti kalangan bawah yang banyak jumlahnya tersebut. Hal ini juga menyumbang timbulnya jarak sosial para pemilih tradisional sehingga tidak memilih Amien dan memilih yang lain yang bahasanya bahasa pergaulan biasa. Narasumber penelitian ini memberikan pandangannya tentang sebab kekalahan Amien, untuk menjadi pelajaran bagi setiap kandidat di masa mendatang, sebagai berikut:

“..Pak Amien itu orangnya jujur, orangnya baik. Orangnya bersih, tapi terlalu *Americancentris*. Keinginannya itu diungkapkan begitu gamblang...terlalu jujur betul. Orangnya baik, orangnya lurus dan apa saja dikomentari. Lama-lama kemudian.. lha kok semuanya dikerjakan oleh dia. Dikomentari. Bahkan kemudian saking kritisnya dia, banyak hal dia kritik, kadang-kadang menyebabkan kontroversial. Maksudnya bagus, sarannya bagus, tapi dampaknya itu jadi kontroversial. Dia hantam Golkar, dia hantam apa saja, pak Harto dihantam. Nah itu orang Jawa seringkali ngomong “*ngono-ngono yo neng ojo ngono*” gitu loh. Pak Amien terlalu rasional dan terlalu emosional. Di hadapan orang-orang agraris tradisional ia tidak bisa diterima. Makanya dia banyak didukung oleh orang perkotaan, orang-orang terpelajar, orang kelas menengah, orang-orang Islam terutama Muhammadiyah. Dia nggak berhasil banyak mendulang suara dari orang-orang NU yang jumlahnya begitu banyak di Jawa Timur. Kenapa? Karena sikap tegasnya seperti itu menimbulkan jarak. Orang NU nggak bisa mendekati hal yang semacam itu. Tapi orang kayak Yudhoyono, orang NU malah senang. Semua kelompok, semua lapisan merasa orang ini akan bisa

mengayomi. Tapi kalau orang kayak Amien itukan tegas, sehingga “oh ini bukan kelompok saya, ia kelompok yang lain...”<sup>16</sup>

**Pasangan Wiranto-Wahid.** Ada yang menilai kekalahan pasangan Wiranto-Wahid karena Wiranto cenderung ditinggalkan sendiri oleh partai yang mengusungnya. Salah satu faktornya karena Wiranto salah duga dan terlalu mengharapkan mesin politik Golkar dengan sendirinya akan bekerja tanpa kawalan dan pendanaan yang kuat. Ada indikasi yang tampak bahwa hal itu sengaja dibuat oleh faksi lain dalam internal Golkar. Kader tidak bekerja karena alasan kader Golkar. Wiranto adalah pendatang baru yang sejak awal kurang berkeringat di partai, tapi bisa menang. Sejak menangnya Wiranto dalam konvensi Golkar dengan menyingkirkan Akbar Tanjung, bisa jadi faksi Akbar Tanjung tidak bisa begitu saja menerima kekealahannya (*bad looser*). Sehingga kemudian mesin politiknya itu dikondisikan jalan, namun bekerjanya tidak maksimal. Bahkan Sholahudin Wahid yang diharapkan untuk bisa menarik suara PKB maupun NU, ternyata tidak bisa maksimal juga. Suara NU dan PKB terpecah, karena di sisi lain masih ada Hasyim Muzadi juga yang juga mengklam dari NU dan PKB. Selain itu untuk kasus di Jawa Timur ada indikasi bahwa PKB di sana lebih dekat kepada SBY dibanding kepada calon-calon lainnya yang *notabene* juga diklaim atau dicalonkan oleh PKB maupun NU.<sup>17</sup>

Ada lagi analisis yang menjelaskan “kekalahan” Wiranto karena dana yang turun untuk kader di lapangan tidak kunjung turun. Seperti halnya mobil dan supir yang tidak dibelikan bensin dan honor yang pantas. Sikap idealisme menipis, sikap pragamtisme dan oportuniste lebih menonjol. Sejak kemenangannya di konvensi Golkar, energi mantan ajudan Soeharto dan tim suksesnya sudah kian menipis. Di internal partai Golkar sendiri tampak setengah hati

---

<sup>16</sup>Wawancara Tim dengan Ariwibowo, Dosen FISIP UNAIR/ Ketua KPU Propinsi Jatim, Kamis, 21 Juli 2005.

<sup>17</sup>Wawancara tim dengan Dhimam Aboro Djuraid, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi “Suara Indonesia” Surabaya, Ketua PWI Jawa Timur, Selasa, 26 Juli 2005.

mendukung Wiranto. Sang pemenang konvensi seperti berdiam di sangkar emas, namun kurang mampu bersiul untuk mengonsolidasi tim sukses Wiranto dan tim sukses Golkar. Gizi yang sangat pokok untuk bekerjanya mesin politik juga seret, sehingga dukungan terhadap Wiranto tampak seadanya.<sup>18</sup> Kata kunci data ini adalah mesin politik Golkar "dibuat tidak bekerja maksimal" oleh kadernya karena alasan *bad-looser* dan seretnya dana yang mengalir.

Slamet Efendy Yusuf mengibaratkan perjalanan Golkar mendukung Wiranto, kehabisan bensin di tengah jalan. Berharap memperoleh massa, tapi kendaraannya tidak bisa jalan karena bahan bakarnya kurang. Akbar Tandjung yang di muka publik tampak seperti mendukung penuh Wiranto sebetulnya tidak mengeluarkan segenap kemampuan politiknya yang selama ini tampak sangat piawai. Di akhir masa kampanye, Akbar sempat menyita perhatian kala "menagih" Gus Dur agar mantan presiden itu mendukung penuh Wiranto dengan menginstruksikan massa PKB dan NU mencoblos pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Tapi, upaya Akbar itu seperti meneriaki pengemudi bus di jalanan, tapi awaknya sendiri tak mampu diatur.<sup>19</sup>

*Elit Golkar Pindah Gerbong.* Pada Pilpres putara pertama, ada indikasi konflik internal dalam tubuh Golkar dalam rangka perebutan posisi politik. *Exit Polling* LP3ES yaitu *polling* pendapat yang dilakukan setelah pemilih keluar dari bilik suara, mengonfirmasikan bahwa suara pemilih Partai Golkar yang diambil alih oleh pasangan Yudhoyono-Kalla ada sebanyak 31 persen dan PKB kehilangan 28 persen. NU sendiri menyumbang sekira 32 persen kepada pasangan "militer-sipil" tadi. Hal itu tampak menjadi suatu risiko ketika politisi hidup dalam dua pijakan, satu kaki mendukung Wiranto dan satu lagi (samar-samar) merestui langkah Jusuf Kalla. Publik tidak tahu, kalau

---

<sup>18</sup>Lihat ulasan Moh. Samsul Arifin *aktivis Center for Bureaucracy Studies (CBS) Jakarta*. "Buruk Suara, KPU Dicela", dalam rubrik Teropong, Pikiran Rakyat, 12 Juli 2004.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

sebetulnya secara diam-diam banyak elite Golkar (perorangan) yang pindah gerbong ke Yudhoyono-Kalla pascakonvensi Golkar.<sup>20</sup>

Dalam gerbong baru itu, mereka bertemu kembali eksponen Golkar lama semacam Edi Sudrajat (PKPI). Dalam konteks ini, mesin PKB kurang layak dibicarakan, sebab sejak awal "PKB atas" (para elite DPP) dan "PKB bawah" (DPW, DPD, dan para kiai) memiliki tafsir yang berbeda soal ke mana suara PKB dan Nahdlyin akan dilabuhkan. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika kongsi Golkar-PKB (pemilik 32,15 suara legislatif) tak sanggup mempertahankan suara tersebut. Wiranto-Salahuddin Wahid hanya mendapat 23 persen suara.<sup>21</sup>

Data di atas menunjukkan walaupun Wiranto menang dalam mekanisme pemilihan partai, konvensi partai Golkar yang diadakan di Makasar, namun faktanya tidak menang di pertarungan yang sebenarnya di tingkat nasional. Faktor, Jusuf Kalla, yang juga merupakan kader Golkar dari Sulsel. Berhasil memposisikan dirinya sebagai putra terbaik dan representasi dari kawasan Indonesia Bagian Timur. Kemenangan Wiranto dalam Konvensi Partai Golkar mengalami kehilangan makna, ketika Kalla yang juga kader Golkar "yang dipecat" naik dengan pasangan lain yang punya momen bagus untuk tampil dan didukung para pemilih IBT ketimbang Wiranto.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>*Ibid.*,

<sup>22</sup>Ada analisis yang menjelaskan bagaimana "kekalahan" Wiranto bisa terjadi. Sejak kemenangannya di konvensi Golkar, energi mantan ajudan Soeharto dan tim suksesnya sudah kian menipis. Di internal Golkar sendiri tampak setengah hati mendukung Wiranto. Sang pemenang konvensi seperti berdiam di sangkar emas, namun kurang mampu bersiul untuk mengonsolidasi tim sukses Wiranto dan tim sukses Golkar. Gizi yang sangat pokok untuk bekerja mesin politik juga seret sehingga dukungan terhadap Wiranto tampak seadanya. Perjalanan Golkar mendukung Wiranto, seperti teori mendorong mobil. Mobil kehabisan bensin di tengah jalan. Berharap memperoleh massa, tapi kendaraannya tidak bisa jalan karena bahan bakarnya kurang. Akbar Tandjung yang di muka publik tampak seperti mendukung penuh Wiranto sebetulnya tidak mengeluarkan segenap kemampuan politiknya yang selama ini sangat piawai. Di akhir masa

*Kampanye Negatif Untuk Wiranto.* Seorang wartawan senior bertutur: "Ketika Wiranto datang ke redaksi Pos Kupang, para wartawan memiliki pertanyaan Apakah pencalonan pak Wranto ini tandanya kembalinya militer ke dalam politik?. Bagaimana pun juga wajah Wiranto itu masih terlalu erat dengan peristiwa 1998 di Jakarta. Peristiwa 1999 di Dili. Kasus-kasus HAM. Wiranto mungkin naik pada saat yang barangkali tidak pas. Menurut saya, secara pribadi Wiranto mungkin baik. Visi dia waktu itu, hanya menjabat satu periode saja. Wiranto cukup satu periode. Bagaimana pun juga, orang masih terlalu ingat dan belum lupa soal Tim-tim terkait dengan Wiranto. Peristiwa 1998, saat Wiranto masih sangat berkuasa. Sehingga boleh dibilang, ada yang berpandangan, dia tentara yang belum bersih dari lumuran darah korban-korban pelanggaran HAM. Itu yang juga disuarakan saat pilpres di NTT. Semua orang tahu dan kita di NTT sangat dekat dengan Timor-timur. Masyarakat memperoleh informasi juga seperti itu. Wiranto memperoleh panen *negative-campaign* dan harus bekerja keras. Orang juga ribut soal latar belakang militernya, militer kembali ingin berkuasa. Mau dibawa kemana kita. Ironi seperti jaman Soeharto lagi.<sup>23</sup>

Ada proses stigma sosial bahwa Wiranto dianggap sebagian pemilih terlibat kasus Trisakti dan peristiwa Timor-Timur, terlepas dari upaya pembelaannya pada beberapa tayangan eksklusif di televisi. Hal itu bagi orang-orang perkotaan, orang-orang kritis, tidak disukai. Mereka tidak mungkin memilih Wiranto. Ada persepsi Wiranto itu lebih emosional dibandingkan dengan Yudhoyono. Kesan militeristiknya lebih kuat dibandingkan dengan Yudhoyono, akibatnya dukungan terhadap Wiranto tidak banyak. Apalagi

---

kampanye, Akbar sempat menyita perhatian kala "menagih" Gus Dur agar mantan presiden itu mendukung penuh Wiranto dengan menginstruksikan massa PKB dan NU mencoblos pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Tapi, upaya Akbar itu seperti meneriaki pengemudi bus di jalanan, tapi awaknya sendiri tak mampu diatur

<sup>23</sup>Wawancara tim dengan wartawan Senior/Redaktur Pelaksana Harian Kupang Pos, Sabtu, 23 Juli 2005.

Wiranto tidak cukup pas memainkan peluang lewat media massa setelah dia tidak di kabinet. Lain halnya dengan Yudhoyono dan timnya, sengaja atau tidak telah membuatnya sering tampil di TV. Begitu pula sosialisasi lewat multi media (buku, stiker, poster, spanduk, kontrak politik dengan PKS). Secara nasional hasilnya popularitas Wiranto kalah jauh lebih rendah dibanding Yudhoyono, karena ada faktor psikologis sosial pemilih Yudhoyono adalah korban teraniaya dari perilaku Presiden Mega.

Wiranto kurang didukung karena masyarakat waktu itu sedang kurang suka terhadap kiprahnya di militer terhadap mahasiswa tahun 1998 di Jakarta. Sehingga masyarakat NTT cenderung kurang bersimpati terhadap calon yang berafiliasi terhadap militer. Ada ketakutan tersendiri dikalangan masyarakat jika militer terpilih. Akibatnya Kampanye Negatif Untuk Wiranto terjadi lewat SMS dan VCD bersampul AFI (Akademi Fantasi Indonesia) berisi tragedi Trisakti saat kampanye pemilihan presiden di berbagai tempat di Indonesia.

***Pasangan Hamzah-Agum Gumelar.*** Tidak maksimal bekerjanya mesin politik, terorisme dan poligami. Wakil Ketua Umum DPP PPP Ali Marwan Hanan, berpendapat mengenai peluang kemenangan pasangan Hamzah-Agum pada putaran pertama dengan analisa bahwa PPP telah melakukan penghitungan dukungan utama dari pemilih setia PPP yaitu sekitar 9 hingga 10 juta orang atau 8,15 persen dan kemungkinan didukung parpol lain yang memiliki platform dan asas yang sama. Selain itu akan ada dukungan masyarakat terhadap Agum sebagai tokoh yang sudah banyak dikenal masyarakat baik sebagai purnawirawan TNI maupun dari kalangan pelaku olah raga di Indonesia.<sup>24</sup>

Hamzah Haz perolehan suaranya sangat sedikit hampir disemua daerah pemilihan di 32 provinsi. Pemilih di Kupang NTT misalnya menjelaskan pilihannya tidak kepada pasangan ini karena berkaitan dengan *statement*-nya yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>24</sup>*Pikiran Rakyat*, Selasa, 11 Mei 2004, "Mbak Tutut Mundur dari Pencalonan, Hamzah Gaet Agum"

terorisme. Pada saat ada indikasi terorisme yang dilaporkan badan intelijen negara tidak direspon dengan baik oleh Wapres Hamzah Haz. Malah ia mengatakan "langkah mayat saya jika ada terorisme di Indonesia". Ketika kepolisian dan intelijen membuka kedok teroris ada, baru wapres Hamzah Haz, membuka mata. Hal lain yang menjadi kerebatan pemilih wanita, karena soal poligami. Sehingga pada saat Pilpres kemarin, isi terorisme dan poligami menjadi pertimbangan masyarakat untuk tidak memilih Hamzah Haz.<sup>25</sup>

Nasib Hamzah Haz dan Agum Gumelar di Jawa Timur juga cenderung kurang memperoleh dukungan. Pemilih PPP di Jawa Timur tampak lebih kecil jumlahnya dibanding pemilih PKB. Agum yang diharapkan bisa menarik kalangan profesional, juga tidak banyak mampu menarik kalangan tersebut. Dengan *back ground*-nya sebagai tokoh olah raga ia mengharapkan di Jawa Timur perolehan suaranya besar. Ternyata tidak ada relevansinya antara Agum Gumelar sebagai Ketua Umum PSSI atau "orang bola", Ketua Umum KONI dengan indikasi perhitungan bahwa masyarakat Jawa Timur "sangat gila" sepak bola. Menyadari masyarakat Jatim yang sangat fanatik terhadap sepak bola, Agum pernah memakai jalur itu untuk mencari dukungan. Hasilnya terbukti belum signifikan. Menurut narasumber kalau sudah sampai pada keputusan politik, pemilih berbeda pertimbangannya dengan pertimbangan- ketika orang menjadi supporter sepak bola. Bola dan politik tidak begitu terkait di Jatim, sehingga pasangan Agum yang tokoh PSSI pusat dan menjadi pasangannya Hamzah Haz, tidak signifikan mendulang perolehan suara di Jawa Timur.<sup>26</sup>

Selanjutnya, Ariwibowo, analis politik dari Jawa Timur membaca sebab-sebab kekalahan Hamzah Haz-Agum Gumelar sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Wawancara tim dengan Sdr. Yosep Hardi H. Bagian Program KPUD Propinsi NTT Kamis, 21 Juli 2005.

<sup>26</sup>Wawancara tim dengan Dhimam Aboror Djuraid, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi "Suara Indonesia" Surabaya, Ketua PWI Jawa Timur, Selasa, 26 Juli 2005.

”Hamzah Haz itu jelas *performance*-nya buruk setelah ketika menjadi wakil presiden. *Performance* dia menangani partai terkesan otoriter. Lalu soal dia kawin lagi (poligami) membuat citranya menurun di mata pemilih perempuan. Kemampuan manajerial dia di dalam pemerintahan dipertanyakan. Dia tidak menunjukkan sosok pemimpin yang kuat. Dia selalu mau saja, walaupun tadinya menentang majunya Mega. Ia semula menolak perempuan jadi pemimpin, tapi akhirnya mau mejadi Wapresnya. Hamzah sikapnya dilihat pemilih tidak konsisten. Dulu sikapnya di PPP – termasuk juga Yusril – mengatakan kalau partai Islam tidak bisa menerima wanita jadi pemimpin, tapi kemudian kemudian ditawarkan menjadi wakil presiden oleh Mega, mereka mau. Yusril, menjadi menterinya Mega mau. Sikap itu tidak konsisten. sehingga kemudian banyak masyarakat yang tidak mendukungnya. Kalangan PPP diduga banyak juga yang tidak jadi mendukung Hamzah. Menurut Ariwibowo, sebetulnya PPP dalam pemilihan presiden tidak bekerja. Peran kampanye diambil alih oleh Agum Gumelar”<sup>27</sup>

### ***Kampanye Hitam Untuk Kandidat Lain.***

Pada putaran pertama Pilpres terjadi gejala kampanye hitam terhadap Yudhoyono, Amien dan Hamzah di beberapa daerah. Satu pihak tanpa identitas menebar pesan menyudutkan pihak lain, berupa intrik-intrik berisi *black campaign* agar jangan pilih kandidat tertentu. Pesan itu beredar lewat SMS dan selebaran. *Black campaign* itu isi pesannya antara lain berupa: ”Kalau Amien Rais atau Hamzah Haz jadi presiden akan ada Islamisasi dan berdirinya Negara Islam di Indonesia?”. ”Umat Kristen akan sulit beribadah, bila Hamzah atau Amien jadi Presiden.”; ”Kalau presidennya Megawati NTT aman, orang Kristen aman. Kalau presidennya Yudhoyono-Kalla akan terjadi Islamisasi.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Wawancara tim dengan Aribowo, Dosen FISIP UNAIR/Ketua KPU Propinsi Jatim, Kamis, 21 Juli 2005.

<sup>28</sup>Info dari pemantau pemilu JPPR-Lapesdam NU, kota Kupang NTT, Juli 2005.

Ada SMS lain yang gencar di NTT, "Kalau presidennya SBY, ABRI akan kembali berkuasa.". Sebaliknya, dari kubu yang pro-SBY, ada SMS dan gosip yang menyatakan bahwa "Istrinya SBY adalah orang Katholik, dari kalangan kita Kristen. Pilihlah SBY...". SBY dikatakan issunya sangat erat dengan Soeharto. Wiranto juga diisukan terkait dengan pelanggaran HAM di Tim-tim dan terkait erat juga dengan Soeharto. Di Kupang NTT ada penjelasan Tim Sukses mantan Gubernur Herman Nusakabe untuk meng-*counter black campaign* dari tim kampanye kandidat lain. "SBY diisukan dia dahulu terkait soal Timor-timur, itu tidak benar! SBY malah banyak berjasa soal Tim-tim dan HAM".<sup>29</sup> Hal-hal di atas banyak berisi disinformasi dan perang urat syaraf yang bernuansa *black campaign* yang sedikit banyak cukup mengacaukan keputusan pemilih yang menerima SMS tersebut sehingga bergeser pilihan tanpa pertimbangan rasional dan kalkulatif.

## **Analisis Faktor Penentu Kemenangan Pilpres Putaran II**

### ***Kemenangan Yudhoyono-Kalla Secara Nasional:***

Ada faktor ledakan harapan terhadap lahirnya pemimpin alternatif. Daya tarik Yudhoyono bisa jadi tidak akan begitu fenomenal, apabila partai-partai politik lain di luar yang mendapatkan *electoral threshold* juga menyuguhkan pola-pola kampanye yang menarik. Kenyataannya ada keunikan Yudhoyono, tak ada tim sukses capres lain, selain Amien Rais yang benar-benar melakukan inovasi yang sama. Berani berduet dengan istri dan pergi menemani anaknya menemui *group* Slank, penyanyi idola anak muda. Selebihnya panggung kampanye Pilpres di daerah umumnya seragam dibuat oleh tim sukses yaitu nyanyian dan goyang dangdut dan tebaran teriakan juru-juru kampanye nasional dan lokal wajah lama tentang janji apa

---

<sup>29</sup>Wawancara tim dengan wartawan senior/redaktur Pelaksana Harian Kupang Pos, Sabtu, 23 Juli 2005.

yang akan dilakukan bila kandidatnya menang. Sesuatu yang mengundang kebosanan.<sup>30</sup>

Yudhoyono diuntungkan karena ia adalah relatif merupakan “wajah baru” dalam panggung politik, sekalipun dikenal luas. Yudhoyono dikenal sebagai militer profesional. Yudhoyono dalam kemasan baru ini tentu menimbulkan rasa penasaran. Apalagi ketenangannya, juga kemampuannya menyanyi, mengingatkan kita pada Bill Clinton yang pandai memainkan Saxophone, atau pertemuan kelompok pencapir yang disertai tokoh Srimulat yang dulu dilakukan Presiden Soeharto. Bahasa tubuh SBY yang khas, lalu wajahnya yang terbilang tampan untuk ukuran rata-rata pemimpin politik lainnya. Hal ini, menyenangkan publik yang selama ini begitu resah dengan kecenderungan penampilan fisik presiden Gus Dur dan Mega. Setelah proses politik yang hiruk-pikuk selama proses awal reformasi terlihat para pemilih nasional cenderung mendambakan sosok yang lebih kalem, tenang dan berbicara jelas/sistematis.

Ada pandangan bahwa faktor kemenangan Yudhoyono karena sebagian besar pemilih menaruh kepercayaan dan harapan yang besar terhadap kapasitas kandidat ini dalam melakukan perubahan. Sabam Siagian menganggap berbagai data yang diungkapkan berkaitan dengan kemenangan pasangan Yudhoyono pada Pilpres langsung pada putaran II, tanggal 20 September 2004, karena ada harapan amat besar ditumpukan pada Yudhoyono, untuk

---

<sup>30</sup> Ada analisis bahwa dengan masuknya JK dalam lingkaran SBY, amunisi pasangan ini kian bertambah. Bukan hanya popularitas yang jadi andalan mereka namun juga mesin politik. JK yang malang-melintang di Golkar tak kurang 30 tahun, membawa sekira 10 persen suara partai ini. SBY-JK didukung mesin politik yang kira-kira sanggup memproduksi 21,33 persen suara jikalau parpol-parpol itu sukses merangkul massa yang mencoblos mereka di pemilu legislatif. Paduan popularitas dan mesin politik itu setidaknya terbukti manakala pasangan ini meroket di Sulawesi Selatan, menangkan sekira 69,25 persen. Wiranto-Salahuddin Wahid, hanya kebagian 14,07 persen. Ingat Sulsel adalah tolok ukur kawasan Indonesia Timur, yang *notabene* condong ke JK ketimbang Wiranto yang dianggap cenderung sebagai “pangeran” tak punya daulat.

membereskan kesemrawutan yang sedang dialami Indonesia. Rakyat pemilih ingin bisa hidup lebih sejahtera dalam suasana serba tenteram. Sedangkan lapisan masyarakat menengah, khususnya para pengusaha dan profesional, mengharapkan kepemimpinan Yudhoyono dapat mendorong tata kerja yang lebih disiplin dan teratur, mengurangi premanisme yang akhir-akhir ini merembet secara meluas. Hal yang paling penting, Yudhoyono diyakini mampu menghidupkan semangat kerja baru untuk kemajuan Indonesia. Yudhoyono sendiri agak sadar benar betapa harapan amat besar diandalkan pada dirinya. Hal itu nampak ketika sekelompok redaktur media yang bergabung dalam *Jakarta Editors' Club* pada awal minggu Oktober 2004 berjumpa dengan Yudhoyono di sebuah gedung pertemuan di Cibubur, di Selatan Jakarta. Yudhoyonodatang seorang diri.<sup>31</sup>

Rosihan Anwar, sesepuh korps wartawan Indonesia, juga hadir karena menganggap pertemuan dengan Yudhoyono itu menarik dan penting. Setelah pernyataan singkat, para rekan wartawan mengajukan sejumlah pertanyaan. Tampak benar, meskipun sikap santun sebagai ciri pribadinya tetap menonjol, setelah berbulan-bulan kampanye politik, sosok individunya lebih nyata. Dalam bahasa Inggrisnya, dia lebih *assertive*. Tentang memilih anggota kabinet baru atau tentang peranan wakil presiden sebagai direktur utama yang mengurus bidang ekonomi dan keuangan, Yudhoyono menandakan bahwa sebagai presiden dialah yang menentukan. Dia akan memimpin sendiri aksi memberantas korupsi. Ia sadar, penting sekali memilih tokoh yang tepat sebagai Jaksa Agung. Menurut Yudhoyono, korupsi harus dibendung dan dikurangi secara berangsur.

Yudhoyono menyatakan ia tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri, umpamanya sowan ke negara-negara ASEAN (9 negara tetangga di Asia Tenggara) untuk memperkenalkan diri, sesuai kebiasaan di masa lalu. Ia hanya akan ke pertemuan para pemimpin negara-negara APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia/Pasifik)

---

<sup>31</sup>Lihat Artikel Sabam Siagian, *Bali Post*, 11 Oktober 2004, "Indonesia Masuki Tahap Baru".

di Chili dan pertemuan puncak ASEAN di Laos. Seorang rekan wartawan menyampaikan pesan bahwa Yudhoyono harus siap dikritik oleh media pers. Apalagi, menurut rekan itu, kalau di antara para pembantu Yudhoyono ternyata ada yang tidak kompeten dan tidak beres integritasnya. Jawaban Yudhoyono cenderung menarik. Dia kemukakan bahwa sebagai pendukung dasar demokrasi, ia secara mental siap menampung kritik. Dia mempersilakan untuk mengamati para pembantunya nanti, karena dia sendiri tidak selalu mampu mengetahui kenyataan sebenarnya di balik wajah yang ramah dan sikap yang santun. Dia mengandalkan media yang dapat bersikap lebih objektif. Selama dua stengah jam, Yudhoyono melayani sejumlah pertanyaan dan observasi oleh para awak media yang biasa "tembak ke sasarannya". Sosok yang muncul setelah pertemuan itu adalah seorang Yudhoyono yang santun, tulus, berkompeten, siap bekerja dan ingin menggalang kerja sama dengan semua pihak.<sup>32</sup>

Faktor Yudhoyono menang dengan memanfaatkan momentum. Yudhoyono akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Yudhoyono secara resmi telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, pada hari Kamis 11 Maret 2004. Surat Pengunduran Sebelas Maret (Supersemar) itu menjadi kisah antiklimaks hubungan buruk Mega-Yudhoyono yang terkuak ke permukaan pers. Alasan Yudhoyono mundur adalah akibat Presiden Megawati tidak merespons surat yang mempertanyakan kewenangannya sebagai penanggung jawab keamanan saat pemilu. Dia merasa tugas-tugasnya sebagai Menko Polkam telah diambil alih secara langsung oleh kepala negara. Bagi SBY, sudah tertutup peluang untuk bertemu dengan presiden saat itu guna membicarakan surat yang dikirimkannya. Selama pemerintahan Megawati sebelumnya, tidak ada menteri yang dipecat atau mengundurkan diri, sekalipun kredibilitasnya hancur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika Matori Abdul Djalil nonaktif dalam waktu enam bulan, Megawati tidak melakukan penggantian.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

Tipikal Megawati sebelum itu cenderung apapun yang terjadi, tetap mempertahankan kabinetnya.

Ada analisis yang melihat bahwa momen khusus "pemecatan Yudhoyono", ada tayangan televisi dan ada kiat pengelolaan komunikasi politik untuk menjadi "opera sabun" yang sangat menyentuh adalah bagian penting dari faktor kemenangan Yudhoyono. Televisi sebagai media komunikasi massa memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan membangun dukungan atau sebaliknya menjatuhkan simpati pemilih di masyarakat. Kejadian tersebut terekam dalam memori ingatan jangka panjang orang Indonesia, kemudian bisa mempengaruhi keputusan pemilih pada hari H pemungutan suara. Lalu apa yang sebenarnya membuat Megawati kalah bersaing dengan Yudhoyono dalam Pilpres putaran dua 2004 lalu? Salah satu penyebab pentingnya adalah faktor determinan penggunaan media dan pengemasan pesan komunikasi politik yang muncul di televisi. Hal ini berkaitan erat dengan persoalan apakah suatu berita yang muncul pertama, telah dikelola atau belum secara baik oleh pasangan dan tim sukses Yudhoyono ataupun Tim Mega pada kesempatan berikutnya.

Salah satu contoh momen khusus milik Yudhoyono adalah bagaimana pemberitaan soal posisi Yudhoyono sebagai Menkopolkam yang ingin mencalonkan diri, kemudian tidak diundang dalam rapat kabinet. Begitu juga tayangan ketika Mega yang menunjukkan amplop dengan bahasa tubuh tertentu saat menunjukkan surat pengunduran diri Yudhoyono. Hal tersebut menjadi bagian drama "opera sabun" yang menyimpan pesan Yudhoyono sebagai "korban" yang kemudian menimbulkan banyak simpati dari ibu-ibu dan kalangan lainnya untuk berbalik mendukung Yudhoyono, terlepas berlatar belakang tentara yang dicap trauma bermasalah akibat dwifungsinya di masa lalu. Sisi figur Yudhoyono sebagai "sang demokrat" kemudian ditonjolkan lewat tayangan publik peluncuran buku. Yudhoyono sebagai militer intelektual dan pro perubahan "Bersama Kita Bisa!". Begitu pula lantunan lagu Zamrud "Sudah lima menit... aku disini... tanpa suara..." yang sukar dibantah telah mampu menggoyang emosi kaum muda, bapak-bapak

dan para ibu. Hal itu berulang-ulang kali muncul di berbagai stasiun televisi nasional.

Hal itu mengandung pesan visual –bahwa Yudhoyono adalah korban Mega”, hal itu tampak mampu menenggelamkan upaya membangun popularitas Amien Rais yang juga dilakukan lewat televisi. Amien Rais dan anaknya sempat ditayangkan menyanyikan lagu favorit kelompok Slank dan sengaja menyempatkan diri hadir ke markas *group* Slank di Jalan Potlot, Duren Tiga Jakarta. Beberapa kali tayangan di televisi nasional, Amien Rais dan istri berduet menyanyikan lagu campur sari menjelang kampanye pemilihan presiden. Sama-sama bernyanyi di depan televisi, tapi pamor Yudhoyono melejit naik karena ia memiliki momen khusus sebagai figur teraniaya. Sementara Amien Rais tidak memiliki momen itu.

Ada analisis lain yang mendongkrak popularitas Yudhoyono. Sukardi Rinakit membuat analisis bahwa angin yang ditebar Taufik Kiemas telah berubah menjadi badai buat Mega. Ia ibarat massa atom yang menjelma menjadi energi dalam teori Albert Einstein. Hanya karena mengatakan, sebagai seorang jenderal, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung bersifat “kekanak-kanakan”, bom atom pun meledak. Suara PDI-P merosot 14 persen, kalah oleh Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2004. Sebaliknya, Partai Demokrat (PD), yang memanfaatkan SBY sebagai simbol politik, mendulang perolehan suara. Padahal, apa yang dialami PDI-P itu belum berakhir. Ledakan lain akan segera menyusul, yaitu saat perebutan kursi presiden. Paralel dengan itu, sejarah Megawati yang awalnya menjadi simbol nurani rakyat, juga akan selesai. Tokoh politik lain, siapa pun orangnya, akan mengganti posisi politik yang kini diduduki Megawati.<sup>33</sup>

Garin Nugroho misalnya berpendapat televisi sebagai media dinilai merupakan alat yang efektif untuk komunikasi publik. Dengan tampil di televisi beberapa kali saja, sudah bisa menjadikan seseorang tampak menjadi pantas, menjadi ahli hukum, ahli politik, ahli psikologi. Padahal, kemampuan tokoh tadi sebenarnya bisa jadi pas-pasan saja. Menurutnya, kemenangan Yudhoyono dalam pemilu

---

<sup>33</sup>Lihat *Kompas*, Selasa, 20 April 2004.

yang lalu, salah satu faktor penentunya adalah kehadiran Yudhoyono lewat televisi. Malah, televisi dinilai lebih berperan dibanding dengan tim sukses. Yudhoyono tampil sebagai sosok yang lugas, padat dan santun. Di antara calon presiden, Yudhoyono mempunyai nilai tinggi dibanding calon lain.<sup>34</sup>

Salah satu yang terpenting dari kesuksesan opera sabun adalah kemampuan membaca karakter pemirsa yang terus berubah. Era semacam ini adalah era mengelola penonton dengan memahami masa jenuh penonton, dan tidak semata-mata mengelola yang ditonton. Dalam perspektif itu, kajian terhadap capres memiliki beberapa aspek yang menarik. Aspek pertama, pemilu sekarang ini muncul dalam percepatan perubahan masyarakat dan politik Indonesia Pasca-1998, yang tidak sempat terdeskripsikan dan terpetakan dengan baik, khususnya citra peran partai, politik aliran, ideologi, serta citra politisi populer penggerak politik Indonesia yang muncul layaknya selebriti di berbagai berita, seperti citra Akbar Tandjung, Hamzah Haz, dan lain-lain. Sekiranya terjadi pelemahan dan kejenuhan pada citra partai dan peran politikus, psikologi komunal semacam itu, sangat menguntungkan nasib Opera Sabun Yudhoyono-Kalla. Sebab, citra ketokohan mereka cenderung tidak sangat kuat sebagai politikus, namun lebih sebagai pemimpin birokrat dan birokrat pedagang.<sup>35</sup>

Aspek kedua yang harus dicatat, kepopuleran Yudhoyono bertumbuh dalam karakter masyarakat sebagai dunia penggemar. Gejala itu sesungguhnya bertumbuh dari masyarakat yang mengalami transformasi besar-besaran di tengah krisis yang penuh guncangan dan migrasi, khususnya dari masyarakat pedesaan ke perkotaan, yang sedang mengalami puncak budaya industri teknologi kapitalis. Simaklah menjamurnya kanal-kanal televisi, media cetak, hingga berbagai bentuk tontonan dan pengiklanan. Sebuah transformasi yang menjadikan individu masyarakat sebagai atom-

---

<sup>34</sup>Lihat Garin Nugroho, *Opera Sabun SBY : Televisi & Komunikasi Politik*, Pn. Nastiti, Cetakan I : Nopember 2004.

<sup>35</sup>Lihat artikel Palopo Abdurahman , Televisi Dan Komunikasi Politik, *Banjarmasin Post*, Minggu, 16 Januari 2005.

atom. Sebuah kedirian yang terpecah dari komunitasnya dan menuntut panduan baru. Yakni, panduan-panduan yang terbaca lewat teks televisi daripada teks buku-buku sejarah. Maka, sesungguhnya Opera Sabun SBY tumbuh dan didukung oleh perilaku suku-suku baru, suku-suku kontemporer yang sering disebut *neo-tribal*. Dalam kasus pilpres yang lalu, diakui, televisi memiliki peran besar dalam kemenangan Yudhoyono. Tetapi, kemenangan itu tidak semata-mata televisi, tetapi juga tidak lepas dari budaya patronial bangsa ini. Dalam budaya tersebut, terdapat hubungan *patron* dan *client*. *Patron* dipandang *client* sebagai sosok yang bisa melindungi. Pencitraan Yudhoyono yang lugas, mengayomi dan santun, dianggap simbol *patron* yang diinginkan *client*.<sup>36</sup>

Keadaan ini dikuatkan dengan temuan di NTT, seorang narasumber berpendapat bahwa kandidat presiden yang ada datang ke NTT dengan isu yang hampir sama seperti pemberantasan kemiskinan dan dipromosikan oleh tim sukses, tidak mendapat banyak perhatian. Walaupun Mega menang di NTT, masyarakat kota Kupang terbanyak memilih Yudhoyono, karena kualitas figurinya yang sering tampil di televisi dengan statemen yang menyejukkan, mengarah ke upaya membangun kesatuan dan persatuan. Masyarakat Kupang ada yang bersimpati kepada Yudhoyono, saat statusnya masih Menkopolkam yang tampil di televisi dan koran. Sebagian masyarakat NTT merasa akan ada angin segar baru yang akan dihembuskan Yudhoyono.<sup>37</sup>

Sebagai salah satu pembanding analisa “Opera Sabun” faktor komunikasi politik Garin Nugroho, Ketua Departemen Politik

---

<sup>36</sup>*Ibid.*. Palopo Abdurahman juga menambahkan kutipan dari Garin Nugroho bahwa salah satu aspek terpenting dari analisis opera sabun adalah analisis terhadap kemampuan mereposisi kepopuleran yang menurun yang pada gilirannya menuntut reposisi lewat nilai tambah dan perombakan pada unsur-unsur opera sabun ketika mengalami masa jenuh. Sebutlah, meningkatkan sosialisasi, penambahan bintang baru, hingga penguatan karakter.

<sup>37</sup>Wawancara tim dengan Bagian Program KPUD Propinsi NTT Kamis, 21 Juli 2005.

Soegeng Sarjadi Syndicated Jakarta, Sukardi Rinakit melihat bahwa faktor perhitungan keterwakilan wilayah geografis, *cross cutting* ideologis, agenda perubahan – seperti jaminan rasa aman, pemberantasan KKN, pendidikan dan kesehatan, penerimaan pasar dan pelaku bisnis, ikut pula menentukan pasangan calon akan mendapat dukungan pemilih lebih banyak secara nasional. Sukardi berpandangan bahwa jika politik berjalan linier, pasangan Yudhoyono –Kalla dengan sendirinya akan memenangi pertempuran melawan kekuatan pasangan Mega yang saat itu sedang berkuasa.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menjadikan Yudhoyono-Kalla menjadi pasangan ideal untuk menjawab simpul sejarah Indonesia pada dekade 2000-an. Faktor-faktor itu antara lain Yudhoyono-Kalla cenderung dianggap sebagian pemilih akan mewakili kepentingan masyarakat Jawa-Luar Jawa, Indonesia Bagian Barat (IBB)-Indonesia Bagian Timur (IBT) dan perpaduan pasangan nasionalis-Islam, militer-sipil. Selain itu, sikap peragu Yudhoyono bisa ditutupi oleh sikap Jusuf Kalla yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Belum lagi bila faktor lain ikut diperhitungkan seperti Jusuf Kalla bersih dari KKN dan sikap yang cenderung pro-pasar. Boleh dikata, Yudhoyono-Kalla sebagai pasangan terbaik, lebih menjanjikan untuk terjadinya akselerasi pemulihan ekonomi dan stabilitas keamanan. Jika mereka tidak bisa memenuhi tuntutan dan harapan rakyat, mereka berisiko menghadapi pengadilan rakyat. Publik akan meninggalkan mereka dalam tempo singkat.<sup>38</sup>

Fungsionaris DPP Partai Golkar yang dinonaktifkan Priyo Budi Santoso menyatakan akan ada kemenangan capres-cawapres Yudhoyono-Kalla. Fenomena Yudhoyono-Kalla pada Pemilu 2004 ini, sama persis dengan fenomena Megawati pada Pemilu 1999 yang sama-sama memilik momen khusus dukungan arus bawah. Pernyataan itu berkaitan untuk menanggapi adanya keputusan Rapim DPP Partai Golkar yang ternyata justru berpendapat sebaliknya, dengan mendukung pasangan capres Megawati-Hasyim melalui

---

<sup>38</sup>Sukardi Rinakit, *Kompas*, Selasa, 20 April 2004, "Pasangan SBY-Jusuf Kalla".

Koalisi Kebangsaan. Semula Priyo berharap hasil Rapim DPP Golkar akan mengikuti suara arus bawah mendukung Yudhoyono-Kalla. Priyo khawatir hal itu akan berakibat pada pemilu 2009 nanti basis konstituen partai Golkar akan 'menghukum' dengan tidak memilih lagi partai berlambang pohon beringin tersebut.<sup>39</sup>

Adanya perbedaan hasil di basis-basis partai Golkar dengan Koalisi Kebangsaan yang ternyata justru dimenangkan oleh pasangan Yudhoyono-Kalla. Priyo melihat hal itu merupakan sebuah bentuk pembangkangan dari para pemilih partai tersebut. Kemungkinan alasannya sangat sederhana, mereka mendukung Kalla yang merupakan tokoh partai Golkar dan sampai saat itu masih tercatat sebagai anggota dewan penasihat partai.<sup>40</sup> Faktor Kalla yang dianggap mewakili IBT, yang kemudian berpasangan dengan Yudhoyono yang mewakili IBB menjadi suatu yang juga diperhitungkan oleh para pemilih. Khususnya pemilih mereka yang ada di IBT.

***Kekalahan Pasangan Mega-Hasyim*** Terkait kekalahan pasangan Mega-Hasyim, Mangara Siahaan, wakil sekretaris jenderal partai PDI Perjuangan menyatakan:

"Hal itu memang kesalahan DPP yang kurang kerja keras dalam lima tahun ini. Sekarang mereka perlu lebih memikirkan strategi ke depan. Pengakuan sportif dan autokritik yang disampaikan oleh politisi PDIP tentang kekalahan kandidatnya. Ada dinamika internal dalam faksi-faksi di PDIP. Hasil kajian Lembaga Kajian Demokrasi (LKaDe), yang menyatakan sepak terjang Taufiq Kiemas (TK), suami Megawati, sebagai salah satu penyebab turunnya suara partai.

---

<sup>39</sup>Laporan Kantor Berita Antara, 22 September 2004 bertajuk: Kemenangan SBY-JK Sudah Diprediksikan Sejak Lama

<sup>40</sup>*Ibid.*, Kantor Berita Antara, 22 September 2004. Sebelumnya DPP Partai Golkar dalam rapim IX memutuskan untuk menonaktifkan sementara 15 fungsionaris, pengurus dari keanggotaan partai. Ke 15 orang tersebut antara lain Prof Muladi dan Jusuf Kalla dinonaktifkan sebagai anggota dewan penasihat, Fahmi Idris, Marzuki Darusman, Priyobudi Santoso, dinonaktifkan sebagai Pengurus DPP, serta beberapa lainnya seperti Anton Lesiangi, Burhanuddin Napitupulu, Firman Soebagyo, Yorris Raweyai, Malkan Amien dst

LKaDe dalam pertemuan di rumah Arifin Panigoro, sempat mendiskusikan *paper* berjudul "Analisis Kegagalan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2004 dari Target 42 Persen".<sup>41</sup>

*Paper* analisis kegagalan tersebut mengungkapkan ada lima penyebab kegagalan yaitu melemahnya figur Megawati, masalah struktur pimpinan pusat, sepak terjang Taufiq Kiemas (TK), kurangnya efektivitas organisasi, dan kontroversi pemilihan kepala daerah. Dalam *paper*-nya, Ketua LKaDe Sukowaluyo Mintorahardjo menjelaskan, penelitian dilakukan setelah melihat suara partainya anjlok. Selama sepekan, ia mewawancarai 100 narasumber, dari kalangan elite partai hingga sopir taksi. Kesimpulannya, menunjuk faktor intervensi politik Taufiq dinilai menjadi penyebab kekalahan yang dominan. Sukowaluyo menyatakan "Ini kajian objektif, bukan suka atau tidak suka sama TK. LKaDe merekomendasikan agar peran Taufiq dikurangi untuk mengerek popularitas Megawati. "Komentar-komentar TK memberi dampak negatif, memunculkan kesan, sekalipun Megawati sebagai presiden, Taufiq yang berkuasa hingga orang tak suka".<sup>42</sup>

Menurut Sukowaluyo lagi, ada lima faktor yang di atas kertas harusnya membawa kemenangan bagi Megawati. Pertama, pada Pemilu 1999 Megawati mendapat dukungan riil akar rumput. Kedua, Mega didukung PDI-P yang memiliki sejarah lama dan institusionalisasinya berjalan baik. Ketiga, Megawati adalah presiden berkuasa (*incumbent president*) yang bisa membuat kebijakan menarik rakyat. Keempat, calon wakil presiden Hasyim Muzadi adalah pemimpin organisasi Islam terbesar di dunia. Kelima, Mega didukung Koalisi Kebangsaan. Timbul pertanyaan besar kenapa bisa kalah?. Kekalahan PDI-P dan Megawati disebabkan dua faktor, yaitu faktor eksternal 20 persen dan internal 80 persen. Dari survei tim Sukowaluyo Maret 2004, ada 62 persen responden menolak Mega. Jadi, rakyat kecewa dengan Megawati bukan karena prestasi

---

<sup>41</sup>Lihat Majalah *Gatra*, 23 April 2004, PDI Perjuangan: Kajian Miring di Tikungan. LKaDe adalah bentukan para mantan anggota Badan Litbang PDI Perjuangan, yang sempat jadi posko oposisi kepada Megawati

<sup>42</sup>*Ibid*,-.

Yudhoyono. Siapa pun yang dihadapkan dengan Megawati akan menang.<sup>43</sup>

Tokoh internal PDIP Kwik Kian Gie mengatakan, kekalahan Mega disebabkan Koalisi Kebangsaan yang terdiri PDIP, Partai Golkar, PPP dan PDS, tidak mampu menjawab aspirasi yang berkembang di masyarakat. Maswadi Rauf soal kekalahan pasangan Mega berpandangan bahwa kharisma Megawati Soekarnoputri dalam tiga tahun pemerintahannya ternyata tidak bisa membantu perolehan suara PDIP dan dirinya sendiri, karena kharisma sekarang ini sudah dikalahkan faktor kinerja. Konflik di tubuh PDIP bukan dikelola Megawati, karena ia tidak sepintar Soekarno atau Soeharto dalam mengelola konflik. Megawati tidak terbiasa mengelola konflik, dan tidak ada untung baginya. Kharisma Megawati sulit dijual, tetapi di kalangan pengurus PDIP masih yakin akan kepemimpinan Megawati.<sup>44</sup>

Sabam Siagian mengungkapkan penolakan terhadap kepemimpinan Megawati dan keinginan untuk terjadinya pembaruan ternyata amat kuat di kalangan masyarakat pemilih. Ada kesan sementara pengamat, kekalahan 20 September 2004 lalu merupakan trauma psikologis yang berat bagi Megawati. Mega cenderung terlalu dibuai oleh para pembantunya, terutama di tim suksesnya yang berpusat di Mega Center yang meyakinkannya bahwa Mega pasti akan menang. Meskipun dengan persentase yang tipis. Andaikata pun Mega kalah, maka kekalahan itu akan tipis sekali persentasenya. Demikian perkiraan tim suksesnya. Hasil lengkap yang diungkapkan 20 September ternyata lain sama sekali. Selisih jumlah suara 21 persen solid untuk Yudhoyono-Kalla (60,62% - 39,38%). Mega-Hasyim hanya unggul di empat propinsi dari 32 propinsi: Bali, NTT, Maluku dan Kalbar. Data ini berarti bahwa tidak di satu propinsi pun yang strategis posisinya berdasarkan faktor jumlah penduduk dan faktor historis mendukung Mega-Hasyim. Kemenangan SBY-Kalla,

---

<sup>43</sup>Lihat *Kompas*, 23 September 2004, "Megawati 'Kalah', LKaDe Usulkan PDI-P Gelar KLB".

<sup>44</sup>Lihat Majalah *Gatra*, 29 September 2004, "Konflik Internal Golkar dan PDIP Bisa Makin Tajam".

atau kekalahan Mega/Hasyim ini dari pandangan sosiologi politik lebih mencolok lagi, kalau hasil 20 September itu diukur menurut kabupaten/kota. Ternyata 77 persen dari jumlah kabupaten/kota mendukung Yudhoyono-Kalla. Sketsa peta menggambarkan kabupaten/kota yang mendukung Mega-Hasyim, kecuali di 4 propinsi tersebut tadi, juga di beberapa bagian di Sumut, Sulsel, Bengkulu dan Jawa Tengah.<sup>45</sup>

Andreas Bintoro menilai adanya bias gender adalah penyebab kekalahan Mega. Faktor gender sangatlah signifikan bagi kelompok tertentu untuk menentukan pilihannya di samping faktor-faktor lain. Kelompok ini secara kategoris hanya menjawab, pokoknya mereka meyakini perempuan itu tidak baik sebagai pemimpin atau presiden. Dalam budaya Sunda dan Jawa memang ada bias terhadap perempuan. Misalnya di tanah Sunda, perempuan dikatakan sebagai *pondok langkah* artinya tidak leluasa untuk bepergian jauh. Seorang suami di Jawa Tengah atau Jawa Timur sering menyebut istrinya sebagai *tiyang wingking* atau *konco wingking* (orang belakang atau teman belakang). Menurut Bintoro ada kenyataan historis bahwa kandidat Amien Rais, tokoh Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif, capres Hamzah Haz pun pernah menolak pencalonan presiden perempuan seperti kasus Megawati. Para kiai sepuh Langitan pun mengharamkan calon presiden perempuan. Hal itu agaknya bisa pula menjadi salah satu faktor alternatif yang sedikit bisa menjelaskan kekalahan Presiden Megawati dalam putaran terakhir pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>46</sup>

Andreas Bintoro melihat kekalahan pasangan Mega-Hasyim, sama halnya dengan Maswadi Rauf yaitu dari faktor kinerja. Menurutnya, walaupun ekonomi makro pemerintahan Megawati baik tetapi ekonomi mikronya tidak, penjualan aset negara, banyaknya PHK, pengangguran, bertahannya jaksa agung (tidak dipecat oleh Presiden Megawati), mahalnya biaya pendidikan dan sebagainya.

---

<sup>45</sup>Sabam Siagian, Indonesia Masuki Tahap Baru *Bali Post*, 11 Oktober 2004.

<sup>46</sup>Andreas Bintoro, *Pikiran Rakyat*, 27 September 2004, "Bias Gender Penyebab Kekalahan Mega".

Pencapaian Presiden Megawati, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, utang negara yang makin berkurang, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung walaupun lamban tidaklah mampu meredam kecemasan para pemegang pemerintahan ini.<sup>47</sup>

Faktor yang lain adalah kegagalan mesin partai. Pada Pilpres langsung 2004, tidak ada jaminan bahwa konstituen Parpol tertentu akan otomatis menjadi konstituen capres yang diajukan parpol tersebut. *Exit poll* LP3ES menunjukkan bahwa tidak semua konstituen PDIP dan Partai Golkar memilih Megawati-Hasyim. Banyak di antaranya yang memilih SBY-Kalla. Menghadapi pemilu legislatif, boleh jadi Parpol berharap banyak pada pemilih setia (*loyal voters*). Tetapi menghadapi Pilpres langsung, para *loyal voters* ini tiba-tiba menjadi *swing voters* atau pemilih mengambang yang bisa condong ke mana saja. Pelajarannya adalah dalam era demokratisasi pemilihan langsung, maka "hidung" dan nurani Parpol dan tim suksesnya harus lebih tajam lagi dalam mendengarkan suara hati rakyat. Koalisi tingkat elite, apalagi yang dibentuk secara terburu-buru menjelang pilpres, tentu tidak akan efektif. Mesin koalisi parpol hanya bisa bekerja di luar bilik tempat pemungutan suara (TPS). Begitu masuk ke bilik sempit itu, nuranilah yang bicara. Selain itu, pilpres ini menunjukkan bahwa parpol bagaimana pun juga harus memperbarui peta pemilih. Kalau dulu pemilih dibagi-bagi menjadi berbagai aliran (sosial, agama, suku, dll.), maka kini mungkin peta itu harus diperkaya lagi, karena aliran tak lagi absolut menentukan pilihan.<sup>48</sup>

Anggota Presidium Gerakan Pemurnian PDI Perjuangan, yang pernah menjabat sebagai anggota Balitbang PDIP, Bambang Pranoto menganggap kemenangan PDIP pada pemilu 1999 dan urutan dua di pemilu terakhir adalah bukti dari kuatnya faktor pemilih tradisional. "Soekarnoisme masih mayoritas". Unsur-unsur primordialisme dan pendukung kharisma akan muncul. Penting untuk menjaga hubungan historis dengan para partai-partai cikal bakal PDIP, seperti Partai Nasional Indonesia. Karena jika PDIP tidak menjaga hubungan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*,

<sup>48</sup>Lihat *Pikiran Rakyat*, 27 September 2004, "Perpecahan Parpol".

historis, bisa repot, perolehan suara akan menurun, tetapi konsekuensi dari sistem pemilihan langsung adalah adanya pemilih yang rela meninggalkan partai, demi memilih orang di lain partai yang dianggap lebih kredibel. Secara *de facto* Mega gagal, baik internal ataupun eksternal.<sup>49</sup> Faktanya, Mega-Hasyim kalah dibanding Yudhoyono-Kalla pada putaran kedua.

Penjelasan soal kegagalan Mega secara internal dijelaskan oleh Noviantika Nasution, mantan anggota Komisi X DPR Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan (GP) PDI-P dalam tesis S2 Ilmu Politik-nya yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Kekalahan PDIP dalam Pemilu Legislatif 2004. Menurut Noviantika, kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2004, tidak terlepas dari gaya kepemimpinan partai ini yang sangat feodalistik dan paternalistik. Di samping itu, hak prerogatif yang dimilikinya ternyata tidak digunakan secara proporsional untuk kemajuan partai, dan sebaliknya lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Lihat *TEMPO Interaktif*, 23 Januari 2005. Guruh, Kuda Hitam Calon Ketua Umum PDIP.

<sup>50</sup>Lihat *Harian Komentor*, Manado, 31 August 2005. Noviantika Nasution: Gaya Kepemimpinan Feodal Penyebab Terpuruknya PDIP. Noviantika menjelaskan Program program yang telah disepakati partai baik dalam tingkatan kongres maupun rapat-rapat partai sering dibatalkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan kesibukannya sebagai ketua umum yang juga presiden RI ketika itu, juga menyebabkan rapat-rapat partai di tingkat DPP tidak berjalan. Akibatnya pengambilan keputusan selalu lambat. Noviantika yang telah di-recall dari DPR oleh DPP PDIP me-ngatakan, selaku Ketua Umum PDI-P, Megawati sering mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial. Misalnya tidak dijalankannya Surat Keputusan (SK) pembentukan departemen-departemen partai, proses pe-nunjukan kader-kader partai di fraksi DPR/MPR yang meng-abaikan aturan main yang ada, proses pemberian sanksi yang dilakukan tanpa melalui prose-dur seperti kasus Basuki di Sura-baya, Albert Pribadi di Bogor dan penunjukkan Sutiyoso sebagai calon gubernur. Kenyataan tersebut, memperlihatkan tidak adanya sistem meritokrasi mem-berikan penghargaan ber-dasarkan prestasi— di tubuh

Dalam konteks yang lain, Saiful Mujani dalam penjelasan soal pemilih kalkulasi rasional, berpandangan bahwa pilihan terhadap partai atau calon presiden sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat mengevaluasi kinerja partai yang didukungnya atau calon yang sedang berkuasa. Misalnya bagaimana mereka mengevaluasi partai yang sedang berkuasa (PDI-P dalam hal ini), dan presiden yang sedang berkuasa (Megawati Soekarnoputri). Kalau evaluasinya positif, kinerja Megawati dianggap positif, dan partai politiknya juga dipandang positif, maka baik partai maupun Megawati sendiri akan diberi *reward*, semacam pahala atau ganjaran untuk kembali dipilih dalam pemilu, baik pemilu legislatif maupun presiden. Sebaliknya, kalau evaluasi masyarakat terhadap kinerja partai atau presiden yang berkuasa negatif, maka yang diberikan adalah

---

PDI-P. Kader partai yang sudah dengan susah payah mencapai posisi tinggi di struktural, ternyata tidak diberi prioritas kesempatan melanjutkan karier politiknya di jenjang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang tidak mempunyai sejarah perjuangan dengan partai, malah diberi posisi strategis. Suasana ini membuat demora-lisasi di kalangan kader dan me-nurunkan etos kerja serta kejujuran-nya. Penyingkiran kader PDI-P untuk menduduki jabatan-jabatan politik, juga menjadi salah satu indikasi telah terjadinya politik uang dan suap kepada elit-elit PDI-P. Dengan permainan uang, maka kebijakan partai kemudian berpaling kepada pihak yang mencalonkan kader di luar kader PDI-P. "Dengan perilaku elit di PDI-P seperti itu, maka proses kaderisasi untuk jabatan politik gagal. Secara internal, kaderisasi di tingkat kepengurusan juga tidak berlangsung secara baik. Akibat gaya kepemimpinan Megawati yang feodalistik itu juga menimbulkan berbagai gugatan-gugatan yang dialami DPP PDI-P. Belum selesai gugatan di berbagai pengadilan di Jakarta, DPP kembali dilaporkan ke Mabes Polri oleh empat orang kadernya melalui kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dikoordinir Petrus Selestinus. DPP PDI-P dalam hal ini Sekjennya Pramono Anung, fungsionaris lainnya Alexander Litaay, Firman Jaya Deily dan kuasa hukumnya Dwi Ria Latifah dilaporkan ke Mabes Polri karena telah melakukan pencemaran nama baik dengan menyebut-nyebut bahwa ke empat kadernya yang juga sebagai utusan kongres Bali bersama 13 lainnya telah mencabut gugatannya terhadap Megawati dan DPP PDIP.

*punishment*, semacam hukuman atau sanksi terhadap partai atau presiden yang berkuasa tersebut.<sup>51</sup>

Dalam analisis perilaku pemilih, berlaku kalkulasi rasional. Ini juga berlaku untuk menjelaskan mencuatnya dukungan untuk Yudhoyono. Kekalahan Megawati dalam pemilu kemarin sebagian terkait dengan evaluasi terhadap kinerja Megawati selama tiga tahun ini. Walaupun kinerjanya tidak terlalu buruk, tapi belum cukup bagus dibandingkan dengan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap perbaikan kinerja pemerintah. Rakyat melihat kinerja Megawati, terutama yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum dan keamanan sangat lemah. Oleh karena itu mereka mencari alternatif, dan alternatif itu dipandang ada pada sosok Yudhoyono. Media massa menjadi sangat menentukan, terutama media massa yang sangat massif seperti televisi. Makanya, orang NU di pedalaman sana justru tidak mendukung Hasyim Muzadi, tapi mendukung Yudhoyono. Dari mana mereka tahu, tiba-tiba mengenal dan menyukai Yudhoyono? Di antaranya lewat media massa yang massif itu tadi. Itulah kelakuan politik masyarakat kita sekarang, di era media massa yang makin massif.<sup>52</sup>

Di sini terlihat bahwa mesin politik, walaupun punya pengaruh penting, tetap tidak cukup kuat untuk mendorong orang untuk mendukung keputusan partai mendukung kandidat tertentu, kalau tidak disertai faktor-faktor penunjang lainnya seperti faktor psikologis. Misalnya, bagaimana karakteristik tokoh yang didukung oleh mesin partai politik tersebut. Walaupun mesin politiknya besar seperti gabungan partai-partai besar semisal PDI-P, PPP dan Golkar, tapi sosok yang didorongnya tidak cukup bagus di mata masyarakat, maka tidak akan di dukung pemilih. Oleh karena itu, yang bagus adalah punya mesin politik, sekaligus punya tokoh andalan yang kurang lebih sepadan dengan pesaingnya.

Masih pendapat Saiful Mujani, melombakan Megawati dengan Yudhoyono itu terlalu timpang. Ketika partai-partai yang tergabung

---

<sup>51</sup>*Ibid.*,

<sup>52</sup>Saiful Mujani, *JIL Newsletter*, 12 September 2005, "Penjelasan Aliran dan Kelas Sosial Sudah tidak Memadai".

dalam Koalisi Kebangsaan itu mendukung Megawati, sepertinya mereka kurang memperhatikan atau mengabaikan faktor bagaimana hubungan Megawati dengan masyarakat pemilih. Sebenarnya para ilmuwan politik sudah sejak awal memberi tahu cukup banyak informasi lewat tafsir survei-survei menjelang Pilpres 2004 bahwa Yudhoyono itu sangat populer, jauh di atas Megawati. Tetapi berhubung survei tentang perilaku pemilih merupakan hal baru dalam politik kita, banyak orang yang skeptis. Sekarang mereka para capres yang lain, makan sendiri hasil ketidakpercayaan mereka.<sup>53</sup>

Meskipun pasangan Mega-Hasyim kalah dalam pilpres, tetapi di beberapa daerah pemilihan di IBT (Indonesia Bagian Tengah/Timur) seperti Maluku, Kalbar, Bali dan NTT, pasangan ini mendapat dukungan yang besar.<sup>54</sup> Seorang anggota DPRD Provinsi NTT, menjelaskan ada kecenderungan pemilih di NTT kuat dalam mendukung Megawati. Mengapa mayoritas pemilih di NTT cenderung mendukung Mega? Pertama, masyarakatnya adalah masyarakat yang sangat paternalistik. Ketika aktor penting di dunia Parpol ada di elit daerah dan birokrasi, maka rakyatnya akan ikut. Narasumber ingat betul waktu itu, gubernur, wakil gubernur, sejumlah bupati sudah berkonsolidasi, mendeklarasikan untuk mendukung Mega. Masyarakat melihat itu dan mengikuti pilihan itu. Kedua, masyarakat NTT masih agak traumatik dengan militer (sebagai contoh "Pelanggaran HAM" di Dili, Timor-timur). Personifikasi Wiranto dan Yudhoyono dilihat dalam posisi itu. Walaupun SBY kemudian diolah oleh tim suksesnya (Blora Center) diupayakan agar bisa terlihat dalam perspektif non militer, namun seorang intelektual. Lihatlah cara berfikir dan sikap Yudhoyono-Kalla. Masyarakat menengah atas di NTT, sebagian banyak yang mendukung Yudhoyono yang bukan militeristik, profesional dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Lihat Ananta Aris, Evi Nurvidya dan Leo Suryadinata, *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapura: ISEAS, 2005, hlm. 103.

demokratis. Namun, Mega tetap mendapat dukungan terbanyak di NTT.<sup>55</sup>

Bagi narasumber untuk waktu kedepan diharapkan dikotomi sipil dan militer ini tidak hanya diselesaikan sampai batas wacana, tapi juga sampai pada tataran konteks. Untuk itu secara struktural bisa diubah melalui aturan UU Pilpres. Kalau tentara ada yang ingin menjadi calon presiden, dia harus menanggalkan seluruh atribut ketentaraannya tersebut minimal setahun sebelumnya. Hal itu dibuktikan juga dalam penyusunan kabinet. Kalau kabinet yang disusunnya banyak anasir militernya, maka kecurigaan terhadap datang kembalinya militerisme di Indonesia itu terbukti. Jika benar, hal tersebut akan memanen 'kecelakaan politik' pula pada masa yang akan datang. Kembalinya otoritarianisme.<sup>56</sup>

Pada Pilpres putaran II di NTT pun secara keseluruhan perolehan suara Mega-Hasyim masih sangat mendominasi. NTT adalah kantong tradisional PDIP. Pemilih tradisional tidak mau tahu bagaimana visi calon presiden yang lain, tapi mereka melihat ketokohan dan ikatan emosional. Siapa orangnya sangat menentukan, belum tentu programnya. Jadi masuk akal, Mega menang telak di NTT. Dalam kemiskinan orang NTT, dengan kesederhanaan mereka menjadi mudah dipengaruhi oleh kharisma Soekarno. Mega, memang sangat kuat di NTT karena dia sering ke NTT. Ada sejarah, ayahnya dibuang Belanda ke Flores (Ende). Selain itu juga boleh dibilang, 'dekat dengan kalangan gereja'. Itulah barangkali pendekatan yang timnya pakai untuk meraih suara di NTT. Dia figur yang sudah lebih lama dikenal, dibandingkan dengan SBY.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Narasumber adalah anggota Komisi A Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan Keamanan dan Tata Pemerintahan yang berasal PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) DPRD NTT, Juli 2005.

<sup>56</sup>Wawancara tim dengan Pius Rengka, anggota DPRD Provinsi NTT, Anggota Komisi A Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan Keamanan dan Tata Pemerintahan. Berasal PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), Kamis, 21 Juli 2005.

<sup>57</sup>Wawancara tim dengan Wartawan Senior Kupang Pos, Kamis, 21 Juli 2005

Staf KPUD NTT menjelaskan pasangan Mega memperoleh kemenangan hampir di semua kota dan kabupaten di NTT. Urutan perolehan dukungan tertinggi diperoleh di Kab. Manggarai, Sumba Barat dan Ende. Di kab. Timor Tengah Selatan, perbedaan perolehan suara pasangan Mega dan Wiranto cukup tipis, selisih sekitar hanya 8000 suara saja dan di kabupaten Alor Selisih 4000 suara. Pasangan Wiranto mendapat kemenangan peringkat kedua setelah pasangan Mega di Kab. Kupang, Rote Ndao, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata (beda tipis dengan SBY), Sumba Timur dan Sumba Barat. Di Kab. Sikka, Ende, Rote Ndao, Lembata dan Flores Timur pasangan Mega relatif menang mutlak, dengan selisih perolehan suara yang jauh signifikan lebih banyak dibanding ke empat pasangan yang lain. SBY dibanding Mega, memperoleh peringkat kedua di Kota Kupang, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, dan Manggarai Barat.<sup>58</sup>

Sebagai ilustrasi, seorang ibu yang ikut Pilpres langsung tahun 2004 di kota Kupang memberikan alasannya mengapa mendukung Mega:

“...Kita dulu *pung pilih* mama (Mega.f.n), bukan bapak (SBY, Amien, Wiranto, Hamzah. f.n). Kalau *pilih* mama, seperti mama kita yang melahirkan. Mama selalu *baik*. Walaupun marah, mama tetap cinta kita. Kalau bapak... lain. Waktu mama jadi presiden, walaupun keadaan masih buruk, tapi tidak seperti sekarang ...lebih buruk lagi. Waktu mama jadi presiden, kita masih bisa dapat tempat untuk jualan, tidak *diusir-usir*. Kalau bapak sekarang kita boleh berjualan setelah jam 1 siang, kita juga harus bayar Rp. 2000,- untuk ongkos kebersihan. Waktu mama jadi presiden, *dia atur orang menganggur, biar dapat jadi supir ojek pung motor*. Kalau bapak sekarang makin sulit saja. Minyak tanah sempat hilang. Harganya naik dari Rp. 900,- sampai melambung Rp. 2000,-. Kalau kita dulu mengharap

---

<sup>58</sup>Wawancara tim dengan Yosep Hardi H. Bagian Program KPUD Propinsi NTT Kamis, 21 Juli 2005.

mama menang, *agar bisa atur kita pung nasib jadi lebih baik.* Sekarang bapak menang, kita tambah susah...!”<sup>59</sup>

Ada alasan mengapa pasangan Mega menang dalam Pilpres Langsung 2004 di NTT menurut narasumber masyarakat di kota Kupang. Berikut petikannya:<sup>60</sup>

”...Di NTT yang menang memang Ibu Mega. *Kita orang* banyak *pilih* Ibu Mega karena orang tuanya (Soekarno) sewaktu hidup dekat dengan orang NTT. Tidaknya saja karena Bung Karno pernah menginjakkan kaki di Ende atau baik dengan Frans Seda, tapi semua orang bisa senang dengan Bung Karno. Dia seorang yang nasionalis dan baik kepada rakyat kecil, sehingga mendapat kesan yang mendalam disini. PDIP kuat disini. Ketika anaknya maju menjadi calon presiden, *kita orang* di NTT umumnya banyak *pung pilih* dia....”<sup>61</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa keluarga Bung Karno punya ikatan personifikasi sejarah. Ikatan tradisional dan emosional yang erat dengan emosi pemilih NTT.<sup>62</sup> Pemilih Indonesia Bagian Timur, misalnya di NTT cenderung tidak banyak memilih pasangan Yudhoyono, Wiranto, Amien Rais apalagi Hamzah Haz, dikarenakan pemilih NTT umumnya adalah pemilih tradisional yang beraliran

---

<sup>59</sup>Wawancara tim dengan seorang ibu pedagang jeruk, berusia sekitar 50 tahun di pelataran toko dekat pantai Teddy, Terminal kota Kupang, Rabu siang, 20 Juli 2004

<sup>60</sup>Banyak orang luar NTT yang belum tahu bahwa seorang pembantu keluarga dan pengawal bung Karno, sebelum menjadi presiden, bernama Ruwa Ga, berasal dari NTT. Ruwa Ga tadinya pedagang kue saat pengasingan Bung Karno di Ende. Kemudian diajak oleh bu Inggit Gunarsih, saat Bung Karno berpindah-pindah tempat. Sampai akhirnya ke Jakarta. Ruwa Ga pernah ikut mengibarkan bendera di jalanan Jakarta setelah 17 Agustus 1945.

<sup>61</sup>Wawancara tim dengan dua orang pria berusia sekitar 60 dan 45 tahun. Warga Kota Kupang yang sedang makan rujak bersama di Jl. Terate, Kupang, dekat kompleks perkantoran Pemda NTT, Rabu siang, 20 Juli 2004.

<sup>62</sup>Lihat liputan khusus *Kompas* menjelang 17 Agustus 2005, bertema ‘Pengabar Kemerdekaan yang Terlupakan’.

nasionalis yang secara turun-temurun punya ikatan sejarah dengan Bung Karno di masa lalu. Walaupun pada putaran kedua masyarakat di beberapa tempat memberi dukungan untuk Yudhoyono, karena berharap akan ada nuansa baru. Sebagian masyarakat ada yang cepat berubah dukungannya, seperti halnya dukungan terhadap orde baru dan penolakan terhadap orde lama. Orang yang menolak orde baru akan memilih Mega, tetapi setelah Mega terpilih apa yang mereka impikan dan harapkan belum terwujud secara maksimal. Mereka memilih Yudhoyono untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan nyata masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, bagaimana pengentasan kemiskinan di NTT di bidang industri rumah tangga, ketersediaan air, peternakan, pertanian lahan kering dan pemasaran hasil alam.

### **Penutup**

Garis afiliasi politik yang berkembang dikalangan pemilih cenderung bisa menjadi alasan utama untuk menjelaskan mengumpulnya suara basis pendukung. Hal itu bisa dipakai sebagai variabel untuk dijadikan analisis soal faktor utama apa yang penentu kemenangan pasangan Capres pada Pilpres langsung 2004 di Indonesia. Garis afiliasi politik itu antara lain adalah pemetaan kandidat yang mewakili suara pemilih Indonesia Bagian Timur (IBT) dan Indonesia Bagian Barat (IBB), faksi Islam dan nasionalis, latar belakang sipil-militer, kepentingan *urban* (perkotaan) dan *rural* (pedesaan), gaya dan kepentingan politik modernis atau konservatif (tradisionalis).

Banyak indikasi yang menunjukkan kemenangan capres 2004 karena faktor ketokohan atau figur, bukan platform atau program. Selain itu, ada kecenderungan pro kontra analisa kekalahan dan kemenangan capres di kedua putaran. Bila pada putaran pertama mesin politik para pasangan calon tidak bekerja, tidak berarti mesin itu akan macet pula pada putaran kedua. Tidak bekerjanya mesin politik pada putaran pertama, karena mesin itu tidak jelas bekerja untuk siapa dan mesin diduga kurang pelumas. Pembelotan warga Golkar dan kampanye negatif terhadap kandidat Wiranto tampaknya terjadi di berbagai tempat. hasilnya pemilih bingung mereka harus

memilih Wiranto-Gus Sholah atau Yudhoyono-Kalla atau capres lain. Suara pemilih NU misalnya menjadi tidak terfokus atau terbelah. Hal itu mengakibatkan kebingungan pemilih dari kalangan *nahdliyyin* untuk membela Gus Sholah atau Hasyim Muzadi. Ketersendatan suara Megawati sedikit banyak antara lain cenderung bisa terjadi karena pemilih nasionalis pun bingung menentukan pilihan untuk mendukung Megawati atau Siswono yang sama-sama satu faksi dan menjual platform yang sama.

Akan tetapi saat putaran kedua, saat pilihan menjadi amat jelas, terjadi konsolidasi yang amat menentukan tentang siapa yang akan didukung oleh pemilih untuk menjadi presiden. Secara teoretis, suara Golkar dan keluarga besar TNI akan ke Yudhoyono-Kalla. Suara NU dan nasionalis akan ke Mega-Hasyim. Sementara itu, suara pemilih muslim modernis di perkotaan yang dikuasai PKS dan PAN, juga mengalir ke Yudhoyono-Kalla selain ke Amien-Siswono. Pada putaran kedua patut diduga kekalahan Mega-Hasyim terjadi karena ada pemilih dari kalangan NU dan PKB yang netral, abstain dan golput. Memilih untuk tidak memilih calon yang sama-sama berlatar belakang NU-PKB. Sikap Gus Dur untuk benar-benar tidak mencoblos serta kekecewaan karena pasangan Wiranto-Gus Sholah tidak lolos, bukan mustahil telah menumbuhkan sikap skeptis terhadap pemilih di kalangan NU. Akibatnya posisi Hasyim tidak berhasil mendongkrak perolehan suara Mega dibanding Yudhoyono-Kalla. Mega-Hasyim tampak masih bisa berharap aliran suara dari Agum Gumelar yang selama ini dikenal sangat dekat dengan Megawati. Ide-ide Agum yang cenderung futuristik, bicara soal perbaikan kedepenan cenderung bisa memfasilitasi bersatunya kaum modernis dan konservatif di pasangan Mega-Hasyim. Akan tetapi manuver ini sedikit banyak bisa disaingi oleh manuver PAN dan PKS untuk mendongkrak Amien, tapi waktunya sangat pendek menjelang hari pemilihan.

Ada pandangan bahwa kemenangan kandidat Yudhoyono-Kalla pada putaran kedua karena berhasil mendapat simpati terbanyak rakyat Indonesia sebagai figur teraniaya oleh Mega dan Taufik Kiemas. Popularitas Yudhoyono menggelembung ketika ia

menyerahkan 'Surat Pengunduran Diri Sebelas Maret' (Supersemar). Ketika hari pertama kampanye diberitakan keesokan harinya oleh pers, pengunduran SBY berhimpit dengan seluruh peserta pemilu lainnya. "Iklan kampanye" gratis ini disambut kalangan calon pemilih dengan menghadiri setiap kampanye Yudhoyono. Artinya, pers membantu pengelompokan massa di belakang gerbong Partai Demokrat, ketika partai-partai politik lain mencari banyak celah untuk memperkenalkan diri. Hal itu terjadi karena faktor keberhasilan tim sukses Yudhoyono-Kalla memainkan instrumen komunikasi politik akibat adanya momen khusus.

Selain itu ada faktor mendasar yaitu sistem atau aturan main pencalonan yang tidak memungkinkan konsolidasi demokrasi berjalan sesungguhnya untuk memunculkan calon independen. Hal lain bisa terjadi bila sistem memungkinkan tokoh independen seperti almarhum Nurcholis Madjid, H.S. Dillon, Meutia Hatta, dll. yang non partai bisa ikut berkompetisi berhadapan dengan Mega-Hasyim, SBY-JK, Wiranto-Solahudin, Hamzah-Agum. UU Pilpres yang ada tidak memungkinkan masuknya tokoh alternatif berdarah segar (*new blood*) non partai untuk membuat perubahan di Indonesia. Pilpres Langsung belum mampu menghasilkan 'darah baru' dan memperkuat konsolidasi demokrasi, dalam pengertian terjadi sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan reformist yang lebih berpihak kepada mayoritas pemilih dan pembayar pajak.

Kemenangan Yudhoyono-Kalla secara nasional, salah satunya sangat dipengaruhi oleh keberadaan fungsi media televisi dan cetak (media massa) sebagai sarana mencari dukungan publik dan komunikasi politik dibangun kandidat lewat jaringan pers. Hal itu tidak lepas pula dari keberadaan tim sukses, Blora Center, dan hasil jejak pendapat yang membangun opini publik yang luas. Jejak pendapat diproyeksikan ikut mempengaruhi jatuhnya pilihan pemilih mengambang untuk membuat keputusan dukungan. Meskipun begitu, Yudhoyono-Kalla juga dinilai berhasil atau tepat dalam memilih paket pasangan yang merupakan representasi perpaduan Jawa-luar Jawa/IBB-IBT dan Militer-Sipil Pengusaha.

Perolehan suara bagi pasangan Mega kalah dibanding pasangan Yudhoyono-Kalla dinilai karena memang ada kesalahan DPP PDIP yang kurang kerja keras dalam lima tahun. Ada beberapa penyebab kegagalan yaitu melemahnya figur Megawati, masalah struktur pimpinan pusat, sepak terjang Taufiq Kiemas (TK), kurangnya efektivitas organisasi, dan kontroversi pemilihan kepala daerah. Faktor intervensi politik Taufiq dinilai menjadi penyebab kekalahan yang dominan. Komentar-komentar TK memberi dampak negatif, memunculkan kesan, sekalipun Megawati sebagai presiden, TK yang berkuasa hingga banyak orang menjadi tidak suka. Memang Mega mendapat dukungan mayoritas di Bali dan NTT karena basis masa tradisional mereka dengan Bung Karno sangat kuat (daerah dengan basis tradisional), selebihnya kurang didukung.

Kritik internal PDI-P menyebutkan ada lima faktor di atas kertas harusnya membawa kemenangan bagi Megawati. Pertama, pada Pemilu 1999 Megawati mendapat dukungan riil akar rumput. Kedua, Mega didukung PDI-P yang memiliki sejarah lama dan institusionalisasinya berjalan baik. Ketiga, Megawati adalah presiden berkuasa (*incumbent president*) yang bisa membuat kebijakan menarik rakyat. Keempat, calon wakil presiden Hasyim Muzadi adalah pemimpin organisasi Islam terbesar di dunia. Kelima, Mega didukung Koalisi Kebangsaan. Kekalahan PDI-P dan Megawati disebabkan dua faktor, yaitu faktor eksternal 20 persen dan internal 80 persen. Ada temuan Sukowaluyo bahwa 62 persen responden menolak Mega karena rakyat kecewa dengan Megawati bukan karena prestasi Yudhoyono. Siapa pun yang dihadapkan dengan Megawati akan menang. Kwik Kian Gie menambahkan kekalahan Mega disebabkan mesin partai atau Koalisi Kebangsaan (PDIP, Partai Golkar, PPP dan PDS), tidak mampu menjawab aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Sebagian Ilmuwan Politik dalam negeri berpandangan bahwa kharisma Megawati Soekarnoputri dalam tiga tahun pemerintahannya ternyata tidak bisa membantu perolehan suara PDIP dan dirinya sendiri karena kharisma sekarang ini sudah dikalahkan faktor kinerjanya yang relatif menurun. Kharisma

Megawati sudah mulai sulit untuk dijual kesikiran kalinya, sebaliknya di kalangan internal pengurus PDIP masih sangat yakin akan kepemimpinan Megawati untuk dimajukan dalam pencalonan 2004.

Narasumber jurnalis mengungkapkan kekalahan pasangan Mega cenderung disebabkan karena adanya penolakan terhadap kinerja kepemimpinan Megawati dan ada keinginan untuk terjadinya pembaruan. Selain itu, ada pula analisis yang menilai bias gender adalah penyebab kekalahan Mega. Faktor gender cenderung signifikan bagi kelompok tertentu untuk menentukan bersikap 'Asal bukan Mega'. Kelompok ini secara kategoris menjawab, pokoknya mereka meyakini perempuan itu tidak baik sebagai pemimpin (presiden). Hal ini tidak berarti banyak ketika Mega mengalami momen khusus sebagai tokoh teraniaya pada masa akhir Orde Baru.

Sebagian menilai kekalahan Amien Rais pada putaran pertama terjadi karena lemahnya koalisi PAN dan PKS, serta tidak solidnya Muhammadiyah. Orang awam banyak yang menyayangkan figur Amien yang kontroversial. Sementara itu kekalahan Wiranto dianggap sudah terjadi sejak kemenangannya di konvensi Golkar. Energi Wiranto dan tim suksesnya cenderung dinilai sudah kian menipis. Sementara itu, di internal kader partai Golkar sendiri tampak setengah hati mendukung Wiranto. Gizi yang sangat pokok untuk bekerja mesin politik dari Wiranto dan tim suksesnya cenderung berjalan seret sehingga dukungan terhadap Wiranto dari Partai tampak seadanya.

Dikalangan pemilih, ada kecenderungan proses stigma sosial terhadap kandidat Wiranto. Ia dianggap oleh sebagian pemilih terlibat kasus Trisakti dan peristiwa Timor-Timur. Walaupun ada upaya Wiranto membuat pembelaannya pada beberapa tayangan eksklusif di televisi menjelang Pilpres. Hal itu bagi pemilih urban (perkotaan), faksi modernis, pemilih, belum bisa diterima. Mereka memutuskan tidak mungkin memilih Wiranto. Ada persepsi Wiranto itu lebih emosional dibandingkan dengan Yudhoyono. Kesan militeristiknya lebih kuat dibandingkan dengan Yudhoyono. Akibatnya dukungan terhadap Wiranto tidak banyak, kecuali di Bengkulu, Maluku, Maluku Utara dan beberapa daerah pascakonflik

lainnya. Apalagi Wiranto tidak cukup pas memainkan peluang lewat media massa setelah dia tidak di kabinet. Lain halnya dengan SBY dan timnya, sengaja atau tidak telah membuatnya sering tampil di TV. Begitu pula sosialisasi lewat multi media (buku, stiker, poster, spanduk, kontrak politik dengan PKS). Secara nasional hasilnya popularitas Wiranto kalah jauh lebih rendah dibanding Yudhoyono, karena ada faktor psikologis sosial pemilih Yudhoyono adalah korban teraniaya dari perilaku Presiden Mega.

Kekalahan pasangan Hamzah-Agum salah satu faktornya cenderung karena sebagian besar pemilih menilai *performance*-nya biasa-biasa saja, malah cenderung tidak membaik setelah jadi wakil presiden. Hal itu berkaitan soal pernyataan Hamzah bahwa tidak ada terorisme di Indonesia. Padahal 'panen bom' yang berulang kali terjadi di berbagai tempat. Selain itu karena kurang efektifnya mesin partai PPP dan ada sikap resistensi sebagian pemilih terhadap Hamzah Haz yang memiliki istri lebih dari satu (poligami). Hal itu cukup menyebabkannya kurang populer. Selain itu, ada sikapnya yang kurang konsisten, semula menentang perempuan jadi pemimpin, tapi akhirnya mau mejadi Wapres seorang presiden perempuan. Posisi Agum sebagai purnawirawan TNI dan tokoh olah raga nasional pun belum banyak membantu. (SR)



**Bab VI**

**PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG DAN  
KONSOLIDASI DEMOKRASI:  
Catatan Kesimpulan**

*Lili Romli*

**Pendahuluan**

UUD 1945 hasil amendemen telah membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan kita, di antaranya adalah masalah sistem pemerintahan. Seperti diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan UUD 1945 sebelum amendemen, presiden dipilih oleh MPR sebagai institusi “perwujudan” kedaulatan rakyat. Dalam sistem presiden yang dipilih oleh MPR ini tentu saja mereduksi kedaulatan rakyat. Suara rakyat dan kedaulatan yang dimiliki hanya diwakili MPR yang jumlahnya 700 orang. Padahal keinginan dan pilihan MPR itu belum tentu sejalan dengan aspirasi rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian yang terjadi kemudian adalah distorsi kedaulatan rakyat pada segelintir orang. Apalagi kemudian, seperti diketahui umum, MPRS masa Soekarno dan MPR masa Soeharto, meski sebagai lembaga tertinggi negara, kekuasaannya dikendalikan oleh rezim. Selain itu dalam sistem ini, keberlangsungan kekuasaan presiden tergantung pada MPR. MPR dapat memberhentikan presiden di tengah jalan sewaktu-waktu manakala ia dianggap melanggar haluan negara. Definisi tentang haluan negara ini dalam praktek bersifat politis. Sebut saja misalnya, kasus pemberhentian KH. Abdurahman Wahid oleh MPR menunjukkan nuansa politis dimaksud. Dengan adanya kasus ini, antara lain, muncul kritik bahwa sistem pemerintahan Indonesia belum sepenuhnya sistem presidensiil murni karena keberlangsungan pemerintahannya terletak pada MPR.

Atas dasar problem tersebut ada desakan perlu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam konteks itu lalu amandemen UUD 1945 mengamanatkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. UU yang mengatur untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2003. Dalam pembuatan regulasi tentang pemilihan presiden secara langsung tersebut terdapat sejumlah kepentingan politik jangka pendek dari kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR.

Apa saja kepentingan-kepentingan politik itu, tulisan ini akan mencoba membahas hal tersebut. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, mulai dari peranan partai, pola koalisi, hasil pilpres, dan kecenderungan pola perilaku pemilih. Selanjutnya tulisan ini akan membahas kaitan pascapilpres dengan keberlangsungan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

### **Sistem Pilpres**

Dilihat dari perspektif historis, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tidak mengalami perubahan sampai amandemen konstitusi. Sistem pemilihan presiden/wakil dilaksanakan melalui lembaga perwakilan. *Pertama*, Soekarno-Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama RI oleh PPKI pada sidang pertamanya tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya Bung Karno diberhentikan sebagai presiden oleh Sidang Istimewa MPRS pada 12 Maret 1967. *Kedua*, selama masa Orde Baru, Soeharto dipilih sebagai presiden RI oleh sidang MPR.

Adalah keinginan untuk melakukan reformasi politik, yang menuntut pembaruan dalam sistem pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan regulasi sistem pemilihan presiden menjadi sistem pemilihan langsung (*direct vote*) dalam UUD 45 pada dasarnya ditujukan untuk menjamin

pemerintahan yang stabil dan kuat. Sebab belajar dari tiga pemerintahan terdahulu, baik pada masa presiden BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati, kesemuanya tidak memiliki pemerintahan yang kuat dan stabil.

Sistem pemilihan presiden langsung mengacu pada model *two round system* atau *sistem run-off*. Model sistem pemilu pilpres seperti ini sama dengan model sistem yang diterapkan di Perancis di mana presiden terpilih adalah calon yang meraih suara mayoritas mutlak, bila itu tidak tercapai maka dilakukan pemilihan putaran kedua.<sup>1</sup> Model sistem seperti ini tampak terlihat dalam bunyi pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945. Dalam ayat (3) menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum ....., dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden". Selanjutnya ayat (4) menyebutkan, "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden". Dengan demikian sistem pemilihan dilakukan melalui dua tahap. Dengan pemilihan dua tahap ini maka presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat karena ia dipilih oleh rakyat dengan dukungan mayoritas.

Sistem pemilihan presiden secara langsung ini pada hakekatnya memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Namun kedaulatan rakyat tersebut kembali dicabut oleh MPR, hal ini karena dalam pasal 8 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, ..... Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil

---

<sup>1</sup>Lihat TA Legowo (ed.), *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*, Jakarta: Ristek 2005

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.

Dengan demikian, adanya pasal seperti itu, berarti kedaulatan rakyat kembali lagi berada di tangan MPR. Selain itu, adanya pasal seperti itu akan cenderung rawan *vested interest*. Karena boleh jadi calon presiden yang kalah terdapat keinginan “untuk menggoyang” presiden terpilih dengan harapan presiden terpilih jatuh. Dalam konteks ini maka sepatutnya pasal tersebut dihapus. Ketentuan untuk menjadi presiden di serahkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.<sup>2</sup> Jadi, apabila seorang “Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan”, harus dilaksanakan pemilihan presiden secara langsung kembali.

Hal lain yang perlu ditinjau kembali dalam regulasi ini adalah hak monopoli yang diberikan kepada partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Bunyi pasal konstitusi ini telah menutup rapat-rapat calon independent. Padahal, sebagaimana diketahui, rakyat menginginkan perlu adanya calon independent. Keperluan adanya calon independent ini semakin mendesak pasca pilpres 2004 ini karena ternyata seseorang terpilih sebagai presiden cenderung bukan karena faktor partai politik melainkan faktor figur.

### **Regulasi Pilpres dan Kepentingan Partai Politik**

Pembahasan tentang regulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terjadi perdebatan seputar batas *electoral threshold*, persyaratan pendidikan, kesehatan dan larangan bagi terdakwa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini karena masing fraksi, terutama fraksi-fraksi besar, memiliki pandangan yang berbeda tentang hal-hal dimaksud. Tentang ketentuan *electoral threshold*, misalnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) mengajukan usul

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

35%, Pemerintah 20%, sedangkan partai-partai lainnya mengusulkan 3%.<sup>3</sup> Berkaitan dengan syarat pendidikan, FPG, Fraksi Reformasi dan Fraksi Bulan Bintang mengajukan syarat minimal pendidikan Sarjana (S1), sedangkan Fraksi PDIP menentangnya dengan mengajukan syarat minimal pendidikan SLTA. Mengenai persyaratan kesehatan jasmani dan rohani didukung semua fraksi, kecuali Fraksi PKB yang menolaknya. Sementara tentang larangan terdakwa menjadi calon presiden dan wakil presiden semua fraksi menyetujuinya, hanya Fraksi Golkar yang menentang.

Tampaknya Fraksi Golkar mengusulkan syarat *electoral threshold* 35% dalam upaya untuk mengganjal calon-calon lain serta menaikkan posisi tawar Partai Golkar, sedangkan partai politik yang menolak tentu tidak lepas dari upaya untuk melancarkan kandidatnya agar tetap ikut dalam kompetisi pilpres. Berkaitan dengan syarat sehat jasmani dan rohani, semua orang pun tahu bahwa hal itu dimaksudkan untuk mengganjal KH. Abdurahman Wahid sebagai calon presiden. Sementara syarat pendidikan minimal S1 dimaksudkan untuk mengganjal Megawati, yang tingkat pendidikannya tidak sampai sarjana meski ia sempat kuliah. Oleh karena itu PDIP lalu menolak syarat pendidikan S1. Sedangkan syarat larangan terdakwa untuk mengganjal Akbar Tanjung. Seperti diketahui Akbar Tanjung, sebagai Ketua Umum Partai Golkar waktu itu berstatus terdakwa terkait dengan masalah korupsi di Bulog.<sup>4</sup>

Di sini terlihat bahwa masing-masing partai politik dalam mengusulkan batas *electoral threshold*, persyaratan pendidikan, kesehatan dan larangan bagi terdakwa menjadi calon presiden dan wakil presiden bukan berlandaskan pada ukuran standarisasi yang rasional tetapi berdasarkan pada “kepentingan politik jangka pendek” tadi. Berdasarkan pada motif ini maka hasil perdebatan tentang hal dimaksud berakhir dengan *happy ending*. Ini terjadi karena di antara partai-partai politik, terutama partai-partai besar, melakukan *lobby* secara intensif (baca: “politik dagang sapi”). Di antara mereka terjadi

---

<sup>3</sup>Lihat Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*, Yogyakarta; Pustaka Pelajat, 2004, hal.34.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal 28-29.

kompromi-kompromi politik yang menghasilkan *win-win solution*. Kompromi politik itu terlihat dengan jelas, misalnya, dalam hal batas *electoral threshold* untuk Pilpres 2004 disepakati bahwa, “.... partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara Pemilu Anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon”.<sup>5</sup>

Kompromi politik yang mengarah pada “politik dagang sapi” juga terlihat dalam syarat pendidikan, kesehatan, dan larangan terdakwa. Dalam hal pendidikan, terjadi kompromi bahwa syarat minimal adalah SLTA. Dengan syarat seperti ini maka Megawati dapat melenggang menjadi calon presiden. Sebagai kompensasi atas dukungan syarat pendidikan SLTA, maka persyaratan larangan terdakwa bagi calon presiden menjadi dihapus. Lalu sebagai gantinya dicantumkan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.<sup>6</sup>

Dalam hal persyaratan sehat jasmani dan rohani, akhirnya semua fraksi mencabut persyaratan itu dan dikembalikan ketentuannya sesuai dengan Pasal 6 UUD 1945. Dengan adanya

---

<sup>5</sup>Lihat Pasal 101, Bab Ketentuan Peralihan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

<sup>6</sup>Lihat Pasal 6 ayat t UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Yang masih menjadi problem bagi Akbar Tandjung dan juga Golkar adalah harus membuktikan tuduhan bahwa ia telah melakukan korupsi dana Bulog itu tidak benar. Upaya itu ia lakukan melalui pengajuan Kasasi di MA. Hasil keputusan MA membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi, dan menyatakan bahwa Akbar Tandjung tidak bersalah. Namun dalam keputusan itu, ada satu hakim agung, yakni Abdurahman Saleh, yang kini menjadi Jaksa Agung dalam Kabinet SBY, melakukan *dissenting opinion*. Dengan bebasnya Akbar Tandjung dari jeratan hukum tersebut semakin memuluskannya dalam bursa pencalonan presiden di tubuh Golkar. Namun perjuangan Akbar terhenti tatkala konvensi Golkar mayoritas memilih Wiranto.

kompromi itu maka calon presiden dari F PKB, yakni Gus Dur, tidak lagi terganjal dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani. Ini sebagai “hadiah” buat FKPB yang telah mencabut usulannya tentang syarat larangan terdakwa dan syarat pendidikan SLTA bagi calon presiden dan wakil presiden. Namun dalam perkembangan kemudian, meski di dalam konstitusi tidak ada hambatan, Gus Dur sebagai calon presiden dari F PKB terganjal dengan syarat Pasal 6 ayat d UU No. 23 Tahun 2003, yang menyatakan “mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Dalam syarat ini, KPU sebagai penyelenggara Pilpres berdasarkan rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang memeriksa kesehatan semua calon presiden, menyatakan Gus Dur tidak lolos dan tidak memenuhi persyaratan pasal 6 ayat d dimaksud. Penolakan itu dituangkan dalam SK KPU No. 31 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>7</sup>

Bila kita mencermati hasil dari perdebatan dengan *win-win solution* di atas, tampak, sekali lagi, yang muncul adalah kepentingan sesaat dari masing-masing kekuatan politik. Mereka menyusun regulasi bukan untuk kepentingan jangka panjang dalam upaya untuk melembagakan pilpres langsung, tetapi bagaimana kepentingan-kepentingan jangka pendek mereka terakomodasi dalam regulasi. Tentu saja hal ini mengakibatkan di satu sisi regulasi tentang persyaratan calon presiden dan wapres itu bukan saja mendistorsi isi konstitusi yang berkaitan dengan syarat-syarat di atas karena konstitusi tidak menyebutkan dan membatasi tentang syarat-syarat di maksud, di sisi lain regulasi yang dibuat tersebut memunculkan dugaan bahwa mereka dalam membuat regulasi bukan hendak mendorong memperbaiki kepemimpinan nasional.

Kesan itu semakin tampak, bukan hanya dalam hal tentang persyaratan tentang calon presiden dan wakil prersiden tetapi juga berkaitan dengan hal-hal lain. Sebut saja misalnya berkaitan dengan

---

<sup>7</sup>Adanya pembatalan oleh KPU tersebut lalu Gus Dur melakukan upaya pembelaan dengan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, namun upaya itu ditolak oleh kedua institusi tersebut.

pengaturan dana kampanye yang bersifat longgar dan tidak transparan, pengaturan kampanye yang cenderung ke mobilisasi massa dan kampanye monolog serta tidak adanya keharusan debat kandidat presiden, serta tiadanya regulasi tentang keberadaan Tim Sukses.

### **Pola Koalisi Partai Politik dalam Pilpres**

Dalam UU No. 23 Tahun 2003 disebutkan bahwa rekrutmen calon presiden dilakukan oleh partai politik. Dengan demikian, partai politik memiliki peran sentral dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan itu lalu diterjemahkan melalui UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden. Dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, "Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum". Lalu Pasal 101 mengatakan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sebanyak 3% atau yang memperoleh 5% suara sah secara nasional dalam Pemilu legislatif.

Hasil Pemilu legislatif 2004 menunjukkan dari 24 partai politik yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya ada tujuh partai politik, yaitu Golkar, PDIP, PKB, PPP, PD, PKS, dan PAN. Dari tujuh partai ini, yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya lima partai politik, yaitu Golkar, PDIP, PPP, PD, dan PAN, sedangkan PKB dan PKS tidak mencalonkan. PKB, semula mengajukan kandidat tetapi ditolak oleh KPU dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani, sedangkan PKS berdasarkan keputusan Majelis Syuro-nya memutuskan tidak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dari lima partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam menjangkau kandidat yang dilakukan secara terbuka dan relatif demokrasi adalah Golkar, yakni

melalui mekanisme konvensi. Dalam konvensi Golkar tersebut ada lima kandidat yang ikut berkompetisi, yaitu: Akbar Tanjung (Ketua Umum Golkar), Jendral (Purn) Wiranto (Mantan Pangab dan Menko Polkam), Aburizal Bakri (Pengusaha), Surya Paloh (Pengusaha dan Tokoh Pers), dan Letjen (Purn) Prabowo Subiyanto (Mantan Komandan Kopasus dan Pangkostrad). Dalam konvensi itu yang terpilih adalah Jendral (Purn) Wiranto.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Golkar, maka empat partai lainnya dalam menjaring kandidat melalui mekanisme Muktamar, Kongres atau Rakernas partainya. Megawati sebagai calon tunggal PDIP terpilih melalui Rakernas PDIP di Solo 10 Maret 2003, Amien Rais calon tunggal dari PAN hasil Rakernas PAN di Batam akhir 2002, Letjen (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono calon tunggal Partai Demokrat hasil Rapat Paripurna Pimpinan PD di Surabaya 7 Mei 2004, dan Hamzah Haz merupakan calon tunggal PPP hasil Muktamar PPP di Jakarta 20-24 Mei 2003.<sup>9</sup>

Pengaturan tentang koalisi dalam UU Pilpres sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit. Artinya, bagaimana mekanisme koalisi itu dibentuk dan apa saja aturan main yang mesti dilakukan dalam koalisi itu, tidak diatur dalam UU Pilpres. Dalam UU Pilpres hanya menyebutkan tentang peran partai politik atau gabungan partai politik dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Penyebutan gabungan partai politik inilah yang kemudian

---

<sup>8</sup>Latar belakang Partai Golkar melakukan konvensi, antara lain, karena adanya kasus Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar, yang akan diproyeksikan sebagai calon presiden Golkar tersangkut dugaan korupsi dana Bulog. Sehubungan dengan itu Golkar lalu melakukan terobosan dalam upaya memecahkan kebuntuan itu melalui mekanisme konvensi. Mekanisme konvensi ini disambut hangat oleh berbagai kalangan sebagai suatu kemajuan sampai-sampai Nurcholis Madjid, cendekiawan Islam ternama pun mencoba akan mengikuti konvensi Golkar. Tetapi di tengah jalan ia mengundurkan diri, tidak jadi ikut sebagai peserta konvensi karena perlu ada "gizi" (uang) yang banyak.

<sup>9</sup>Dikutip dari M Djadjijono, "Pemanasan Menjelang Pemilu 2004", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003 No2. hal 135-136.

diterjemahkan dalam bentuk koalisi antar partai dalam mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Bentuk koalisi itu terlihat dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan masing-masing partai merupakan hasil koalisi. Ini terlihat dari lima partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya PPP yang tidak melakukan koalisi, sedangkan empat partai lainnya berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Kecenderungan yang terjadi ternyata mereka dalam berkoalisi bukan berdasarkan kesamaan platform dan program, tetapi cenderung bersifat jangka pendek dalam kerangka *power sharing*. Bila yang terjadi demikian, lalu bagaimana kita membedakan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya manakala koalisi terbentuk atas dasar *power sharing*? Apa bedanya antara partai yang satu dengan partai yang lain. Praktek semacam ini terjadi, salah satu sebabnya karena pengaturan koalisi tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi pilpres.

Tetapi sudahlah. Kembali ke persoalan pola koalisi dalam pilpres 2004, maka memperhatikan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta dukungan partai politik terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, tampak terjadi kecenderungan pola koalisi antara Islam dan Nasionalis. Pada pilpres putaran kedua, pola koalisi cenderung cair dan pragmatis. Ini terlihat dari kelompok pendukung masing-masing kandidat dalam membangun koalisi. Kubu Megawati, misalnya, dalam membangun dukungan membentuk *koalisi kebangsaan*.<sup>10</sup> Koalisi ini didukung antara lain oleh partai-partai politik yang pada pilpres putaran pertama mengusung Wiranto dan Hamzah. Sementara itu kubu Yudhoyono

---

<sup>10</sup>Pembentukan koalisi kebangsaan mendapat kritik tidak hanya dalam bentuk pendapat tetapi juga unjuk rasa dari kalangan mahasiswa karena dinilai mengkhianati rakyat sebab dibalik koalisi itu ada upaya kepentingan elit untuk meraih kekuasaan. Protes juga datang dari pengurus partai-partai di daerah yang merasa tidak dilibatkan dalam koalisi tersebut. Ini semakin meneguhkan bahwa koalisi itu hanya rekayasa elit politik di tingkat pusat. Lihat, Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004, hal. 105.

membentuk *koalisi kerakyatan*. PKS, yang pada putaran pertama merupakan pendukung Amien-Siswono, kini pada putaran kedua pilpres masuk dalam barisan koalisi kebangsaan sebagai pendukung Yudhoyono-Kalla. Masuknya PKS dalam koalisi ini karena Yudhoyono-Kalla setuju atas lima syarat, yaitu: (1) konsisten melakukan perubahan; (2) mempertahankan kedaulatan RI di dunia internasional; (3) konsisten melanjutkan demokratisasi dan reformasi; (4) meningkatkan kualitas moral bangsa, menegakan hukum dan HAM; dan (5) mendukung perjuangan bangsa Palestina dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.<sup>11</sup> Sehubungan dengan itu, Dhurorudin mengatakan bahwa pola koalisi yang terjadi telah meruntuhkan sekat ideologis antara Islam dan ideologi sekuler.<sup>12</sup> Hal ini karena dalam kubu koalisi kebangsaan, selain terdiri atas partai-partai sekuler terdapat pula partai Islam, seperti PPP dan PBR. Begitu juga dalam kubu kerakyatan terdapat partai-partai Islam yaitu, PBB dan PKS.

### Hasil Pilpres

Hasil suara Pemilu legislatif yang diperoleh partai-partai politik ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil suara yang diperoleh pada pilpres. Hasil pilpres pertama menunjukkan bahwa kandidat yang diusung oleh partai-partai besar tidak memperoleh dukungan yang besar, sebaliknya kandidat yang didukung oleh partai kecil keluar sebagai pemenang. Sebagaimana diketahui, pasangan Yudhoyono-Kalla ke luar sebagai pemenang dengan memperoleh suara 69.266.350 (60,62%), sedangkan pasangan Megawati-Hasyim mendapat 44.990.704 suara (39,38%).

Tidak adanya hubungan antara hasil pemilu legislatif dan hasil pilpres tersebut dapat dilihat dari perolehan suara masing-masing kandidat. Hasil suara yang diperoleh pasangan Wiranto-Wahid

---

<sup>11</sup>Dikutip dari Dhurorudin Mashad, "Pemilu Presiden: Runtuhnya Sekat Ideologi Islam-Sekuler", dalam *Quo Vadis Politik Indonesia ?*, Year Book 2004 P2P LIPI, hal. 41.

<sup>12</sup>*Ibid.*

adalah 26.286.788 suara (22,15%).<sup>13</sup> Padahal jumlah kumulatif perolehan suara Golkar dan partai pendukungnya (PKB, PKPB, PPNUI, dan Patriot Pancasila) dalam Pemilu legislatif sebesar 40.838.360 suara. Pasangan ini hanya unggul di enam provinsi, yaitu Bengkulu, Jawa Barat, NTB, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Hasil suara yang diperoleh pasangan Amien-Siswono hampir sama nasibnya dengan pasangan Wiranto-Wahid. Seharusnya pasangan ini minimal mendapat dukungan 22.78.846 suara, sesuai dengan jumlah kumulatif partai-partai yang mengusungnya. Tetapi kenyataan suara yang diperoleh hanya 7.392.93 suara (14,66%). Pasangan ini hanya menang di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumbar. Begitu juga dengan hasil suara yang diperoleh pasangan Hamzah-Agum. Pada Pemilu legislatif, PPP memperoleh 9.248.764 suara, tetapi pada pilpres putaran pertama pasangan ini hanya meraih 3.569.861 suara (3,01%). Bahkan tidak ada satu daerah pun yang dimenangkan oleh pasangan ini.

Hasil suara yang diperoleh pasangan Megawati-Hasyim sebanyak 31.569.104 suara (26,605%). Meskipun ada penambahan

---

<sup>13</sup>Pasangan ini merasa keberatan dengan perolehan suara tersebut sehingga kemudian mereka mengajukan sengketa ke MK. Dalam permohonannya ke MK, mereka mengklaim telah kehilangan 5.434.660 suara di 26 provinsi. Dari 26 provinsi yang diajukan, disebutkan dalam permohonan bahwa Provinsi Jawa Barat menunjukkan kehilangan suara terbesar dari pasangan ini, yaitu sebanyak 1.038.855 suara. Selanjutnya di Sumatra Selatan sebanyak 963.661 suara, Jawa Timur 768.339, dan Jawa Tengah sebanyak 752.552 suara. Pasangan Wiranto menyatakan jika permohonan mereka dikabulkan MK, pasangan Wiranto-Wahid akan mengungguli perolehan suara pasangan Megawati-Hasyim sebanyak 122.344 suara, karena dalam ketetapan KPU pasangan Mega-Hasyim memperoleh sebanyak 31.462.931 suara. Tetapi dalam sidangnya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan Wiranto-Wahid dalam sengketa atas hasil penghitungan suara dalam pemilu presiden (pilpres) putaran pertama karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti materiil.

18.176.593 suara dari jumlah suara PDIP dan PDS pada pemilu legislatif sebesar 23.392.511 suara, tetapi pasangan ini kalah suaranya dengan pasangan yang diajukan oleh PD. Pasangan ini bahkan hanya menang di enam provinsi, yaitu: Sumut, Bangka Belitung, Jateng, Bali, NTT, dan Kalbar. Bahkan pada putaran kedua ini pasangan Megawati-Hasyim hanya menang di tiga provinsi (Jateng, Bali, dan NTT).

Hasil suara yang diperoleh pasangan Yudhoyono-Kalla, seperti sudah diduga oleh para pengamat, unggul dari calon-calon lainnya meski mereka diusung oleh partai kecil. Terbukti pasangan ini mendapat 39.838.184 suara (33,574%) dan menang di 18 provinsi, yaitu Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jatim, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Irian Jaya Barat, dan Papua. Pada putaran kedua pasangan ini menang di 29 provinsi.

Keluarnya pasangan ini sebagai pemenang tidak lepas dari figur Yudhoyono itu sendiri yang populer dimata rakyat sebagai orang kharismatis dan memiliki kepribadian yang mempesona.<sup>14</sup> Faktor figur ini tidak lepas dari kecenderungan pola perilaku pemilih yang cenderung memilih berdasarkan pertimbangan personalitas daripada program. Selain itu, faktor Yusuf Kalla sebagai representasi tokoh luar Jawa dianggap ikut memberikan andil dalam mendulang suara, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur, meski ada yang berpendapat bahwa dengan siapa pun Yudhoyono berpasangan ia akan tetap mendapat dukungan yang besar. Di samping itu, janji kampanye yang menawarkan perubahan dan pemberantasan KKN ikut juga berperan dalam meraih dukungan massa.

### **Pola dan Kecenderungan Perilaku Pemilih**

Secara umum terjadi perubahan pola dan kecenderungan perilaku pemilih dari pemilu legislatif ke pemilu presiden. Pergeseran

---

<sup>14</sup>Ditambah lagi Yudhoyono dianggap sebagai orang yang teraniaya karena ia tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan politik padahal ia sebagai Menkopolkam dan pernyataan Taufik Kiemas, suami Megawati, yang menyatakan Yudhoyono sebagai anak kecil.

perilaku pemilih itu tampak jelas dari kekalahan para kandidat yang dicalonkan partai-partai besar. Kekalahan kandidat Golkar (Wiranto-Wahid) dan PDIP (Mega-Hasyim), yang merupakan partai peraih kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR, ternyata dapat dikalahkan oleh kandidat PD (Yudhoyono-Kalla) yang perolehan suaranya relatif kecil. Begitu juga dengan upaya para elit partai untuk memobilisasi dukungan melalui koalisi kebangsaan pun mengalami kegagalan. Para pemilih partai-partai pada pemilu legislatif ternyata tidak merasa terikat untuk memilih kandidat yang diusung oleh partai yang sama dalam pemilu presiden.

Faktor penyebab pergeseran pilihan bervariasi dan saling tumpang tindih satu sama lain. Di antara variabel-variabel yang mempengaruhi adalah faktor popularitas figur dan ketokohan, pencitraan dan pembentukan opini publik oleh media massa, kinerja partai dan kecerdasan politik dan kearifan masyarakat. Kinerja dan popularitas elit partai-partai besar dianggap buruk oleh publik, dan popularitas figur kandidat PD yang dicitrakan positif oleh media massa, tampaknya menjadi salah satu faktor penting terjadinya pergeseran perilaku pemilih. Bila pada pemilu legislatif pola dan kecenderungan perilaku pemilih lebih kepada identifikasi partai, maka pada pemilu presiden cenderung kepada identifikasi figur.

Selain itu juga, bila pemilu legislatif cenderung masih bersifat "aliran", maka perilaku pemilih pada pemilu presiden sangat cair. Preferensi pemilih dalam memilih lebih didasarkan pada performance pribadi, ketokohan, dan citra publik para kandidat ketimbang faktor latar belakang kultural-ideologis. Itu terlihat dari kurangnya dukungan terhadap pasangan kandidat Wiranto-Wahid dan Mega-Hasyim serta Amien Rais. Dalam konteks ini, Saiful Muzani, peneliti LSI (Lembaga Survey Indonesia), mengatakan,

"Perilaku pemilih pada Pemilu 1999 dan 2004 jelas tidak dipengaruhi oleh politik aliran dan kelas sosial, tapi faktor psikologis, terutama identifikasi diri dengan partai politik dan kalkulasi rasional pemilih atas partai dan calon presiden. Faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan atas calon presiden adalah persepsi tentang kualitas kepribadian calon sebagaimana tersosialisasi oleh media massa dan tertangkap oleh masyarakat

pemilih kita. Dalam soal ini, SBY jauh lebih unggul dibandingkan dengan Megawati. SBY dipersepsikan lebih memberikan harapan untuk pemberantasan KKN dan penegakan keamanan. Citra personalitas tampaknya paling menentukan”.<sup>15</sup>

Hasil putaran kedua pilpres semakin membuktikan bahwa faktor popularitas begitu menonjol. Popularitas figur yang dicitrakan positif oleh media massa, ternyata jauh lebih menentukan ketimbang mesin politik (partai). Dengan demikian juga membuktikan bahwa ternyata partai sebenarnya belum memiliki basis massa yang jelas. Kemenangan Yudhoyono-Kalla memperlihatkan bahwa sebenarnya rakyat memiliki rasionalitas politik sendiri yang berbeda dan belum tentu sama dengan rasionalitas politik para elit partai-partai.

### **Masalah Konsolidasi Demokrasi**

Untuk mengukur konsolidasi demokrasi bukan hanya pemilu saja. Seperti dikemukakan oleh Juan Linz dan Alfred Stepan bahwa untuk mengukur suatu negara itu demokrasi atau demokrasi yang terkonsolidasi tidak cukup dengan memusatkan perhatian pada pemilu. Mereka mengatakan, “sayangnya, terlalu banyak pembahasan mengenai “gelombang” demokratisasi yang hanya memusatkan perhatian pada pemilihan umum atau pada apa yang dianggap sebagai potensi demokratisasi dan mekanisme pasar. Padahal konsolidasi demokrasi menuntut jauh lebih banyak dari sekedar pemilihan umum dan pasar”.<sup>16</sup> Bila bukan hanya ukuran pemilu, lalu apa ukuran lainnya. Dalam konteks itu mereka kemudian mengatakan bahwa “demokrasi yang terkonsolidasi adalah di mana demokrasi berlaku sebagai aturan main, baik dalam segi perilaku, sikap, maupun dalam segi peraturan (konstitusi).

Ada tiga agenda besar dalam konsolidasi demokrasi, yaitu (1) kinerja politik dan ekonomi rejim pemerintah demokratis; (2)

---

<sup>15</sup>Dikutip dari TA Legowo., Op.cit., hal. 143-144.

<sup>16</sup>Juan Linz dan Alfred Stepan, ‘Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi’, dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (ed.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, Yogyakarta: Mizan, 2001, hal 41.

institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum); dan (3) restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya *civil society* yang otonom di pihak lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada kriteria-kriteria konsolidasi demokrasi yang dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang membuat skeptis bagi keberlangsungan konsolidasi demokrasi di Indonesia: *Pertama*, secara umum proses transisi politik dari otoritarian menuju demokratisasi yang salah satunya dicerminkan dalam pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung telah terperangkap menjadi sistem yang oligarkis baik di lingkungan partai politik maupun di lembaga-lembaga politik. Politik oligarkis ini telah menghasilkan aturan UU Pemilihan Presiden yang didasarkan atas kompromi-kompromi politik yang sangat oportunistik. Sebagai contoh adalah perdebatan Pasal 6 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden. Masing-masing partai merelakan dihapusnya prinsip yang diperjuangkan, demi memperoleh keringanan bagi calon presidennya masing-masing. Mereka cenderung terjebak pada kepentingan politik jangka pendek dari elit-elit partai di parlemen.<sup>18</sup> Selain itu juga, UU Pemilihan Presiden hanya menetapkan kewenangan partai politik untuk mengusulkan calon dan mengabaikan keberadaan calon independen, sehingga, lagi-lagi, peranan partai politik begitu dominan.

*Kedua*, dalam pembentukan koalisi yang tidak semata-mata didasari eksklusivitas ideologi dalam proses pemilihan presiden, disatu sisi merupakan kabar yang menggembirakan bagi proses

---

<sup>17</sup>Dikutip dari Syamsuddin Haris, "Pemerintahan Hasil Pemilu 2004: Legitimasi Kuat, Kinerja Lemah", *Refleksi Akhir Tahun 2004 Kedepitan Bidang IPSK LIPI*, Jakarta 9 Desember 2004.

<sup>18</sup>Begitu juga dengan UU Pemilu Legislatif dan UU Partai Politik, nuansa kepentingan elit tampak kental sekali. Dalam UU Pemilu legislatif, misalnya, sistem pemilu yang diberlakukan adalah sistem proposional "setengah hati", sementara dalam UU Partai Politik menghidupkan kembali kebijakan "recalling

demokratisasi. Namun di sisi lain, cairnya koalisi politik ini bisa mengkhawatirkan sebab orientasi kekuasaan dan pembagian “harta negara” oleh partai politik menjadi terbuka sedemikian lebar. Karena pertimbangan pragmatisme politik ini pula, maka intensitas koalisi berjalan serba instan dan cepat, tanpa memperhatikan aspirasi dan suara rakyat.

*Ketiga*, perilaku elit yang tidak atau belum berubah di mana mereka masih berorientasi pada kepentingan kelompok atau golongannya. Baik perilaku maupun mentalnya masih tetap sama seperti pada masa Orde Baru. Kalau pun ada yang berubah, hal itu hanya orangnya atau yang berubah adalah kendaraan politiknya (partai). Politisi kita masih banyak didominasi pemain lama, baik dengan kendaraan lamanya maupun loncat dengan kendaraan (partai politik) baru.

*Keempat*, susunan kabinet yang diumumkan Yudhoyono ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan yang akan di isi oleh kalangan profesional. Komposisi kabinet ternyata banyak berasal dari partai politik, yaitu Partai Golkar (2 orang), PAN (2 orang, PKB (2 Orang), PPP (3 orang), PBB (2 orang), PKS (3 orang), dan PD (2 orang). Selain itu orang-orang sekitar Yudhoyono yang terlibat dalam Tim Sukses dan orang-orang Yusuf Kalla ikut masuk dalam kabinet. Ditengarai peran Yusuf Kalla dan partai politik dalam penyusunan kabinet relatif dominan.<sup>19</sup>

*Kelima*, dalam hal kinerja pemerintahan belum ada tanda-tanda pencapaian yang signifikan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Padahal, dalam bidang ekonomi, kinerja pemerintah demokratis dituntut agar dapat menjamin berlangsungnya kompetisi ekonomi secara fair, menghindari perangkap krisis, menjaga tingkat pertumbuhan, mengendalikan inflasi dan distribusi sumber-sumber

---

<sup>19</sup>Oleh karena susunan cabinet seperti itu, ketika ekonomi Indonesia terpuruk lagi yang diindikasikan dengan naiknya nilai dolar AS terhadap rupiah, banyak kalangan menuntut perlunya reshuffle kabinet. Lihat misalnya tulisan, Indra J Pilliang, “Publik dalam “Reshuffle” Kabinet” dan Syamsuddin Haris, “Reshuffle” Kabinet Sekarang”, *Kompas*, 22 Septemner 2005.

secara adil. Dalam bidang politik, kinerja rejim demokratis tidak hanya dituntut untuk secara konsisten mendukung reformasi ekonomi, melainkan juga diharapkan dapat memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi politik.<sup>20</sup>

*Keenam*, dalam hal penegakan hukum juga belum menunjukkan tanda-tanda yang berarti. Sebut saja misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, di mana belum ada agenda aksi pemberantasan korupsi yang terarah, terfokus, dan terukur. Memang sudah ada UU tentang Pemberantasan Korupsi, pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Timtas Tipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Namun semua itu belum “memuaskan” dan “mengobati” hati rakyat karena mereka yang ditindak masuk dalam kategori “kelas teri” sementara mereka yang “kelas kakap” masih bebas berkeliaran.<sup>21</sup>

*Ketujuh*, reformasi birokrasi juga belum dilakukan secara sungguh-sungguh, padahal ini penting sekali bagi jalannya konsolidasi demokrasi. Birokrasi belum sepenuhnya profesionalisme, masih berlangsung tipe birokrasi patrimonialisme. Selain itu juga terjadi apa yang dinamakan politisasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Lihat Syamsudin Haris, “Pemerintahan Hasil Pemilu 2004: Legitimasi Kuat, Kinerja Lemah”, *Refleksi Akhir Tahun 2004 Kedepitan Bidang IPSK LIPI*, Jakarta 9 Desember 2004. AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) dalam evaluasi pemerintahan SBY selama satu tahun mengatakan bahwa “pemerintah gagal membawa perubahan, baik dalam bidang ekonomi, perpolitikan, maupun manajemen pemerintahan. Ekonomi rakyat makin terpuruk dengan kenaikan harga BBM, dalam bidang politik pemerintah tidak mampu menyelesaikan dualisme kepemimpinan Gubernur di Lampung”. Bahkan dalam pemerintahan sendiri ada “matahari kembar” yang saling bersaing satu sama lain. Publik melihat bahwa antara Presiden dan Wapres terjadi persaingan di antara keduanya. Lihat *Kompas*, “Belum Ada Perubahan Berarti”, 11 Oktober 2005, hal. 3.

<sup>21</sup>Lihat antara lain, Frans H Winarta, “Pemberantasan Korupsi Setengah Hati”, *Kompas* 3 Oktober 2005.

<sup>22</sup>Mahfud MD mengatakan, “Orang-orang, prosedur dan mekanisme di birokrasi pemerintahan kita masih yang dulu. Yang diganti hanya

## Penutup dan Rekomendasi

Pilpres 2004 yang lalu tercatat sebagai bentuk keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan tahapan perkembangan demokratisasi di Indonesia. Meski sebelumnya ada kekhawatiran kemungkinan akan terjadi konflik horizontal karena baru pertama ini bangsa Indonesia memilih pemimpinnya secara langsung, namun hal itu tidak terjadi. Pelaksanaan pilpres berjalan damai dan aman. Ini membuktikan bahwa rakyat cukup arif dan dewasa. Mereka tidak termakan oleh provokasi dari oknum-oknum yang hendak mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

Meski kita telah berhasil melaksanakan pilpres secara aman, damai, dan demokratis, bukan berarti bahwa pilpres yang lalu itu tidak ada kekurangan atau kelemahannya. Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, baik dalam hal regulasi maupun pelaksanaannya, terdapat sejumlah kelemahan-kelemahan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pilpres ke depan perlu ada perbaikan-perbaikan, yaitu:

1. Dalam pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden perlu dibuka peluang calon independent yang bukan berasal dari dan melalui partai politik;
2. Dalam mencari kandidat presiden dan wakil presiden perlu ditradisikan bagi partai politik untuk mengadakan konvensi sehingga mereka yang terpilih sebagai kandidat benar-benar memiliki kapabilitas;
3. Koalisi yang terbentuk dalam pilpres kemarin cenderung bersifat pragmatis untuk kepentingan jangka pendek, maka dalam membangun koalisi yang permanen (*coalition contract*) perlu adanya regulasi tentang hal tersebut; dan

---

pemimpin puncak sehingga KKN yang sudah begitu makanistis terus berlangsung tanpa hambatan malah memblokade upaya perbaikan yang datang dari luar". Lihat, Mahfud MD, "Sudah Habis Teori di Gudang", *Kompas*, 11 Oktober 2005.

4. Dalam pilpres yang lalu masing-masing kandidat membentuk Tim Sukses, namun kerja mereka tidak diketahui masyarakat dan tidak transparan, agar mereka transparan dan akuntabel, keberadaan Tim Sukses mesti diatur dalam regulasi pilpres.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris, dkk. *Emerging Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2005.
- Arinanto, Satya. "Pemilihan Presiden secara Langsung: Beberapa Catatan". [Cetro.or.id](http://Cetro.or.id).
- Aspinall, Edward. "Politics: Indonesia's Year of Elections and the End of the Political Transition", dalam Budy P. Resosudarmo, ed., *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources*, Singapore: ISEAS, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly (a). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- (b). "Demokratisasi Pemilihan Presiden dan Peran MPR di Masa Depan" dalam *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol. 1 No. 1 Mei-Agustus 2000.
- Azhary, H. "Teori Bernegara Bangsa Indonesia (Suatu Pemahaman tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas dalam Hukum Tata Negara)", pidato pengukuhan guru besar disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1995, dalam Hendra Nurtjahjo (ed.), *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 1, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004.
- Bahar, Syafruddin et. all. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PBUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei*

1945-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

Daniel J. Seidmann dan Eyal Winter, A theory of Gradual Coalition Formation, dalam *Review of Economic Studies* 1998.

David Brockington, The Paradox of Proportional Representation pada *Political Studies* 2004, vol 52.

David Held, *Models of Democracy*, California: Stanford University Press, 1987.

Diamond, Larry, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta, IRE Press, 2003.

Djadijono, M. "Pemanasan Menjelang Pemilu 2004", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003 No. 2.

Fabrizio Cargmignani, Cabinet Formation in Coalition System, dalam *Scottish Journal of Political Economy*, Vol.48 No.3 Agustus 2001.

Feith, Herbert (a). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. first publised. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962.

----- (b). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

Garin Nugroho. 2004. *Opera Sabun SBY : Televisi & Komunikasi Politik*. Pn. Nastiti, Cetakan I : Nopember.

Gerald Pomper, Voter's Choice, *Varieties of American Electoral Behavior*, New York: Dod and Company, 1978.

Gunther, Richard. "Opening a Dialogue on Institutional Choice in Indonesia: Presidential, Parliamentary and Semipresidential Systems," dalam R. William Liddle (ed.), *Crafting Indonesian Democracy*. Bandung: Mizan, bekerjasama dengan PPW-LIPI dan The Ford Foundation, 2001.

- Haris, Syamsuddin, “Reshuffle” Kabinet Sekarang”, *Kompas*, 22 September 2005
- Haris, Syamsuddin, *Presiden Pilihan Rakyat, So What?*, Seminar Refleksi Akhir Tahun 2004 Kedepujian Bidang IPSK LIPI, 2005.
- , “Pemerintahan Hasil Pemilu 2004: Legitimasi Kuat, Kinerja Lemah”, *Refleksi Akhir Tahun 2004 Kedepujian Bidang IPSK LIPI*, Jakarta 9 Desember 2004.
- , *Presiden Pilihan Rakyat, So What?*, Seminar Refleksi Akhir Tahun 2004 Kedepujian Bidang IPSK LIPI, 2005.
- Hariyanto Y. Thohari, *Pasca Konversi kini Konvensi: Esei-esei Politik tentang Golkar*, Karanganyar: The Hajriyanto Center, 2004.
- Heryanto, Ariel. “Seakan-akan Pemilu” dalam Kasim, Ifdhal, ed. *Mendemokratisasikan Pemilu*. Jakarta: ELSAM, 1996.
- Ir. H. Suroto, MM, dan Drs. Doddy Runto, MM, *Partai-Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Mandala Pratama, 2003.
- Ismanto, Ign., et.al., *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*, Jakarta: Ristek 2005.
- Koirudin. *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Masa Depan Demokrasi Pasca Pilpres 2004*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan Umum 2004. Makassar: Juli 2005.
- Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Kusumah, Mulyana W, dkk. *Menata Politik Pasca Reformasi*. Jakarta, Komite Independen Pemantau Pemilu, 2000.

- Legowo, T.A (ed). *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis dan Kritik*, (Jakarta: Kedeputan Bidang Dinamika Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi, 2004).
- Linz, Juan dan Afred Stepan, ‘Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi’, dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (ed.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, Yogyakarta: Mizan, 2001.
- , *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1996.
- Lipset, Seymour Martin. *Political Man: The Social Base of Politics*. Bombay, Vakils Ltd., 1960.
- Makmur Makka (ed) , *Demokratisasi Tak Boleh Henti*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Marijan, Kacung. “Sistem Pemilihan Presiden Secara Preferensial: Upaya Mengatasi Krisis Kepemimpinan Nasional” dalam Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim (ed.), *Amandemen Konstitusi & Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*. Cet 1. Jakarta: AIPI bekerjasama dengan Partnership for Government in Indonesia, 2002.
- Mark N. franklin, “Voting Behavior”, dalam Seymour Martin Lipset, *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc, 1995.
- Mashad Dhurorudin, “Pemilu Presiden: Runtuhnya Sekat Ideologi Islam-Sekuler”, dalam *Quo Vadis Politik Indonesia*, Year Book 2004 Jakarta: LIPI Press 2004
- MD, Mahfud , “Sudah Habis Teori di Gudang”, *Kompas*, 11 Oktober 2005.
- Notosusanto, Smita. *Usulan Pemilihan Presiden Langsung*. Pustaka Cetro, 2003. [www.cetro.or.id](http://www.cetro.or.id).

- Nurhasim, Moh., ed., *Kualitas Keterwakilan Legislatif: Kasus Sumbang, Jateng, Jatim dan Sulsel*, Jakarta: P2P LIPI, 2001.
- Nusantara, Abdul Hakim G.. "Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Amandemen III UUD 1945," dalam Bambang Widjayanto et. all., (ed.).
- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. *Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama dan Kedua*, Buku 4. Makassar: 2005.
- Per Arnt Pettersen and Lawrence E. Rose, "Participation in Local Politic in Norway: Some Do, Some Don't, Some Will, Some Won't", dalam *Political Behavior*, Volume 18, No. 1, 1996.
- Pilliang, Indra J, "Publik dalam "Reshuffle" Kabinet", ", *Kompas*, 22 Septemner 2005.
- Priyatno dan Anton Muljono (ed.). *Pemilu 2004: Kesaksian Politik Rakyat atas Jalannya Reformasi*. Cet. 1. Surabaya: Forum Rektor Indonesia, 2004.
- , *Lapoaran Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama dan Kedua*. Buku 5. Makassar: 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Ricard Rose dan Ian Mc. Alliser, *The Loyalties of Voters: Lifetime Learning Model*, London, Newburry Park, CA: Sage, 1990.
- Romli, Lili, "Memantapkan Sistem Pemerintahan", dalam Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Amandemen Konstitusi dan Strtegi Penyyelesaian Krisis Politik Indonesia*, Jakarta: AIPI dan Partnership, 2002.
- , "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia" *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 1 No. 1, 2004. Jakarta: LIPI Press, 2004.

Romli, Lili, ed., *Dinamika Lembaga Perwakilan Lokal: Studi tentang Peranan DPRD dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik*, Jakarta: P2P LIPI, 2002.

-----, *Potret Partai Politik Pasca-Orde Baru*, Jakarta: P2P LIPI, 2003.

Rose, Richard dan Ian Mc. Alliser. *The loyalties of Voters: Lifetime Learning Model*. London, Newbury Park, CA: Sage, 1990.

S.P. Varma. 1987. *Teori Politik Modern*. Terj. Tohir Effendi. Jakarta: Rajawali.

Schumpeter. J, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London: Allen and Unwin,

Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Jakarta: Sekneg, 1995

Sundberg, Jan. "Finland: Presidential Elections" dalam *European Journal of Political Research*, vol 28, nos. 3/4 December 1995.

Tan. T.K (ed.). *Sukarno's Guided Indonesia*. cet. 1. Brisbane, NSW, Melbourne: Jacaranda. PTY. LTD., 1967.

Tataq Chidmad, SH, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta, Penerbit PustakaWidyatama.

Winarta, Frans H, "Pemberantasan Korupsi Setengah Hati", *Kompas* 3 Oktober 2005

### **Lain-lain**

*Antara*. 22 September 2004 .

*Bali Pos*. 11 Oktober 2004.

*Banjarmasin Post*. 16 Januari 2005.

*Effendi Gazali: Komunikasi Politik Bagian dari Rekonstruksi Budaya.* HU. Kompas, 20 September 2004.

*Gatra.* 23 April 2004.

*Gatra.* 29 September 2004.

*Gugurnya Teori Perilaku Pemilih dan Peran Kaum Migran.* HU. Republika, 7 Juli 2004.

Harian Fajar, 9 September 2004

Harian Fajar, 20 September 2004

<http://www.kpu.go.id/>

<http://www.policyreview.org>

<http://www.policyreview.org>

<http://www.tokohindonesia.com/majalah/15/berita.shtml>

<http://www.tokohindonesia.com/majalah/15/berita.shtml>

<http://www.sumpahpalapa.com>,

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/26/pemilu/875065.htm>

Indonesia Media Online, Mid September 2004

Indonesia Media Online, Mid September 2004

*JIL Newsletter.* 12 September 2005.

“Ketentuan Peralihan”, Pasal 101, UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres. *Komentar Manado.* 31 August 2005.

*Kompas.* 17 Agustus 2005.

*Kompas.* 23 September 2004.

*Kompas.* Selasa, 20 April 2004.

*.Pemilu Presiden 2004*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

*Pikiran Rakyat.* 12 Juli 2004.

*Pikiran Rakyat*, 27 September 2004.

Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Republik Indonesia, UUD 1945 [hasil amandemen].

Suara Merdeka, 19 Juli 2004

Suara Merdeka, 19 Juli 2004

Tap MPRS No. XXXIII/1967 tertanggal 22 Februari 1967.

Tap. MPR No. IX Th 1968.

Tempo Interaktif, 20 April 2004

*Tempo Interaktif*, 23 Januari 2005.

Tempo Interaktif, 28 Oktober 2004

Tempo Interaktif, 28 Oktober 2004

Tempo, 11 Agustus 2004

Tempo, 11 Agustus 2004

